JIRA VOLUME 10 NOMOR 1

P-ISSN 2089-0818

E-ISSN 2776-4338



JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI

POLITEKNIK RAFLESIA

Tim Editorial

Pimpinan Redaksi:
Tuti Hermelinda, M.Ak (Politeknik Raflesia)
Google Scholar - SINTA

Editor :

1. **Paddery, S.E., M.Ak** (Politeknik Raflesia)
   Google Scholar - SINTA
2. **Mis Fertyno Situmeang., SE., MSi., Akt** (Politeknik Negeri Ambon)
   Google Scholar - SINTA
3. **Revi Candra, M.Ak.** (IAIN Batusangkar)
   Google Scholar - SINTA
4. **Dr. Dwi Asih Haryanti, S.E., M.M., M.Ikom.** (Universitas Gunadarma)
   Google Scholar - SINTA
5. **Nurhasanah, S.E., M.Ak. (Politeknik Raflesia)**
   Google Scholar - SINTA

Managing Editor :

Parwito (Universitas Ratu Samban)
Google Scholar SINTA

Alamat Redaksi:
Program Studi Akuntansi Politeknik Raflesia Jl. S. Sukowarti No. 28 Curup (39114)

Email:
jirapolraf@gmail.com

Reviewer

1. **Dirvi Surya Abbas, S.E., M.Ak.** (Universitas Muhammadiyah Tanggerang)
   Google Scholar - SINTA
2. **Erly Mulyani, M.Si** (Universitas Negeri Padang)
   Google Scholar - SINTA
3. **Dr. Fachruzzaman, S.E., M.D.,M.Ak., CA.** (Universitas Bengkulu)
   Google Scholar - SINTA
4. **Yeni Melia, SE, MM** (IAIN Batu Sangkar)
   Google Scholar - SINTA
5. **Dr. Siska Yulia Defitri, S.E., M.Si.** (Universitas Mahaputra Muhammad Yamin)
   Google Scholar - SINTA
6. **Elfina Yenti, S.E., AK., M.Si, CA.** (IAIN Batu Sangkar)
   Google Scholar - SINTA
7. **Estu Niasna Syamiya, S.E., M.Pd.** (Universitas Islam Syekh Yusuf)
   Google Scholar - SINTA

Corporate Social Responsibility Dan Dampaknya Terhadap Manajemen Laba

Nur Fitriana
Universitas Muhammadiyah Riau-nurfitri@umri.ac.id

Abstract*-This study aims to examine the effect of social responsibility and CSR disclosure on earnings management. The sample in this study is a manufacturing company listed on the IDX. The results of the study indicate that CSR has an effect on earnings management, while the disclosure of CSR has an impact on the economy and the environment on earnings management. The results of this study indicate that CSR activities carried out by the company will affect the level of earnings management carried out by the company*

Keywords : CSR, Earnings Management, GRI4, Environmental, Social, Economic

1. PENDAHULUAN

Pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang berkelanjutan dan transparan merupakan landasan dasar bagi bisnis dalam meraih keunggulan operasional jangka panjangnya. Pertanggung jawaban sosial atau CSR dalam pelaporannnya tidak hanya berfokus pada masyarakat bahkan pada perusahaan itu sendiri dan lingkungan sekitar. Sehingga dengan waktu yang bersamaan perusahaan akan menciptakan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan yang akan menghubungkan antara konsumen, pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat (Santoso, 2021). Kegiatan CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan sosial dan ekonomi sebagai kebutuhan perusahaan untuk diakui akan lingkungan sosialnya memberikan dampak CSR yang dilakukan pada masa sekarang tidak hanya menjadi kewajiban melainkan juga menjadi kebutuhan perusahaan. Pertanggung jawaban sosial yang dilakukan masyarakat dapat mengurangi manajemen laba, perusahaan yang melaksanakan dan melaporkan pertanggung jawaban sosialnya, dipandang lebih bersih dalam menjalankan usahanya dibanding perusahaan yang tidak melaporkannya (Alexander & Palupi, 2020).

Masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi di Indonesia terlebih yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan dan manufaktur diakibatkan karena masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan perusahaan akan pentingnya CSR. Seperti kasus yang terjadi dalam beberapa waktu akhir ini PT Nirmala Tipar Sesama (TPS) melakukan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah industri ke lingkungan sekitar sehingga mengakibatkan kerusakan tanah (Times, 2020). Selain kasus-kasus yang pernah terjadi seperti kasus PT.Aneka Tambang tahun 2016 dan pada tahun 2017 kasus PT.Energi Mega Persada kebocoran pipa minyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kejadian ini tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat akan kewenangan yang diberikan untuk memberikan keseimbangan lingkungan sebelum dan sesudah perusahaan didirikan. Untuk memberikan keseimbangan tersebut maka perusahaan melaksanakan program CSR yang diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat akan nilai perusahaan (Almunawwaroh & Dkk, 2022)

Namun pada kenyataannya perusahaan yang telah menjalankan CSR pada kegiatan usahanya bukan menjadi jaminan bahwa perusahaan tersebut telah berkinerja dengan baik dan telah menjalankan pelaporan keuangan dengan transparasi yang baik. Seperti kasus-

kasus yang telah terjadi sebelumnya (CNBC,2021) PT.Kimia Farma yang menggelembungkan persediaan, tahun 2012 PT.Bumi Resources yang melakukan manipulasi laba dan PT.Garuda Indonesia Airways pada tahun 2018 mencatat pendapatan fiktif dalam laporan keuangannya, padahal untuk kegiatan CSR nya PT. Garuda selalu melakukan dan menerapkannya setiap tahun. Masih adanya skandal laporan keuangan yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam pelaporan keuangannya. Sehingga menimbulkan pendapat adanya perubahan maksud pelaporan CSR, yang tidak hanya digunakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan tetapi sebagai alat yang digunakan perusahaan untuk menarik investor (Kinasih et al., 2018).

Skandal pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan merupakan suatu bentuk manajemen laba yang mengakibatkan kurangnya kualitas dan keakuratan isi laporan keuangan (Toni, 2021). Lebih lanjut manajemen laba terdiri dari 2 tindakan yaitu perbuatan yang memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan pribadi dan perbuatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tak terduga untuk melindungi pihak terkait (Scott, 2009). Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh (Anugra & Siregar, 2019) dengan hasil, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap manajemen laba, (Rahmawardani & Muslichah, 2020) dengan hasil CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba,. Hasil penelitian (Kinasih, 2018) menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aset yang tinggi dari kegiatan CSR berdampak semakin tingginya perusahaan melakukan manajemen laba. Masih adanya perbedaan hasil penelitian membuat peneliti kembali ingin menggali lagi isu tentang CSR ini terlebih perusahaan manufaktur yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai bahan baku utamanya juga memberikan dampak buruk bagi alam berupa limbah, polusi dan kerusakan sumber daya.

Dowling dan Prefer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi merupakan suatu bentuk keseimbangan antara lingkungan tempat perusahaan beroperasi dengan norma-norma aturan yang berlaku pada masyarakat. Sehingga perlu dijaga agar perusahaan tetap mempunyai legitimasi agar perusahaan tidak terancam keberadaannnya dikarenakan aktifitas operasional yang dilakukan perusahaan. Kegiatan CSR inilah yang akan menjadi alternatif untuk mempertahankan legitimasi perusahaan. Lebih lanjut, Legitimasi teori menjelaskan bahwa perusahaan akan memberikan dampak yang kuat apabila ada tanggung jawal sosial yang diberikannya, sehingga memberikan pengaruh tidak langsung bagi perusahaan untuk dapat menguasai masyarakat. CSR yang diberikan oleh perusahaan akan memberikan kepercayaan diri yang tinggi bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba.

Indikator *Global Reporting Initiative* GRI-G4 pada CSR memberikan pembagian pengukuran CSR menjadi tiga indikator, indikator lingkungan berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari proses produksi seperti air, udara, dan unsur-unsur lingkungan yang lainnya. Indikator ekonomai i berdasarkan informasi yang jelas dan tidak dirahasiakan kepada para pemangku kepentingan untuk menciptakan kesejahteraan pemangku kepentingan, dan indikator sosial yaitu dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya aktifitas produksi yang dilakukan perusahaan (Labetubun, 2022).

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H1 : CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba

H2 : CSR bagian lingkungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba

H3 : CSR bagian ekonomi berpengaruh positif terhadap manajemen laba

H4 : CSR bagian sosial berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif data diambil dari *website* BEI tahun pengamatan 2018 sampai dengan 2020. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2018-2020. Sedangkan untuk sampel diambil dengan cara *purposive sampling* dan diperoleh data sebanyak 117 perusahaan. Berikut prosedur pemilihan sampel 1) Dalam jangka waktu 2018-2020 perusahaan telah *listing* di BEI; 2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap sesuai kebutuhan penelitian, 3) Laporan keuangan perusahaan menggunakan satuan rupiah; 4)Ada laporan pertanggung jawaban sosial yang dibuat perusahaan dalam jangka waktu 2018-2020 berturut-turut.

Manajemen laba dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Jones (1995) yang dimodifikasi, dengan cara menghitung nilai *discretionary accruals*. Sedangkan untuk CSR dan pengungkapannya diukur menggunakan Indeks GRI 4 yang terdiri dari 3 bagian yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu *leverage, size* dan ROA.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini, tabel 1 menunjukkan sampel dalam penelitian ini bejumlah 117 perusahaan. Nilai manajemen laba terendah pada 0,0673 dan nilai maksimal 2,1941 sedangkan nilai rata-rata 0,6638 dengan standar deviasi 0,5118. CSR dengan nilai terendah 0,2293 dan nilai tertinggi 4,2262 dengan nilai rata-rata 1,4024 dan standar deviasi 0,1733. Pengungkapan CSR pengungkapan ekonomi dengan nilai terendah 0,0412 dan nilai tertinggi 6,0416 dengan nilai rata-rata 3,0004 dan standar deviasi 1,6036. Pengungkapan CSR lingkungan dengan nilai terendah 0,2006 dan nilai tertinggi 0,4582 dengan nilai rata-rata 0,1567 dan standar deviasi 0,1394. Pengungkapan CSR sosial dengan nilai terendah 0,2547 dan nilai tertinggi 0,6201 dengan nilai rata-rata 0,4257 dan standar deviasi 0,3401.

Tabel 1 Hasil Statistik deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
EM	117	0,0673	2,1941	0,6638	0,5118
CSR	117	0,2293	4,2262	1,4024	0,1733
CSR_Eko	117	0,0412	6,0416	3,0004	1,6036
CSR_Env	117	0,2006	0,4582	0,1567	0,1394
CSR_Sos	117	0,2547	0,6201	0,4257	0,3401
SIZE	117	23,6473	32,3307	26,6657	1,6541
LEV	117	0,1216	2,3343	0,7685	0,5455
ROA	117	0,0076	0,7813	0,2765	0,1345

Tabel 2 Hasil uji t

	Coefficient	T Statistics	Probability
C	0,7442	-0,3291	1,5822
CSR	0,0000	-5,0822	0,0213*
Size	0,0035	1,5789	0,0078
Leverage	0,0067	1,9853	0,0464
ROA	0,6573	13,4574	0,6715
Adjusted R Square	0,6587		
F Statistics	40,5248		
Prob F-Statistics	0,0000		

*Signifikan 0,05

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba dengan nilai *probability* 0,02 lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dapat meningkatkan manajemen laba yang akan dilakukan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan merupakan suatu bentuk kewajiban yang secara tidak langsung memberikan dampak perusahaan untuk melakukan manajemen laba. CSR yang dilakukan memberikan anggapan bahwa perusahaan memberikan kebaikan moral sehingga memberikan anggapan bahwa perusahaan bersih dari tindakan yang tidak etis. Sedangkan bagi pemangku kepentingan perusahaan, kegiatan CSR merupakan simbol bahwa perusahaan telah berkembang dan menghasilkan dengan baik, maka perusahaan perlu memberikan bentuk pertanggung jawaban atas imbal jasa penggunaan lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi.

Bagi manajer, CSR merupakan alat untuk mendapatkan apresiasi masyarakat agar perusahaaan dapat beroperasional dalam jangka waktu yang lama dan manajemen laba yang dilakukan dapat tertutupi. Hal ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wardani & Santi, 2018) dalam hasil penelitiannya yang menyimpulkan kegiatan CSR memiliki kekuatan yang tinggi dalam melakukan manajemen laba, karena CSR memberikan citra nilai positif bagi perusahaan sehingga akan menutupi kegiatan manajemen laba tersebut.

Tabel 3 Hasil Uji Pengungkapan

	Coefficient	T Statistics	Probability
C	0,7452	-0,349	1,597
CSR_Eko	-0,0411	-0,941	0,048
CSR_Env	-0,0105	-1,624	0,035
CSR_Sos	0,0631	-0,438	1,280
SIZE	0,0043	1,6261	0,0127
LEV	0,0104	1,8953	0,0497
ROA	0,5925	13,6538	0,7760
Adjusted R square	0,6587		
F Statistics	40,5248		
Prob F-Statistics	0,0000		

*Signifikan 0,05

Hasil uji t untuk bagian pengungkapan CSR menunjukkan pengungkapan CSR bagian ekonomi dan lingkungan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan pengungkapan CSR bagian sosial tidak berpengaruh. Hal ini dikarenakan pengungkapan CSR bagian ekonomi berhubungan dengan kesejahteraan para pemangku

kepentingan perusahaan, adanya pengungkapan kesejahteraan setiap anggota eksekutif akan memberikan dampak untuk melakukan manajemen laba. Kesejahteraan anggota eksekutif berhubungan langsung dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Manajer bertanggung jawab dengan pengungkapan kesejahteraan anggota eksekutif, sehingga manajer dapat mengungkapakannya, mengurangi dan menambahkan pengungkapannya tergantung kebutuhan. Jika kesejahteraan anggota eksekutif terus meningkat, mengharuskan perusahaan melaporkan CSRnya. Pengungkapan bagian lingkungan berpengaruh dikarenakan dengan adanya ganti rugi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan perusahaan dapat merusak citra perusahaan dan juga mengancam keberlangsungan usaha. Untuk variabel kontrol yang berpengaruh terhadap manajemen laba dalam penelitian adalah size dan leverage sedangkan ROA tidak berpengaruh.

4.KESIMPULAN

CSR berpengaruh terhadap manajemen laba. Kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba, hal ini dikarenakan CSR memberikan gambaran positif bagi masyarakat akan keberadaan perusahaan. Terlebih kegiatan CSR yang dilakukan sebagai alat untuk menyeimbangkan manfaat yang didapatkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Pengungkapan CSR yang berpengaruh terhadap manajemen laba adalah pengungkapan ekonomi dan lingkungan. Pengungkapan ekonomi terlihat dari kesejahteraan pemangku kepentingan sedangkan pengungkapan lingkungan merupakan dampak langsung yang dirasakan akibat kegiatan operasional perusahaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha.

Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan sampel perusahaan seperti keuangan, jasa, dagang dll. Hal ini dikarenakan untuk melihat konsistensi hasil pengungkapan CSR dan memberikan perbandingan kegiatan CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Manajemen laba dalam penelitian ini hanya diungkapkan secara umum, untuk penelitian selanjutnya dapat mendeskripsikan jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan sesuai dampak positif atau negatif yang ditimbulkannya bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, N., & Palupi, A. (2020). Pengaruh corporate social responsibility reporting terhadap manajemen laba. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *22*(1), 105–112. https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.628

Almunawwaroh, M., & Dkk. (2022). *Green Accounting : Akuntansi dan Lingkungan*. https://books.google.co.id/books?id=-EN9EAAAQBAJ&pg=PA55&dq=kesimbangan+lingkungan+pada+CSR+dapat+meningkatkan+nilai+perusahaan&hl=en&newbks=1&newbks_redir=1&sa=X&ved=2ahUKEwidhebdw-_5AhW3DLcAHa8ZB4gQ6AF6BAgLEAI

Anugra, S. R., & Siregar, S. V. (2019). Pengaruh tanggung jawab sosial strategis dan non strategis terhadap manajemen laba: peran perlindungan investor pada industri perbankan di ASEAN. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(3), 567–582. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i3.18774

Kinasih, H. W. D. (2018). Keterkaitan antara corporate social responsibility terhadap manajemen laba : sebuah perspektif teori agency. *Jurnal Penelitan Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2), 101–109. https://doi.org/10.33633/jpeb.v3i2.2303

Labetubun, M. D. (2022). *CSR PERUSAHAAN "Teori Dan Praktis Untuk Manajemen Yang Bertanggung Jawab"* (Februari 2). Penerbit Widina.

Rahmawardani, D. D., & Muslichah. (2020). Corporate social responsibility terhadap manajemen laba dan kinerja perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, *12*(2), 52–59. https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.2251

Santoso, E. B. D. (2021). *Tinjauan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanNo Title* (A. Khanafi (ed.)).

Scott, W. R. (2009). *Financial Accounting Theory (Fifth Edition)* (5th Ed). Pearson Prentice Hall.

Times, S. (2020). Dirut PT. Nirmala Tipar Sesama Tersangka Pencemaran Lingkungan. *Seistimes.Com*. https://seitimes.com/dirut-pt-nirmala-tipar-sesama-tersangka-pencemaran-lingkungan/

Toni, N. D. (2021). *Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Perusahaan : Strategi Peningkatan Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Kebijakan Dividen Bagi Perusahaan* (1st ed.). CV.Adanu Abitama.

Wardani, D. K., & Santi, D. K. (2018). Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi*, *6*(1), 11–24. https://doi.org/10.24964/ja.v6i1.536

Analisis Konsistensi Penerapan Konsep *Sustainable Tourism* Berdasarkan Pendekatan *Blue Accounting* dan Kebijakan *Sustainable Development Goal* No. 14 Pada Wisata Nikoi Island dan Cempedak Private Island

Putri Dwi Novrina[1], Rezario Febrianta Chandra[2], Finalesvita Br. Nasution[3]
[1]**STIEPembangunan Tanjungpinang** – *pdnovrina13@gmail.com*
[2] **STIEPembangunan Tanjungpinang** – *rezario.azra1@gmail.com*
[3] **STIEPembangunan Tanjungpinang** – *finalesvitanaasution@gmail.com*

Abstrak— *The purpose of this study is to determine the consistency of the application of sustainable tourism based on the blue accounting approach and the sustainable development goals No. 14 policy on Nikoi Island Tourism and Cempedak Private Island. Constancy is assessed from the joining of Nikoi Island Tourism and Cempedak Private Island as a Long Rung Alliance Member, which requires each member to achieve 4C sustainable goals, namely conservation, community, culture, and commerce. Bleu accounting is assessed on activities related to five (five) pilot project focuses that represent various interests and stakeholders, namely: (1) fish species in waters; (2) coastal wetlands; (3) marine transportation; (4) phosphorus control; and (5) water sources. The method used in this research is the qualitative method. Data collection was carried out in two ways, namely through interviews and literature studies. Data processing techniques include checking, correcting, reviewing, and providing explanations for the results of interviews. Data analysis techniques include collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The result of this research is that Wisata Nikoi and Cempedak Private Island have consistently implemented the concept of sustainable tourism based on 4C activities that reflect five blue accounting projects and support the achievement of Sustainable Development Goal No. 14 policy.*

Keywords — *Sustainable Tourism, Blue Accounting, Sustainable Development Goals No.4*

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi bidang pariwsata yang menjanjikan untuk kemajuan dan pertumbuhan Indonesia. Kemajuan dan pertumbuhan harus dikendalikan dengan menjaga kelestarian dengan mewajibkan para wisatawan untuk memerhatiakan peraturan berwisata diantaranya kesehatan, keamanan, kenyamanan dan kelestarian alam. Tahun 2021, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkonsentrasi pada peningkatan pariwisata berkelanjutan dan berkelanjutan daripada mengejar jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Terdapat 4 (empat) pilar fokus yang dikembangkan diantaranya pengelolaan berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi berkelanjutan (sosis ekonomi) jangka panjang, keberlajutan budaya (*sustainable culture*) yang harus selalu dikembangkan dan dijaga serta aspek lingkungan (*environment sustainability*).

Akuntansi, sebuah bidang keilmuan yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan, bukan hanya angka, adalah bidang yang mengalami peningkatan masalah keberlanjutan. (Sultan Syah, 2019). Konsep akuntansi biru hampir sama dengan konsep akuntansi hijau, tetapi akuntansi biru lebih berfokus pada kegiatan yang berdampak pada laut. Perusahaan yang operasi utamanya berada di perairan laut harus melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban lingkungan perairan. Blue accounting diperkuat dengan program dunia yang dinaturalisasi kedalam rencana kerja bappenas yakni Sustainable Development Goals No. 4 yang tujuan adalah untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global pda tahun 2030 salah satunya adalah Ekosistem Lautan.

Kabupaten Bintan merupakan penyumbang perkembangan Industri pariwisata maritim yang cukup signifikan setelah Bali, terbukti dari Wisatawan asing telah mengunjungi Bintan sebanyak 191.953 kali dari Januari hingga Oktober 2023. Kadisbudpar Bintan Arif Sumarsono mengatakan bahwa dari Oktober hingga 2023, jumlah kunjungan wisman ke Bintan telah meningkat. meningkat dibandingkan sepanjang tahun 2022 tercatat 283.000 kunjungan dan sepanjang tahun 2021 tercatat 88.248 kunjungan. Peningkatan kunjungan dipengaruhi dengan adanya kebijakan tarif Visa on arrival (VoA) sebesar Rp. 500.000,- per orang untuk masa kunjungan satu bulan yang biasanya

digunakan wisatawan untuk day trip menikmati keindahan alam Lagoi, main golf dan sepeda. Berkembangnya industri pariwisata khususnya di Bintan memang berdampak pada penyediaan fasilitas penunjang pariwisata yang berlandakan prinsip pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan dsesuai arahan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tetang kepariwisataan. Industri pariwisata harus tumbuh secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. (Ida Ayu, 2022).

Dalam pertemuan koordinasi dengan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, membicarakan hasil dari kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas ke Kepulauan Riau (Kepri) yang berlangsung dari tanggal 4 hingga 6 Oktober 2022. Berdasarkan tujuan dari kunjungan tersebut, Enam strategi untuk transformasi ekonomi Kepri telah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Strategi-strategi tersebut adalah (1) Kepri Talenta, yang berfokus pada talenta dari sektor wisata hingga industri kreatif dan ekonomi kreatif; (2) Kepri Biru, yang mengoptimalkan laut sebagai sumber ekonomi baru untuk masa depan; (3) Kepri Kreatif dan Produktif, yang mengembangkan industri kreatif berskala internasional bersama dengan industri manufaktur berteknologi tinggi; dan (4) Kepri Digital, yang membangun pusat digital dan informasi di seluruh provinsi. Dengan enam strategi ini, pertumbuhan ekonomi Kepri diproyeksikan lebih cepat. Dengan skenario transformasi ekonomi ini, di 2045, provinsi tersebut dapat mencapai pendapatan per kapita USD 41.946 per orang.

Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor kelautan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyusun indeks ekonomi biru, dan Kepulauan Riau menempati peringkat tertinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Kepri memiliki banyak potensi laut yang harus dimanfaatkan, tidak hanya untuk perikanan dan hasil laut, tetapi juga harus diciptakan nilai tambah inklusif dan berkelanjutan karena potensi laut bisa mencakup pengolahan ikan, industri galangan kapal, konektivitas logistik laut, serta aktivitas ekonomi lain yang dapat diciptakan dengan kekuatan laut Kepri", kata Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas.” (2023, dikutip dari lama web: https://bapenas.go.id/)

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terlebih dahulu penulis memilih topik riset ini dikarenakan adanya hubungan yang signifikan antara Blue Accounting (akuntansi berkelanjutan yang berfokus pada ekonomi laut dan pesisir) dengan Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) nomor 14 yang dikenal sebagai "Life Below Water," berfokus pada perlindungan dan pelestarian kehidupan di bawah air, termasuk ekosistem laut, perikanan berkelanjutan, dan konservasi laut.

Pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, social budaya dan lingkungan saat ini hingga masa depan (Muchammad dan Lutfi, 2023). Menurut Peraturan Menteri Periwisata Nomor 14 Tahun 2016, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, bisnis, lingkungan, dan masyarakat setempat. Ini juga dapat diterapkan pada semua jenis destinasi wisata, termasuk perjalanan masal dan berbagai aktivitas lainnya. Pariwisata berkelanjutan harus memperhatikan lingkungan saat membangun, mendorong masyarakat lokal, meningkatkan budaya dan ekonomi sekitar. (Fandeli dan Muhammad, 2019). Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup adalah pariwisata berkelanjutan, yang menyeimbangkan penyediaan dan pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam dan budaya secara berkelanjutan hingga masa mendatang. Pariwisata berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan dengan tetap mengedepankan lingkungan tetap lestari dan memberi manfaat baik di masa mendatang

Berdasarkan blue accounting organization, Akuntansi Biru (Blue Accounting) adalah sebuah metode akuntansi yang berfokus pada kehidupan ekosistem laut. Laut merupakan bagian penting dari planet bumi, mencakup sekitar 72% dari total permukaan bumi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kelestarian laut agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Istilah *Blue Accounting* pertama kali digunakan di Great Lakes dan St. Lawrence River, dua wilayah perairan yang terletak di Amerika Utara. Pada awalnya, Blue Accounting fokus pada kualitas air di wilayah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, Blue Accounting berkembang menjadi sebuah metode akuntansi yang lebih luas, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terdapat 5 (lima) fokus pilot project yang mewakili berbagai kepentingan dan pemangku kepentingan yakni (1) Jenis ikan di perairan; (2) Lahan basah pesisir; (3) Transportasi laut; (4) Pengendalian fosfor; (5) Sumber air (T. Mata dkk, 2017). Kelima fokus tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat masyarakat dan

organisasi terhadap penataan ekosistem laut yang dapat diwujudkan melalui beberapa aspek tersebut. Selain itu, untuk pemerintah Indonesia Blue Accounting juga dapat membantu dalam upaya pemantauan polusi, perubahan suhu laut dan upaya meminimalkan dampak negatif ekosistem laut.

Pada awal tahun 1990-an, para akademisi dan profesional mulai menyadari bahwa akuntansi tradisional tidak cukup untuk mengukur kinerja perusahaan secara menyeluruh. Akuntansi tradisional hanya berfokus pada aspek keuangan, sedangkan aspek sosial dan lingkungan juga penting untuk dipertimbangkan. Para akademisi dan profesional ini kemudian melakukan pengalihan paradigma (divert of paradigm) dari akuntansi tradisional ke akuntansi keberlanjutan. Akuntansi keberlanjutan tidak hanya mengukur aspek keuangan, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Sustainability Accounting (Mchugh, 2008; Subroto & Endaryati, 2022), Environmental Accounting (Capusneanu, 2008); Social and Environmental Reporting (Susilo, 2008); Social Responsibility Accounting (Harahap, 2002). Green accounting, juga dikenal sebagai Triple Bottom Line Reporting, menekankan pentingnya tiga elemen utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Harahap, 2002; Helming et al., 2008; Kuhlman & Farrington, 2010; Tracey & Anne, 2008). Ini adalah pendekatan yang mencakup lebih dari sekadar faktor ekonomi dalam pelaporan dan analisis. Akuntansi tidak hanya berfungsi untuk menangani isu-isu global, tetapi juga untuk menyelesaikan masalah keuangan, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks penelitian lingkungan, istilah “akuntansi hijau” atau green accounting sering digunakan. Ini bukanlah hal yang aneh, mengingat akuntansi biasanya diasosiasikan dengan angka-angka yang mewakili aktivitas ekonomi (dari entitas bisnis) yang diukur dalam satuan moneter (Sukoharsono, 2017).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tujuan pembangunan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang dapat menikmati kedamaian dan kemakmuran pada tahun 2030. SDGs adalah kelanjutan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. MDGs telah berhasil mengurangi jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan mengurangi kematian ibu dan anak. SDGs bertujuan untuk melanjutkan upaya dan pencapaian MDGs, serta mengatasi tantangan baru yang muncul, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

Sustainable Development Goals dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada menganalisa aktivitas yang berkaitan dengan konsep Pariwisata Berkelanjutan melalui Pendekatan *Blue Accounting* Dan Kebijakan Sustainable Development Goals No. 14 Pada Wisata Nikoi Island dan Cempedak Private Island.

Penelitian dilakukan pada Kantor Nikoi Island dan Cempedak Private Island yang beralamat di Teluk Bakau Kawal, Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Nikoi Island merupakan Nikoi Island Resort dengan luas 15 hektare lepas pantai timur Bintan dan Cempedak Private Island merupakan pulau pribadi seluar 17 hektar yang terletak 9 km di lepas pantai timur Bintan. Penelitian dilakukan pada tanggal 25 November 2023.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan memperjelas segala aktivitas pada Nikoi Island dan Cempedak Private Island yang dikaitkan dengan konsep pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan *blue accounting* dan kebijakan Sustainable Development Goals No. 14.

Pada penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan untuk mendukung proses penelitian adalah:

a. Data Primer, yaitu data yang diambil pada lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan HRD dan karyawan yang bertanggungjawab atas kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pariwisata berkelanjutan. Wawancara ini mencakup beberapa pertanyaan terkait dengan *blue accounting* dan Sustainable Development Goals No.14.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki relevansi dengan

penelitian ini. Data sekunder ini mencakup hasil penelitian sebelumnya, literatur, dan data dari objek penelitian yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, di mana peneliti melakukan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Analisis data kualitatif merupakan suatu proses evaluasi yang berkaitan dengan hubungan antar variabel yang tengah diinvestigasi. Tujuan utama dari analisis data kualitatif adalah agar peneliti memperoleh pemahaman yang dalam terkait dengan hubungan variabel-variabel tersebut, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Analisis ini tidak melibatkan penggunaan angka, sebagaimana yang umumnya terjadi pada analisis kuantitatif. Prinsip utama dari teknik analisis data kualitatif adalah mentransformasi dan menganalisis data yang terhimpun menjadi informasi yang terstruktur, sistematis, dan bermakna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengumpulan Data
   Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang dilakukan, struktur oraganisasi.
b. Reduksi Data
   Melakukan reduksi daya dengan cara merangkum dan mengidentifikasi hasil wawancara sesuai dengan konsep pariwisata berkelanjutan, *blue accounting* dan SDGs No 14 pada Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island.
c. Peyajian Data
   Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat terkait pariwisata berkelanjutan, *blue accounting* dan SDGs No 14 pada Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island.
d. Penarikan Kesimpulan
   Berdasarkan penyajian data dan studi pusatka akan ditarik sebuah kesimpulan akhir atas konsep pariwisata berkelanjutan, *blue accounting* dan SDGs No 14 pada Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan pariwisata berkelanjutan yang diterapkan pada Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island diantaranya adalah bergabung menjadi anggota The Long Run sejak 2013 hingga saat ini tahun 2024 dan harus memenuhi kewajiban untuk beraktivitas dengan mempertimbangkan keseimbangan 4C secara holistik diantaranya Konservasi, Komunitas, Budaya dan Perdagangan dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Konservasi
   Tahap ini dilakukan untuk melindungi lingkungan, selama bergabung menjadi anggota The Long Run Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island telah bekerjasma dengan salah satu Naturalis terkemuka asal Singapura untuk melindungan satwa liar dan keanekaragaman hayati di pulau ini serta melakukan pemulihan polulasi penyu yang terancam punah. Telah berhasil menciptakan Kawasan Perlindungan Laut dan memiliki Petugas Konservasi Laut. Selain itu, pemanfaatan kayu apung yang hanyut dari pulau-pulau sekitar dan atap rumput alang-alang digunakan sebagai bahan bangunan utama, vila-vila yang tidak menggunakan AC, lampu LED atau CFL yang bertenaga rendah serta memanfaatkan panel surya untuk penyediaan air panas dan menyalakan generator. Melakukan proses pendaurulangan ban mobil menjadi sandal jepit dan souvenir dari kantong plastik.
b. Komunitas
   Masyarakat Kabupaten Bintan merupakan hal yang penting bagi Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island. Hal tersebut diwujudkan dengan pendirian The Island Foundation Tahun 2009 untuk mendukung aktivitas masyarakat diantaranya dalam bidang pendidikan melakukan identifikasi kebutuhan utama dan pusat-pusat pembelajaran di lima desa nelayan di sepanjang pantai timur Bintan didirikan dan melakukan diskusi dengan para pemimpin masyarakat setempat. The Island Foundation telah menciptakan sumber pendapatan alternative bagi masyarakat sekitar diantaranya menganyam keranjang dan tas dari Koran bekas hingga mengembangkan alat pemintal kayu. Sehingga, Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island berdedikasi untuk mempekerjakan penduduk setempat baik dalam posisi tidak terampil maupun manajerial yang nantinya akan diikutsertakan dalam pelatihan untuk menunjang karir.

c. Budaya
Bintan dan pulau-pulau di sekitarnya tidak memiliki budaya yang kuat. Terlepas dari itu, Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island bekerja sama dengan komunitas lokal dan penduduk desa untuk menyelamatkan yang tersisa yakni Orang Suku Laut. Orang Suku Laut merupakan pengembara asli yang memainkan peran sentral dalam sejarah politik Melayu. Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island bekerjasama dengan The Island Foundation merangkul Orang Suku Laut untuk melindungi budaya dan warisan mereka dengan mengabadikan tiga tungku bersejarah yang mereka gunakan untuk membuat arang dan dijadikan museum untuk mendokumentasikan budaya Orang Suku Laut.

d. Perdagangan
Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island meyakini dengan komitmen yang kuat terhadap standar tertinggi dalam manajemen yang berkelanjutan melalui investasi yang dilakukan kepada The Island Foundation tidak hanya dapat memastikan keberlanjutan jangka panjang dari operasi Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island sendiri tetapi keberlanjutan lingkungan sekitar dan masyarakat. The Island Foundation telah mendirikan merek ritel (Kura-Kura) untuk membantu menjual seni dan kerajinan serta program olahrga terorganisir pertama di Bintan untuk anak-anak.

Penerapan Akuntansi Biru (Blue Accounting)

Penerapan blue accounting di Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island diwujudkan dengan adanya program-program yang melibatkan masyarakat sekitar dan pembatasan penggunaan plastik dilingkungan Nikoi Island. Berdasarkan 5 project pilot yang dikemukakan oleh (Sultan Syah, 2019) yakni fokus pada biaya lingkungan (terutama biaya lingkungan) yang terkait dengan ekosistem air atau laut dan dimana terdapat lima projek pilot yakni:

a. Jenis Ikan di Perairan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhendy bagian HRD, Bagaimana Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island menjalankan operasional dengan tidak mengganggu ekosistem termasuk mempertahankan spesies ikan yang ada di perairan Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island?
“Untuk menjaga lingkungan, kami menghindari penggunaan straw atau sedotan plastik, yang kita tau itu sangat mudah ditemukan dilaut sehingga kami mengganti dengan straw berbahan bambu”
Apakah terdapat pembatasan aktivitas pada perairan Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island untuk menjaga ekonsistem laut?
“Saat ini Nikoi dan Cempedak Island concern dengan yang namanya marine list, kita mengusulkan penambahan zona konservasi sekitar 3,8 hektar dimana tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas memancing dan untuk binatang asli pulau tidak boleh diusik. Kita merupakan inisiator dari Marine Protected Area di Bintan dan penghentian perburuan dugong dan penyu di pulau Bintan”

b. Lahan Basah Pesisir
Apakah Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island terdapat pemanfaatan lahan basah seperti bakau?
“tidak ada pemanfaatan hutan bakau, karena kami menggunakan kayu apung yang hanyut sebagai material dasar”

c. Transportasi Laut
Transportasi laut yang digunakan untuk mengakses Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island berupa kapal speed dengan perjalanan sekitar 45 menit-1 jam.

d. Pengendalian Fosfor
Bagaimana Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island melakukan pengelolaan limbah atas sampah yang dihasilkan dari dapur maupun dari tamu?
“Membuat siklus larva maggot dari lalat Black Soldier Fly yang kemudian dijadikan pakan ternak di Farm”

e. Sumber Air
Persediaan sumber air pada Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island berasal dari mana?
“Sumber air dari sumur yang digali secara manual”
Bagaimana Nikoi Island mengelola air limbah sabun dan Toilet?

"melakukan recycle air dari toilet dengan teknik aerobic septik, yang filternya menggunaan ijuk, arang, granit dan tanaman heliconia sebagai natural indicator, apabila tanaman heliconia kering itu tandanya da filter yang tidak berfungsi dengan baik".

Penerapan *Sustainable Development Goals No. 14*

Penerapan *Sustainable Development Goals* No. 14 di Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island diantaranya adanya kegiatan beach clean up dan hasil dari sampah yang terkumpul akan dilakukan recycle dan sisanya akan dikirim ke landfill (tempat pembuangan akhir). Pemilik dari Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island memprioritaskan aktivitas atau pengelolaan bisnis dengan memperhatikan lingkungan terbukti dengan adanya yayasan yang sengaja didirikan untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar dalam bidang pendidikan. Selain itu, dengan adanya aktivitas bisnisnya, Wisata tetap mempertahankan ragam hayati dan hewan asli pulau untuk menjadi daya Tarik wisatawan serta menggunakan bahan baku arsitektur menggunakan kayu apung yang hanyut dilaut. Sementara Cempedak Private Island menggunakan material bamboo yang apabila tidak beroperasi maka ekosistem akan mudah kembali seperti semula dikarenakan material yang digunakan dari alam.



Gambar 1.1
Nikoi Island



Gambar 1.2
Cempedak Private Island

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat konsistensi penerapan pariwisata berkelanjutan berdasarkan konsep blue accounting dan SDGs No 14, sebagai berikut:

1. Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island secara konsisten menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan melalui tindakan konkret di bidang konservasi, komunitas, budaya, dan perdagangan. Dengan menjadi anggota The Long Run dan melakukan langkah-langkah nyata, Nikoi Island memberikan contoh positif bagaimana pariwisata dapat berdampak positif pada lingkungan, masyarakat lokal, warisan budaya, dan ekonomi setempat;
2. Penerapan konsep Blue Accounting di Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island terlihat melalui serangkaian program dan proyek yang menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Dengan fokus pada lima proyek pilot, Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island berusaha menciptakan keseimbangan antara kegiatan operasional dan pelestarian lingkungan. Upaya seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, larangan aktivitas tertentu, dan pengelolaan limbah menjadi bagian dari strategi Blue Accounting untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam pengelolaan pulau dan ekosistemnya;
3. Penerapan SDG No. 14 di Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island dapat dianggap positif dengan adanya berbagai inisiatif berkelanjutan, seperti beach clean up, pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan, pemeliharaan ekosistem, dan penggunaan bahan baku arsitektur berkelanjutan. Meskipun demikian, perlu adanya upaya terus-menerus untuk meningkatkan dan memperkuat implementasi praktik-praktik berkelanjutan, serta melibatkan pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca, Wisata Nikoi dan Cempedak Private Island. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih mendalami penelitian yang berkaitan dengan intensif keterlibatan komunitas lokal dan inovasi berkelanjutan dalam semua aspek operasional, termasuk penggunaan energy terbarukan, pengolahan limbah yang lebih efisien dan penggunaan teknologi hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Bintan Tourism, (2023). *10 Bulan, 182.514 Kunjungan Wisman ke Bintan, AW Sebut Keringanan Tarif VoA Bisa Dongkrak Kunjungan.* [Online]
Available at: https://bintantourism.com/2023/12/11/10-bulan-182-514-kunjungan-wisman-ke-bintan-aw-sebut-keringanan-tarif-voa-bisa-dongkrak-kunjungan/
[Accessed 30 Desember 2023].

Blue Accounting, n.d. *About Blue Accounting.* [Online]
Available at: https://www.blueaccounting.org/about/
[Accessed 28 Desember 2023].

Cempedak Island, n.d. *The Cempedak Story.* [Online]
Available at: https://cempedak.com/about/the-cempedak-story/
[Accessed 30 Desember 2023].

Fandeli, C. d. M., (2019). Analisis Daya Dukung Lingkungan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem: Jakarta.*

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2022. *Bappenas Paparkan Rancangan 6 Strategi Transformasi Ekonomi Kepulauan Riau.* [Online]
Available at: https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-paparkan-rancangan-6-strategi-transformasi-ekonomi-kepulauan-riau-8fxSb
[Accessed 27 Desember 2023].

Muchammad Satrio Wibowo, L. A. B., (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata,* 6(1).

Nikoi Island, n.d. *The Nikoi Story.* [Online]
Available at: https://nikoi.com/about/the-nikoi-story/
[Accessed 30 Desember 2023].

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan,* Jakarta: BN. 2016 No. 1303, jdih.kemenparekraf.go.id.

Permatasari, I. A. P. W. d. I., (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism Development) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di kabupaten Badung. *ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana,* pp. 35-44.

Sultan Syah, E. S. E. G. S. R., (2019). Blue Accounting and Sustainability. *Advances in Economics, Business and Management Research,* Volume 144, p. 502.

T. Mata, D. P. S. S. C. W. I. D. A. D. S., (2017). Blue Accounting, Coast. Wetl. Inf. Deliv. Decis. Support.

The Island Foundation, 2020-2023. *Annual Report.* [Online]
Available at: https://www.theislandfoundation.com/annual-reports
[Accessed 30 Desember 2023].

Widhayati, D. A. &. S. E., (2017). The Compliance of GRI G4 Guidelines and the Relevance with Creating Shared Value (CVS) Concept: Sustainablity and Partnership and Community Development Report Analysis of PT Pupuk Kaltim. *Paper of International Conference in Socio Political Enterpreneurship,* pp. 116-125.

Pandemi Covid -19: Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Makanan dan Minuman

Fairas Panca Yudha[1], Septyana Mubarakah[2]
Universitas Mercu Buana- *[1]fairas.panca@gmail.com*
- [2]septy.yana@gmail.com

Abstract: *Financial performance in many literacies is affected by aspects such as Net Profit Margin, Current Ratio, and Debt To Equity Ratio. This research wants to further test the effect on company performance due to the COVID-19 pandemic with a sample of the food and beverage subsector which is included in the sample criteria. A purposive sampling technique was carried out to obtain 105 analysis samples with Eviews 12, using multiple linear regression analysis data analysis techniques in the processing. The results of this research reveal that Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), and Debt-to-Equity Ratio (DER) influence company performance. Simultaneously, the variables Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), and Debt To Equity Ratio (DER) influence company performance.*

Keywords*:* ***Company Performance, Net Profit Margin (NPM), Current Ratio (CR), Return On Equity (ROE), Debt To Equity Ratio (DER****)*

1. PENDAHULUAN

Adanya kebijakan pembatasan interaksi sosial akibat Pandemi Covid-19 lalu dianggap berdampak bagi sektor ekonomi, dan beberapa perusahaan mengalami penurunan . Pandemi Covid-19 membuat Indonesia kehilangan nilai ekonomi mencapai Rp 1.356 triliun atau setara 8,8% dari produk domestik bruto. Hal ini disebabkan karena penurunan daya beli dari masyarakat sehingga jumlah produksi berkurang dan membuat banyak karyawan yang terkena dampak dari hal tersebut. Meski demikian kebutuhan akan barang bahan makanan pokok seperti minuman dan makanan tetap diperlukan dan tidak mengalami penurunan yang signifikan (Kompas.com, 2020).

Berdasarkan data dari IDX yang diolah menggunakan rasio keuangan Net Profit Margin (NPM) menunjukan tentang kinerja perusahaan diukur dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan mengalami penurunan pada saat Pandemi Covid-19 tahun 2020. Penurunan tersebut dialami pada beberapa perusahaan seperti, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) sebesar 5,14%, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. (COCO) sebesar 2,2%, PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) sebesar 1,68%, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) sebesar 2,42%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja perusahaan.

Berdasarkan data dari IDX yang diolah menggunakan rasio keuangan Net Profit Margin (NPM) menunjukan tentang kinerja perusahaan diukur dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan mengalami penurunan pada saat Pandemi Covid-19 tahun 2020. Penurunan tersebut dialami pada beberapa perusahaan seperti, PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) mengalami penurunan sebesar 5,14%, PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (COCO) mengalami penurunan sebesar 2,2%, PT Diamond Food Indonesia Tbk (DMND) mengalami penurunan sebesar 1,68%, PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) mengalami penurunan sebesar 2,42%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja perusahaan.

Kinerja perusahaan merupakan salah satu faktor untuk melihat keberhasilan perusahaan, adanya kinerja perusahaan yang baik akan menambah nilai bagi perusahaan tersebut. Penilaian terhadap kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan rasio keuangan. Rasio keuangan dibuat untuk menunjukan hubungan antara rencana laporan keuangan. Ada beberapa rasio keuangan yang akan

digunakan dalam penelitian ini yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Current Ratio* (CR), dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

NPM adalah rasio yang mengukur besarnya laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya (Hery, 2018). Rasio ini, untuk mengukur besaran presentase sisa pendapatan. Pengukuran ini akan mengasilkan jumlah keuntungan bersih yang di peroleh dari total pendapatan dikurangi seluruh biaya yang terkait. *Current Ratio* (CR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur nilai kewajiban lancar dan aktiva lancar (Anwar, 2019). Rasio ini merupakan rasio yang membantu melihat bagaimana perusahaan dapat menjalankan kewajiban lacar sehingga dapat dikatakan perusahaan sehat jika perusahaan tersebut dapat membayarkan kewajiban lancarnya terpat waktu. Sehingga melakukan penelitian lebih lanjut akan faktor-faktor tersebut diatas terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan sektor makanan dan minuman saat ini, menjadi dianggap perlu dilakukan.

Teori Sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spense (1973) yang menyatakan bahwa pemilik informasi memberikan sinyal atau isyarat berupa informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan yang mempunyai manfaat bagi investor atau pihak penerima informasi. Informasi merupakan elemen penting bagi pelaku usaha dan investor. Sedangkan kajian teori sinyal berkaitan dengan rasio keuangan NPM yang merupakan pengukuran kinerja dari suatu perusahaan dengan cara membagi antara laba bersih dengan penjualan, sehingga menghasilan keuntungan bersih. Informasi yang diberikan perusahaan tersebut dapat memberikan sinyal bagi investor maupun kreditor atau pihak lain mengenai naik atau turunnya keuntungan bersih perusahaan, hal itu merupakan sinyal penting untuk investor maupun kreditor dalam menginvestasikan uangnya ataupun memberikan pinjaman pada perusahaan. Keuntungan dari suatu perusahaan investor dapat mendorong keputusan investasi dananya pada perusahaan, begitu pula bagi kreditor, cenderung akan lebih percaya untuk memberikan pinjaman.

Kaitan teori sinyal dengan rasio keuangan Current ratio (CR) yang merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja perusahaan dengan cara membagi antara aktiva lancar dengan utang lancar, sehingga menghasilkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva lancarnya dalam melakukan pembayaran utang lancar. Dari informasi tersebut dapat memberikan sinyal bagi investor atau pihak lain mengenai baik atau buruk kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, hal itu merupakan sinyal penting untuk investor dalam menginvestasikan uangnya, dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam melakukakan pembayaran kewajibannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang dipakai untuk penelitian ini berasal dari Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Peneliti menggunakan metode kuantitatif agar data tersebut digunakan sebagai perhitungan untuk mencari rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan dan mengetahui pengaruh dari variabel satu dengan variabel lain. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan Net Profit Margin (NPM) yang membagi laba bersih dengan penjualan, Current Ratio(CR) yang membagi aktiva lancar dengan hutang lancar, dan Debt To Equity Ratio (DER) yang didapatkan dari pembagian total hutang dan total ekuitas terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022.

Populasi penelitian merupakan perusahaan sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 yaitu sebanyak 37 perusahaan. Terdapat 16 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dari tahun 2018-2022. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan dengan tahun pengamatan yaitu 5 tahun. Maka total data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 sampel. Dalam salah satu pengukuran

pada variabel terdapat nilai negatif sehingga hal ini dapat berpengaruh pada saat proses pengujian di program statistik.

Maka diperlukan sebuah transformasi data yang dapat mengubah nilai negatif menjadi nilai positif. Transformasi data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik square root (Wilhelmi et al, 2021). Kemudian diaplikasikan ke software Microsoft Excel. Pada teknik square root, nilai absolute dari bilangan positif atau 0 (nol) sama dengan bilangan itu sendiri. Nilai absolute dari bilangan negatif adalah bilangan positif yang sesuai, karena negatif dari bilangan negatif adalah positif (Leithold, 1968) (Wilhelmi et al, 2021).

Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi mengenai penelitian yang berupa penyajian data yang sesuai dengan variabel –variabel yang diteliti, setelah itu data diolah untuk menanggapi rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang diperoleh berupa angka dan statistik. Kemudian data akan diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel dan Software Eviews 12. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel. Data panel ialah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (*cross section).* Peneliti melakukan pemilihan model regresi untuk menentukan model mana yang akan digunakan dari 3 model yang ada, yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Model tersebut digunakan untuk melakukan uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier (LM), disamping dilakukan pula uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa variabel kinerja perusahaan (Y) menunjukan nilai terendah (minimal) pada variabel ini ada pada PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2022 sebesar -11,822, nilai tertinggi (maximum) pada variabel ini ada pada PT Sekar Bumi Tbk pada tahun 2020 sebesar 4,658, nilai rata-rata (mean) 0,011 dan nilai standar deviasi 1,777. Dari nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan pada sampel penelitian ini yaitu sebesar 1,1%. Variabel net profit margin (X1) menunjukan nilai terendah (minimal) pada variabel ini ada pada PT Tri Banyan Tirta Tbk pada tahun 2018 sebesar -0,113, nilai tertinggi (maximum) pada variabel ini ada pada PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2020 sebesar 0,938, nilai rata-rata (mean) 0,096 dan nilai standar deviasi 0,140.

Dari nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa rata-rata laba bersih pada sampel penelitian ini yaitu sebesar 9,6%. Variabel current ratio (X2) menunjukan nilai terendah (minimal) pada variabel ini ada pada PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2021 sebesar 0,060, nilai tertinggi (maximum) pada variabel ini ada pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk. pada tahun 2021 sebesar 13,309, nilai rata-rata (mean) 2,818 dan nilai standar deviasi 2,707. Dari nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa rata-rata aktiva lancar pada sampel penelitian ini yaitu sebesar 281,8%. Variabel debt to equity ratio (X4) menunjukan nilai terendah (minimal) pada variabel ini ada pada PT FKS Food Sejahtera Tbk pada tahun 2019 sebesar -2,127, nilai tertinggi (maximum) pada variabel ini ada pada PT Prasidha Aneka Niaga Tbk pada tahun 2022 sebesar 17,036, nilai rata-rata (mean) 1,024 dan nilai standar deviasi 2,073. Dari nilai rata-rata dapat disimpulkan bahwa rata-rata utang pada sampel penelitian ini yaitu 102,4%. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa telah memenuhi prasyarat untuk melanjutkan proses analisa data lanjutan.

Hasil uji regresi data panel memperlihatkan bahwa nilai konstanta sebesar -0,1429 menunjukan jika variabel independen NPM sebesar -4,5292, CR sebesar 0,0401, DER sebesar 0,1495, maka nilai variabel dependen kinerja perusahaan sebesar -0,1429. Nilai coefficient variabel NPM bernilai negatif sehingga pengaruh antara variabel NPM dengan kinerja perusahaan berlawanan. Nilai coefficient variabel CR bernilai positif sehingga pengaruh antara variabel CR dengan kinerja perusahaan searah. Nilai coefficient variabel DER bernilai positif sehingga pengaruh antara variabel DER dengan kinerja perusahaan searah.

Berdasarkan dari hasil koefisien determinasi (R2) menunjukan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0,138724 yang berarti mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Net Profit Margin (NPM), Current ratio (CRdan Debt to Equity Ratio (DER) menjelaskan tentang kinerja perusahaan sebesar 13,8%, sedangkan 86,2% dijelaskan oleh

variabel lain yang tidak gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan dari hasil uji signifikasi simultan (Uji F), menunjukan bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0,004205 yang berarti kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Net Profit Margin (NPM), Current ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja perusahaan.

Hasil uji hipotesis (t) memperlihatkan bahwa Net Profit Margin (NPM) nilai prob. sebesar 0,0008 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja perusahaan. Current Ratio (CR) nilai prob. sebesar 0,0276 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Current ratio (CR) berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja perusahaan, dan pada Debt to Equity Ratio (DER) nilai prob. sebesar 0,0315 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja perusahaan.

Berdasarkan hasil uji wilcoxon variabel kinerja perusahaan nilai probability sebesar 0,8675 > 0,05 maka tidak ada perbedaan kinerja perusahaan pada sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dari hasil uji wilcoxon nilai median sebelum pandemi sebesar 0,151885 dan sesudah pandemi Covid-19 sebesar 0,071246. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat sesudah pandemi Covid-19 nilai kinerja perusahaan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil uji wilcoxon variabel Net Profit Margin (NPM) nilai probability sebesar 0,9922 > 0,05 maka tidak ada perbedaan Net Profit Margin (NPM) pada sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dari hasil uji wilcoxon nilai median sebelum pandemi sebesar 0,068321 dan sesudah pandemi Covid-19 sebesar 0,062295. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat sesudah pandemi Covid-19 nilai Net Profit Margin (NPM) mengalami penurunan. Hasil uji wilcoxon variabel Current Ratio (CR) nilai probability sebesar 0,3970 > 0,05 maka tidak ada perbedaan Current Ratio (CR) pada sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, dan nilai median sebelum pandemi sebesar 1,731068 dan sesudah pandemi Covid-19 sebesar 1,954193. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat sesudah pandemi Covid-19 nilai Current Ratio (CR) mengalami peningkatan. Hasil uji wilcoxon variabel Debt to Equity Ratio (DER) nilai probability sebesar 0,4984 > 0,05 maka tidak ada perbedaan Debt to Equity Ratio (DER) pada sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Dari hasil uji wilcoxon nilai median sebelum pandemi sebesar 0,563737 dan sesudah pandemi Covid-19 sebesar 0,735621. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat sesudah pandemi Covid-19 nilai Debt to Equity Ratio (DER) mengalami peningkatan.

Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk melihat keuntungan dari sebuah perusahaan, sehingga semakin meningkat nilai laba bersih yang diperoleh perusahaan maka dapat dikatakan semakin baik hasil dari kinerja perusahaan tersebut, sehingga menjadi sinyal untuk investor ataupun kreditor dalam menentukan menginvestaikan dananya ataupun memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Berbanding terbalik bila ternyata laba bersih perusahaan semakin menurun maka dapat dikatakan kurang baik. Hasil dari kinerja perusahaan tersebut, sehingga menjadi sinyal untuk investor ataupun kreditor. Sehingga dapat dikatakan bahwa Net Profit Margin (NPM) dapat digunakan untuk bahan pertimbangan bagi investor ataupun kreditor dalam menilai kinerja perusahaan. Hasil penelitian pada variabel ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Badriah et al. (2022), Arifin (2019), Prasetyo et al. (2019), Pakpahan et al. (2020) menyatakan bahwa Net Profit Margin (NPM) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Current Ratio (CR) digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva lancar dalam melakukan pembayaran utang lancar. Sehingga semakin baik kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban jangka pendek maka dapat dikatakan semakin baik kinerja dari perusahaan tersebut. Dari informasi tersebut dapat memberikan sinyal bagi investor atau pihak lain mengenai kinerja perusahaan (sinyal). Hasil penelitian pada variabel ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Silom et al.

(2023), Juwita & Mutawali (2022), Puspitarini (2019), Fajaryani (2018), Yuliani (2021), Sitohang & Wulandari (2020), Umami & Budiarti (2019), Krisnandi (2019), Grediani et al., (2022) dan Sembiring (2019) menyatakan bahwa Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dari informasi tersebut dapat memberikan sinyal bagi investor atau pihak lain mengenai naik atau turunnya persentase utang pada modal, hal ini merupakan sinyal untuk investor dalam mempertimbangkan dan menilai kinerja perusahaan tersebut. Hasil penelitian pada variabel ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Suciati (2021), Indriastuti & Ruslim (2020), Lestari (2020), Fajaryani (2018), Yuliani (2021), Arisanti (2020), Umami & Budiarti (2019), Liando (2021), Astutik (2021), Chanifah (2019) Amalia & Khuzaini (2021) menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

4. KESIMPULAN

Dari hasil analisa data, dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat nilai laba bersih yang diperoleh perusahaan maka dapat dikatakan semakin baik hasil dari kinerja perusahaan tersebut, sehingga dapat menjadi sinyal untuk investor ataupun kreditor dalam menentukan investasi dananya ataupun memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Semakin baik kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajiban jangka pendek maka dapat dikatakan semakin baik kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga dapat menjadi sinyal bagi investor atau pihak lain mengenai kinerja perusahaan, hal itu merupakan sinyal penting untuk investor dalam menginvestasikan uangnya, dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam melakukakan pembayaran kewajibanya.

Adanya peningkatan atau penurunan hutang dan ekuitas mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga dapat menjadi sinyal bagi investor atau pihak lain mengenai naik atau turunnya persentase utang pada modal, hal ini merupakan sinyal untuk investor dalam mempertimbangkan dan menilai kinerja perusahaan tersebut. Kemudian, hasil uji beda sub sektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2018-2022 terdampak pandemi Covid-19 memperlihatkan bahwa kinerja dapat menjadi sinyal bagi investor atau pihak lain mengenai, hal ini merupakan sinyal untuk investor dalam mempertimbangkan dan menilai kinerja perusahaan tersebut baik sebelum ataupun setelah penurunan ekonomi tersebut.

Terdapat keterbatasan pada saat proses uji normalitas data terdistribusi tidak normal, sehingga dilakukan transformasi data logaritma natural (LN) dan penelitian ini terbatas pada variabel rasio keuangan sehingga tidak dapat digeneralisir. Saran penelitian lanjutan yaitu memperluas area penelitian ke lingkup global dan tidak hanya melihat rasio keuangan untuk menganalisa kinerja keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman, dan juga membandingkan dengan sektor yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A. N., & Khuzaini, K. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM),* 10(5).

Arifin, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi),* (2), 477-483.

Arisanti, P. (2020). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Keperluan Rumah Tangga Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2018. *Competence: Journal of Management Studies*, 14(1), 1-8.

Astutik, W. S. (2021, September). Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2012-2014. *In Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 6, No. 1, pp. 1682-1690).

Badriah, E., Faridah, E., Nurwanda, A., & Lisara, A. (2022). Pengaruh Net Profit Margin dan Total Asset Turnover Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi),* 10(2), 143-154.

Chanifah, S., & Budi, A. (2019). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Dynamic Management Journal*, 3(2).

Fajaryani, N. L. G. S., & Suryani, E. (2018). Struktur modal, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 10(2), 74-79.*

Grediani, E., Saputri, E., & Hanifah, H. (2022). Analisis Rasio Solvabilitas, Likuiditas, dan Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 51-65.

Indriastuti, A. M., & Ruslim, H. (2020). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan,* 2(4), 855-862.

Juwita, R. I., & Mutawali, M. (2022). Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Total Asset Turnover Ratio dan Earning Per Share terhadap Kinerja Keuangan PT Asahimas Flat Glass Tbk Periode 2012-2021. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen dan Sumberdaya,* 1(2), 114-123.

Krisnandi, H. (2019). Pengaruh Current Ratio, Inventory Turnover, Debt To Equity Ratio Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Rekayasa Informasi,* 8(2), 111-123.

Lestari, P. (2020). Pengaruh Likuiditas, Der, Firm Size, Dan Asset Turnover Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 1-10.

Liando, J. S. (2021). Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bei Tahun 2015-2019*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(01), 86-91.

Lutfiana, D. E. S., & Hermanto, S. B. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA),* 10(2).

Pakpahan, Z., Parlina, A., Trisinggih, J. A., Panggabean, J., & Aruan, D. A. (2020). Pengaruh Current Ratio (CR), Debt to Asset Ratio (DAR), Intensitas Modal (IM), dan Net Profit Margin (NPM) terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2017. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(3), 1132-1147.

Prasetyo, M. W., & Wahyuni, W. (2019). Pengaruh Pajak Tangguhan, Tax To Book Ratio, Net Profit Margin Dan Operating Assets Turnover Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Liability*, 1(1), 103-120.

Puspitarini, S. (2019). Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas Dan Size Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis,* 5(1), 462001.

Putra, N. R., & Yuniati, T. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Bumn *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya.*

Rahmawati, S. A. (2021). Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Net Profit Margin Terhadap Price To Book Value pada Perusahaan Sub Sektor Tourism, Restaurant, Dan Hotel yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2019. *Jurnal Inovatif Mahasiswa Manajemen,* 1(3), 279-289.

Samo, A.H. and Murad, H. (2019), "Impact of liquidity and financial leverage on firm's profitability – an empirical analysis of the textile industry of Pakistan", *Research Journal of Textile and Apparel*, Vol. 23 No. 4, pp. 291-305. https://doi.org/10.1108/RJTA-09-2018-0055

Sembiring, M. (2019). Analisis Rasio Likuiditas, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Perputaran Persediaan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Retail Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal Akuntansi Barelang,* 4(1), 75-85.

Silom, D., Saerang, I. S., & Rumokoy, L. J. (2023). Pengaruh Global Economic Policy Uncertainty, Likuiditas, Leverage, dan Firm Size Terhadap Kinerja Perusahaan Sub Sektor Pariwisata, Hotel dan Restoran yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 349-360.

Sitohang, A. W., & Wulandari, B. (2020). Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, terhadap Kinerja Keuangan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS),* 3(2), 577-585.

Suciati, R. (2021). Analisis rasio solvabilitas terhadap kinerja perusahaan di sektor perdagangan indonesia. INOVASI, 17(2), 199-210.

Umami, H., & Budiarti, A. (2019). Pengaruh CR, TATO dan DER terhadap kinerja keuangan perusahaan food and beverages di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM),* 8(6).

Yuliani, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(2), 111-122.

Yusmaniarti, Y., Febriyanto, A., Hernadianto, H., & Fitria, D. (2022). Analisis Pengaruh Struktur Aktiva, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal dan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia),* 7(1), 14-39

Good Corporate Governance (GCG) Leverage Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Pada BUMN Yang Melakukan Penambahan Saham Beredar

Risa Wahyuni EDT
Universitas Sumatera Barat – *risawahyuniedt@gmail.com*

Abstrak— *This research aims to see the influence of good corporate governance (GCG), leverage, profitability on company value. The data source used in this research is secondary data. The type of data used is quantitative data in the form of financial reports that have been uploaded to the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016-2022. The objects of this research are five state-owned companies, namely PT Semen Indonesia, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Karakatau Steel and PT Garuda Indonesia. So that samples taken using purposive sampling technique obtained a sample of 35 samples for research. The statistical method used is multiple linear regression analysis, with hypothesis testing using partial tests (t tests) and simultaneous tests (f tests). The results of research hypothesis testing show that GCG does not have a significant effect on company value, leverage has a negatif and significant effect on company value, profitability has a positive and significant effect on company value and together the variables GCG, leverage and profitability have an effect on company value.*

Keywords — *Good Corporate Governance (GCG), Leverage, Profitability, Company Value.*

1. PENDAHULUAN

Perusahaan di Indonesia memiliki persaingan yang sangat ketat dalam mempertahankan kualitas dan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan acuan bagi para investor untuk menilai suatu perusahaan dari segi fundamental dalam berinvestasi (Yohendra & Susanty, 2019). Menurut Nabila & Wuryani (2021) Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi yang diraih perusahaan yang tergambar dari harga saham yang nilai perusahaannya diukur dengan menggunakan *Price Book Value (PBV)*. *Price Book Value (PBV)* merupakan rasio yang sering digunakan para investor untuk melihat seberapa sering *market value* suatu saham di hargai dari *book valuenya*. Nilai perusahaan dapat diartikan menjadi hal yang sangat penting dalam membuat suatu perusahaan agar dapat tumbuh dan berkembang serta menjadi acuan bagi para investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Menurut Trisnawati (2021) keputusan investor didapatkan berdasarkan informasi yang diberikan perusahaan untuk melihat prospek perusahaan.

Perusahaan dapat dipengaruhi dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik atau disebut juga dengan *good corporate governance (GCG). Good corporate governance (GCG)* merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk para *stakholde*r (Putra, et al. 2022). Menurut Sasmita & Bondan (2018) Penerapan *good corporate governance (GCG)* bermula ketika adanya masalah keagenan yang memiliki perbedaan persepsi, akses informasi dan resiko karna kurangnya tanggung jawab manajer dalam melaksanakan tugasnya. Pihak manajer sebagai pengelola cenderung melakukan penyimpangan yang mengakibatkan konflik kepentingan, yang mana manajer sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola perusahaan lebih mengarah pada kepentingan pribadi dari pada mencapai tujuan yang selaras dan berdampak pada nilai perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya *agency conflict* sehingga perusahaan perlu menerapkan *good corporate governance (GCG)* untuk meningkatkan nilai perusahaan dan mengurangi *agency conflict* yang terjadi dalam perusahaan.

Selain *good corporate governance (GCG*) terdapat faktor lain yang digunakan untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu *leverage. Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dibandingkan dengan modal sendiri (Toni, 2021). Secara logika, perusahaan yang sering berhutang tidaklah sehat dikarenakan kelebihan hutang yang besar akan memberikan

dampak negatif pada nilai perusahaan.

Leverage sendiri dapat diukur dengan menggunakan *working capital to total assets ratio (WCTAR)*, peneliti menggunakan rasio ini dikarenakan dapat melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar perusahaan saat jatuh tempo yang di ukur dengan pengurangan antara aktiva lancar dan hutang lancar lalu dibagi dengan total aktiva sehingga semakin tinggi *working capital to total assets ratio* ini dapat menggambarkan keadaan aktiva lancar perusahaan sehingga dapat berdampak pada naiknya nilai perusahaan (Ermaini, et al. 2021). Jadi dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan yang dibiayai oleh asset perusahaan.Dan selain *good corporate governance (GCG)* serta *leverage* nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya *profitabilitas* yang dihasilkan oleh perusahaan.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya laba yang diperoleh dari penjualan maupun *investment* (Yusmaniarti, et al. 2019). Menurut Putri & Putri (2022) *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan kemampuaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan tingkat pengembaliaan laba kepada investor. Kebanyakan para investor memakai rasio *profitabilitas* untuk pertimbangan dalam menentukan pengembilan keputusan. *Profitabilitas* dapat diukur dengan menggunakan rasio *erning per share (EPS)* karna rasio ini dapat menunjukkan kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Semakin besar nilai *erning per share (EPS)*nya maka perusahaan dinilai lebih kompeten dalam menghasilkan laba.

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan BUMN yang sedang melaksanakan *right issue* pada tahun 2022 yang terdaftar dibursa efek Indonesia. *Right Issue* adalah hak yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham lama untuk melakukan penawaran/membeli saham sebelum ditawarkan ke public (pasal 1 angka 1 POJK 14/2019). *Right issue* yang pertama akan dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dengan menginjeksikan sebesar Rp 7,5 triliun yang berasal dari porporsi pemerintah *(cnbcindonesia.com)*. Sementara itu SIG (Semen Indonesia Grop) akan melakukan *Right issue* dengan kepemilikan saham pemerintah sebanyak 51,01%, Waskita Karya juga akan melakukan *Right issue* dengan kepemilikan saham pemerintah sebanyak 75,35% namun setelah *Right issue* porporsi pemerintah akan berkurang menjadi 66,04% , Adhi Karya juga akan melakukan *Right issue* dengan target dana sebesar Rp1,98 triliun, selanjutnya *Right issue* Bank Tabungan Negara (BTN) yang terkait dengan alokasi PMN TA 2022 sebesar Rp2,98 triliun yang rencananya akan digunakan untuk cadangan pembiayaan investasi. Terakhir *rights issue* Krakatau Steel yang akan membuat porsi jumlah saham pemerintah berkurang dari 80% menjadi 60% dan dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha (*cnbcindonesia.com).*

Inisiatif Corporate Action yang melibatkan Partisipasi Publik

No	BUMN	Jenis Saham yang Akan dijual	Metode Privatisasi	Kepemilikan Pemerintah Sebelum Privatisasi	Perkiraan Persentase Kepemilikan Pemerintah Setelah Privatisasi	Rencana Penggunaan Dana
1.	SIG	Saham dalam Portepel	*Rights Issue**	Pemerintah: 51,01% Publik: 48,99%	**Pemerintah: 51,01% Publik: 48,99%	*Inbreng* Semen Batu Raja pada Semen Indonesia melalui skema *right issue*
2.		Saham dalam Portepel	*Rights Issue**	Pemerintah: 75,35% Publik: 24,65%	**Pemerintah: 66,04% Publik: 33,96%	Terkait alokasi PMN TA 2022 sebesar Rp 3,00 Triliun
3.	adhi	Saham dalam Portepel	*Rights Issue**	Pemerintah: 51,00% Publik: 49,00%	**Pemerintah: 51,00% Publik: 49,00	Terkait alokasi PMN TA 2022 sebesar Rp 1,98 Triliun
4.	Bank BTN	Saham dalam Portepel	*Rights Issue**	Pemerintah: 60,00% Publik: 40,00%	**Pemerintah: 60% Publik: 40%	Terkait alokasi PMN TA 2022 sebesar Rp 2,98 Triliun dari Cadangan Pembiayaan Investasi
5.		Saham Pemerintah	Penjualan saham secara langsung kepada investor	Pemerintah : 61,48% Bank Mandiri : 37,39% Pemprov NTT : 1,12%	Pemerintah: 0% Bank Mandiri: 37,39% Pemprov NTT: 62,61%	Masuk ke kas negara
6.	Garuda Indonesia	Saham dalam Portepel	*Rights Issue***	Pemerintah:60,54% PT Trans Airways:28,27% Publik: 11,19%	Tahap 1 Pemerintah ~65% **** Tahap 2 Pemerintah minimal ~51% ****	Terkait Alokasi PMN TA 2022 Rp7,5 T dari Cadangan Pembiayaan Investasi-Pembiayaan operasional dan pendanaan restrukturisasi selama tahun 2022-2023. Pendanaan *new investor* akan digunakan untuk pendanaan restrukturisasi dan transformasi selama tahun 2022-2023

* *Data rentang jumlah lembar saham belum dapat disampaikan mengingat valuasi saham masing-masing BUMN akan dilakukan menjelang pelaksanaan Rights Issue*
** *Asumsi publik menyerap seluruh saham yang diterbitkan.*
*** *Non HMETD*
**** *Termasuk PMN sebesar Rp 7,5 T atau setara ~USD527jt dan Konvesi Obligasi Wajib Konversi (OWK) Rp 1T yang diperoleh dari Program IP-PEN dengan ilustrasi harga pelaksanaan Rp 50/ lembar saham. Harga pelaksanaan subject to material change tergantung kesepakatan antar pemegang saham dan/atau hasil valuasi dari penilai independen.*

Gambar 1.Perbandingan Sebelun Dan Sesudah Rights Issue
Sumber: cnbcindonesia.com

Dari berita diatas peneliti tertarik mengambil lima perusahaan yang melakukan penambahan saham beredar tersebut untuk menjadikan objek penelitian dengan melihat pengaruh *good corporate governance (GCG)*, *leverage dan profitabilitas* terhadap nilai perusahaan yang bertujuan untuk membantu para investor baru dalam melihat apakah perusahaan yang melakukan *right issue* memiliki nilai perusahaan yang sangat bagus ketika nantinya perusahaan menawarkan sahamnya ke publik atau kepada investor baru sehingga para investor dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.

Agency Theory sering juga di sebut sebagai landasan dasar dari pembahasan *good corporate governace (GCG).* Menurut Indrarini (2019), *Agency theory* merupakan konflik antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) sebagai pihak yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemilik perusahaan untuk mengatur dan mengelola perusahaan sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Sebagai pihak yang mengelola perusahaan tentunya manajemen (*agent*) lebih banyak mendapatkan informasi mengenai perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan (*principal*). Perbedaan informasi inilah yang dapat menimbulkan konflik antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent) dikarenakan manajemen dapat berbuat curang untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Menurut Gosal, et al. (2018) Dengan adanya konflik ini dapat berdampak negatif terhadap perusahaan sehingga perlu diminimalkan dengan menerapkan mekanisme *good corporate governance* untuk meningkatkan pengawasan kinerja manajemen sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sehingga dapat mengoptimalkan nilai perusahaan.

Trade-Off merupakan istilah yang sering digunakan dalam akuntansi untuk menggambarkan kapan suatu barang ditukar dengan barang lain atau disebut juga dengan pengorbanan. Menurut Sukamulja (2021) teori *trade-off* yang dibahas yaitu tentang penggunaaan hutang yang lebuh tinggi dapat menyebabkan *trade-off* (pengorbanan) antara kerugian pada perusahaan yang berdampak pada penurunan nilai perusahaan dikarenakan adanya resiko gagal bayar dan beban bunga tetap yang menjadi beban keuangan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh yaitu pengurangan pembayaran pajak penghasilan karna adanya bunga atas hutang.

Menurut Trisnawati (2021), Teori ini menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh

manajemen perusahaan dalam memberikan sinyal berupa informasi untuk melihat keadaan masa lalu, sekarang maupun masa depan perusahaan yang nantinya dapat digunakan oleh para investor dalam mengambil keputusan saat berinvestasi.

Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat berpengaruh baik maupun buruk terhadap perusahaan. Apabila perusahaan dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada investor akan berdampak pada perubahan kapasitas perdagangan saham sesuai dengan harga saham yang telah ditetapkan. Dengan meningkatnya harga saham secara otomatis dapat meningkatkan nilai perusahaan. Sementara, nilai perusahaan dapat mengalami penurunan atau ketidak sesuaian terhadap kedudukannya apabila perusahaan gagal dalam menyampaikan informasi kepada investor yang berdampat terhadap kurangnya minat investor dalam berinvestasi.

Nilai Perusahaan merupakan keadaan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai cerminan kepercayaan para investor terhadap kinerja perusahaan dari perusahaan didirikan yang nantinya akan menjadi tolak ukur para investor dalam membeli saham perusahaan dengan harga yang telah ditentukan (Fatoni 2020). Menurut Sarafina & Saifi, (2017) Harga saham yang tinggi dapat membuat nilai perusahaan tinggi yang diikuti dengan tingginya kemakmuran para pemangku kepentingan atau disebut juga dengan *stakeholders*. Jadi nilai perusahaan adalah hal yang sangat penting dalam membuat suatu perusahaan agar dapat tumbuh, dan berkembang serta menjadi acuan bagi para investor untuk berinvestasi.

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu dengan membandingkan harga pasar per lembar saham dengan nilai buku per lembar saham atau disebut juga dengan istilah *Price Book Value (PBV*) (Zamzami 2018). *Price Book Value* merupakan rasio yang sering digunakan para investor untuk melihat seberapa sering *market value* suatu saham di hargai dari *book valuenya*.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan menggendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk para *stakeholder* (Putra, et al 2022). Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk mempengaruhi informasi dengan benar tepat pada waktunya dan yang kedua kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder.* Menurut Mentri BUMN No.Kep-117/M-MBU/2002 Definisi *Corporate Governance* merupakan proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan *akunttabilitas* perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholders* yang berlandasan dengan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak lembaga atau institusi seperti perusahaan yang bergerak dibidang investasi, reksadana, dana pension, perusahaan asuransi serta kepemilikan instasi lainya yang berasal dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan Institusional berguna untuk memantau secara professional perkembangan investasi sehingga tingkat pengendalian terhadap manajemen semakin tinggi yang akhirnya dapat menekan potensi kecuranga dan meningkatkan kinerja yang dapat dilakukan oleh manajemen.

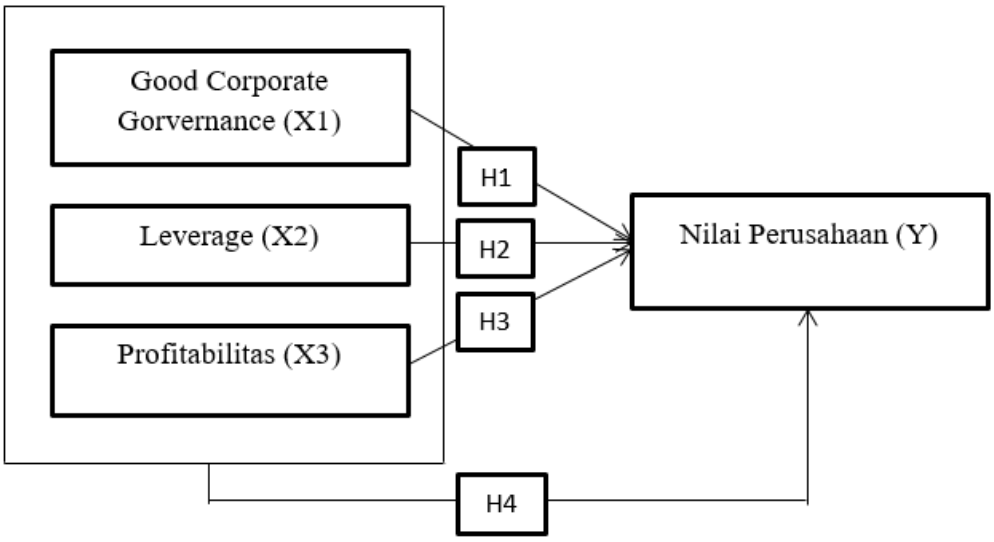
Leverage merupakan rasio yang sering digunakan untuk melihat seberapa jauh asset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan dari modal perusahaan (Toni, 2021). Sementara menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Leverage* merupakan penjumlahan dari eksposur asset dalam laporan posisi keuangan (neraca). *Leverage* juga dianggap dapat membantu perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dalam kegagalan apabila digunakan secara efektif, namun juga dapat menyebabkan kebangkrutan bagi perusahaan apabila dikelola dengan cara yang sebaliknya karena perusahaan kesulitan dalam membayar hutang-hutangnya. Oleh sebab itu perusahaan harus kompeten dalam menggunakan rasio *leverage* agar tetap berjalan dengan efesien sehingga perusahaan tidak kesulitan dalam membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Ermaini, et al. (2021) *leverage* dapat diukur dengan menggunakan *working capital to total assets ratio (WCTAR)* yaitu rasio yang melihat kemampuan perusahaan dalam

membayar hutang lancar perusahaan saat jatuh tempo yang dilihat dari pengurangan aktiva lancar dan hutang lancar lalu dibagi dengan total aktiva. Sehingga semakin tinggi *working capital to total assets ratio (WCTAR)* ini dapat mengambarkan kemampuan keadaan aktiva lancar dalam menutupi hutang lancar perusahaan. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa *leverage* adalah rasio yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan yang dibiayai oleh asset perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keputusan, ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. *Profitabilitas* yang tinggi akan berdampak positif pada perusahaan karena dapat meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan dapat menarik investor baru untuk berinvestasi. Menurut Toni (2021) rasio *profitabilitas* merupakan rasio yang dimanfaatkan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. *Earning Per Share (EPS)*merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari perlembar saham pemilik.

Kerangka konseptual merupakan sebuah model kerangka berpikir mengenai hubungan suatu teori dengan berbagai faktor atau variabel yang diidentifikasi sebagai masalah penelitian.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban terhadap rumusan masalah yang didasari oleh teori serta didukung oleh penelitian terdahulu. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

H1: Diduga Good Corporate Gorvernance berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
H2: Diduga Leverage Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan.
H3: Diduga *Profitabilitas* Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan.
H4: Diduga *Good Corporate Governance (GCG), Leverage, Profitabilitas Berpengaruh* Terhadap Nilai Perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikelompokkan kedalam jenis penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif menurut Nugraha (2022) merupakan pendekatan dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan serta pengaruh yang satu dengan yang lain. Jenis penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara variabel

bebas dengan variabel terikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *good corporate governance (GCG)*, *leverage,* dan *profitabilita* sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat.

Objek Penelitian menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil Objek lima perusahaan BUMN yaitu PT Semen Indonesia, PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Karakatau Steel dan PT Garuda Indonesia. Dalam penelitian ini penulis tidak secara langsung mendatangi perusahaan yang diteliti, melainkan dengan mendownload data laporan tahunan pada perusahaan BUMN melalui www.idx.com.id selama periode 2016-2022.

Populasi merupakan semua jumlah yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki mutu serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari sehingga kemudian ditarik kesimpulan oleh hasil akhir (Nugraha, 2022). Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 72 perusahaan BUMN.

Menurut Nugraha (2022), Sampel merupakan bagian kecil dari suatu populasi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling* yang mana pengambilan sampelnya berdasarkan sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri tertentu sehingga dapat menentukan jumlah sampel yang diteliti.

Adapun Kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Kriteria Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	72
2	Perusahaan BUMN yang Tidak Mengeluarkan Right Issue Pada Tahun 2022	(66)
3	Bentuk Laporan Keuangan Tidak Sama	(1)
4	Perusahaan Pengamatan	5
5	Dikalikan Periode Penelitian 2016-2022	7
	Jumlah Observasi Penelitian	35

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 perusahaan dengan 7 tahun pengamatan sehingga jumlah observasi adalah 35.

Jenis data yang peneliti gunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data dalam bentuk angka atau data kuantitatif yang diangkakan. Menurut Nugraha (2022), data kuantitatif merupakan metode peneliti yang digunakan untuk menghasikan penemuan-penemuan yang diukur menggunakan statistic sebagai alat uji perhitungan berdasarkan masalah yang diteliti.

Sumber data yang penulis gunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau dengan melalui media perantara atau data yang dicatat dan diperoleh oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan perusahaan yang bersumber dari website resmi dari Bursa

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur *Price Book Value (PBV)* dengan membandingkan harga saham dengan nilai bukunya. Menurut (Ningrum, 2022) semakin besar rasio *price book value (PBV)* maka semakin tinggi pulan perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditambahkan di perusahaan.

a. Variabel Independen (X)

Variabel independen 1 dalam penelitian ini adalah *good corporate governance (GCG*). *Good Corporate Governance (GCG)* dapat diukur dengan menggunakan kepemilikan institusional dengan membandingkan total sahma intitusional dengan total saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Total Saham Institusional}}{\text{Total Saham Yang Beredar}}$$

Variabel independen 2 dalam penelitian ini adalah *leverage. Leverage* da

pat diukur dengan menggunakan *working capital to total asset ratio* yang merupakan rasio untuk melihat seberapa besar asset mampu melunasi hutang atas kewajiban perusahaan. Menurut Ermaini, et al. (2021) rumus *working capital to total asset ratio* yaitu sebagai berikut :

$$WCTAR = \frac{\text{Total Assets Lancar} - \text{Total Hutang Lancar}}{\text{Total Assets}}$$

Variabel Independen 3 dalam penelitian ini adalah *profitabilitas. Profitabilitas* dapat diukur dengan menggunakan *erning per share (EPS). Erning per share (EPS)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba perusahaan. besarnya hasil perhitungan laba per lembar saham menunjukkan besar laba yang dapat dibukukan oleh perusahaan. Menurut Marino & Badriatin (2021) rumus erning per share (EPS) adalah :

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dari catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulan data sekunder berupa laporan tahunan yang diperoleh melalui website resmi Bursa Efek Indonesi (BEI) yaitu di (www.idx.co.id).

Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan untuk pengumpulan informasi serta data yang relevan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan *good corporate governance (GCG), leverage, profitabilitas* dan nilai perusahaan sehingga dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengelolaan data.

Menurut Setyawan (2021), Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan berdasarkan dengan perhitungan untuk menjawab tujuan penelitian, hipotesis penelitian, dan jenis data yang diperoleh.

Statistik deskriptif adalah suatu metode yang menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik serta dapat dilihat berdasarkan nilai mean (rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yang bertujuan agar dapat menggambarkan distribusi serta perilaku data sampel yang berasal dari data penelitian dengan hubungan antar variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini variable yang digunakan yaitu nilai perusahaan, *good corporate governance (GCG)*, *leverage*, serta *profitabilitas*.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada modal regresi. Modal regresi linier dapat disebut sebagai model yang naik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Untuk melakukan pengujian regresi linier perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang terdiri dari :

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan apakah persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Terdapat dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan

analisis grafik (histogram dan normal probability plot) atau menggunakan uji statistik yaitu Kolmogorov-smirnov (Sihabubi, et al.2021)

Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan melakukan uji stastistik atau Kolmogorov-smirnov yang mana pengambilan keputusannya dilakukan dengan nilai sig < 0,05 yang artinya dapat terdistribusi tidak normal dan dengan nilai sig > 0,05 yang artinya dapat terdistribusi normal

Multikolonieritas merupakan suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Menurut Sihabubi, et al. (2021) Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadih gejala multikolinearitas begitupun sebaliknya sementara nilai VIF yaitu jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas begitupun sebaliknya.

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah pada persamaan regresi linier mempunyai korelasi atau tidak diantara kesalahan penganggu pada periode sekarang (t) dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dalam penelitian ini, ada atau tidaknya autokorelasi pada persamaan regresi dapat dideteksi dengan cara melakukan uji durbin-watson (DW). Menurut Sihabudi,et al. (2021) uji durbin-watson dikatakan tidak mengalami gejala autokorelasi apabila dw terletak antara nilai dL dan dU.

Menurut Sihabubi, et al. (2021) Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi linear terjadi ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dideteksi dengan menggunakan grafik scatter plot antara ZPRED (nilai residual dari variabel dependen) dengan SRESID (residualnya). Apabila tidak terdapat pola tertentu yang jelas pada grafik scatterplot serta titik menyebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas Dan sebaliknya, apabila terdapat pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur yang bergelombang, melebar yang kemudian menyempit maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbatas dari heteroskedastisitas.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini diawali dengan statistik deskriptif yang mencakup angka statistik, rata-rata, standar deviasi dan nilai ekstrim. Uji Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda (Multiple Linear Regression). Menurut Rifkhan (2023), Regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat yang dirumuskan sebagai berikut :

$$NP = a + b1\ (GCG) + b2\ (LEV) + b3\ (PROF) + e$$

Keterangan :

NP	= Nilai Perusahaan
GCG	= *Good Corporate Governance*
LEV	= *Leverage*
PROF	= *Profitabilitas*
a	= Konstanta
b1-b3	= Koefisien Regresi
(e)	= *Error Term*

Besarnya variabel terikat (NP) dapat dilihat dari nilai variabel bebas pertama (GCG), kedua (LEV), ketiga (PROF), berdasarkan nilai konstanta (a), koefisien regresi yang tercermin dalam b1,b2 dan b3 serta nilai (e) yang telah ditetapkan dalam menilai signifikan dari pengaruh tersebut.

Hipotesis apabila ditinjau secara etimologi merupakan dua kata, *hypo* dan *thesis. Hypo* berarti kurang dari: *thesis* merupakan pendapat atau tesis. Secara harfiah hipotesis dapat diartikan sebagai sesuatu pertanyaan yang belum merupakan suatu tesis; suatu kesimpulan sementara; suatu pendapat yang belum final, karena masih harus dibuktikan kebenarannya.yang dikemungkakan dalam hipotesis adalah dugaan sementara yang

dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar. Sementara menurut Sugiono (2019) dalam Rifkhan (2020) Hipotesi merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap rumusan masalah yang mana masalah tersebut telah disusun dalam bentuk pertanyaan dan hipotesis juga dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru berdasarka teori. Kriteria penerima dan penolakan hipotesis ditentukan dengan melihat uji t dan f sebagai berikut :

Uji statistic t dilakukan untuk menunjukkan ada atau tidak adanya pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t merupakan uji yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan spss dengan signifikan 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikan lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, dan jika lebih kecil dari α maka hipotesis diterima. Menurut Utarini, et al (2022) Rumus Uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{RX1X2X3\sqrt{(N-2)}}{\sqrt{1-(RX1X2X3)^2}}$$

Dengan Kriteria :
Jika nilai t_{hitung} positif:
$T_{hitung} > t_{tabel}$ yang berarti terdapat pengaruh
$T_{hitung} < t_{tabel}$ yang berarti tidak dapat pengaruh

Jika nilai t_{hitung} negatif:
$-T_{hitung} \leq -t_{tabel}$ yang berarti berpengaruh
$-T_{hitung} \geq -t_{tabel}$ yang berarti tidak berpengaruh
Berdasarkan signifikan:
Jika nilai signifikan < 0,05 (Berpengaruh)
Jika nilai signifikan > 0,05 (Tidak berpengaruh)

Uji F (Uji Simultan)

Menguji keberartian regresi ganda dengan uji F. Uji F- statistic digunakan untuk melihat hubungan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujiaan ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan signifikansi level 0,05 (α=5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka koefisien ditolak dan jika lebih kecil dari α maka hipotesis diterima. Menurut Rifkhan (2020) Rumus Uji F yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(N-K)}$$

Dimana :
R^2 : Koefisien Determinasi
K : Jumlah Variabel
N : Jumlah Sampel

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) dalam Rifkhan (2020) uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menerangkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel terikat yang mana besar pengaruhnya dapat dilihat dari nilai *adjusted R-squared* pada tabel *Model Summary* dan juga dapat dihitung menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 - \frac{P(1-R^2)}{N-P-1}$$

Dimana :
R^2 = R-Squared
P = Jumlah fariabel bebas
N = Jumlah data

Besarnya pengaruh yang diperoleh dari hasil nilai koefisien determinasi ditandai dengan

nilai *adjusted R-squared* yang diperoleh mendektesi satu, yang artinya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya apabila *adjusted R-squared* semakin kecil (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya *adjusted R-squared* berada diantara 0-1 atau 0 < *adjusted R-squared* < 1.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau dengan melalui media perantara dan diperoleh oleh pihak lain berupa data laporan keuangan yang telah diaudit dari perusahaan BUMN. BUMN menurut UU no 19 tahun 2003 pasal 1 BUMN merupakan badan usaha yang seluruh maupun sebagian sahamnya dimiliki oleh negara yang mana modalnya berasal dari kekayaan negara dan kegiatan utamanya yaitu untuk mengelola perusahaan yang penting untuk negara serta dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Statistik deskriptif adalah suatu metode yang menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik serta dapat dilihat berdasarkan nilai mean (rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian yang bertujuan agar dapat menggambarkan distribusi serta perilaku data sampel yang berasal dari data penelitian dengan hubungan antar variabel yang digunakan. Dalam penelitian ini uji analisis deskriptif dapat dilihat dari hasil tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	35	-61.00	248.00	1.0677	65.07827
X1	35	51.00	88.80	67.6254	14.47065
X2	35	-75.99	25.36	-5.7246	23.57610
X3	35	-2.30	76230.00	1.5109	52329.63018

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Nilai Perusahaan

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif dari Tabel diatas dapat di simpulkan bahwa variabel dependen (Y) yaitu nilai perusahaan yang diukur menggunakan PBV dengan sampel penelitian yang berjumlah 35 sampel pada perusahaan BUMN yang diambil pada tahun 2016-2022 memiliki nilai std. deviation sebesar 65.07827, nilai rata-rata sebesar 1.0677, sedangkan maximum sebesar 248.00 dan nilai minimum -61.00 yang menunjukkan bahwa keadaan nilai perusahaan BUMN kurang baik karna kecilnya nilai rata-rata dari nilai std. deviation. Dari hasil tersebut diduga sampel yang digunakan terdapat masalah dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam memberikan sinyal dalam melihat keadaan masa lalu, sekarang maupun masa depan perusahaan.

Good Corporate Governance

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif dari Tabel 4.5 diatas dapat di simpulkan bahwa variabel (X1) yaitu GCG memperoleh 35 sampel dari perusahaan BUMN pada tahun 2016-2022 yang diukur dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional (KI) memiliki nilai std. deviation sebesar 14.47065, nilai rata-rata sebesar 67,6254, sedangkan nilai maximum sebesar 88,80 dan nilai minimum sebesar 51,00, yang berarti nilai kepemilikan institusional pada perusahaan BUMN pada tahun 2016-2022 tinggi yang mana dapat dilihat dari besarnya nilai rata-rata yang diperoleh dan dengan tingginya kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat memperkuat pengaturan dan pengawasan kinerja perusahaan.

Leverage

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif dari Tabel 4.5 diatas dapat di simpulkan bahwa variabel (X2) yaitu *leverage* memperoleh 35 sampel dari perusahaan BUMN pada tahun 2016-2022 yang diukur dengan *Working capital to total assets ratio (WCTAR). Working capital to*

total assets ratio (WCTAR) memiliki nilai std. deviation sebesar 23.57610, nilai rata-rata sebesar -5.7246, sedangkan nilai maximum sebesar 25.36 dan nilai minimumn -75.99.

Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji analisis deskriptif dari Tabel 4.5 diatas dapat di simpulkan bahwa variabel (X3) yaitu *profitabilitas* memperoleh 35 sampel dari perusahaan BUMN pada tahun 2016-2022 yang diukur dengan. *Erning Per Share (EPS)*. *EPS* memiliki nilai std. deviation sebesar 52329.63018, nilai rata-rata sebesar 1.5109, sedangkan maximum sebesar 76230.00 dan nilai minimum sebesar -2.30.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi pada modal regresi. Modal regresi linier dapat disebut sebagai model yang naik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu data residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini dapat pada gambar dibawah:

Hasil Uji Normalitasi

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah regresi variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model Regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada pun hasil uji normalitas yang peneliti lakukan yaitu :

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	52.76083168
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.058
	Negatif	-.065
Kolmogorov-Smirnov Z		.383
Asymp. Sig. (2-tailed)		.999

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Hasi Uji Kolmogrov-Smirnov dikatakan berdistribusi norman apabila hasilnya sesuai dengan ketentu yang ada. Menurut Sihabubi, et al. 2021 untuk menentukan nilai residual berdistribusi normal atau tidak dapat menggunakan uji stastistik atau disebut juga dengan uji Kolmogorov-smirnov, yang mana pengambilannya dilakukan dengan nilai sig < 0,05 yang berarti nilai residual tidak berdistribusi normal sedangkan > 0,05 dinyatakan nilai residual berdistribusi normal. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hasil model residual yang peneliti gunakan berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,999.

Hasil Uji Multikolinieritas

Multikolonieritas merupakan suatu hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel independen. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Menurut Sihabubi, et al. (2021) untuk mendektesi tidak adanya gejala multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factoe), yang mana nilai tolerance harus besar dari 0,10 dan nilai VIF kecil dari 10,00. Dari penjelasan diatas peneliti memperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistics	
Tolerance	VIF
.478	2.092
.375	2.668
.538	1.860

Berdasarkan uji multikolinieritas pada Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,001 dan nilai VIF kecil dari 10,00 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi masalah atau gejala multikolinearitas, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dilanjutkan ke uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah pada persamaan regresi linier mempunyai korelasi atau tidak diantara kesalahan penganggu pada periode sekarang (t) dengan kesalahan penganggu pada periode sebelumnya (t-1). Dalam penelitian ini, ada atau tidaknya autokorelasi pada persamaan regresi dapat dideteksi dengan cara melakukan uji durbin-watson (DW). Menurut Sihabubi, et al. (2021) uji durbin-watson dikatakan tidak mengalami autokorelasi apabila dw terletak antara nilai dL dan dU. Dari penjelasan diatas peneliti memperoleh hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

	Change Statistics					
Model	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.343	5.388	3	31	.004	1.372

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

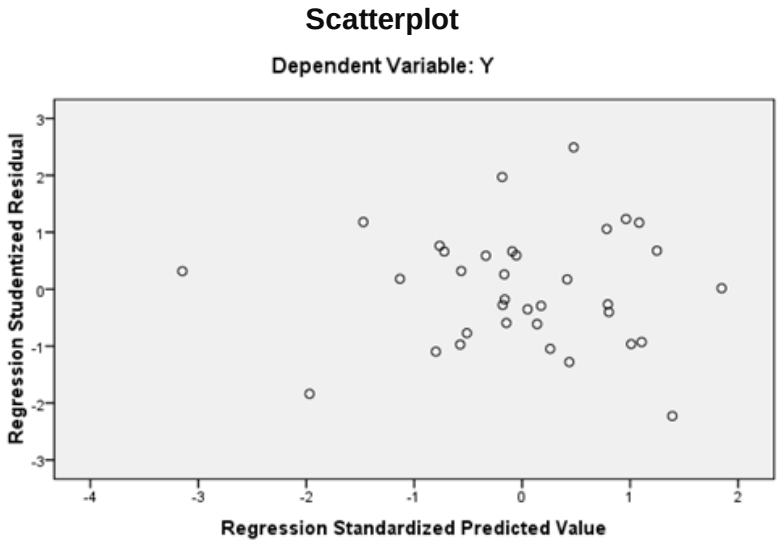
b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Berdasarkan hasil uji durbin Watson diatas nilai durbin – watsonnya sebesar 1.372 berarti terletak diantara dl dan du yaitu sebesar dL(1.2833) dU(1.6528) sehingga dapat disimpulan tidak terdapatnya gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Shihabubi, et al. (2021) Uji Heteroskedastisitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi linear terjadi ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada atau tidak adanya gejala heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3 apabila tidak terdapat pola tertentu yang jelas pada grafik scatterplot serta titik menyebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y, maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas Dan sebaliknya, apabila terdapat pola seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu dan teratur yang bergelombang, melebar yang kemudian menyempit maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terbatas dari heteroskedastisitas.



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Berdasarkan uji heteroskedasitas yang peneliti lakukan dapat dilihat dari grafik scatterplot diatas bahwa data yang peneliti gunakan tidak terdapat gejala heteroskedasitas karna tidak terdapat pola tertentu yang jelas pada grafik scatterplot serta titik menyebar diatas dan dibawah nol pada sumbu Y.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Rifkhan (2023), Regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar hubungan masing-masing variabel bebas (X1,X2,X3) dengan satu variabel terikat (Y), Hasil dari uji analisis regresi linear berganda yang diperoleh dari penelita ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
Model	B	Std. Error	Beta
(Constant)	203.830	62.788	
X1	-1.569	.947	-.349
X2	-1.374	.657	-.498
X3	.001	.000	.636

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda pada Tabel 6 besarnya dominasi variabel independen terhadap variabel dependen tergambar pada beta standardized coefficients sementara besar kecilnya penggaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari nilai beta unstandardized coefficients, sehingga dari tabel diatas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

NP = a + b1(GCG) + b2(LEV) + b3(PREF) +e
NP = 203.830 – 1.569(GCG) – 1.374(LEV) + 0.001(PROF) + e

Keterangan :
Y = Nilai Perusahaan
a = Constanta
b1,.…b3= Koefisien regresi variabel antara X1, X2, X3 dan Y
GCG = *Good Corporate Governance*
LEV = *Leverage*
PROF = *Profitabilitas*

Tanda positif maupun negatif yang diperoleh dari hasil koefisien regresi berganda bukanlah menyatakan tanda aljabar tetapi mencerminkan arah hubungangan antar variabel independen (*good corporate governance, leverage* dan *profitabilita)* terhadap variabel dependen (nilai perusahaan). Tanda positif yang diperoleh memiliki hubungan yang searah sementara tanda negatif menunjukkan arah hubungan yang berlawanan.

Berikut ini merupakan penjelasan koefisien yang terdapat pada tabel 4.9 diatas :

a. Nilai konstanta pada model regresi yang diperoleh sebesar 203.830 yang artinya jika variabel independen (*good corporate governance, leverage* dan *profitabilitas)* bernilai sama dengan nol maka besarnya nilai perusahaan mengalami peningkatan sebesar nilai konstanta yang diperoleh yaitu 203.830.
b. Nilai koefisien regresi variabel *good corporate governance* yang diperoleh sebesar -1.569 yang berarti setiap penurunan nilai *good corporate governance* sebesar satu satuan maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 1.569 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya nol.
c. Nilai koefisien regresi variabel *leverage* yang diperoleh sebesar -1.374 yang berarti apabila setiap penurunan nilai *leverage* sebesar satu satuan maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 1,374 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya nol
d. Nilai koefisien regresi variabel *profitabilitas* sebesar 0.001 yang berarti apabila nilai *Profitabilitas* mengalami peningkatan sebesar satu satuan maka nilai perusahaan akan bertambah sebesar 0,001 dengan asumsi nilai variabel independen lainnya nol.

Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Hipotesis uji t dilakukan untuk menunjukkan ada atau tidak adanya pengaruh suatu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t merupakan uji yang membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan spss dengan signifikan α = 0,005.

Tabel 7. Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	203.830	62.788		3.246	.003
	X1	-1.569	.947	-.349	-1.657	.108
	X2	-1.374	.657	-.498	-2.092	.045
	X3	.001	.000	.636	3.201	.003

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Berdasarkan hasil uji dari Tabel 7 diatas hasil hipotesis variabel *Good corporate governance* memperoleh nilai thitung bertanda negatif sebesar -1.657 > ttabel sebesar -2.039513 dan nilai signifiksi 0,108 > 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) ditolak yang berarti, *Good corporate governance (X1)* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). sementara hipotesis variabel *Leverage* memperoleh nilai thitung bertanda negatif sebesar -2.092 < ttabel sebesar -2.039513 dan nilai signifiksi 0,045 < 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis kedua (H2) diterima yang berarti, *leverage* (X2) berpengaruh secara neatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Y). dan hipotesis variabel *Profitabilitas* memperoleh nilai thitung bertanda positif sebesar 3.201 > ttabel sebesar 2.039513 dan nilai signifiksi 0,003 < 0,05 maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga (H3) diterima yang berarti, *profitabilitas* (X3) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan (Y).

Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat ada atau tidak adanya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat.. Pengujiaan ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F dengan melihat nilai signifikansi lebih besar dari α=0.05 maka koefisien ditolak dan jika lebih kecil dari α=0,05 maka hipotesis diterima. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dari Tabel 4.11 dibawah ini :

Tabel 8. Uji F

ANOVA[b]

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	49350.189	3	16450.063	5.388	.004[a]
Residual	94645.982	31	3053.096		
Total	143996.171	34			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Berdasrkan hasil uji F yang ditunjukkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Fhitung yang diperoleh sebesr 5.388 < Ftabel sebesar 2.901 dengan nilai signifikan yang diperoleh kecil dari nilai α yaitu sebesar 0,04 < 0,05, dengan demikian model yang digunakan untuk menguji Nilai Perusahaan adalah model yang layak, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen (*good corporate governance, leverage* dan *profitabilitas)* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji yang dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependennya yang dapat dilihat dari nilai *Adjusted R Square (R²)*. Jika *Adjusted R Square* (*R²)* semakin besar (mendektesi satu), maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.585[a]	.343	.279	55.25483

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah SPSS Versi 16.0

Berdasarkan hasil penelitian uji koefisien determinasi pada tabel diatas dapat dilihat bahwa model regresi dengan nilai koefesien determinasi *Adjusted R Square (R^2)* sebesar 0,279 atau 27,9% yang berarti sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen *good corporate governance, leverage* dan *profitabilitas* dalam menjelaskan variable dependen sebesar 27,9% sedangkan sisanya sebesar 0,721 atau 72,1% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan Hipotesis

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dari Tabel 6 diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan dan *leverage* serta *profitabilitas* memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Dibawah ini merupakan perincian dari hasil pengujian masing-masing variabel, yaitu:

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan

Good Corporate Governance (GCG) merupakan system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk para *stakeholder* (Putra, et al 2022). Berdasarkan hasil uji penelitian yang peneliti lakukan dapat di lihat dari Tabel 6 untuk variabel *good scorporate governance* menunjukkan nilai thitung yang diperoleh bertanda negatif sebesar -1.657 > ttabel sebesar -2.039513 dan nilai signifiksi 0,108 > 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh secara signifikan antara *good corporate governance (X1)* terhadap nilai perusahaan (Y). Pada penelitian ini *good corporate governance* tidak memiliki pengaruh akan kenaikan nilai perusahaan, karena *good corporate governance* yang diukur dengan menggunakan mekanisme kepemilikan institusional yang belum mampu mewujudkan penerapan *good corporate governance* sebagai pengawas perusahaan yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo,et al.(2018) dan Zamzami (2018) bahwa *good corporate governance* yang diukur dengan menggunakan mekanisme kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara sinifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Leverage terhadap nilai perusahaan

Menurut Toni (2021) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh hutang atau pihak luar dibandingkan dengan modal sendiri. Namun Penggunaan hutang terlalu tinggi dapat berdampak kepada keadaan perusahaan karna tingginya resiko yang dihadapi. Berdasarkan hasil uji penelitian yang peneliti lakukakn dapat di lihat Tabel 6 untuk *leverage* menunjukkan bahwa nilai thitung yang diperoleh bertanda negatif sebesar -2.092 < ttabel sebesar -2.03951 dan nilai signifiksi 0,45 < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh negatif signifikan antara *leverage* terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini *leverage* memiliki pengaruh akan kenaikan nilai perusahaan, karena dengan kecilnya hutang perusahaan dinilai perusahaan mampu mengelola atau membangun perusahaan tampa harus berhutang sehingga setiap penurunan hutang yang dilakukan oleh perusahaan mampu membuat peningkatan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusmaniarti, et al. (2019) dan Sari (2021) yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Menurut Putri & Putri (2022) *profitabilitas* adalah rasio yang menunjukkan kemampuaan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan tinggkat pengembaliaan laba kepada investor. Menurut teori sinyal profitabilitas yang mampu meningkatkan keuntungan perusahaan setiap tahunnya mampu memberikan sinyal positif bagi para investor yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan.

Berdasarkan hasil uji penelitian yang peneliti lakukan dapat di lihat Tabel 6 untuk

profitabilitas menunjukkan bahwa nilai thitung yang diperoleh bertanda negatif sebesar 3.201 > ttabel sebesar 2.03951 dan nilai signifiksi 0,45 < 0,05 maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara *profitabilitas* (X3) terhadap nilai perusahaan (Y). Pada penelitian ini arah yang positif menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang besar akan meningkatkan nilai perusahaan. Sehingga perusahaan mampu memberikan sinyal positif kepada investor untuk berinvestasi pada perusahaan karena peninggkatan laba yang diperoleh perusahaan sehingga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutapea, et al.(2021) dan Zamzami (2018) yang mengatakan bahwa nilai *profitabilitas* dalam mengukur profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

***Good Corporate Governance (GCG), Leverage, Profitabilitas Berpengaruh* Terhadap Nilai Perusahaan.**

Berdasrkan hasil uji F yang peneliti lakukan secara simultan oleh indikator GCG, Leverage dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan maka dapat dilihat dari Tabel 4.11 diatas bahwa nilai signifikan yang diperoleh kecil dari nilai α yaitu sebesar 0,04 < 0,05 dan niali Fhitung sebesar 5.388 dan Ftabel sebesar 2.901 yang menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *GCG, Leverage dan Profitabilitas* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damaianti (2019) dan Hasna (2014) yang menunjukkan secara simultan *GCG, leverage dan profitabilitas* berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan uraian dan hasil analisis pada penjelasan sebelumnya dan merujuk pada topik pembahasan mengenai pengaruh pengaruh *good corporate governance (gcg), leverage, profitabilitas,* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan bumn yang melakukan penambahan saham beredar yang dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Good corporate governance* secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kenaikan *good corporate governance* tidak berdampak terhadap besar kecilnya penurunan nilai perusahaan.
2. *Leverage* secara pasial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penurunan *leverage* dapat mempengaruhi besar kecilnya kenaikan pada nilai perusahaan.
3. *Profitabilitas* secara pasial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kenaikan *profitabilitas* dapat mempengaruhi besar kecilnya kenaikan pada nilai perusahaan.
4. Sementara secara simultan *good corporate governance, leverage* dan *profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel penelitian untuk memperoleh hasil yang optimal, melakukan perhitungan nilai gcg menggunakan gcg score dan nilai perusahaan menggunakan Tobin’s Q. Dapat menambah alat ukur yang digunakan untuk menguji gcg, leverage dan profitabilitas sehingga dapat berpengaruh lebih besar terhadap nilai perusahaan. Dan untuk Investor diharapkan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan disarankan investor dapat melakukan analisis dan melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan perusahaan mana yang akan investor pilih untuk membeli sahamnya, karna setiap investor ingin peningkatan kinerja yang terjadi pada perusahaan dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan keuntungan untuk para pemegang saham.

DAFTAR PUSTAKA

Damaianti, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas dan Leverage terhadap nilai perusahaan. *Jurnal Ekonomi*, 2.

Gosal, M., Pangemanan, S., & Tielung , M. (2018). The Influence of Good Corporate Governance on Firm Value: Empirical Study of Companies Listed in Idx30 Index Within 2013-2017 Period. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6*, 4.

Hasna , F. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2.

Indrarini, S. (2019). *Nilai Perusahaan Melalui Kualitas Laba (Good Governance dan Kebijakan Perusahaan).* Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Ningrum, E. P. (2022). *Nilai Perusahaan.* (Kodri, Ed.) Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.

Nugraha, A. G., Maulid, T., Falah, S., & Pangayouw, B. J. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Good Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah, 17*, 1.

Putra, I. G., Manuari, I. A., & Puspayanti, N. K. (2022). Pengaruh Corporate Governace Terhadap Profitabilitas Dan Nilai Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi, 21*, 1.

Putri, B. D., & Putri, E. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4*, 10.

Rifkhan. (2023). *Pedoman Metodologi Penelitian Data Panel dan Kuesioner.* Jawa Barat: Penerbit Adab.

Sarafina, S., & Saifi, M. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan (Studi kasus pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 50*, 3.

Susanti, A., Wafirotin, K. Z., & Hartono, A. (2019, April). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi, 3*, 1.

Susilo, A., Sulastri, & Isnurhadi. (2018). Good Corporate Governance(GCG), Risiko Bisnis dan kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Analisis Bisnis ekonomi, 16*, 1.

Toni, D., Simorangkir, E. N., & Kasasih, H. (2021). *Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Perusahaan.* (Abdul, Ed.) Indramayu: Penerbit Adab.

Trisnawati, N. L. (2021). *Enterprise Risk Management Disclosure: Siklus Hidup Perusahaan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan.* Jawa Barat: Nilacakra.

Yohendra, C. L., & Susanty, M. (2019). Tata Kelola Perusahaan Dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, 21*, 1.

Yusmaniarti, Setiorini, H., & Pitaloka, L. (2019, Desember). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, 3*, 4.

Zamzami. (2018). Pengaruh Good corporate Governance (GCG) dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Pada BUMN yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia priode 2012-2016 . *Skripsi*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh *Leverage* Pada *Tax Avoidance*

Irma Indira[1], Latifatun Nisa[2],Achmad Farid Dedyansyah[3], Agustinus Salukh[4], Guruh Marhaenis Handoko Putro[5]
[1]**Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan** – indirairma99@gmail.co.id
[2]**Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan** – latifatnns@gmail.com
[3]**Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan** -*fariddedyansyah@ahmaddahlan.ac.id*
[4]**Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan** – *Muhammad.agussalukh@gmail.com*
[5]**Universitas Muhammadiyah Lamongan** – *guruhmhp@umla.ac.id*

Abstrak— *Tax is the largest source of revenue for the state which is used to finance state development, build infrastructure, finance government, finance health and education facilities and is used for the welfare of its people. This study aims to determine the effect of Leverage on Tax Avoidance with firm size as a moderating variable. The samples obtained were 75 sample data from 25 goods and consumption companies during 2019-2022 which were selected using the purposive sampling method. Data analysis techniques used descriptive statistical tests, classic assumption tests (normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test), multiple linear regression tests, Moderated Regression Analysis (MRA) test, and hypothesis testing (t test, Coefficient of determination test) with SPSS application program version 25.The results of this study indicate that, Leverage has an effect on Tax avoidance, company size has an effect on tax avoidance and the results show that company size is able to moderate leverage.*

Keywords — Leverage, Tax Avoidance, Company Size

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan bagian utama untuk menunjang pemasukan Negara. Pemerintahan memanfaatkan pajak sebagai pusat pengeluaran Negara yang utama di APBN. Penerimaan pajak di tiap tahun diharapkan dapat meningkat. Pembiayaan pajak adalah bentuk dari kewajiban serta peran untuk secara bersama-sama maupun langsung melaksanakan wajib pajak guna pembiayaan begara serta pembangunan nasional. Pembiayaan pajak tidak hanya wajib namun menjadi hak warga di Indonesia dalam turut serta untuk pembiayaan maupun pembangunan secara nasional. Pembiayaaan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah sebagian banyak diperoleh pada penerimaan pajak sedangkan wajib pajak perupaya dalam pembayaran pajak yang bernilai kecil hal ini dikarenakan pembiayaan pajak mampu mengurangi kapabilitas secara ekonomi dalam kewajiban pajak. Perbedaan utama wajib pajak serta pemerintah terletak pada dimana wajib pajak condong berupaya dalam mengurangi total pembiayaan pajaknya baik secara hukum maupun diluar hukum (Levina & Hananto, 2017).

Cara memperlihatkan Negara yang mandiri yakni dengan mencari pembiayaan yang berasal dari pajak (Rima Masrurroch et al., 2021). *Tax Avoidance* diartikan sebagai penanggulangan yang dilaksanakan perseroan dalam meminimalisir pembiayaan pajak (Indriani & Juniarti, 2020). Tax Avoidance adalah cara dalam memperkecil pembiayaan pajak dengan memanfaatkan peraturan yang sedang berlaku. Disatu sisi tax avoidance diizinkan secara legal selama tidak melanggar Undang-undang namun dilain sisi tax avoidance juga menjadi hal yang tidak diinginkan, hal ini disebabkan bisa menjadikan penerimaan Negara menjadi rugi dikarenakan banyak tujuan dilaksanakan dalam tax avoidance pada perseroan maka pembiayaan yang tadinya dimanfaatkan dalam pembiayaan pajak perseroan menjadi dialihkan untuk hutang lainnya (Dharma & Ardiana, 2015). Penerimaan pajak diIndonesia masih berada dibawah apa yang ditargetkan APBN yang disasar pemerintah cukup tinggi serta total yang dapat direalisasikan dalam pemasukan pajak dikatakan tidak stabil hal ini menjadikan realisasi pemasukan pajak lebih rendah dari yang dinginkan. Tabel berikut merupakan data realisasi serta target pemasukan pajak dalam triliun di tathun 2019-2022.

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2019	2020	2021	2022
Target (*dalam Triliun rupiah*)	1.577,58	1.198,82	1.229,60	1,784
Realisasi (*dalam Triliun rupiah*)	1.332,06	1.069,98	1.231,87	2,034.5
Capaian	84,44%	89,25%	100,19%	114%

Sumber: https://pajak.go.id/id/tahunan

Gambar 1.diatas menginformasikan bahwa pemasukan pajak dari 2019-2022 tidak sesuai dengan taget yang diharapkan meski persentase menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, jika di lihat pemasukan pajak menunujukkan fluktuasi selama 4 tahun terakhir , pada tabel diatas ditunjukkan jika ditahun 2020 negara mengalami realisasi paling rendah jika dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Pemasukan pajak menjadi penting dikarenakan dimanfaatkan Negara sebagai pengoptimalan kemakmuran maupun pembangunan. Jika pajak yang ditargetkan tidak tercapai maka hal ini menjadi penghambat pembangunan secara nasional. Adanya fenomena tersebut penting untuk dilakukan pengkajian maupun penelitian faktor yang menjadikan adanya *Tax Avoidance.* Kebijakan pendanaan menjadi kebujakan dari dua kebijakan penting dari manajemen keuangan yaitu kebijakan dengan pemasukan dari dalam perseroan serta pemasukan diluar perseroan yang bertujuan mengedepankan pemasukan yang diperlukan perseroan dengan melakukan cara yang paling membuat perseroan laba dengan tujuan menjadikan nilai perseroan meningkat.

Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *laverage*, *laverage ratio* yakni perhitungan seberapa banyak pemanfaatan utang guna pembiayaan dalam perseroan (Sudana, 2015) Terdapat sebagian rasio guna mengukur tingkat hutang suatu perusahaan salah satunya *DER* yang merupakan perhitungan utang pada modal (Ramadhani, 2020). Dalam menentukan siap maupun tidak siapnya perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva atau aset, firm size merupakan besar kecilnya suatu perseroan yang digambarkan dengan keseluruhan aset maupun keseluruhan bersih dari penjualan (Hery, 2016). Brigham & Houston, (2017) menyatakan bahwa dalam menentukan skala besar maupun kecilnya perseroan yang bersala dari keseluruhan penjualan, aset hingga rerata tingkat penjualan.

Aset suatu perseroan yang besar maka menunjukkan pendanaan yang dilakukan penahanan. Ukuran perusahaan dibuktikan dengan seberapa besar aset maupun harta perseroan dengan memanfaatkn pengukuran nilai logaritma dari keseluruhan aktiva (Hartono, 2015). Keselurhan aset yang semakin tinggi memperlihatkan jika perseroan mempunyai peluang baik dalam waktu yang cukup panjang, hal ini menunjukkan jika perseroan akan lebih stabil serta dapat memperoleh keuntungan jika dibandingkan dengan keseluruhan aset yang kecil. Untuk mengetahui besar maupun kecilnya suatu perseroan salah satunya dapat ditinjau berdasarkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang bisa diklasifikasikan besar maupun kecil perseroan berdasarkan beberapa cara seperti size, keseluruhan asset, log, kapitalisasi pasar dan penjualan (Sari, 2016).

Pada penelitian sebelumnya terdapat penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda seperti penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih et al., (2019), Rachmitasari, (2015), Oktamawati, (2017), Ardianti, (2019), (Widiayani et al., (2019) menyatakan bahwa *laverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2017), Arianandini & Ramantha, (2018), Darmawan & Sukartha, (2014), (Desediria, 2022) menyatakan bahwa *laverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Triyanti et al., (2020), Rosa et al., (2022), (Alfina et al., (2018), menyatakan bahwa ukuran perushaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun penelitian oleh Agustia & Suryani, (2018), Sembiring & Sa'adah, (2021), Oktamawati, (2017), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hutapea & Herawaty, (2020), Ananto, (2021), Dharma & Ardiana, (2015) menunjukkan ukuran perusahaan dapat memoderasi hubungan antara *laverage* dengan *tax avoidance*. Namun penelitian oleh Faizah, (2021), (Hermanto & Puspita, (2022), Nanningsih & Dewi, (2023), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi korelasi *laverage* terdahap *tax avoidance*. Alasan diadakan penelitian ini karena terdapat permasalan mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di

setiap tahunnya tidak sama dengan apa yang ditargetkan pemerintah. Perseroan sektor barang dan konsumsi pada tahun yang diteliti merupakan perseroan yang mampu bertahan dari diberlakukannya PSBB. Sektor barang dan konsumsi merupakan salah satu satu sektor yang menopang kinerja manufaktur nasional selama terjadinya PSBB.

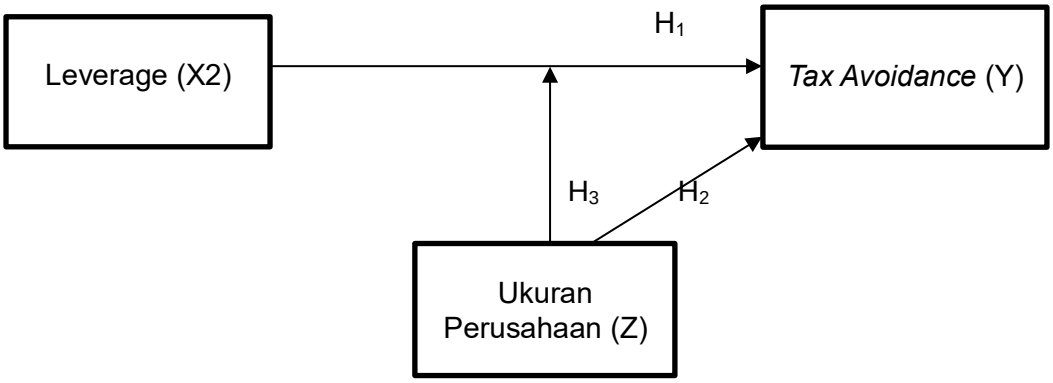
agency theory diartikan sebagai mandat hak dari seseorang pada agent yang diberikan hak dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis. Dimana pemerintah merupakan agent dalam melaksanakan jasa atas principal serta pemberian kewenanagan pada agent untuk keputusan prinsipal (Sunarsih et al., 2019)**.** Agen mampu mencurangi pelaporan yang berkaitan dengan perseroan dalam penyampaian pada pemilik, hal ini disebabkan tiap manajer memiliki keperluan ekonomi yang tinggi, hal ini termasuk mengoptimalkan kompensasi dengan melaksanakan praktik pengaturan laba. Agency theory adalah korelasi kontraktual pemilik maupun agen (Supriyono, 2018). Korelasi ini dilaksanakan guna jasa dimana yang memberikan wewenang pada agen berkaitan dengan pembuat keputusan yang bagik untuk principal dengan mengutamakan keperluan dalam pemaksimalan keuntungan perseroan sehingga beban akan dapat diminimalisisr termasuk bean pembayaran pajak yang memanfaatkan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan merupakan besar maupun kecilnya perseroan mampu dikatakan sebagai keseluruhan *asset* maupun keseluruhan pendapatan bersih (Hery, 2017). Menyatakan bahwa dalam menentukan skala perseroan baik kecil maupun besar berdasarkan dari keseluruhan *asset*, pendapatan maupun penjualan (Brigham & Houston, 2017). Asset perusahaan yang besar menunjukkan semakin besar modal yang ditahan. Ukuran perusahaan yakni perhitungan yang dikelompokkan berasar besar maupun kecilnya perseroan serta mampu mencerminkan kegiatan maupun laba perseroan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan semakin besar upaya yang perseroan lakukan guna menarik investor (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Laverage *ratio* adalah pengukuran seberapa besar perseroan memanfaatkan hutang pada pembelanjaan perseroan (Sudana, 2015). Rasio *leverage* dimanfaatkan untuk menghitung besarnya perseroan telah dibiayai utang (Fahmi I, 2015). Rasio ini menghitung sejauh apa asset perseroan yang dibiayai utang yang berarti bayaknya utang yang menjadi tanggungan perseroan dengan membandingkan dengan modal serta pengukuran kapabilitas perseroan menyelesaikan kewajiban jangka pendek dan panjang. *Laverage* dapat diartikan sebagai taksiran resiko yang melekat pada perseroan dimana besarnya *leverage* memperlihatkan resiko dalam menanamkan modal juga semakin tinggi. Perusahaan dengan *leverage* yang kecil maka dampaknya juga kecil (Ernawati dan Widyawati, 2015). Tingginya rasio *laverage* membuktikan jika perseroan memiliki modal yang dapat memenuhi keseluruhan hutang artinya besarnya keseluruhan hutang sebanding dengan modalnya.

Tax avoidance merupakan upaya legal dalam pengurangan yang dilaksanakan berdasakan ketentuan perpajakan secara maksimal seperti pengecualian maupun pemotongan yang diperbolehkan maupun manfaat yang belum diatur serta kelemahan dalam peraturan pajak yang diberlakukan, (Jasmine, 2017). *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilaksanakan secara sah serta aman bagi pembayar pajak dikarenakan tidak terdapat pertentangan dengan ketentuan pajak yang mana metode serta teknik yang dimanfaatkan cenderung menggunakan kelemahan yang diperoleh dalan perundangan pajak untuk meminimalisisr keseluruhan pajak yang dihutang.

Kerangka konseptual penelitian merujuk pada hubungan atau interaksi antara berbagai konsep yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki (Sugiyono, 2018). Kerangka konsep ini berfungsi untuk secara rinci menjelaskan atau mengaitkan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian. Penyusunan kerangka ini didasarkan pada konsep ilmiah atau teori yang menjadi dasar penelitian, yang ditemukan melalui tinjauan pustaka. Secara spesifik, kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini fokus pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sektor barang dan konsumsi ini ditempatkan sebagai sektor kelima dengan kode JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification) di Bursa Efek Indonesia dan dianggap sebagai sektor yang signifikan karena mencakup kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif.

Populasi yang menjadi fokus penelitian mencakup semua perusahaan yang beroperasi dalam sektor barang dan konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2022. Penggunaan teknik purposive sampling digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil pengambilan sampel mencakup 25 perusahaan.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui metode dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu teknik yang diterapkan untuk menggali data dan informasi dalam bentuk buku, dokumen, arsip, gambar, dan tulisan angka seperti laporan, serta keterangan yang mendukung proses penelitian (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengakses data tertulis, seperti laporan keuangan perusahaan manufaktur yang beroperasi dalam sektor barang dan konsumsi dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs http://www.idx.co.id.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji ststistik deskriptif, uji asusmsi klasik, uji regresi linier berganda, uji regresi moderasi, uji hopitesis dan uji koefisien determinasi. Model analisis regresi linier berganda yang digunakan adalah sebabagai berikut:

$$\boldsymbol{Y = \alpha + \beta_1 X1 + \beta_2 Z + \beta_3 X1 * Z + e}$$

Keterangan:

Y	= *Tax Avoidance*
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi linier berganda
X_1	= *Laverage* (DER)
Z	= Ukuran Perusahaan
e	= *Standar Error*

Effective Tax Rate (ETR) adalah rasio persentase tarif yang efektif digunakan untuk mengkomputasi pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif, semakin kecil pula beban pajak yang dibebankan pada wajib pajak, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak (Rima Masrurroch et al., 2021).

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan metode perbandingan yang digunakan untuk memproyeksikan proporsi jumlah hutang terhadap modal suatu entitas (Hery, 2017).

Ukuran perusahaan mencerminkan dimensi entitas tersebut, yang dapat diukur dengan total aset atau total penjualan bersih (Hery, 2017).

Tabel 2 Tabel Oprasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Proksi
Tax avoidance (Y)	ETR= $\frac{Total\ beban\ pajak\ pengahasilan}{Laba\ setelah\ pajak}$
Laverage (X1)	DER = Total Hutang/Total Ekuitas
Ukuran Perusahaan (Z)	*Size* = *Log* (Total Aset)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

	Asymp.sig.(2-tailed	Keterangan
Residual	0,200	Normal

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 diatas. Hasil uji normalitas diperoleh besarnya *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 > 0,05 yang artinya data terdistribusi dengan normal atau memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multitikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Laverage (DER)	0,600	1,667	Tidak terjadi multikolineritas
Ukuran Perusahaan (*Size*)	0,698	1,432	

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 uji multikolineritas diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0.1 dan nilai VIF <10 yang berarti tidak terjadi korelasi antara variabel independen, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terbebas dari multikolineritas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5 Hasil Uji Autokorelasi

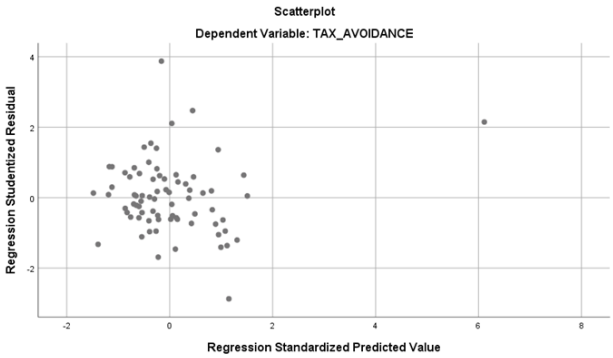
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimated	Durbin Watson
0.416	0.173	0.138	0.033547	1.249

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 5 diatas dapat diketahui bahwa angka *Durbin Watson* diantara -2 sampai +2 yaitu sebesar 1.249. maka sebagaimana dari dasar pengambilan keputusan uji durbin Watson dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen sehingga model regresi layak digunakan

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar Scatterplot diatas, terlihat bahwa plot atau titik-titik menyebar secara acak diatas maupun dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y serta tidak membentuk pola-pola tertentu, maka dapat disimpulkan dalam model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap data yang diuji

***Moderated Regression Analysis* (MRA)**

Tabel 6 Hasil *Moderated Regression Analysis*

Model	Unstandardized coefficient		sig	Keterangan
	B	Std. Error		
Constant	0.324	0.138	0.033	
Laverage (DER)	7.499	0.021	0.000	Berpengaruh
Ukuran Perusahaan (Size)	4.313	0.002	0.010	Berpengaruh
Moderasi (X_1*Z)	5.041	0.001	0.021	Berpengaruh
a. Dependent Vriabel: Tax Avoidance				

Sumber: output SPSS25

Berdasarkan tabel 6 perhitungan yang didapatkan nilai koefisien regresi *Laverage* (X_1) sebesar 7.499, nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (Z) sebesar 4.313, nilai koefisien regresi moderasi 1 (X_1*Z) sebesar 5.041.

$$Y= \alpha+ \beta_1 X_1+ \beta 2 Z+ \beta_3 X_1*Z +e$$
$$Y = 0.324 + 7.449 X_1 + 4.313 Z +5.041 X_1*Z+e$$

Koefisien regresi untuk variabel Laverage (X1) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 7,499 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel Laverage akan menyebabkan peningkatan sebesar 7,499 pada variabel tax avoidance. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Laverage memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Peningkatan nilai rasio Leverage mengindikasikan peningkatan pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan, sehingga biaya bunga yang muncul dari utang tersebut juga meningkat. Biaya bunga yang lebih tinggi cenderung mengurangi beban pajak perusahaan, mengakibatkan penurunan nilai Effective Tax Rate (ETR) perusahaan. Koefisien regresi untuk variabel ukuran perusahaan (Z) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 4,313 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel ukuran perusahaan akan menyebabkan peningkatan sebesar 4,313 pada variabel tax avoidance. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,010 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Perusahaan berukuran besar memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan

pajak (tax planning) yang dapat mengoptimalkan penghematan pajak. Koefisien regresi untuk variabel Laverage (X1) yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan (X2*Z) terhadap tax avoidance (Y) sebesar 5,041 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada variabel Return on Equity yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,001 pada variabel tax avoidance. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa Laverage yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini disebabkan oleh korelasi ukuran perusahaan dengan besarnya hutang yang dimiliki, dimana perusahaan yang lebih besar cenderung lebih memilih pendanaan melalui utang menggunakan sumber daya operasionalnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error the Estimated
0.416[a]	0.953	0.945	0.033547

Sumber: output SPSS25

Berdasarkan analisis koefisien determinasi pada tabel 3.7, ditemukan bahwa nilai adjusted R square (adjusted R^2) mencapai 0,945 atau 94,5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan dalam menjelaskan variasi variabel tax avoidance mencapai 94,5% oleh pengaruh variabel dependen dan variabel interaksi moderasi. Sementara itu, 5,5% sisanya diatribusikan kepada faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam kerangka penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai moderasi Ukuran Perusahaan terhadap pengaruh Laverage terhadap Tax Avoidance, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laverage memiliki dampak signifikan terhadap Tax Avoidance, mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah pendanaan dari utang dapat meningkatkan biaya bunga yang timbul dari utang, sehingga memengaruhi tingkat Tax Avoidance suatu perusahaan.
2. Ukuran perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tax Avoidance, menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan strategi perencanaan pajak yang dapat mengoptimalkan penghematan pajak.
3. Ukuran perusahaan memiliki peran dalam memoderasi pengaruh Laverage terhadap Tax Avoidance. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Laverage terhadap Tax Avoidance dapat berbeda-beda tergantung pada ukuran perusahaan, menambah pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian dan keterbatasanyang ditemui, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan manufaktur di sektor barang dan konsumsi, disarankan untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan laba dan aset yang dimiliki. Keputusan yang bijak dapat mencegah tindakan Tax Avoidance, yang tidak hanya dapat merugikan negara namun juga berpotensi merusak reputasi perusahaan di mata publik.
2. Bagi pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, diharapkan untuk mempublikasikan laporan pembayaran pajak perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan tindakan tax avoidance dan membantu dalam mendeteksi celah-celah peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Perhatian terus menerus terhadap potensi celah dalam peraturan juga diharapkan agar dapat meningkatkan efektivitas dan perbaikan peraturan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Y. P., & Suryani, E. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, *10*(1), 63–74. Https://Doi.Org/10.17509/Jaset.V10i1.12571

Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence Of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, And Company Size To Tax Avoidance. *International Conference On Technology, Education, And Social Science*.

Ananto, M. R. (2021). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Varibel Moderasi. *Skripsi.* Yogyakarta: Program Studi Akuntansi Universitas Islam Yogyakarta.

Ardianti, H. P. N. (2019). Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *26*(3), 2020–2040. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P13

Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, *22*(3), 2088–2116. Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2018.V22.I03.P17.

Brigham, & Houston. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* (11th Ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *9*(1), 143–161.

Desediria, M. (2022). *Pengaruh Profitabilitas Dan Leveerage Terdahap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia)*.

Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2015). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *15*(1), 584–613.

Ernawati, D., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4*(4).

Fahmi I. (2015). *Analisi Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Faizah, K. (2021). Corporate Governance, Profitabilitas, Laverage Dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 15–26. Https://Doi.Org/10.55587/Jseb.V2i1.31.

Handayani, R. (2017). Pengaruh Return On Assets (Roa), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidancepada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntasi Maranatha*, *10*(1), 72–84.

Hartono, J. (2015). *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi* (Kelima). Jakarta: Rajawali Pers.

Hermanto, & Puspita, I. (2022). Pengaruh perputaran Persediaan, Capital Intensity, Dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(5).

Hery. (2016). *Akuntansi Dasar 1 & 2 Edisi National Best Seller*. Jakarta: Pt. Grasindo.

Hery.(2017).*Analisis Laporan Keuangan (Intergrated And Comprehensive Edition)*. Jakarta: Grasindo.

Hutapea, I. V. R., & Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Profitablitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016–2018). *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 3*, *3*(2).

Indriani, Mi. D., & Juniarti. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.

Jasmine, U. (2017). Pengaruh Leverage, Kepelimikan Institusonal, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014). *Jom Fekon*, *4*(1).

Levina, T., & Hananto, H. (2017). Strategi Perencanaan Dan Perhitungan Pajak Dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terutang Pada Pt. Jasa Konstruksi “X” Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, *6*(2).

Nanningsih, D., & Dewi, S. R. (2023). The Effect Of Sales Growth, Leverage, And Profitability On Tax Avoidance With Company Size As Moderating Variable. *Academia Open*, *8*. Https://Doi.Org/10.21070/Acopen.8.2023.3779.

Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, *15*(1), 2541–5204.

Rachmitasari, A. F. (2015). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).

Ramadhani, N. (2020, October). *Debt To Equity Ratio: Pengertian, Rumus Dan Beberapa Aturannya!* Https://Www.Akseleran.Co.Id/Blog/Der-Adalah/.

Rima Masrurroch, L., Nurlaela, S., & Nikmatul Fajri, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance. *Inovasi*, *17*(1), 82–93. Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi.

Rosa, N. C. S., Kaidun, I. P., & Lingga, I. S. (2022). Pengaruh Firm Size, Return On Equity, Dan Current Ratio Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *14*(1), 172–186. Http://Journal.Maranatha.

Sari, A. N. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Aset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, *5*(4).

Sembiring, S. S., & Sa'adah, L. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, *14*(2).

Sudana, I. M. (2015). *Manajemen Keuangan Perusahaan* (Edisi Kedua). Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bekasi: Alfabeta.

Sunarsih, S., Haryono, S., & Yahya, F. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016). *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *13*(1), 127–148. Https://Doi.Org/10.18326/Infsl3.V13i1.127-148.

Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Gajah Mada University Press.

Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *20*(1), 113. Https://Doi.Org/10.33087/Jiubj.V20i1.850.

Widiayani, N. P. A., Sunarsih, N. M., & Dewi, N. P. S. (2019). *Pengaruh Leverage, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*.

Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian Dan Perdagangan Di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Nonni Yap[1], Andy Chandra Pramana[2], Duwi Riningsih[3], Bima Fatkul Khusna A[4],Eka Agustina[5]
Universitas Kadiri - [1]*nonni_yap@unik-kediri.ac.id*
[2]*andychandra@unik-kediri.ac.id*
[3]*dwi_riningsih@unik-kediri.ac.id*
[4]*jumintenminten350@gmail.com*
[5]*ekaagustina24.co.id@gmail.com*

Abstrak— *Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi asset dan kewajiban. Kualitas Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang berdasarkan pada kuesioner kualitas laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Subjek penelitian dan lokasi penelitian adalah pegawai PNS, SKPD, PAKD selaku pengelola laporan keuangan dan pengumpulan data dilakukan dengan teknikobservasi dan kuesioner.*

Keywords: Akuntansi Berbasis Akrual, Kualitas Laporan Keuangan,

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah, dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Berkembangnya organisasi pemerintah di Indonesia baik dialami oleh pemerintah pusat maupun daerah, maka akan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik. Terdiri dari dua unsur pokok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas. Adanya transparan dan akuntabilitas ini dibutuhkan suatu pengembangan kebijakan akuntansi berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat mewujudkan laporan keuangan yang baik. Pengembangan kebijakan akuntansi SAP diharapkan dapat memberikan pedoman pokok dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah (Setiawan, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 mengenai akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan (Ayu, 2020). Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberikan manfat bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Permana, I Ghe Yoga & Widnyani, 2020). Adanya SAP dapat

mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Selain pengawasan keuangan juga diperlukan dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik, pengawasan keuangan pada dasarnya dikoordinasikan secara penuh untuk menghindari terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan diharapkan dapat membantu menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan akan terciptanya kegiatan yang berkaitan dengan menentukan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kerja yang terjadi (Hayadi,

2019). Oleh karena itu pengawasan keuangan daerah juga penting dilakukan agar dapat meningkatkan nilai informasi yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dalam penggunaan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana dan tertib pada pertanggungjawabannya (Rifandi, 2018).

Laporan keuangan merupakan media sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik pemerintas harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualiats.Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) dijelaskan bahawa laporan keuangan berkualtas itu memenuhi karakteristik relavan,andal,dapat di bandingkan dan dpat di pahami (PP No Tahun 2010).seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Pemerintah diwajibkan menggunakan sisitem akuntansi berbasis akrual, perubahan laporan keuangan dari basis ke basis akrual memang menjadi tantangan bagi Pemerintah daerah untuk dapat menyelesaikan laporan keuangan agar dapat memberikan informasi-informasi yang di butuhkan bagi para penggunanya untuk itu pemerintah daerah.Kabupaten Gresik sudah menerapkan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Fery Taufik dari Kementrian Dirjen Perbendaharaan Direktorat Akuntansi menyatakan bahwa hambatan yang akan dialami adalah sulitnya pola pokir staf atau pejabat pengelola keuangan, kerumitan, dan beragamnya transaksi keuangan yang dicatat secara akrual, jumlah tenaga pelatih di pemerintahan yang mampu mendidik akuntansi akrual terbatas serta membutuhkan waktu dan usaha yang besar untuk mengembangkan sistem yang handal.

Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menerapkan sistem berbasis akrual, Pemkab Gresik menggelar bimbingan dan Lokakarya Pengembangan Teknologi informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sehingga Pemkab Gresik dapat mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual disamping itu pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual dan cara pengimputan data berbais akrual pada Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD).

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa opini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan 4 macam opini yaitu: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau Tidak Memberi Pendapat (Disclaimer atau TMP). Ketika Badan pemeriksa memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian Kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dibandingkan.

Beberapa tahun terakhir telah terlihat dopsi signifikan berbasis akrual oleh beberapa perusahaan sector publik di negara-negara berkembang termasuk dengan disetujuinnya PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengamanatkan organisasi sektor public baik pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (putra & Varina, 2021).Organisasi sektor publik di indonesi secra formal menganut akuntansi akrual sejak 1 januari 2015 sebagai organisasi sektor publik yang menjadi fasiliatator juga harus menerapkan basis akrual pada kualitas laporan keuangannnya

Namun, beberapa literatul akdemik berpendapat bahwa jika akuntansi akrual dimasukkan dalam laporan keuangan sektor publik, diperlukan penelitian lebih lanjut. Apakah sistem akrual benar-benar sesuai untuk perusahaan sektor publik menjadi dasar kesepakatan, persyaratan pendaftaran akun khusus untuk organisasi sektor public yang tidak berlaku untuk organisasi sektor swasta (misalnnya asset bersejarah/warisan,infrastuktur asset,dana modal,dll)hal ini dapat

menunjukkan bahwa pandangan dasar akuntansi akrual sebagai solusi yang terbukti dengan sendirinya dan praktis untuk perusahaan sektor public berdasarkan sasumsi yang terlalu mendasar dari fitur yang sama dengan factor swasta (Kawedar,2017). Ada beberpa pihak yang terlibat, sehingga jika penerapan akuntansi sektor public menimbulkan ambiguitas teknis .

Permendagri No. 59 Tahun 2007 menyatakan bahwa diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang merupakan pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban APBD mulai dari proses pendataan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Apabila sistem akuntansi tidak diterapkan dengan baik, maka penyusunan laporan keuangan akan terhambat sebagaimana tersebut di atas, sehingga diperlukan penerapan sistem

akuntansi yang baru yaitu penerapan sistem akuntansi akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan hal-hal lain pada saat itu. transaksi dan peristiwa, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima (Nyoman Triyadi. Rasmini, 2016).

Selain itu, system pengendalian intern pemerintah juga merupakan system yang mempengaruhinkualitas pelaporan keuangan. Bukti di bidang ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah menempati urutan teratas dalam daftar audit yang dilakukan oleh BPK dan lainnya. BPK sebagai auditor eksternal selalu menguji keandalan sistem pengendalian intern ini dalam setiap pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana pengujiaan nya yang akan di lakukan. Lemahanya sistem pengendalian internal pemerintah yang memberikan peluang besar terjadinnya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD), menuai banyak kritik dari regulator.

Reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik, ditandai dengan adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi, kepada entitas penyelenggara pemerintahan termasuk di lingkungan pemerintah daerah. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi tersebut, dapat terpenuhi salah satunya melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wadah bagi pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah. Ketersediaan informasi keuangan yang berkualitas dalam LKPD akan memudahkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat dan selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, sebab tingkat kualitas informasi yang terkandung akan mempengaruhi kekuatan keputusan yang diambil (Afiah et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut kualitas informasi dari laporan keuangan yang disajikan, merupakan hal mendasar yang sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah. Namun, tatkala laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas atau bermutu menjadi harapan bagi berbagai pihak yang bersangkutan, harapan tersebut pun tidak selalu dapat terpenuhi, oleh sebab adanya permasalahan atau penyimpangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Mengacu pada hal tersebut, fenomena kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu yang menarik untuk digali lebih dalam.

Instansi pemerintahan wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan sistem pelaporan keuangan yang tepat, jelas, dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya reformasi dan pengembangan diperlukan khususnya di bidang akuntansi pemerintahan, yang berkesinambungan sehingga terbentuk suatu sistem yang tepat. Perubahan yang signifikan dalam reformasi di bidang keuangan negara adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintahannya, yaitu dengan melakukan pembenahan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 (PP No. 24 tahun 2005) tentang SAP berbasis Cash Toward Accrual (SAP CTA) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan segala tanggung jawabnya tidak terlepas dari adanya peran besar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kompetensi ialah karakter fundamental individu yang berhubungan dengan efektivitas pencapaian kesuksesan kerja, yang dapat direpresentasikan dalam wujud tindakan, perilaku, serta pikiran dalam suatu pekerjaan atau situasi (Afiah et al., 2020; Sari & Ariawaty, 2019). Menurut Muda et al. (2017) kompetensi sumber daya manusia ialah kemampuan yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan
kepadanya dengan berbekal pengetahuan, keterampilan serta pengalaman yang cukup memadai. Sehubungan dengan pengertian tersebut, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi

khususnya di bidang akuntansi, sangat diperlukan untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas (Fitriana & Wahyudin, 2017). Penelitian mengenai keterkaitan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sudah beberapa kali dilaksanakan dan memperoleh hasil yang beragam. Beberapa di antaranya yakni Sumaryati et al. (2020) dan Ariyanto (2020) yang memperoleh hasil kompetensi sumber daya manusia memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Wijayanti & Handayani (2017) menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak memberikan pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tujuan diberlakukan SAP CTA adalah untuk menjembatani pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan berbasis akrual. Menurut Widyastuti (2015) Akuntansi berbasis akrual adalah salah satu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan aliran masuk atau keluar dari kas sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya yang dicatat. Tujuan umum laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik adalah menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Arus Kas, Hasil Operasi, dan Perubahan Ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna (stakeholder) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Permasalahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan masih banyak ditemukan ketidak beresan, ketidak teraturan dan ketidak benaran, dan bahkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan termasuk banyak aset yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar dalam laporan keuangan yang berimplikasi pada opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik"** untuk mengetahui penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang tidak wajar dan dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti pemula lainnya untuk melakukan penelitian.

Kualitas Laporan Keuangan merupakan persyaratan normative yang dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik laporan keuangan yang terdapat dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Komponen laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 memiliki perbedaan dengan PP No. 24 Tahun 2005 berikut perbedaan nya :

Tabel 1.1
Komponen laporan keuangan

PP No. 24 Tahun 2005	PP No. 71 Tahun 2010
Komponen Laporan Keuangan Pokok : Neraca Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan	Komponen Laporan Keuangan Pokok : Laporan Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Kinerja Keuangan

	Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Neraca Laporan Operasional Laporan Arus Kas Laporan Perubahan Ekuitas Catatan Atas Laporan Keuangan

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010

Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kualitas

yang dihendaki yaitu :

1. Relavan (Memiliki umpan balik, tepat waktu, lengkap)
2. Andal (Penyajian yang jujur, dapat diverifikasi, netral)
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dalam akuntansi secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercaya dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi yang sebenarnya, oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Widjajarso (2008) menjelaskan beberapa alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu :

1. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti informasi tentang hutang piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
2. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
3. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, SAP berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Menurut hasil pemikiran dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam penerapan SAP berbasis Akrual, yaitu :

1. Regulasi
2. Sistem dan Sarana Pendukung
3. Sumber Daya Manusia

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada menganalisis bagian program dan keuangan yang berdasarkan peraturan daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pembuat laporan keuangan.

Lokasi Penelitian di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Jln. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 245 Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik dan waktu penelitian akan dilakukan kurang lebih selama 2 bulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berdasarkan pada teknik observasi, wawancara, dan kuesioner data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil objek penelitian. Sedangkan Data sekunder merupakan data dari dokumen objek penelitian berupa laporan tertulis yang dibuat secara berkala. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi
   Observasi adalah pengumpulan data secara langsung ke lokasi penelitian.
2. Wawancara
   Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan dengan pihak pegawai bidang keuangan dalam lingkup Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan
3. Dokumentasi
   Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, catatan, dan menganalisis dokumen tentang penelitian secara langsung.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana.

Dalam persamaan regresinya dapat ditunjukkan sebagai berikut (Ghozali, 2006):

$Y = a + bx + e$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b1 = Koefisien Regresi/Slop (Standar Akuntansi Pemerintahan)

a = Konstanta

e = Nilai Standar error

2. Teknik Analisis Data

a. Uji Kualitas Data
   Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat keandalan (reliability) dan tingkat kebenaran/keabsahan (validity) yang tinggi.

b. Uji Validitas
   Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenai sasaran. Validitas laporan keuangan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasikan skor komponen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, pernyataan yang mempunyai nilai koefisien korelasi terhadap skor total lebih kecil dari nilai kritisnya berarti tidak lolos uji validitas dan harus diperbaiki atau dibuang. Untuk menguji validitas antara masing-masing skor total dengan menggunakan rumus teknik korelasi Product Momen.
   Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila r = 0,0. (Sugiyono, 2012: 183).

c. Uji Reliabilitas
   Sugiyono (2012: 268) menyatakan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti yang sama dalam

waktu berbeda menghasilkan data yang sama atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Untuk uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha yang dihasilkan lebih besar dari 0,6 (Ghozali dalam Irwana, 2010:64).

3. Uji Hipotesis

Untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

(1) merumuskan hipotesis statistik;
(2) menentukan level of significance ( ) sebesar 5%;
(3) menghitung besarnya thitung dengan menggunkan SPSS;
(4) menetapkan kriteria pengujian hipotesis; dan
(5) menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang dilakukan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model regresi melewati uji asumsi klasik. Model regresi yang lolos uji asumsi klasik adalah model regresi yang berdistribusi normal dan terlepas atau terbebas dari keadaan multikolinearitas serta heteroskedastisitas, sehingga dapat dinyatakan model regresi layak untuk dilakukan analisis regresi linear berganda. Rangkuman hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat diamati pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	*Std. Error*	t	*Sig.*
(*Constant*)	2,579	1,919	-1,344	0,183
Sistem Pengendalian Intern (X_1)	0,299	0,085	3,497	0,001
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (X_2)	0,515	0,127	4,066	0,000
Adjusted R Square	: 0,859			
F hitung	: 91,247			
Sig. F	: 0,000			

Dependent Variable : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Data Penelitian, 2022

Mengacu pada Tabel 2, dapat dirumuskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut.

$$Y = -2,579 + 0,171X_1 + 0,299X_2 + 0,175X_3 + 0,308X_4 + 0,515X_5 + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 1, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yakni sebesar 0,859 atau 85,9 persen. Hal tersebut bermakna 85,9 persen variasi variabel dependen atau variabel terikat yakni kualitas laporan keuangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh variasi variabel independen yakni sistem pengendalian intern pemerintah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan Teori Kepatuhan. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagai bentuk kepatuhan atau ketaatan

terhadap peraturan yang ada khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan mematuhi paraturan yang ada, akan tersaji laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang sudah berkekuatan hukum. Kredibilitas laporan keuangan yang sudah mengacu pada standar pun tidak akan diragukan lagi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Setiawan dan Gayatri (2017); Wijayanti dan Hendayani (2017); serta Holle et al. (2019) yang menyatakan bahwa akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan.

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Pada penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel terbatas di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sehingga hasil penelitian kurang dapat digeneralisasi, berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti selanjutnya dianjurkan untuk memperluas lokasi penelitian meliputi OPD di beberapa kabupaten sehingga diharapkan hasil penelitian mempunyai kemampuan generalisasi yang lebih luas. Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada Akuntansi Berbasis Akrual dalam laporan keuangan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzia, Risa Ayu. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.*Skripsi,Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung.* Melalui:http://repository.widyatam.ac.id. Diakses pada 2 September 2015

Faradillah, Andi, (2013). Analisis kesiapan pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar akuntansi Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) *(Skripsi). Makassar, Universitas Hasanuddin*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purwita, Erma. (2013).Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan. *Skripsi, Jurusan Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung*. Melalui:http://repository.widyatama.ac.id. Diakses 2 September 2015.

Tanjung, Abdul Hafiz, (2013). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual,* Bandung,Alfabeta.

Laporan Akhir Kajian. (2012). *Kesiapan Pemda Dalam Implementasi SAP*

Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Widyawati, Dini. (2015).Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan TerhadapKualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Akuntansi* vol 1: 1-14.

Pengaruh Kinerja Keuangan *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Materialitas Pada laporan Keuangan Berkelanjutan

M. Afif Herliandi Nasution
Universitas Al – Azhar-*afifherliandi1@gmail.com*

Abstrack*-The Influence of Financial Performance, Leverage, and Firm Size on Materiality in Sustainability Reports Abstract: This study aims to examine the influence of financial performance, leverage, and firm size on the level of materiality in corporate sustainability reports. The methodology employed is regression analysis on panel data of companies listed on the stock exchange. Data were extracted from financial statements and corporate sustainability reports for the period 2020-2022.*

The results of the analysis indicate that the financial performance of companies has a significant influence on the level of materiality in sustainability reports. Companies tend to be more transparent in disclosing material information when their financial performance is better. However, there is no significant influence from leverage and firm size on materiality. These findings highlight the importance of financial performance in determining the level of materiality in sustainability reports, as well as indicating that other factors such as leverage and firm size may have more limited impacts in this context.

Keywords: Financial Performance, Leverage, Firm Size, Materiality, Sustainability Reports.

1.PENDAHULUAN

Saat ini, pesatnya perkembangan dunia ekonomi telah mempengaruhi kesadaran para pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, dan regulator, yang fokus pada aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusannya. Investor mencari informasi tentang risiko dan peluang terkait isu keberlanjutan ketika mengalokasikan modal. Konsumen semakin memilih produk dan layanan yang diproduksi secara bertanggung jawab. Regulator memperketat persyaratan pelaporan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

Laporan keberlanjutan, juga dikenal sebagai *sustainability report*, adalah sebuah dokumen yang memuat informasi tentang kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu perusahaan. Penyusunan laporan keberlanjutan didasarkan pada konsep keberlanjutan, yang menekankan bahwa perusahaan harus berkontribusi pada keberlanjutan alam dan masyarakat agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Secara sederhana, konsep keberlanjutan dapat diinterpretasikan sebagai pertanyaan tentang bagaimana manajemen perusahaan berkontribusi terhadap komunitas sosial dan lingkungan sekitar mereka, serta bagaimana mereka mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis perusahaan terhadap komunitas tersebut (Kurniawan, 2017). Pengenalan laporan keberlanjutan di Indonesia dimulai pada tahun 2005 oleh NCSR. Awalnya, praktik pelaporan keberlanjutan bersifat sukarela, namun kemudian berkembang menjadi praktik yang wajib dilakukan (Ningsih & Meiden, 2022)

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga, Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik pada Bab IV Pasal 10 ditentukan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Perusahaan tercatat wajib menyusun laporan keberlanjutan. Setiap laporan keberlanjutan dapat diungkapkan secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan.(Ningsih & Meiden, 2022)

Fenomena yang terjadi masih terdapat jumlah yang rendah dari perusahaan yang belum menyajikan laporan keberlanjutan (Damayanti & Hardiningsih, 2021). Kesadaran tentang Keberlanjutan Perusahaan atau organisasi semakin menyadari pentingnya keberlanjutan dalam operasi mereka, baik dari sudut pandang lingkungan, sosial, maupun tata kelola perusahaan. Ini bisa dipicu oleh tekanan dari pemegang saham, persyaratan peraturan pemerintah, atau kebutuhan untuk mempertahankan reputasi perusahaan. Latar

belakang lebih lanjut yang mendasari tema penulis mengenai pentingnya informasi dalam laporan keberlanjutan perusahaan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh GRI (Global Reporting Initiative) dan RobecoSAM.

Pelaporan keberlanjutan kini menjadi paradigma baru dalam proses pelaporan perusahaan. Laporan keberlanjutan merupakan akhir dari proses pelaporan perusahaan. Proses pelaporan perusahaan awalnya berfokus pada laporan keuangan yang berisi angka-angka keuangan. Paradigma saat ini beranggapan bahwa angka-angka keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan tidak menjamin kinerja komprehensif perusahaan tersebut. Dengan berkembangnya dunia usaha, para manajer berkewajiban untuk memperkenalkan gagasan keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaannya (Kurniawan, 2017).

Laporan keberlanjutan juga dimanfaatkan oleh kementerian lingkungan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam hal lingkungan. Peraturan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK (kini OJK) dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun laporan keberlanjutan merupakan dokumen tersendiri, seringkali pelaporan keberlanjutan dilakukan bersamaan dengan laporan tahunan perusahaan (Gunawan, 2010). Keberlanjutan mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang terhadap masyarakat, lingkungan, dan individu sekitarnya saat membuat Keputusan (Daromes et al., 2023)

Prinsip triple bottom line menyatakan bahwa perusahaan harus memprioritaskan isu-isu sosial dan lingkungan sejajar dengan fokus pada keuntungan finansial. Banyak perusahaan telah mengadopsi konsep ini dalam laporan keberlanjutan mereka untuk menilai kinerja dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. Di Indonesia, sejak awal tahun 2017, pendekatan ini telah diadopsi. Komponen-komponen triple bottom line dalam laporan keberlanjutan dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, terkait dengan Profit, yang menyoroti pengukuran kinerja keuangan seperti laba dan rugi serta data statistik yang mempengaruhi ekonomi perusahaan. Kedua, People, yang menekankan pentingnya praktik bisnis yang mendukung kepentingan tenaga kerja dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan komunitas sekitarnya, seperti perawatan kesejahteraan karyawan, pelatihan, donasi, dan sebagainya. Yang terakhir, Planet, yang membahas tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk pengelolaan energi yang efisien dan perlindungan sumber daya alam yang tak terbarukan, seperti pengelolaan limbah dan pengembangan teknologi untuk mengurangi polusi (Daromes et al., 2023).

Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dapat memperkirakan dampak kegiatan usahanya terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Standar GRI mencakup panduan dengan langkah-langkah untuk mengidentifikasi topik-topik penting. Untuk memprioritaskan topik-topik yang mempunyai dampak paling penting. Tujuan penilaian materialitas adalah untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memilih isu-isu yang paling penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai akuntabilitas yang lebih besar bagi perusahaan dan transparansi yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan (Calabrese et al, 2016).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perusahaan saat melakukan penilaian materialitas, dewan direksi, leverage, dan ukuran perusahaan. Jumlah anggota dewan yang lebih besar, tingkat utang yang lebih rendah, dan ukuran perusahaan yang semakin besar memberikan transparansi informasi yang lebih besar mengenai topik dan dampak ketika mengungkapkan Peringkat Materialitas Laporan Keberlanjutan. (Caesaria & Yuliandhari, 2022). Pentingnya konsep materialitas dalam pengukuran dan pelaporan kinerja keberlanjutan perusahaan semakin meningkat karena dapat menjadi alat untuk mengungkapkan aspek-aspek yang benar-benar relevan bagi para pemangku kepentingan (Putri et al., 2022).

Risiko keuangan atau leverage perusahaan juga terkait dengan pengungkapan informasi mengenai isu atau dampak yang dianggap penting bagi perusahaan. Tingkat risiko keuangan yang lebih tinggi dapat mengurangi kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan informasi yang dianggap penting. Hal ini tercermin dari risiko keuangan

seperti tingkat hutang perusahaan yang memiliki korelasi dengan proses penilaian materialitas oleh perusahaan (Meutia et al., 2022).

Penelitian sebelumnya tentang pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan telah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut, di antaranya adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan umumnya dikategorikan sebagai bagian dari profitabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran yang menentukan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh kinerja perusahaan, yang kemudian mempengaruhi pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Profitabilitas dianggap sebagai salah satu indikator kinerja yang penting untuk diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, sehingga perusahaan yang berhasil mencapai profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2022) menunjukkan adanya hubungan positif antara kinerja keuangan dan pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Farooq et al. (2021) menunjukkan bahwa kinerja keuangan, yang diukur melalui rasio profitabilitas, memiliki pengaruh terhadap pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan. Namun, penelitian oleh Ngu & Amran (2021) tidak berhasil membuktikan adanya hubungan antara kinerja keuangan dan pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan.

H1: Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan materialitas pada laporan keberlanjutan

Faktor lain yang berpotensi mempengaruhi pengungkapan materialitas adalah *leverage*, yang merujuk pada jumlah kewajiban yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh aset. Rasio leverage memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk mendanai operasinya. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dianggap lebih cenderung untuk memberikan informasi secara sukarela kepada para kreditur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan kreditur terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Penelitian Caesaria & Yuliandhari (2022) menemukan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian materialitas laporan keberlanjutan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ngu & Amran (2021) menemukan adanya korelasi negatif antara leverage dan pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan. Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Farooq et al. (2021) serta Putri et al. (2022) menunjukkan adanya hubungan positif antara leverage dan pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan.

H2: Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan materialitas pada laporan keberlanjutan.

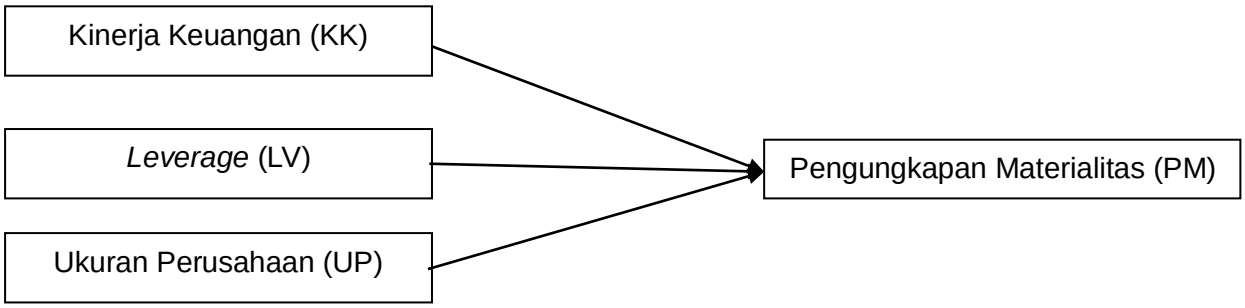
Ukuran perusahaan (size) dapat memengaruhi sejauh mana informasi perusahaan diungkapkan, termasuk dalam laporan keberlanjutan. Menurut teori legitimasi, perusahaan yang lebih besar cenderung lebih terlihat dan lebih dipantau oleh masyarakat serta mengalami tekanan sosial yang lebih besar, sehingga mereka cenderung memiliki dampak lingkungan dan sosial yang lebih besar dari operasi bisnis mereka. Umumnya, perusahaan yang lebih besar akan memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar, dengan tingkat laba yang tinggi, biasanya memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam pengungkapan informasi, baik dalam laporan keuangan maupun laporan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh (Caesaria & Yuliandhari, 2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penilaian materialitas laporan keberlanjutan. Penelitian Putri et al. (2022) menunjukkan adanya hubungan positif antara ukuran Perusahaan (*size*) dan pengungkapan materialitas dalam laporan keberlanjutan. Namun, penelitian oleh Ngu & Amran (2021) serta Farooq et al. (2021) menemukan bahwa ukuran perusahaan (size) tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi materialitas dalam laporan keberlanjutan.

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan materialitas pada laporan keberlanjutan.

Teori *Stakeholder* adalah teori yang digunakan dalam salah salu teori yang digunakan dalam penelitian laporan berkelanjutan ini. Freeman dan McVea (2001) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan dan dapat mempengaruhi aktivitas perusahaan. Pihak-pihak yang disebut pemangku kepentingan antara lain masyarakat, pegawai, pemerintah, pemasok, dan pasar modal. (Freeman dan McVea, 2001).

Teori stakeholder menekankan bahwa organisasi memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya mencapai kinerja keuangan atau ekonomi semata. Penelitian ini dapat dijelaskan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa organisasi akan secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial, dan intelektualnya di atas dan melampaui persyaratan yang diwajibkan, untuk memenuhi harapan yang sesungguhnya atau diakui oleh para pemangku kepentingan. Teori stakeholder mencakup bidang etika dan manajerial. Di bidang etika, argumennya adalah bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan semua pemangku kepentingan. Teori stakeholder mengasumsikan bahwa keberadaan perusahaan memerlukan dukungan dari para pemangku kepentingan, sehingga kegiatan perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari para pemangku kepentingan. Dukungan yang kuat dari para pemangku kepentingan dapat disampaikan melalui pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. (Damayanti & Hardiningsih, 2021)

Dengan mengacu pada konteks dan tinjauan literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka konseptual penelitian ini dapat disajikan melalui Gambar 1 seperti yang terlihat di bawah ini.



Gambar 1 Kerangka Konseptual

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan mencakup semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022 yang secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan dan laporan tahunan dalam rentang waktu tersebut. Sampel penelitian ini terdiri dari 70 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan periode penelitian selama 3 tahun.

Penelitian ini melibatkan 210 laporan keberlanjutan dan laporan tahunan laporan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang telah diproses sebelumnya oleh pihak ketiga dan telah tersedia (Sakaran & Bogie, 2017). Data yang diperoleh berasal dari laporan keberlanjutan selama periode dan laporan tahunan dari 2020 - 2022 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Studi ini memperhitungkan beberapa aspek penting dalam pelaporan keberlanjutan, termasuk penentuan cakupan dan topik yang diungkapkan dalam laporan, penerapan prinsip-prinsip pelaporan, pengidentifikasian topik material, dan penyusunan matriks materialitas.

Berdasarkan informasi yang terkandung dalam laporan keberlanjutan, peneliti menentukan isi laporan dan memastikan batasan item pengungkapan. Uraian mengenai proses pengambilan keputusan isi laporan dapat berupa metode atau pendekatan yang

digunakan manajemen untuk menentukan topik material dengan partisipasi pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja keuangan. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *earning per share* (EPS). EPS merupakan metrik penting dalam evaluasi kinerja keuangan karena menggambarkan potensi profitabilitas yang bisa dinikmati oleh setiap pemegang saham dalam perusahaan. Semakin tinggi nilai EPS, semakin besar peluang bagi pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan atas investasi mereka (Watung & Ilat, 2016).

Earning per Share = $\frac{Laba\ bersih}{\text{Jumlah aham yang beredar}}$

Rasio *leverage* atau rasio *solvabilitas* adalah indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menanggung utang. Penelitian ini memanfaatkan rasio utang terhadap ekuitas (DER) sebagai metrik untuk mengevaluasi leverage, yang mengukur proporsi utang perusahaan terhadap ekuitasnya. Berikut adalah formula untuk menghitung DER (Nguyen, 2020).

Debt to Equity Ratio = $\frac{Total\ Utang}{\text{Total Ekuitas}}$

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menggunakan indikator berikut (Kumar et al. , 2021).

Size = Ln (Total Ekuitas)

Pengungkapan materialitas dapat diartikan sebagai bentuk penyampaian informasi topik-topik material yang dapat mempengaruhi keputusan para pengguna laporan. Pengungkapan materialitas diukur dengan menggunakan metode yang dikembangkan oleh (Farooq et al., 2021) dalam penelitian yang telah dilakukannya. Untuk pengukuran pengungkapan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Metode Pengukuran Pengungkapan Materialitas yang Dikembangkan oleh Farooq et al. (2021)

No	Pengungkapan Penilaian Materialitas	Skor
1	Tidak ada referensi yang dibuat untuk penilaian materialitas	0
2	Pelapor mengklaim telah melakukan penilaian materialitas tetapi tidak memberikan informasi tentang langkah-langkah yang diambil	1
3	Informasi terbatas yang diberikan tentang langkah-langkah penilaian materialitas. Namun, tidak ada matriks materialitas yang disediakan	2
4	Informasi terbatas yang diberikan tentang langkah-langkah penilaian materialitas dan matriks materialitas disediakan	3
5	Pengungkapan komprehensif diberikan pada langkah-langkah penilaian materialitas. Namun, tidak ada matriks materialitas yang disediakan	4
6	Pengungkapan komprehensif disediakan pada langkah-langkah penilaian materialitas dan matriks materialitas disediakan	5

Sumber: Farooq et al. (2021).

Analisis regresi data panel merupakan penggabungan dari data *cross section* dan *time series* (Gujarati & Porter, 2015). Model persamaan data panel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

PM = α + β1 KK i.t + β2 LV i.t + β3 UP i.t + e

Keterangan:

PM = Pengungkapan Materialitas
A = Konstanta
β1, β2, β3 = Koefisien
KK = Kinerja Keuangan
LV = Leverage

UP = Ukuran Perusahaan
E = Error

3. HASIL PENELITIAN

Tabel 2. hasil uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KK	210	-2249.0000	88252.0000	3481.897762	10112.1184525
LV	210	-66.0000	64338.0000	2360.928571	8144.7912471
UP	210	15767389.0000	9938758167.0000	1919981371.966667	1949784174.5448582
PM	210	4.0000	5.0000	4.285714	.4528334
Valid N (listwise)	210				

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh kinerja keuangan, leverage , dan ukuran perusahaan terhadap tingkat materialitas dalam laporan berkelanjutan. Berdasarkan analisis statistik deskriptif terhadap data dari 210 perusahaan, hasil menunjukkan variasi yang signifikan dalam semua variabel yang diteliti. Kinerja keuangan perusahaan, diukur dengan Kinerja Keuangan (KK), menunjukkan variasi yang besar, dengan rentang nilai yang signifikan dari yang rendah hingga tinggi. Begitu pula dengan leverage perusahaan (LV), yang menunjukkan variasi yang cukup besar di antara perusahaan dalam sampel. Ukuran perusahaan (UP) juga menunjukkan variasi yang luas, dengan perbedaan yang signifikan antara perusahaan kecil dan besar.

Secara keseluruhan, tingkat pengungkapan materialitas (PM) dalam laporan berkelanjutan cenderung tinggi, dengan nilai rata-rata mendekati 4.29 dari skala 1 hingga 5. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan pengungkapan materialitas yang cukup tinggi dalam laporan berkelanjutan mereka.

Tabel 3 . Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.284	.046		93.944	.000
	KK	8.970E-6	.000	.200	2.349	.020
	LV	-4.580E-6	.000	-.082	-.963	.336
	UP	-9.815E-12	.000	-.042	-.613	.540

a. Dependent Variable: PM

Analisis regresi dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kinerja keuangan (KK), leverage (LV), dan ukuran perusahaan (UP) terhadap tingkat materialitas dalam laporan berkelanjutan, yang diukur dengan pengungkapan materialitas (PM). Hasil analisis menunjukkan beberapa temuan yang signifikan: Kinerja Keuangan (KK): Koefisien regresi KK (β = 8.970E-6, p = 0.020) menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan materialitas.

Artinya, kinerja keuangan yang lebih baik cenderung berkorelasi dengan peningkatan tingkat pengungkapan materialitas dalam laporan berkelanjutan. *Leverage* (LV): Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien LV (β = -4.580E-6, p = 0.336) tidak signifikan secara statistik terhadap pengungkapan materialitas. Ini menandakan bahwa tingkat leverage perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap materialitas dalam laporan berkelanjutan. Ukuran Perusahaan (UP) Koefisien regresi UP (β = -9.815E-12, p = 0.540) juga tidak signifikan secara statistik terhadap pengungkapan materialitas. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap materialitas dalam laporan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan materialitas dalam laporan berkelanjutan. Namun, leverage dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap materialitas. Implikasi dari temuan ini dapat digunakan untuk memandu praktik pengungkapan dan kebijakan perusahaan dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan berkelanjutan.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.171[a]	.029	.015	.4493770

a. Predictors: (Constant), UP, KK, LV

Analisis regresi dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh kinerja keuangan (KK), leverage (LV), dan ukuran perusahaan (UP) terhadap tingkat materialitas dalam laporan berkelanjutan. Ringkasan model menunjukkan beberapa temuan yang dapat ditarik: Keakuratan Model: Model regresi secara keseluruhan memiliki tingkat keakuratan yang rendah, dengan koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.029. Ini berarti hanya sekitar 2.9% dari variabilitas dalam pengungkapan materialitas dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam variabel prediktor (KK, LV, dan UP).

Pengujian model menunjukkan bahwa prediktor yang dimasukkan (KK, LV, dan UP) secara bersama-sama tidak signifikan dalam menjelaskan variasi dalam tingkat materialitas dalam laporan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam nilai signifikansi (p-value) yang lebih besar dari 0.05. Kontibusi Variabel: Meskipun demikian, variabel KK (kinerja keuangan) memberikan kontribusi yang paling signifikan dalam menjelaskan variasi dalam tingkat materialitas, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang positif.

Standar error dari perkiraan menunjukkan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi dalam kemampuan model untuk memprediksi tingkat materialitas, dengan nilai standar error sebesar 0.4493770. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa meskipun model regresi memberikan beberapa wawasan tentang hubungan antara variabel prediktor dan pengungkapan materialitas, tingkat keakuratan dan signifikansi model secara keseluruhan masih terbatas. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan peningkatan metodologi untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi materialitas dalam laporan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Temuan menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan materialitas. Ini menandakan bahwa perusahaan cenderung lebih transparan dalam mengungkapkan informasi material saat kinerja keuangannya lebih baik. Hal ini memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat kepercayaan dan keandalan di mata pemangku kepentingan.

Meskipun leverage dan ukuran perusahaan tidak terbukti secara signifikan memengaruhi pengungapan materialitas dalam penelitian ini, hal ini dapat diinterpretasikan secara positif. Ini menunjukkan bahwa keputusan pengungapan materialitas mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kebutuhan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, menjaga reputasi perusahaan, atau mematuhi regulasi, daripada faktor keuangan internal.

Ketidaksignifikanan leverage dan ukuran perusahaan mungkin menyoroti adanya faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi praktik pengungapan materialitas. Dengan lebih memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Temuan ini membuka pintu bagi penelitian lanjutan untuk menjelajahi faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi pengungapan materialitas. Penelitian masa depan dapat memperluas cakupan untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-keuangan, kontekstual, atau industri-spesifik yang dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik pengungkapan materialitas.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan (KK) tampaknya menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan materialitas (PM). Namun, leverage (LV) dan ukuran perusahaan (UP) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam model regresi ini. Faktor-faktor lain di luar variabel yang telah diteliti mungkin juga memiliki dampak terhadap pengungkapan materialitas, dan dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

Meskipun penelitian ini mengeksplorasi kinerja keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan dalam konteks pengungapan materialitas, penelitian selanjutnya dapat melibatkan faktor-faktor lain yang mungkin memiliki pengaruh terhadap pengungapan materialitas. Misalnya, faktor-faktor sosial, lingkungan, atau tata kelola perusahaan yang mungkin memengaruhi keputusan pengungkapan.

DAFTAR PUSTAKA

Caesaria, F. C., & Yuliandhari, W. S. (2022). Pengaruh Dewan Direksi, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penilaian Materialitas Laporan Keberlanjutan. *SEIKO : Journal of Management & Business*, *4*(3), 345–356. https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.457

Damayanti, A., & Hardiningsih, P. (2021). Determinan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *22*(1), 175. https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.2756

Daromes, F. E., Holly, A., & Loeferdy, M. (2023). Analisis Aspek Materialitas Dalam Pelaporan Keberlanjutan. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, *22*(1), 1–17. https://doi.org/10.22225/we.22.1.2023.1-17

Gunawan, Wahyu. (2010). Kebut Sehari Menjadi Master PHP. Yogyakarta: Genius Publisher

Kurniawan, P. S. (2017). PEMODELAN PETA MATERIALITAS INFORMASI PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN (Suatu Tinjauan Mengenai Pelaporan Keberlanjutan Industri Perbankan di Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, *2*(2), 202–223. https://doi.org/10.31093/jraba.v2i2.51

Kumar, K., Kumari, R., Poonia, A., & Kumar, R. (2021). Factors Influencing Corporate Sustainability Disclosure Practices: Empirical Evidence from Indian National Stock Exchange. *Journal of Financial Reporting and Accounting.* https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2021-0023

Nguyen, T. T. D. (2020). An Empirical Study on The Impact of Sustainability Reporting on Firm Value. *Journal of Competitiveness,* 12(3), 119–135. https://doi.org/10.7441/joc.2020.03.07

Ningsih, R., & Meiden, C. (2022). Analisis Penilaian Materialitas pada Laporan Keberlanjutan Industri Dasar dan Kimia Tahun 2020. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 109–116. https://doi.org/10.31294/moneter.v9i2.12676

Putri, I. H., Meutia, I., & Yuniarti, E. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Materialitas pada Laporan Keberlanjutan. *E-Jurnal Akuntansi*, *32*(7), 1771. https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p08

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis* (6th ed.). Penerbit Salemba Empat.

Watung, R., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Return on Asset (Roa), Net Profit Margin (Npm), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, BisnisDan Akuntansi*, 4(2), 518–529.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu

Vika Fitranita[1], Elysa Fitriani Hara[2], Novita Sari[3], Indah Oktari Wijayanti[4]
Universitas Bengkulu- [1]*vikafitranita@unib.ac.id*
- [2]*elysafitriani@gmail.com*
- [3]*novitasari@gmail.com*
- [4]*Indahoktari24@gmail.com*

Abstrak*—This study aims to analyze the factors that influence the use of accounting information in MSMEs in Sungai Serut Kecematan, Bengkulu City. The population of this study were all MSMEs in Sungai Serut District, Bengkulu City in 2020-2021, totaling 90 MSMEs. The statistical tool used is SPSS. The results showed that the scale of the business has a positive effect on the use of accounting information, the bigger the business, the more consideration it will provide for MSME owners to be able to use and improve the use of accounting information to be able to support MSMEs in the future.... Business age has a positive effect on the use of accounting information, the longer the age of MSMEs, the longer the business continuity will be and the wider the knowledge about the importance of accounting information, so that this will encourage MSMEs to better understand the importance of using accounting information Education has a positive effect on the use of accounting information, knowledge about the importance of accounting information contained in MSMEs will affect decisions that will be taken later so that the higher the education they have, it will increase the use of accounting information in MSMEs. Accounting training has a positive effect on the use of accounting information, this shows that the owner / financial manager of MSMEs will have the ability to master knowledge about accounting if he participates in accounting training. The more accounting training that is attended will increase understanding of the importance of accounting information and this will encourage MSMEs to use accounting information.*

Keywords -Use of Accounting Information, Accounting Training, Business Scale, Business Age and Education

1. PENDAHULUAN

Pengaruh terhadap penggunakan teknologi khususnya dalam pengolahan dan penyajian informasi yang lebih akurat, relavan, tepat dan juga lengkap. Tentu saja hal ini dapat dimanfaatkan dan menjadi solusi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menyediakan informasi yang berkualitas. Meskipun demikian, faktanya tidaklah semudah itu, penyediaan terhadap perangkat teknologi dan belum lagi pengadaan terhadap sumberdaya manusia yang memumpuni dalam memanfaatkan teknologi tersebut masih menjadi kendala, sehingga penggunaan teknologi tersebut belum terlalu efektif. Whetyningtyas (2016) menyatakan dengan adanya akuntansi yang memadai akan memudahkan pengusaha UMKM dapat memenuhi syarat dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat lainnya. Semakin ketatnya persaingan bisnis dalam era-globalisasi ekonomi, hanya perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang akan mampu memenangkan persaingan. Keunggulan tersebut diantaranya adalah kemampuan dalam mengelola berbagai informasi, sumber daya manusia, alokasi dana, penerapan teknologi, sistem pemasaran dan pelayanan (Nahar & Widiastuti, 2011).

Kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 2013 Pasal 49 dan Undang-undang UKM No. 9 tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi. Kenyataannya, sebagian besar usaha kecil menengah di Indonesia belum menyelenggarakan dan memanfaatkan akuntansi dalam pengelolaan usahanya (Wahyudi, 2009). Menurut perspektif manajerial, teori motivasi akan sangat berpengaruh ketika ia sudah menyadari dan merasakan manfaat atau konsekuensi positif dari penyediaan informasi akuntansi tersebut dalam mengambil suatu keputusan. motivasi seseorang dalam menyediakan informasi akuntansi akan dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat dari informasi yang disajikannya. Karena jika semakin tinggi manfaat informasi akuntansinya, maka orang tersebut akan semakin termotivasi

untuk menggunakan informasi akuntansi yang semakin lengkap sehingga hal tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kinerjanya. Semakin banyak orang mengerti dengan manfaat dan kebutuhan dari informasi akuntansi maka akan berdampak dengan penggunaan dari informasi akuntansi pasti akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kemampuan pelaku bisnis dalam mengenali kebutuhan dalam dirinya atau usahanya tersebut.

Faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi yaitu jenjang pendidikan, masa memimpin perusahan, skala usaha dan lain lain. Hasil penelitian (Wahyudi, 2009) menunjukkan pendidikan pemilik dan skala usaha berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil menengah. (Handayani, 2011) menyatakan bahwa masa memimpin perusahaan dan umur usaha berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi, sedangkan skala usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. (Tuti & Dwijayanti, 2014) menyatakan tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, hanya lama usaha yang berpengaruh terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun informasi akuntansi.

Berdasarkan hasil observasi di UMKM kota Bengkulu pencatatan keuangan usaha mikro dan kecil intensitasnya rendah. Mereka cenderung untuk tidak melakukan pencatatan transaksi dengan baik. Sedikit usaha yang melakukan pencatatan dengan lengkap hingga terbentuk laporan keuangan. Hal ini diperkuat dengan adanya data SE 2016 dari BPS Provinsi Bengkuluc(2018) yang menunjukkan bahwa hanya 7,03% UMKM Non pertanian menggunakan komputer untuk usaha mereka sedangkan 92,97% belum menggunakan komputer. Data juga menunjukkan hanya 9,16% yang menggunakan internet sedangkan 90,84% tidak menggunakan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, tetapi juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, hanya kurang dari 10 persen UMKM yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet di mana pemanfaatan internet tersebut meliputi pelaporan keuangan, mendesain produk, pemasaran dan lainnya (BPS Provinsi Bengkulu, 2018). Melihat masih belum adanya kekonsistenan hasil penelitian melalui penelitian terdahulu dan mengingat pentingnya penggunaan sistem informasi akuntansi dalam mengembangkan usaha maka penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian terhadap faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi dalam operasional usaha skala mikro kecil dan menengah.

Motivasi pelaku bisinis sangat berpengaruh terhadap penyediaan dan pemanfaatan informasi akuntansi dalam kegiataan usaha perusahaannya. Karena motivasi sendiri timbul ketika pelaku usaha sudah mengetahui kebutuhan dan kekurangannya, yang kemudian membuat mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut agar tujuan dari kegiatannya bisa tercapai. hal tersebut berpengaruh pada kinerja yang dilakukannya. Kemudian pelaku bisnis akan terus mengevaluasi dan menilai kebutuhannya setelah melihat hasil atau dampak dari kinerja yang dilakukannya (Robert & Kinicki, 2003). Menurut perspektif manajerial, teori motivasi akan sangat berpengaruh ketika ia sudah menyadari dan merasakan manfaat atau konsekuensi positif dari penyediaan informasi akuntansi tersebut dalam mengambil suatu keputusan. Demikian juga motivasi seseorang dalam menyediakan informasi akuntansi akan dipengaruhi oleh seberapa besar manfaat dari informasi yang disajikannya. Smakin tinggi manfaat informasi akuntansinya, maka orang tersebut akan semakin termotivasi untuk menggunakan informasi akuntansi yang semakin lengkap sehingga hal tersebut memberikan dampak yang positif terhadap kinerjanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

1. **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha peroangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menajadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang mematuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini.
3. **Usaha menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu. Yayuk (2013) informasi akuntansi merupakan suatu pembelajaran yang diperoleh pengusaha dalam menjalankan usahanya. Penyelenggaraan informasi akuntansi adalah pencatatan keggiatan-kegiatan usaha/transaksi kedalam catatan-catatan akuntansi, sedangkan penggunaan informasi akuntansi adalah pemanfaatan informasi-informasi akuntansi yang berasal dari catatan-catatan akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis.

Informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan dan terutama digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan dan implementasi keputusan-keputusan perusahaan. Agar data keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, maka data tersebut harus disusun dalam bentuk-bentuk yang sesuai. Informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga jenis yaitu informasi operasi, informasi akuntansi manajemen, dan informasi akutansi keuangan (Mulyadi, 2001)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada mengalisis skala usaha, umur usaha, pendidikan, pelatihan akuntansi terhadap penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Penelitian dilakukan pada UMKM di Kecamatan Sungai Serut Bengkulu

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menggambarkan serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan desain kolerasi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi dan variabel independen skala usaha, umur usaha, pendidikan, dan pelatihan akuntansi.

Untuk mendukung penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui pembagian kuisioner kepada UMKM. Kuisioner ini mencakup beberapa pertanyaan yang terkait sistem informasi akuntansi dan variabel independen skala usaha, umur usaha, pendidikan, dan pelatihan akuntansi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan cara membagi angket kuesioner yang berisi pertanyaan yang sudah disiapkan alternatif jawabannya kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden Sugiyono (2011:142). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner terstruktur terdiri dari pertanyaan tertutup berupa suatu pernyataan yang diberikan kepada responden untuk diisi berdasarkan pendapat masing-masing.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 24 (*statistical package for social science*) dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik analisis deskriptif

Deskriptif Metode ini bertujuan untuk menyajikan data yang ada dan memberikan gambaran yang jelas mengenai gambaran di UMKM dengan menganalisis nilai mean, nilai minimum dan nilai maksimum serta standar deviasi.

b. Uji Kualitas Data

Uji kualitas data terdiri dari dua uji, yaitu uji validitas dan uji reabilitas. Validitas adalah akurasi temuan penelitian yang mencerminkan kebenaran sekalipun responden yang dijadikan objek pengujian berbeda Ikhsan *et al.,* (2018:245). Ghozali (2016) menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016).

c. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui serta menguji kelayakan dari data penelitian atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian asumsi klasik juga digunakan untuk memastikan bahwa dalam model regresi penelitian ini data bersifat normal, tidak terjadi multikolinieritas dan heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis secara langsung pengaruh variabel independen (skala usaha, umur usaha, pendidikan, dan pelatihan akuntansi) terhadap variabel dependen (penggunaan informasi akuntansi). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan persamaan seperti dibawah ini.

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

Dimana:

Y	= penggunaan informasi akuntansi
X_1	= skala usaha
X_2	= umur manfaat
X_3	= pendidikan
X_4	= pelatihan akuntansi
a	= Konstanta
b1,….,b4	= Koefisien regresi dari variabel independen
e	= error term

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pemilik atau karyawan bagian keuangan yang bekerja pada seluruh UMKM di kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan selama sepuluh hari yaitu, pada tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pengambilan kembali kuesioner dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau paling lama tiga hari setelah penyebaran kuesioner, hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan kuesioner yang tidak kembali dari para responden yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi responden secara langsung untuk menyerahkan kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 89 kuesioner dan penyebarannya dilakukan kepada seluruh UMKM di kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu.

Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Daftar Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	89	100%
Kuesioner yang tidak kembali	22	24,7%
Kuesioner yang kembali	67	75,3%
Kuesioner yang dapat diolah	67	75,3%

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa dari 67 eksemplar (75,3%) kuesioner yang disebarkan seluruh UMKM di kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 67 eksemplar dengan persentase (75,3%). Kemudian kuesioner yang tidak kembali sebanyak 22 eksemplar dengan persentase (24,7%), hal ini disebabkan beberapa responden yang dituju tidak memiliki kabar lanjutan terkait dengan pengembalian kuesioner, sehingga hal ini menyebabkan berkurangnya kuesioner yang dapat kembali. Dari 67 kuesioner yang kembali, semua kuesioner tersebut dapat diolah (75,3%). Responden dari kuesioner ini ditujukan kepada para pemilik atau karyawan bagian keuangan pada UMKM.

Statistik Deskriptif

Tabel 4.2
Statistrik deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Standar Deviasi
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	
Penggunaan informasi akuntansi	67	14	70	42	48	70	58.28	5.608
Skala usaha	67	3	15	9	9	15	12.61	1.954
Umur usaha	67	3	15	9	9	15	12.75	1.636
Pendidikan	67	3	15	9	9	15	12.51	1.460
Pelatihan akuntansi	67	3	15	9	9	15	12.24	1.548

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui gambaran jumlah jawaban yang diberikan oleh responden untuk masing-masing variabel yang diteliti. Dari data tersebut memiliki jumlah responden (N) sebanyak 67 responden. Pada variabel penggunaan informasi akuntansi memiliki 14 item pernyataan dalam kuesioner dengan kisaran aktual nilai skor jawaban terendah dari kuesioner yang disebarkan sebesar 48 dan skor jawaban tertinggi 70 dengan nilai rata-rata (*mean*) aktual sebesar 58,28. Nilai mean aktual lebih besar dari *mean* teoritis yaitu 58,28 > 42, hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata responden menjawab pernyataan dengan jawaban “setuju”. Nilai standar deviasi sebesar 5,608 dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-rata aktualnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap variabel penggunaan informasi akuntansi cenderung bersifat homogen dan tidak terjadi variasi data penelitian pada variabel penggunaan informasi akuntansi.

Hasil Uji Validitas

Tabel 3
Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Nomor Item	N	r tabel	*Person Correlation* (r hitung)	Sig	Keterangan
Penggunaan Informasi Akuntansi (Y)	Y.1	67	0,244	0,749	0,000	Valid
	Y.2	67	0,244	0,757	0,000	Valid
	Y.3	67	0,244	0,782	0,000	Valid
	Y.4	67	0,244	0,770	0,000	Valid
	Y.5	67	0,244	0,772	0,000	Valid
	Y.6	67	0,244	0,672	0,000	Valid
	Y.7	67	0,244	0,785	0,000	Valid
	Y.8	67	0,244	0,674	0,000	Valid
	Y.9	67	0,244	0,753	0,000	Valid
	Y.10	67	0,244	0,624	0,000	Valid
	Y.11	67	0,244	0,623	0,000	Valid
	Y.12	67	0,244	0,605	0,000	Valid
	Y.13	67	0,244	0,779	0,000	Valid
	Y.14	67	0,244	0,745	0,000	Valid
Skala Usaha (X1)	X1.1	67	0,244	0,963	0,000	Valid
	X1.2	67	0,244	0,933	0,000	Valid

Variabel	Nomor Item	N	r tabel	*Person Correlation* (r hitung)	Sig	Keterangan
	X1.3	67	0,244	0,916	0,000	Valid
Umur Usaha (X2)	X2.1	67	0,244	0,915	0,000	Valid
	X2.2	67	0,244	0,873	0,000	Valid
	X2.3	67	0,244	0,833	0,000	Valid
Pendidikan (X3)	X3.1	67	0,244	0,877	0,000	Valid
	X3.2	67	0,244	0,944	0,000	Valid
	X3.3	67	0,244	0,879	0,000	Valid
Pelatihan Akuntansi (X4)	X3.1	67	0,244	0,868	0,000	Valid
	X3.2	67	0,244	0,794	0,000	Valid
	X3.3	67	0,244	0,771	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, semua item pernyataan untuk variabel penggunaan informasi akuntansi, skala usaha, umur usaha, pendidikan, dan pelatihan akuntansi nilai signifikansi yang lebih kecil dari 5% dan r-hitung (*Pearson Correlation*) lebih besar dari r-tabel. Artinya semua item pernyataan sudah memenuhi kriteria uji validitas dengan menggunakan *Person Correlation* sehingga dapat dikatakan valid atau layak digunakan.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Instrument	Nilai *Cronbach's Alpha*	Keterangan
1	Penggunaan Informasi Akuntansi (Y)	14	0,927	Reliabel
2	Skala Usaha (X1)	3	0,919	Reliabel
3	Umur Usaha (X2)	3	0,845	Reliabel
4	Pendidikan (X3)	3	0,882	Reliabel
5	Pelatihan Akuntansi (X4)	3	0,727	Reliabel

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan sebagaimana terlihat pada tabel 4 diperoleh bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel penelitian yaitu penggunaan informasi akuntansi, skala usaha, umur usaha, pendidikan, dan pelatihan akuntansi lebih besar dari nilai 0,70 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen dari variabel penelitian dinyatakan reliabel

Hasil Uji Normalitas
Tabel 5
Hasil Pengujian Normalitas Data

One Sample Kolmogorov-Smirnov test

Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
0,323	Data terdistribusi Normal

Sumber : Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-smirnov test* untuk *Unstandardrized Residual* memiliki nilai *Asymp Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 6
Hasil Pengujian Multikolineritas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Skala Usaha (X1)	0,735	1,360	Bebas Multikolinieritas
2	Umur Usaha (X2)	0,569	1,758	Bebas Multikolinieritas
3	Pendidikan (X3)	0,562	1,779	Bebas Multikolinieritas
4	Pelatihan Akuntansi (X4)	0,941	1,063	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel 6 diatas, disimpulkan bahwa semua variabel penelitian memiliki VIF < 10 dan nilai *Tolerance* > 0,10, yang berarti tidak terjadi gejala multikolinieritas dalam model persamaan regresi.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Tabel 7
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	Keterangan
1	Skala Usaha (X1)	0,081	Bebas Heteroskedastisitas
2	Umur Usaha (X2)	0,236	Bebas Heteroskedastisitas
3	Pendidikan (X3)	0,208	Bebas Heteroskedastisitas
4	Pelatihan Akuntansi (X4)	0,681	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan Tabel 7 Hasil pengujian heteroskedastisitas pada variabel skala usaha memiliki nilai signifikan 0,081, umur usaha memiliki signifikansi 0,236, pendidikan memiliki signifikansi 0,208 dan pelatihan akuntansi memiliki nilai signifikan 0,681. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis
Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig	Hasil
Skala Usaha (X1)	0,624	2,130	0,037	**Diterima**
Umur Usaha (X2)	0,840	2,111	0,039	**Diterima**
Pendidikan (X3)	1,353	3,017	0,004	**Diterima**
Pelatihan Akuntansi (X4)	0,657	2,010	0,049	**Diterima**
R Square	0,525			
Adjusted R^2	0,494			
F	17,127			
Sig.	0,000			

Sumber: Data Diolah 2022.

Berdasarkan hasil regresi di tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model adalah sebesar 17,127 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan.

Berdasarkan tabel.8 dapat dilihat nilai *Adj.* R^2 sebesar 0,494 yang menunjukkan bahwa sebesar 49,4% variabel penggunaan informasi akuntansi dapat dijelaskan oleh variabel skala usaha, umur usaha, pendidikan, dan pelatihan akuntansi sedangkan sisanya sebesar 50,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang dirumuskan adalah skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 8, untuk variabel skala usaha memiliki koefisien regresi (*β*) sebesar 0,624 dan nilai t hitung sebesar 2,130. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,037 atau berada dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa skala usaha terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi di UMKM kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu atau dengan kata lain hipotesis pertama **diterima**.

Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang dirumuskan adalah umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 8, untuk variabel skala usaha memiliki koefisien regresi (*β*) sebesar 0,840 dan nilai t hitung sebesar 2,111. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,039 atau berada dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa umur usaha terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi di UMKM kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu atau dengan kata lain hipotesis pertama **diterima**.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga yang dirumuskan adalah pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 8, untuk variabel skala usaha memiliki koefisien regresi (*β*) sebesar 1,353 dan nilai t hitung sebesar 3,017. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,004 atau berada dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi di UMKM kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu atau dengan kata lain hipotesis pertama **diterima**.

Pengujian Hipotesis Keempat

Hipotesis keempat yang dirumuskan adalah pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 8, untuk variabel skala usaha memiliki koefisien regresi (*β*) sebesar 0,657 dan nilai t hitung sebesar 2,010. Sementara nilai signifikansinya sebesar 0,049 atau berada dibawah nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan akuntansi terbukti berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi di UMKM kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu atau dengan kata lain hipotesis pertama **diterima**.

Pembahasan

Skala Usaha dan Penggunaan Informasi Akuntansi

Hipotesis pertama yang menyatakan skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang berada di Sungai Serut, Kota Bengkulu, secara empiris terbukti didukung. Artinya semakin besar skala usaha UMKM maka UMKM akan memiliki kecenderungan untuk lebih termotivasi untuk menerapkan penggunaan informasi akuntansi yang nantinya penggunaan informasi akuntansi ini akan membantu usaha kecil untuk dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan usaha.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan teori motivasi yang menjelaskan bahwa pelaku bisnis akan terus mengevaluasi dan menilai kebutuhannya setelah melihat hasil atau dampak dari kinerja yang dilakukannya guna untuk membantu memberikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, salah satu informasi akuntansi ialah skala usaha dimana skala usaha akan memberikan pertimbangan bagi pemilik ataupun pengelola bagian keuangan untuk dapat menerapkan penggunaan informasi akuntansi dalam membantu menyelesaikan tugas terkait dengan keuangan dalam usahanya, karena skala usaha yang terus semakin besar akan memberikan banyak permasalahan yang dihadapai terkhusus dalam proses menyajikan laporan

keuangan dan hal tersebut dapat terselesaikan apabila penggunaan informasi akuntansi diterapkan dengan baik pada usaha. Operasional, permasalahan akuntansi manajemen, dan akuntansi keuangan.

Umur Usaha dan Penggunaan Informasi Akuntansi

Hipotesis kedua yang menyatakan umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang berada di Sungai Serut, Kota Bengkulu, secara empiris terbukti didukung. Artinya semakin lama umur usaha UMKM maka UMKM akan memiliki kecenderungan untuk lebih termotivasi menerapkan penggunaan informasi akuntansi dalam pengelolaan UMKM. Hasil penelitian ini dapat mengkonfirmasi teori motivasi yang menjelaskan bahwa informasi akuntansi yang disajikan dipengaruhi oleh usia usaha, pemilik usaha yang telah lama melakukan kegiatan operasional perusahaan memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan dengan pemilik usaha yang baru mengoperasionalkan usahanya. Pemilik yang belajar dengan pengalaman yang lebih akan mengetahui pentingnya suatu informasi yang ada pada usahanya, hal ini merupakan salah satu implementasi teori motivasi yang menjelaskan bahwasannya motivasi sendiri timbul ketika pelaku usaha sudah mengetahui kebutuhan dan kekurangannya, yang kemudian membuat mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut agar tujuan dari kegiatannya bisa tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Zuliyati (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa umur usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Semakin lama usaha yang dijalankan, akan meningkatkan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

Pendidikan dan Penggunaan Informasi Akuntansi

Hipotesis ketiga yang menyatakan pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang berada di Sungai Serut, Kota Bengkulu, secara empiris terbukti didukung, artinya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pemilik atau pengelola keuangan pada UMKM, maka hal tersebut akan memberikan dorongan kepada mereka untuk menerapkan penggunaan informasi akuntansi dalam mempermudah menyelesaikan pekerjaan mereka dan hal tersebut akan memberikan peningkatan pada pengelolaan UMKM. Budiyanto (2014), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Pengetahuan tentang pentingnya informasi akuntansi yang terdapat pada perusahaan akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil nantinya. Semakin baik pendidikan yang dimiliki, akan meningkatkan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.

Pelatihan Akuntansi dan Penggunaan Informasi Akuntansi

Hipotesis keempat yang menyatakan pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang berada di Sungai Serut, Kota Bengkulu, secara empiris terbukti didukung. Artinya semakin sering pelatihan akuntansi dilakukan oleh pemilik ataupun karyawan yang bekerja di UMKM dapat meningkatkan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM Hasil penelitian ini sejalan dengan teri motivasi yang menjelaskan bahwa motivasi sendiri timbul ketika pelaku usaha sudah mengetahui kebutuhan dan kekurangannya, yang kemudian membuat mereka mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut agar tujuan dari kegiatannya bisa tercapai. hal tersebut berpengaruh pada kinerja yang dilakukannya. Kemudian pelaku bisnis akan terus mengevaluasi dan menilai kebutuhannya setelah melihat hasil atau dampak dari kinerja yang dilakukannya. Pelatihan akuntansi dapat dikatakan sebagai pendongkrak penggunaan informasi akuntansi di UMKM.Pemilik/pengelola keuangan UMKM akan memiliki kemampuan untuk menguasai teknis akuntansi jika mengikuti pelatihan akuntansi. Ilmu pengetahuan dari pelatihan akuntansi yang diikuti akan meningkatkan pemahaman atas pentingnya informasi akuntansi dan hal tersebut akan mendorong UMKM dalam penggunaan informasi akuntansi Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Zuliyati (2015), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pelatihan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi pada UMKM. Semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti oleh pemilik/manajer, maka penggunaan informasi akuntansi pada UMKM meningkat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi pada UMKM yang berada di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Skala usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, usaha yang semakin besar akan memberikan banyak pertimbangan bagi pemilik UMKM untuk dapat menggunakan dan meningkatkan penggunaan informasi akuntansi untuk dapat menunjang UMKM di masa yang akan datang.
2) Umur usaha berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, semakin lama umur UMKM maka kelangsungan usaha akan semakin lama dan pengetahuan akan semakin luas tentang pentingnya informasi akuntansi, sehingga hal tersebut akan mendorong UMKM untuk lebih memahami pentingnya penggunaan informasi akuntansi
3) Pendidikan berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, pengetahuan tentang pentingnya informasi akuntansi yang terdapat pada UMKM akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil nantinya sehingga semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, akan meningkatkan penggunaan informasi akuntansi pada UMKM.
4) Pelatihan akuntansi berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi akuntansi, hal ini menunjukkan bahwa pemilik/pengelola keuangan UMKM akan memiliki kemampuan untuk menguasai pengetahuan mengenai akuntansi jika mengikuti pelatihan akuntansi. Semakin banyak pelatihan akuntansi yang diikuti akan meningkatkan pemahaman atas pentingnya informasi akuntansi dan hal tersebut akan mendorong UMKM dalam menggunakan informasi akuntansi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan serta pertimbangan masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran dalam penelitian ini adalah di harapkan dapat mengalokasikan waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan penelitian serupa, hal ini bertujuan untuk dapat menjaring seluruh sampel yang di butuhkan, mengingat penelitian ini dilaksanakan masih dalam pandemi sehingga terkadang menyebabkan sampel yang dituju tidak berada di lokasi ataupun kendala lainnya.

.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, & Zuliyati. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Pada Umkm Kain Tenun Ikat Troso Jepara*) Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015, 2012, 41–52.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.

Aufar, A. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi padaUMKM (Survei pada Perusahaan Rekaan PT. PLN (Persero) di Kota Bandung)*. Universitas Widyatama.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII.* Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Hadi. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM Di Kabupaten Sragen*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Handayani. (2011). *Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil Dan Menengah.* Jurnal Akuntabilitas. *1*.

hendra. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Tenun Troso Jepara. *Universitas Islam NU*.

Ikhsan, Arfan, Aziza, Nurna, Hayat, Atma, Lesmana, Sukma, Albra, Wahyuddin, Khaddafi, Muammar, & Oktaviani, A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Madenatera.

Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Salemba Empat.

Nahar, & Widiastuti. (2011). Analisis Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Industri Menengah Di Kabupaten Jepara. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*.

Robert, & Kinicki. (2003). Perilaku Organisasi: Organizational Behavior. *Salemba Empat*.

Sari, & Setyawan. (2012). Persepsi Pemilik Dan Pengetahuan Akuntansi Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Atas Penggunaan Informasi Akuntansi. *Universitas Gunadarma*.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi dan R&D)*. Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *SPSS Untuk penelitian*. Pustaka Baru Press.

Tuti, & Dwijayanti. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP. *Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.*

Wahyudi, M. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Yogyakarta. *Universitas Diponogoro*, *5*(August), 12–42.

Whetyningtyas, A. (2016). Determinan Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Aprilia Whetyningtyas Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, *31*(2), 88–96.

Yasa, Herawati, & Sulindawati. (2017). Pengaruh Skala Usaha, Umur usaha, Pengetahuan dan Akuntansi terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kecamatan Buleleng dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai variabel Pemoderasi. *E-Journal S1 Ak*.

Analisis Peran Inspektorat Dalam Menyelesaikan Temuan Audit Menggunakan Konsep *Fraud Triangle*

Ari Nugroho Cahyono
Universitas Muhammadiyah Kendal Batang-*ari8cahyono@gmail.com*[1]

Abstract—*The function of the inspectorate as an internal auditor will be very important in detecting fraud and resolving fraud so that corruption can be prevented. This study aims to analyze the audit process carried out by the DIY Inspectorate in detecting fraud to resolve one of the audit findings and then analyze the case using the fraud triangle theory. The research was conducted at the DIY Inspectorate with a case finding on UPTD in 2017. The method used in this research is descriptive qualitative research with data collection techniques using interviews, and document analysis. In this study, the data validity test will use triangulation procedures, member cheking and data reliability. The first result of this study is that the DIY Inspectorate audit process begins with a routine inspection, then the auditor finds fraud through interviews with UPTD employees. The case is followed up by holding a case expose and formulating a solution to the case. The case was then resolved by the UPTD and the DIY Inspectorate. The second research result is a case analysis using the fraud triangle, case pressure because the vendor owner ordered employees not to pay the employment BPJS deposit. The opportunity occurred because the UPTD did not routinely check the employment BPJS payments of vendor employees. The rationalization in this case is that the vendor wants to get more profit than the employment BPJS money that should be paid.*

Keywords: Role of Inspectorate[1]; Implementation of Audit[2]; Fraud triangle[3].

1. PENDAHULUAN

Fraud adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. (Wati ,2019) Pada kenyataannya, *fraud* hampir terdapat di setiap lini pada suatu organisasi, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh seorang pegawai yang tampaknya jujur sekalipun. (Sari & Kusuma,2019) Fraud juga merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh aparatur melalui berbagai cara, berupa kelicikan dan kebohongan sehingga sering tidak disadari oleh masyarakat. Tindakan fraud yang dilakukan oleh aparatur meliputi penyalahgunaan aset, curang dalam membuat laporan keuangan, dan korupsi. Fraud sering terjadi di Indonesia, khususnya pemerintahan atau sector public seperti perkara spekulasi korupsi yang dilakukan oleh segenap pejabat pada jenjang pusat hingga daerah. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)

Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan dan menerapkan audit secara berkala. Korupsi di lembaga gereja menunjukkan bahwa audit belum dilakukan dengan cara yang efektif sejak awal, dan belum ada upaya mencegah *fraud* (tindakan menyimpang dan menyalahgunakan dana. (Ayu, 2020) Apabila audit pada sebuah organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan sangat besar, begitu juga sebaliknya ketika pengendalian yang diterapkan kuat maka kemungkinan terjadinya *fraud* dan kesalahan dapat diperkecil, walaupun *fraud* dan kesalahan masih terjadi, tetapi hal tersebut dapat diketahui lebih cepat dan dapat segera diatasi. (Indraswari, & Yuniasih., 2022)

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap pencegahan fraud adalah audit internal. Audit internal dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern dan operasi dalam suatu organisasi. [3] Bebrapa penelitian menunjukkan bahwa adanya proses audit dapat mencegah fraud seperti penelitian yang dilakukan oleh (Christ, dkk., 2021) menunjukkan bahwa Faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan, yaitu: audit internal, kesadaran anti fraud dan independensi auditor internal. Pengendalian internal memiliki peran vital dalam suatu entitas, yaitu mencegah dan mendeteksi tindakan kecurangan, serta mengawasi, mengarahkan, dan melindungi sumber. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, diharapkan pemimpin dapat mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang baik. (Zakaria, A., dkk., 2021)

Namun beberapa penelitian tersebut hanya menjelaskan konsep audit, bukan praktik yang sebenarnya. [8] Sangat jarang penelitian tentang audit yang menunjukkan proses nyata mulai dari pemeriksaan sampai penyelesaian temuan. Pentingnya mengetahui praktik audit bedasarkan kasus nyata agar penelitian bukan hanya bersifat teori namun juga sesuai dengan praktik audit yang ada dilapangan. Manfaat fraud triangle memberi sudut pandang mengapa fraud bisa terjadi sehingga bisa mencegaf fraud terulang kembali. (Pamungkas, W., 2022)

Pada tahun 1953, seorang peneliti yang Bernama Donald R. Cressey menerbitkan sebuah teori yang dinamakan *fraud triangle. Fraud triangle* adalah teori yang meneliti faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. *Fraud triangle* ini menjelaskan alasan dibalik terjadinya kecurangan yang terdiri dari tiga elemen yaitu tekanan *(pressure)*, kesempatan *(opportunity),* dan rasionalisasi *(rationalization)*[9] Banyak teori yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya korupsi, salah satunya yaitu fraud triangle. Teori ini menyatakan fraud dapat terjadi oleh tiga faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. (Awaliyah, 2023)

Dalam penelitian ini memilih inspektorat karena sebagai lembaga auditor internal pemerintah yang berperan paling depan untuk mencegah fraud. Selain itu inspektorat jogja meiliki kewenangan dan keleuasaan atas pemeriksaan laporan keuangan di pemerintah daerah. Inspektorat juga menjadi internal audit yang sangat memahami karakteristik budaya dan sistem pelaporan keuangan di pemerintah daerah. (Sabatian, dkk., 2020)

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang ditemukan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran inspektorat dalam menyelesaikan suatu temuan audit?
2. Apakah proses audit dan penyelesaian temuan sesuai dengan konsep fraud triangle?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses audit internal dapat mendeteksi suatu temuan dan peran inspektorat dalam menyelesaikan suatu temuan audit tersebut. Selanjutnya peneliti ingin menganalisis proses audit tersebut menggunakan pendekatan konsep fraud triangle untuk mengetahui penyebab terjadinya fraud.

2.1 Teori Fraud Triangle (*Fraud Triangle Theory)*



Gambar 2.1 Konsep *Fraud Triangle.*

Donald R Cressey (1953) mengajukan teori *fraud triangle* yang berisi penjelasan berkaitan penyebab terjadinya penipuan yang dikenal dengan istilah segitiga penipuan. Menurut Donald R. Cressey dalam. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) Fraud financial statement umumnya disertai oleh tiga keadaan, ketiga keadaan tersebut merupakan tekanan, peluang serta rasionalisasi. Faktor terakhir mengarah pada perilaku curang merupakan rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan sikap yang membenarkan kecurangan yang telah dilakukan.

2.1.1 Tekanan (*Incentive* atau *Pressure*) Komponen pertama dari segitiga penipuan merupakan tekanan yang bisa menimbulkan sikap tak etis. Berdasarkan komponen *pressure atau tekanan*, terbisa berbagai keadaan umum yang bisa menyebabkan terjadinya *fraud*. Salah

satu tekanan yang mungkin dilaksanakan karyawan merupakan menjalankan penyelewengan uang bisnis oleh karyawan yang berasal dari suatu tekanan yang memaksanya. (Rianti, N., 2020)

2.1.2 Kesempatan (*Opportunity)*

Peluang dijadikan salah satu faktor atau situasi yang bisa membuka kesempatan dalam menjalankan kecurangan. Menurut SAS No. 99,,fraud financial statement bisa muncul pada tiga macam kesempatan, yaitu nature of industry, ineffective monitoring, serta *organization structure.* (Rianti, N., 2020)

2.1.3 Rasionalisasi (*Rationalization)*

Sikap atau rasionalisasi menjelaskan sikap, kelakuan, serta seperangkat hukun moral yang memungkinkan manajer atau pegawai berencana menjalankan ketakjujuran, atau jika mereka berada dalam lingkungan yang cukup stres untuk membenarkan tindakan ketakjujuran. Rasionalisasi merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemui dalam kecurangan. (Rianti, N., 2020) Menurut teori *fraud triangle*, bisa dikatakan jika aktivitas penipuan, tiga faktor risiko wajib dipenuhi, yaitu tekanan, peluang, serta rasionalisasi. Pada kasus penipuan laporan keuangan, manajer mempunyai kesempatan dalam mengganti laporan keuangan untuk menjaga tarif saham permanen maksimal. Sebab asertaya benturan kepentingan, kesempatan tadi dimiliki oleh manajemen merupakan auditor disewa oleh lembaga, sampai mengganggu independensi auditor. Jika manajemen percaya bahwa tindakan mereka merupakan hal yang biasa bagi perusahaan lain, faktor rasionalisasi terpenuhi. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)

2.2 Audit Internal

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.PER/05/M.PAN/03/2008 audit dapat didefinisikan sebagai: “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.” (Cahyaningtyas, dkk., 2023)

2.2.1 Audit sektor publik

Auditor pemerintah (sektor publik) ialah auditor yang dipekerjakan oleh pemerintah bersifat independen dan bertujuan mendukung kongres dalam memenuhi tanggug jawab konstitusionalnya dan membantu meningkatkan kinerja serta menjamin akuntabilitas pemerintah (Cahyaningtyas, dkk., 2023)

2.2.2 Audit internal sektor publik

Pengawasan internal diperlukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tata kelola yang baik. Pemerintah membentuk aparat pengawas internal pemerintah atau APIP untuk memastikan akuntabilitas pemerintah dengan baik. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

APIP merupakan auditor internal di sektor pemerintah yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Itama) yang bertanggung jawab kepada Menteri/Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPDN); Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2008 dalam Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/ 03/2008. SA-APIP adalah sebagai berikut: 1. Prinsip-Prinsip Dasar, 2. Standar Umum, 3. Standar Audit Kinerja, 4. Standar Audit Investigatif. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

2.2.2.1 Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia disusun untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan oleh APIP adalah Standar Atribut dan Standar Pelaksanaan. (Herawaty, N., & Hernando, R., 2021)

2.3 Tahapan Audit

Tahapan audit umum menurut Taylor dan Glezen (1997) dalam BPKP (2009) yang selanjutnya diadaptasi untuk audit operasional antara lain, sebagai berikut: 1. Persiapan

audit: Survei pendahuluan.,2. Evaluasi sistem pengendalian manajemen, 3. Pengujian substantif dan pengembangan temuan, 4. Pelaporan dan tindak lanjut. (Wati, R., 2019)

2.3.1 Program Audit

Program Kerja Audit (PKA) merupakan rancangan prosedur dan teknik audit yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam menjalankan kegiatan audit untuk mencapai tujuan audit. PKA disusun setelah auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang tujuan audit pada setiap tahap. Konsep PKA disiapkan oleh ketua tim kemudian pengendali teknis melakukan tinjauan untuk memberikan tambahan informasi dan arahan. Selanjutnya, PKA ditinjau kembali oleh pengendali mutu untuk disetujui. (Wati, R., 2019)

2.3.2 Teknik Audit

Dalam kegiatan audit terdapat sepuluh jenis teknik audit antara lain, sebagai berikut: 1. Prosedur Analitis, 2. Inspeksi, 3. Konfirmasi, 4. Permintaan Keterangan, 5. Perhitungan, 6. Penelusuran, 7. Pemeriksaan Bukti Pendukung, 8. Pengamatan, 9. Pelaksanaan Ulang, 10. Teknik Audit Berbantuan Komputer. (Wati, R., 2019)

2.3.3 Laporan Hasil Audit

Laporan hasil audit merupakan hasil akhir dari proses audit. Auditor harus membuat laporan hasil audit sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai/telah ditentukan setelah auditor selesai melakukan kegiatan audit. Laporan hasil audit menurut PER/05/M.PAN/03/2008 bertujuan antara lain untuk: (1) mengomunikasikan hasil audit kepada auditan dan pihak lain yang berwenang berdasarkan peraturan; (2) menghindari kesalahpahaman dalam audit; (3) menjadi bahan untuk melakukan perbaikan bagi auditan dan instansi terkait; dan (4) memudahkan pemantauan tindak lanjut atas pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan. (Wati, R., 2019

2. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah riset kualitatif deskriptif. Hennink et al. (2010) dalam (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021) mengatakan bahwa riset kualitatif merupakan riset yang dilakukan untuk mempelajari pengalaman atau fenomena yang dialami partisipan dengan detail. Hal ini dilakukan dengan beberapa metode pengambilan data seperti wawancara mendalam, focus group discussions, atau observasi. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)

Selain itu, pendekatan riset kualitatif juga dapat mengidentifikasi isu-isu yang terjadi dari sudut pandang partisipan. Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. [21] Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan UPTD ABC DIY. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)

B. Objek Penelitian

Penilitian ini mengambil objek di Inspektorat Provinsi Yogyakarta dengan studi kasus pada salah satu fraud yang terjadi pada salah satu SKPD di Provinsi Yogyakarta. Terdapat 5 narasumber sebagai objek pengumpulan data melalui wawancara mendalam yaitu 1 orang Inspektur Pembantu Inspektorat DIY, 1 orang Ketua Tim Audit Inspektorat DIY, 1 orang auditor Inspektorat DIY, 1 orang kepala UPTD dan 1 orang kepala tata usaha UPTD.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. (Zakaria, A., dkk., 2021) Data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen di Inspektorat DIY dan SKPD.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan riset lapangan (field research). (Zakaria, A., dkk., 2021) Riset lapangan adalah riset yang dilakukan dengan mendatangi

secara langsung objek yang menjadi penelitian, yaitu Kantor UPTD dan kantor Inspektorat DIY.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar (Zakaria, A., dkk., 2021). Dalam penelitian ini analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari analisis dokumen dan hasil wawancara.

F. Pengujian Validitas

Uji validitas dalam penelitian kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. (Zakaria, A., dkk., 2021) Dalam penelitian ini uji validitas data akan menggunakan prosedur triangulasi, member cheking dan keandalan data.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Inspektorat dalam menyelesaikan fraud



Gambar 3.1 Kronologi terjadinya fraud dan penyelesaian fraud

Sesuai dengan analisis hasil transkrip wawancara, berikut merupakan penjelasan gambar 3.1 tentang proses bagaimana Inspektorat DIY dalam mendapatkan temuan. Inspektorat melaksanakan pemeriksaan rutin atau pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang biasanya dilakukan dalam waktu triwulan atau setiap tiga bulanan. Pelaksanaan audit dilakukan secara berkala dan sistematis untuk mencegah terjadinya fraud pada suatu organisasi. (Wati, R., 2019)

> *"proses temuan terjadi melalui mekanisme pemeriksaan rutin (audit), kami diperiksa setiap triwulan itu ada pemeriksaan, kebetula pada triwulan keempat ini ada pemeriksaan kita mendapatkan temuan bahwa UPTD tersebut tidak menyetorkan jaminan kecelakaan atau klaim BPJS ketenagakerjaan."* (Inspektur pembantu)
>
> *"Eh mas, sebentar mas. Itu kan reguler jadi biasa kecuali kalo ada kasus sih. Kalo kita pemeriksaan reguler itu ya biasa setiap triwulan ya kita periksa. Kebetulan waktu itu kami memiliki jadwal unruk memeriksa UPTD itu"* (Ketua Tim Auditor).

Selanjutnya tim audit melakukan inspeksi dan mereview dokumen yang ada di UPTD ABC. Salah satu tim audit mewawancarai tenaga kerja yang bekerja di UPTD ABC, melalui wawancara tersebut auditor mendapatkan informasi bahwa para tenaga kebersihan belum terdaftar atau tidak mengikuti program BPJS ketenagakerjaan. Pemeriksaan dokumen dan wawancara merupakan salah satu cara untuk mengetahui atau mendeteksi terjadinya *fraud.* (Awaliyah, 2023)

> *"Nah kta panggil tenaga kebersihan. Njenengan sebagai anu memperoleh ndak kewajibannya kaitannya dengan BPJS setelah itu kita panggil setelah itu kita tanya*

ternyata ada yang bilang ikut ada yang bilang belum. Nah tetapi di kontrak kok dianggarkan, nah gitu. (Ketua Tim Auditor)*Nah ini mulai sudah satu ketahuan kan terdapat indikasi itu kita panggil yang lainnya, ternyata memang seperti itu. Jadi ada memang istilahnya perbuatan yang sebetulnya solah-olah dari rekanan ada unsur sedikit kesengajaan mugi-mugi ora konangan."* (Auditor)*.*

Melalui informasi awal itulah, tim audit mereview dokumen kontrak atau SP3 antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. Dengan bukti awal tersebut, tim audit mengomunikasikan pada pihak UPTD ABC untuk mengklarifikasi ke pihak ketiga. Ternyata memang pihak ketiga belum mendaftarkan para tenaga kebersihan dalam program BPJS ketenagakerjaan. Ketidaklengkapan dokumen bisa menjadi bukti terjadinya *fraud* dalam sebuah organisasi pemerintahan. (Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P., 2021)

"Ya kita panggil orangnya, saya ikut bayar sendiri karena sudah dulu. Nah tapi kok ini dianggarke? Lalu satu-satu kita panggil ternyata anu, muncullah angka seperti ini. Intinya itu nggak, bukan khusus ini biasa ini. Terus kan mulai kita cermati terus rekanannya kita panggil. Njenengan kok terima duit segini kok njenengan ndak anggarke gitu, ndak dianggarkan kesana? Ohh ini sudah saya bayarkan ternyata nggak gitu nggak dibayarke, terus kita klaim terus mohon ini disesuaikan." (Ketua Tim Auditor)

Proses komunikasi temuan dan pembuatan BAP tersebut disebut dengan penegasan atau komunikasi awal temuan sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan (LHP). Ketika semua pihak sudah menandatangani BAP dan sepakat untuk segera menyelesaikan temuan, selanjutnya tim audit melakukan gelar perkara atau *expose* temuan. *Expose* temuan ini dilaksanakan oleh tim audit yaitu ketua dan anggota tim serta disupervisi oleh pengendali teknis audit (Dalnis) dalam internal inspektorat. Kegiatan lain yang dilakukan dalam *expose* juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Temuan kasus keterlambatan pembayaran BPJS ketenagakerjaan ini merupakan kasus yang pertama terjadi di UPTD ABC. Audit juga dapat berperan untuk mencari solusi atas permasalahan *fraud* yang terjadi pada sebuah organisasi. (Pamungkas, W., 2022)

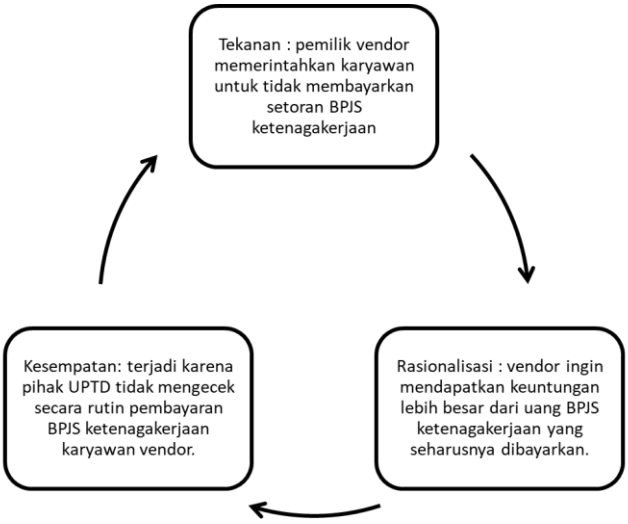
"Lalu perusahaan panggil kesini dengan penyedianya bersama-sama, terus menjelaskan. Ya kadang ada yang jujur dan ada yang berkelit. Kalo misalnya udah berkelit kemudian kita introgasi inspeksi dan dia mengakui, lalu BAP. (Inspektur pembantu) *Bawasannya mengakui bahwa pada bulan sekian belum dibayarkan, kami bersedia membayarkan seperti ini. Tandatangan-tandatangan semua, sudah oke, kuat. Terakir BAP hasil dari klarifikasi temuan itu BAP, bahwa dia bersedia membeyar sekian karena kekurangan ini dan terakir itu BAP."* (Auditor)

Ketika semua pihak sudah menandatangani BAP dan sepakat untuk segera menyelesaikan temuan, selanjutnya tim audit melakukan gelar perkara atau expose temuan. Expose temuan ini dilaksanakan oleh tim audit yaitu ketua dan anggota tim serta disupervisi oleh pengendali teknis audit (Dalnis) dalam internal inspektorat. Expose temuan ini bertujuan untuk merumuskan LHP. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam expose adalah mencari kriteria temuan atau mencari dasar hukum dan peraturan untuk menjadi landasan regulasi atas klaim temuan. Kegiatan lain yang dilakukan dalam expose juga menyusun redaksi LHP serta merumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan. Seluruh proses audit yang telah dilaksanakan harus didokumentasikan kedalam laporan hasil audit (LHP). (Sari, I. M., & Kusuma, H., 2019)

"Tapi sebelumnya juga ada yang namanya expose sebelum pra penegasan itu namanya expose, jadi seluruh auditor yang terlibat mengexpose hasil temuannya untuk koreksi. Dari narasinya apakah ini perlu diklaim atau tidak, itu semua."(Auditor)
"Setelah bukti kasus sudah lengkap dan sudah ada BAP semua pihak yang terkait kemudian kita terbitkan LHP atau laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti" (Ketua Tim Auditor)
"Kalo kita kan kerja tim, nati kita kerjasama dengan ketua tim. Tapi itu sebetulnya yang menentukan ketua tim. Nanti kita juga saling, kadang-kadang yang menemukan kan anggota nah nati dirumuskan bersama-sama. Tapi intinya itu tugas ketua tim" (Inspektur pembantu)

Selanjutnya LHP yang telah dikeluarkan oleh Inspektorat harus dilaksanakan oleh UPTD sehingga fraud yang terjadi bisa diperbaiki dan mencegah fraud terulang kembali. Selain itu perlu adanya monitoring oleh pihak Inspektorat terhadap UPTD atau objek pemeriksaan agar rekomendasi pada LHP telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Rekomendasi hasil audit harus dilaksanakan dan dipantau agar fraud yang terjadi bisa diperbaiki dan mencegah terjadinya korupsi. (Sari, I. M., & Kusuma, H., 2019)

3.2 Analisis fraud triangle terhadap adanya temuan audit



Gambar 3.2 Analisis kasus dengan faraud triangle

Pada gambar 3.2 terlihat bahwa hasil penelitian menunjukkan ada 3 faktor yamg mempengaruhi terjadinya fraud yaitu dimulai dari adanya kesempatan sistem pengawasan internal yang lemah yang dimanfaatkan oleh pemilik vendor untuk menekan para karyawan kontrak untuk tidak membayarkan setoran BPJS Kesehatan. Selanjutnya rasionalisasi vendor yaitu menginginkan keuntungan yang lebih besar dari uang BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan oleh karyawan.

Dalam konteks keuangan publik, penerapan *Fraud Triangle Theory* menjadi penting untuk mencegah dan mengatasi kecurangan. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan, organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi peluang terjadinya kecurangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. (Awaliyah, 2023)

4.2.1 Tekanan (Incentive atau Pressure)

Komponen pertama dari segitiga penipuan merupakan tekanan yang bisa menimbulkan sikap tak etis. Berdasarkan komponen pressure atau tekanan, terbisa berbagai keadaan umum yang bisa menyebabkan terjadinya fraud. (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) Salah satu

tekanan yang mungkin dilaksanakan karyawan merupakan menjalankan penyelewengan uang bisnis oleh karyawan yang berasal dari suatu tekanan yang memaksanya.

Berikut penjelasan dari kepala UPTD yang menjadi objek pemeriksaan Inspektorat DIY.

"Setelah mendapatkan laporan dari Inspektorat kita panggil vendor dan pekerja. Kita tanya kepada pekerja vendor apakah tahu kalo uang BPJS Ketenagakerjaan itu harusnya disetorkan. Kemudia mereka menjawab ya kami tahu tapi kami disuruh diam oleh vendor" (Kepala UPTD). " Kami melakukan kroscek ke para pekerja kenapa mereka tidak menyetorkan uang BPJS Ketenagakerjaan, mereka bilang kalo vendor meminta mereka tidak setor. Vendor meminta pekerja diam dan tidak melaporkan hal tersebut. Jika dilaporkan mereka akan diancam untuk diganti atau diberhentikan" (ketua tim auditor)

Tekanan adalah faktor pertama dalam Fraud Triangle. Ini merujuk pada tekanan finansial atau emosional yang dialami oleh individu. Tekanan finansial dapat terjadi ketika seseorang menghadapi masalah keuangan yang mendesak, seperti utang yang besar atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tekanan emosional dapat meliputi tekanan untuk mempertahankan status sosial, memenuhi ekspektasi, atau memperoleh kekayaan secara cepat. Tekanan ini dapat mendorong seseoranguntuk mencari jalan pintas atau cara tidak etis untuk memperoleh uang atau aset. (Momot, T. dkk., 2021)

3.2.2 Kesempatan(Opportunity)

Peluang dijadikan salah satu faktor atau situasi yang bisa membuka kesempatan dalam menjalankan kecurangan. Menurut SAS No. 99 dalam (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020) fraud financial statement bisa muncul pada tiga macam kesempatan, yaitu nature of industry, ineffective monitoring, serta organization structure.

Melalui informasi awal itulah, tim audit mereview dokumen kontrak atau SPK antara UPTD ABC dengan pihak ketiga penyedia jasa kebersihan. Setelah dilakukan review ternyata memang belum ada bukti atau dokumen pembayaran BPJS ketenagakerjaan yang dilaporkan pihak ketiga ke UPTD ABC. (Momot, T. dkk., 2021)

"Itu memang kesalahan kami karena tidak mengecek dokumen pembayaran BPJS Tenagakerja karyawan, karena yang sudah-sudah itu tidak ada masalah. " (Kepala TU)

"Kayanya yang dokumennya dulu diperiksa, diperiksa kemudian karyawan ditanya, dari TU ditanya kemudian kroscek ke lapangan seperti itu. Jadi disini bisa terjadi celah karena kepala TU itu tidak ngecek dokumen pembayaran BPJS Tenagakerja karyawan". (Auditor 1)

3.2.3 Rasionalisasi (Rationalization)

Sikap atau rasionalisasi menjelaskan sikap, kelakuan, serta seperangkat hukun moral yang memungkinkan manajer atau pegawai berencana menjalankan ketakjujuran, atau jika mereka berada dalam lingkungan yang cukup stres untuk membenarkan tindakan ketakjujuran. Rasionalisasi merupakan salah satu elemen yang paling banyak ditemui dalam kecurangan (Lestari, A, & Nuratama, P., 2020)

"Pihak vendor kita mintai keterangan setelah inspektorat memberitahu kami tentang kasus ini, vendor mengatakan jika mereka menginginkan keuntungan yang lebih banyak dengan cara tidak menyetorkan uang BPJS Tenagakera tersebut. Setelah itu langsung kontrak vendor kita cabut dan vendor harus mengembalikan uang yang tidak disetorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan" (Kepala UPTD)

"Itu ternyata pihak vendor sengaja tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan karena mereka menginginkan keuntungan yang lebih besar. Tapi itu sudah kami tindak, vendor tersebut akhirnya mengembalikan uang yang tidak disetorkan dan kontrak vendor sudah dihentikan oleh pihak UPTD" (Ketua Tim Auditor)

4 KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penyelesaian temuan audit dilaksanakan dengan prosedur audit internal secara sistematis. Berawal dari sidak auditor, menemukan indikasi, pembahasan temuan, peningkatan status temuan, konfirmasi pihak terkait, perumusan temuan, perumusan rekomendasi, pelaksanaan rekomendasi dan pemantauan rekomendasi
2. Dari proses audit dapat disimpulakn bahwa tekanan terjadi kepada pihak supervisor rekanan pekerja agar pekerja tidak perlu mengikuti BPJS. Selanjutnya kesempatan adanya fraud terjadi karena pihak dinas tidak mengecek dokumen karyawan dengan teliti termasuk dokumen BPJS ketenagakerjaan. Selanjutnya rasionalisasi dalam kasus ini adalah pihak vendor tidak mau membayar BPJS ketenagakerjaan karyawan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar

   Saran untuk penelitian selanjutnya adalah bisa menerapkan *variable* yang sama yaitu peran auditor internal dengan objek penelitian selain inspektorat. Ataupun dapat merubah analisis *fraud triangle* dengan konsep atau analisis lain untuk mengembangkan referensi tentang peran internal audit.

DAFTAR PUSTAKA

Awaliyah, Kiswah N. (2023). *Fraud Triangle Theory*: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 5 (2023), e-ISSN 2963-590X

Ayu, N. N. (2020). Financial Statement Fraud Financial Statement Fraud dalam perspektif Fraud Triangle. *The Master Guide to Controllers' Best Practices*, 445–448. https://doi.org/10.1002/9781119723349.ch15

Betri, & Murwaningsih, E. (2021). Auditor toward Internal Audit Effectivenss with Whistleblowing Systems as Moderating Variable. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 6*(21), 62-73. https://doi.org/10.23917/reaksi.v6i1.13863

Cahyaningtyas W., I. Wahyuni, and S. Jayanti, (2023) "Peranan Auditor Internal dalam Upaya Pencapaian Zero Accident di PT Dirgantara Indonesia," *Media Kesehatan Masyarakat IndonesiA*, vol. 22, no. 2, pp. 89-93, Apr. 2023. https://doi.org/10.14710/mkmi.22.2.89-93

Christ, M. H., Eulerich, M., Krane, R., & Wood, D. A. (2021). New Frontiers for Internal Audit Research. *Accounting Perspectives, 20*(4), 449-475. https://doi.org/10.1111/1911-3838.12272

Herawaty, N., & Hernando, R. (2021). Analysis of Internal Control of Good Corporate Governance and Fraud Prevention (Study at the Regional Government of Jambi City). *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, *4*(2), 103–118.

Indraswari, & Yuniasih. (2022). Pengaruh Bystander Effect dan Tekanan Finansial Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) se-Kecamatan Mengwi.

Ismael, H. R., & Kamel, H. (2021). Internal Audit Quality and Earning Management: Evidence from UK. *Managerial Auditing Journal, 35*(7), 951-978. https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2020-2830

Kurnia, Novandino, dan Nur Fadjrih Asyik. 2020. Analisis Fraud Triangle sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(11), 1–22.

Lestari, A. A. M., & Nuratama, I. P. (2020). Pengaruh *Financial Stability, External Pressure, Nature of Industry, dan Rationalization* Terhadap *Financial Statement Fraud* dalam Sudut Pandang *Fraud Triangle* pada Perusahaan Sektor Real Estate and Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 407–435.

Momot, T., Vlasova, O., Gordienko, N., Karpushenko, M., Illyashenko, O., Yaroshenko, I., Solodovnik, O., & Kozlova, A. 2021. Internal Auditing in The Public Sector: Issues of Risks Compliance Application. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, *25*(3), 1–9.

Nurma Awaliah, K. (2023). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi Dan Kecurangan Pada Laporan Keuangan Publik. *Karimah Tauhid*, *2*(5), 1493–1506. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i5.9023

Nuruddinia, M., & Rahmawati, I. P. (2021). Fraud Triangle dan Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, *12*(1), 110–124.

Pamungkas, W. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Independensi, dan Skeptisme Profesional Terhadap Pengungkapan Fraud (Studi Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 15*(1), 99-109.

Rianti, N. (2020). Pengaruh *fraud triangle* terhadap *financial statement* fraud pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2016-2018.

Sabatian, Zakharia, dan Francis M. Hutabarat. 2020. The Effect of Fraud Triangle in Detecting Financial Statement Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 231–244. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.231-244

Sari, I. M., & Kusuma, H. (2019). Fraud Triangle Theory: Pendekatan Strategis Dalam Mendeteksi Korupsi dan Kecurangan pada Laporan Keuangan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(1), 1-12. DOI: 10.18202/jamal.2019.04.10001

Wati, R. (2019). Internal Audit Sebagai Salah Satu Ukuran Sistem Pengendalian dan Pencegahan Terjadinya Fraud. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(2), 1-12. DOI: 10.18202/jamal.2019.08.10007

Zakaria, A., Khumaira, A. R., Utaminingtyas, T. H., Purwohedi, U., & Indriani, S. (2021). Accuracy in Giving an Audit Opinion: Government Internal Auditors' Perspectives. *Quality-Access to Success, 22*(184), 40-48.

Manajemen Laba dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2021

N. Heriyah
Universitas Informatika Dan Bisnis Indonesia-*amoy1904@unibi.ac.id*

Abstract— *Tax avoidance is an effort to fight against taxes carried out legally by taxpayers because it does not conflict with tax provisions. This research is a quantitative descriptive study which aims to determine the effect of earnings management and leverage on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2017-2021 period. The research uses a sample of mining sector companies and uses a purposive sampling technique as a representative sample selection method. The dependent variable in this research is tax avoidance, then the independent variables in this research are earnings management and leverage. The data analysis methods used in this research are the classical assumption test, multiple linear regression analysis, correlation coefficient test, coefficient of determination test and hypothesis test. The results of this research show that: partial earnings management has no influence on tax avoidance, partial leverage has no influence on tax avoidance, simultaneous earnings management and leverage have no influence on tax avoidance*

Keywords: Profit Management, Leverage, Tax Avoidance

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia selama 3 tahun berturut-turut mengalami laju pertumbuhan yang paling sedikit (rendah), yaitu di tahun 2017 perusahaan pertambangan ini hanya berkontribusi sebesar 0,69%, selanjutnya di tahun 2018 perusahaan tersebut berkontribusi sebesar 2,16%, dan di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,22%. Tahun 2020 merupakan tahun yang paling berdampak dari adanya Covid-19, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kerugian. Kemudian, di tahun selanjutnya perusahaan di Indonesia menyesuaikan dan mengupayakan kembali terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari seluruh sektor perusahaan di tahun 2021.Praktik penghindaran pajak ke negara tax haven hingga saat ini sudah umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional yang bertujuan untuk menekan ongkos bisnisnya. Dengan adanya praktik tersebut, maka mengakibatkan negara-negara saling berkompetisi untuk menurunkan tarif pajak serta melakukan berbagai inovasi keringanan pajak guna menarik perusahaan asing untuk melakukan investasi di negara mereka. Adapun berdasarkan motivasi pajaknya, yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak agar menghasilkan laba yang optimal serta adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat, maka hal ini dapat memotivasi manajemen perusahaan untuk dilakukannya praktik pengelolaan laba atau yang biasa dikenal dengan istilah manajemen laba (Putri & Rahmini, 2021). Selain itu, menurut Alam & Fidiana (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang berfokus pada laba akan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam efisiensi biaya salah satunya adalah efisiensi biaya pajak dengan cara melakukan perencanaan pajak, dimana hal tersebut merupakan langkah awal dari manajemen laba. Fahmi (2020) dalam bukunya, menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat Debt to Equity Ratio (DER) yang melebihi nilai 66%, maka perusahaan tersebut sudah dianggap dalam kategori perusahaan yang beresiko. Selain itu berdasarkan data tabel di atas juga, tingkat rasio DER yang dihasilkan oleh perusahaan tambang selain Bumi Resources ini memperoleh hasil yaitu sebesar 66%, 65% dan 58%. Meskipun perusahaan yang berkode ADRO, ANTM, serta UNTR ini menunjukkan perusahaan yang tidak terbilang beresiko, namun nilai yang dihasilkan hampir dan bahkan mencapai batas yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan fenomena di atas, serta adanya perbedaan asumsi dari hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh manajemen laba dan leverage terhadap tax avoidance**.**

Menurut Hermawan & Salim (2018) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Laba”

menyatakan bahwa intervensi (campur tangan) dan istilah mengelabui sering digunakan sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai kecurangan. Sementara pihak lain beranggapan bahwa aktivitas rekayasa manajerial ini bukan merupakan kecurangan, hal ini dikarenakan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan merupakan metode dan prosedur yang diakui dan diterima secara umum. Menurut Sulistyanto (2014) secara umum dalam menentukan indikator manajemen laba, terdapat 3 (tiga) model empiris yang dapat digunakan yaitu model yang berbasis akrual agregat (aggregate accruals), akrual khusus (specific accruals), dan distribusi laba (distribution of earnings). Namun sejauh ini hanya model berbasis aggregate accruals yang diterima secara umum sebagai model yang paling kuat dalam mendeteksi manajamen laba. Seiring dengan perkembangan penelitian, model Jones ini telah dilakukan modifikasi (pembaharuan) oleh Dechow, Sloan & Sweeny pada tahun 1995, sehingga model tersebut dikenal hingga saat ini dengan model Jones modifikasian (modified Jones model 1995). Secara empiris nilai Discretionary Accrual (DA) dapat bernilai nol, positif maupun negatif. Nilai nol menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan yaitu dengan pola perataan laba (income smoothing), sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan yaitu dengan pola penaikan laba (income maximization), serta nilai negatif menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang dilakukan yaitu dengan pola penurunan laba (income decreasing) (Sulistyanto dalam Nopiani, 2021). Nilai discretionary accruals diperoleh dengan cara menghitung selisih dari Total Accruals (TAC) dengan Nondiscretionary Accruals (NDAC). Dalam memperoleh nilai nondiscretionary accruals, maka terlebih dahulu harus menghitung nilai total accruals, yang dihitung dengan menggunakan pendekatan Modified Jones Model (1995).

Menurut Fahmi (2020) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan” menyatakan bahwa leverage merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Kemudian dijelaskan juga bahwa penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan masuk ke dalam kategori extreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Maka dari itu, sebaiknya perusahaan harus menyeimbangkan beberapa utang yang layak diambil dan dari mana sumber- sumber yang dapat digunakan untuk membayar utang.

Menurut Tanjaya & Nazir (2021) menyatatakan bahwa leverage mencerminkan seberapa besar pendanaan entitas yang berasal dari utang.

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan (Ngadiman et al, 2014; Prasetyo 2017). Menurut Pohan (2017), penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Organization for Economic Coorporation and Development (OECD) menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1.Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2.Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3.Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk., 2016).

Menurut Scott (2015), pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua diantaranya:

1.Melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya-biaya politik (oportunistic Earnings Management).
2.Dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila manajer sering berusaha menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang dicapai (Priantara, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang gunakan pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertambangan yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode peneltian 5 (lima) tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2017-2021, yang berjumlah 44 perusahaan pertambangan. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak di mana harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1.Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian (2017-2021).
2.Perusahaan sektor pertambangan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah (IDR).
3.Perusahaan sektor pertambangan yang telah memenuhi kelengkapan data laporan keuangan selama periode penelitian (2017-2021).
4.Perusahaan yang melaporkan akun pendapatan selama periode penelitian (2017-2021).
5.Perusahaan yang melaporkan pembayaran pajak selama periode penelitian (2017-2021).
6.Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menghasilkan kerugian pada income statement nya selama periode penelitian (2017-2021).

Teknik pengujian data dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi dengan menggunakan software SPSS versi 25. Pengujian data yag dilakukan meliputi Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengolahan data dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel manajemen laba dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Manajemen Laba dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2021”. Berdasarkan hasil dari uji penelitian yang telah dilakukan maka berikut ini merupakan pembahasan penelitian yang diperoleh:

1)Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan uji yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021, dengan hasil t hitung sebesar -0,233 dimana nilai t hitung yang diperoleh tersebut lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,018 serta diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,817, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka hasil hipotesis adalah H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accrual berpengaruh terhadap tax avoidance (penghindaran pajak) yang diproksikan dengan menggunakan CETR. Dimana berdasarkan teorinya, manajemen laba (earning management) merupakan suatu tindakan untuk mengatur laba sesuai keinginan pihak-pihak tertentu, terutama manajemen perusahaan (Fahmi, 2018). Sehingga manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manejemen perusahaan dapat berupa income decreasing (meminimalkan laba) atau income maximization (memaksimalisasi laba).

Berdasarkan agency theory yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent, dimana agent ini sebagai manajer perusahaan dan principal sebagai stakeholder/pemegang saham, maka perusahaan tentunya akan lebih menekankan pada peningkatan laba (income maximization) daripada meminimalkan laba (income decreasing). Hal ini dikarenakan principal maupun investor (kreditur) lebih menyukai/tertarik pada laba yang meningkat, dimana dengan meningkatnya laba maka hal ini akan berdampak pada return yang akan mereka terima. Sehingga mengacu pada dasar teori yang ada dan dibuktikan dengan adanya hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan yang penulis jadikan sampel penelitian melakukan manajemen laba dengan cara yang sebaliknya yaitu income maximization (memaksimalkan laba), yang artinya perusahaan yang dijadikan sebagai sampel penelitian lebih mementingkan perspektif investor dibandingkan pemerintah karena dengan semakin tingginya laba yang dihasilkan maka semakin baik kinerja perusahaan di perspektif investor dan hal ini berarti tidak terdeteksi terjadinya praktik tax avoidance (penghindaran pajak) dalam suatu perusahaan

2)Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa variabel leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di

BEI periode 2017-2021 dengan hasil t hitung sebesar -0,074, dimana nilai t hitung yang diperoleh tersebut lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,018 serta diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,942, dimana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka hasil hipotesis adalah H0 diterima dan H2 ditolak, yang berarti hipotesis yang kedua ditolak atau tidak dapat diterima.

Leverage merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Fahmi, 2020). Dimana tingkat leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan menggunakan nilai DER yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan entitas untuk melunasi seluruh liabilitasnya dengan modal atau ekuitas entitas.

Berdasarkan teori keagenan (agency theory) yang menjelaskan bahwa principal sebagai pemberi kerja yang mempekerjakan agent untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan, maka

3)Pengaruh Manajemen Laba dan Leverage Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, hasil uji F pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa F hitung 0,029 lebih kecil dari F tabel sebesar 3,22 dan menunjukkan tingkat signifikansinya yaitu 0,971 > 0,05. Sehingga hipotesis yang diperoleh dari hasil uji F ini adalah manajemen laba dan leverage secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan hipotesis awal yang mana disebutkan bahwa manajemen laba dan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Siregar, Rahman & Aryathama (2022), Hidayat & Wijaya (2021), Rahmadani, Muda dan Abubakar (2020), Henny (2019) serta Alam & Fidiana (2019) yaitu tidak adanya pengaruh terkait manajemen laba terhadap tax avoidance. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan peneliti lainnya yaitu penelitian menurut Wardani, Dewanti & Permatasari (2019) yang menyatakan hasil bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Berdasarkan agency theory yang terdapat dalam penelitian ini, menjelaskan terkait hubungan kontraktual antara principal dan agent, dimana agent ini sebagai manajer perusahaan dan principal sebagai stakeholder/pemegang saham. Pincipal mempekerjakan agent untuk melakukan sejumlah jasa dan memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga berdasarkan teori yang ada dan dibuktikan dengan adanya hasil pengujian, maka hal ini dapat terjadi dikarenakan meminimalisasi laba dengan tujuan terkait pembayaran pajak seringkali bertentangan dengan adanya tekanan untuk menaikkan laba, hal tersebut cenderung terjadi pada perusahaan go public.

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini mengenai variabel- variabel yang digunakan yaitu manajemen laba dan leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021 sebagai berikut:

1)Manajemen laba tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.

2)Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017- 2021.

3) Manajemen laba dan leverage secara bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

DAFTAR PUSTAKA

Adyastuti, Nurul Azizah & Muhammad Khafid. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba dengan Kompensasi Bonus sebagai Variabel Moderating (*11 April 2022). (Vol.6 – ISSN 2548-7507*)

Aprianto, Ade; Naomi Nessyana Debataraja & Nurfitri Imro'ah. (2020). Metode Cochrane Orcutt Untuk Mengatasi Autokorelasi Pada Estimasi Parameter Ordinary Least Square. *(Volume 09 Nomor 1)*

Fahmi, Irham. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Ghozali, imam. (2017). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Unversitas Diponegoro.

Hariani, Aprilia. (2023). DPR: Rasio Pajak 15 Persen, Penerimaan Bisa Capai Rp 3 Ribu T.https://www.pajak.com/pajak/dpr-rasio-pajak-15-persen-penerima an-bisa-capai-rp-3-ribu-t/. Diakses pada 1 Juni 2023.

Heriyah, N. (2020). The Effect Of Return On Assets, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance On Manufacturing Companies Listed On The Idx. *(Volume 4 Nomor 2 – ISSN 26558319).*

Hermawan, Atang & Ivan Julius Salim. (2018). Manajemen Laba. Bandung: Adhi Sarana Nusantara.

Hidayatullah, Syarif, dkk. (2023). *Metodologi Penelitian Pariwisata.* Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Hidayat, Hanafi & Wijaya Suparna. (2021). Pengaruh Manajemen Laba dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. (Volume 25 Nomor 2).

Toumi, Fadoua; Mohamed Amine Bouraoui & Hichem Khlif. 2022. National Culture and Tax Avoidance: a Quantile Regression Analysis. *(Volume 40 Nomor 2 – ISSN 25360051).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Wardani, Dewi Kusuma; Widyani Indah Dewanti & Nur Indah Permatasari. (2019). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan dan Leverage Terhadap Tax Avoidance*. (Volume 15 Nomor 2 -ISSN 24772984.*

Widarsa, I Ketut Tangking; Putu Ayu Swandewi Astuti & Ni Made Dian Kurniasari. (2022). Metode Sampling Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan. Bali:Baswara Press.

Wijaya, Intan Putri; Siti Nurlaela & Yuli Chomsatu. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. (Volume 18 Nomor 1 – ISSN 02167786).

Yanto. (2020). *Konsep Dasar dan Aplikasi Statistika Inferensi Untuk Teknik Industri*.Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Penerapan Dan Pelaksanaan Akuntansi Lingkungan Di RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan

Santi[1],Upi Niarti[2],Meriana[3],Paddery[4]
Universitas Terbuka-*santi@gmail.com*
Politeknik Raflesia-*niarti@gmail.com*
-merianansi@gmail.com
-paddery@gmail.com

Abstrak*-Pengurusan area ialah bentuk tanggung jawab tiap badan ataupun industri yang menciptakan produk ataupun pelayanan buat melaksanakan aktivitasnya. Bagi Elyafei(2012), dampak aktivitas pembedahan sesuatu industri, bagus positif ataupun minus, hendak membagikan akibat langsung ataupun tidak langsung kepada lingkungan dekat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pelaksanaan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo. Langkah- langkah analisa informasi yang dicoba merupakan: 1). Pengumpulan informasi berbentuk akta, arsip, serta hasil tanya jawab ataupun pemantauan setelah itu dipilih serta diorganisir dengan cara analitis buat mengenali dokumen- dokumen yang relevan selaku bawah membuat balasan atas sesuatu kasus. 2). Memastikan bayaran area 3). Analisa pengeluaran atau bayaran area hidup bersumber pada pangkal serta peruntukan anggaran RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat 4 kesimpulan yang didapat, salah satunya adalah RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tidak melakukan akuntansi lingkungan hidup, terbukti dengan tidak dibuatnya laporan khusus mengenai biaya lingkungan hidup. Memang belum ada standar akuntansi yang mewajibkan penerapan akuntansi lingkungan hidup di Indonesia.*

Kata Kunci: Akuntansi Lingkungan, Penerapan dan Pelaksanaan

1.PENDAHULUAN

Pengurusan area ialah bentuk tanggung jawab tiap badan ataupun industri yang menciptakan produk ataupun pelayanan buat melaksanakan aktivitasnya. Bagi Elyafei (2012), dampak aktivitas pembedahan sesuatu industri, bagus positif ataupun minus, hendak membagikan akibat langsung ataupun tidak langsung kepada lingkungan dekat.

Bagi Islamey (2016), industri membutuhkan sistem akuntansi area buat mengatur tanggung jawab industri sebab pengurusan kotoran yang dilakukan industri membutuhkan pengukuran, penilaian, pengumuman serta peliputan. Memberi tahu bayaran pengurusan kotoran bersumber pada kemampuan industri.

Akuntansi area ialah pengembangan akuntansi sosial selaku wujud tanggung jawab sosial dalam aspek ilmu akuntansi yang bermaksud buat mengenali, menulis, mengukur, menyuguhkan serta mengatakan akuntansi area. Lewat akuntansi area, badan serta bidang usaha bisa lebih patuh dalam pengelolaan kotoran dan dalam operasionalnya buat mengurusnya terlebih dulu buat meminimalkan materi- materi beresiko untuk area kala dibuang. Tengah dkk.(2022) menciptakan kalau RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo mengenali serta mengukur bayaran pengurusan kotor walaupun keadaannya sedang kurang maksimal.

Industri pula hendaknya membuat akun khusus bayaran pengurusan kotoran dalam informasi keuangannya supaya para konsumen informasi finansial bagus dalam ataupun eksternal memiliki agama kalau industri sudah mengatur kotoran dengan bagus, perihal ini ditunjukkan dengan terdapatnya bayaran spesial pengurusan kotoran. Profit lain untuk industri yang mempraktikkan akuntansi area yang bagus merupakan terhindarnya bayaran lingkungan dampak membuang kotoran tanpa pengurusan terlebih dulu yang berakibat minus kepada area. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 mengenai Kesehatan Area Rumah Sakit yang mengharuskan rumah sakit buat melakukan pengurusan area hidup selaku bentuk tanggung jawab rumah sakit kepada area sekolah. Bersumber pada

hukum No Ketetapan No 44 Tahun 2009 mengenai Rumah Sakit mengharuskan tiap rumah sakit menulis serta memberi tahu semua kegiatan rumah sakit.

Bersumber pada hukum ini, berarti buat melaporkan aktivitas pengurusan area hidup yang dicoba rumah sakit selaku wujud tanggung jawab pengurusan area hidup rumah sakit. Oleh sebab itu, aplikasi akuntansi area ialah sesuatu keinginan berarti yang wajib dilaksanakan untuk rumah sakit yang merupakan badan yang beranjak di aspek pelayanan kesehatan pada warga.

Bersumber pada kejadian yang terjalin di Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Kanujoso Djatiwibowo balikpapan sediakan pengurusan kotor padat dengan insinerator serta pengurusan kotor cair dengan sarana pengurusan air kotoran (IPAL). Terdapatnya cara pengurusan kotoran ini pastinya hendak memunculkan bayaran pengerjaan kotoran yang esoknya wajib dijamin oleh rumah sakit dalam mengatur kotoran itu. Aktivitas administrator RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo menciptakan antara 200 sampai 500 kilogram limbah medis atau kotoran kedokteran tiap harinya.

Akuntansi area. Dengan cara biasa akuntansi bisa dimengerti selaku sesuatu sistem data yang membagikan informasi pada pengelola kebutuhan mengenai aktivitas ekonomi serta suasana industri. Akuntansi pada awal mulanya didefinisikan selaku metode simpel buat mengerjakan informasi finansial. Uraian itu bisa ditemui dalam Jurnal Terminologi Akuntansi yang diterbitkan oleh AICPA(American Institute of Certified Public Accountants).

Dalam Jurnal Terminologi Akuntansi Nomor. 1, akuntansi merupakan seni menulis, mengklasifikasikan serta meringkas, dengan cara berarti serta dalam sebutan moneter, bisnis serta apalagi, paling tidak beberapa, paling tidak dengan cara kualitatif, watak finansial serta pemahaman hasil. (AICPA, 2003). Maksudnya akuntansi merupakan seni pencatatan, pengumpulan, pengikhtisaran dengan metode yang berarti serta diklaim dalam angka moneter, seluruh bisnis serta insiden yang bertabiat finansial serta dari pencatatan, perihal ini bisa menarangkan akibat- akibatnya.

Tujuan penerapan akuntansi lingkungan. Ikhsan (2009) berpendapat bahwa maksud dan tujuan pengembangan akuntansi lingkungan adalah:

1) Akuntansi lingkungan hidup merupakan alat pengelolaan lingkungan hidup, suatu alat pengelolaan lingkungan hidup, akuntansi lingkungan hidup digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Data akuntansi lingkungan hidup juga digunakan untuk menentukan biaya sarana pengelolaan lingkungan hidup, total biaya pelestarian lingkungan hidup serta tingkat investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

2) Akuntansi lingkungan hidup sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, akuntansi lingkungan hidup digunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat dampak negatif terhadap lingkungan hidup, kegiatan perlindungan lingkungan hidup dan hasil-hasilnya. Umpan balik dan perspektif masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan terhadap konservasi atau pengelolaan lingkungan.

Guna serta kedudukan akuntansi area. Berartinya pemakaian akuntansi area untuk bidang usaha ataupun badan yang lain dipaparkan pada guna serta kedudukan akuntansi area. Bagi Ikhsan(2009: 32), guna serta andil akuntansi area hidup dibagi jadi 2 tipe. Guna awal disebut guna dalam serta guna kedua disebut guna luar. Tiap- tiap guna itu dipaparkan selaku selanjutnya:

1. Fungsi internal

Fungsi dalam merupakan guna yang berhubungan dengan unit dalam bidang usaha itu sendiri. Pihak dalam merupakan pihak yang melaksanakan operasional bidang usaha, seperti pelanggan serta produsen dan pelayanan yang lain. Aspek yang berkuasa dalam guna dalam merupakan kepemimpinan industri. Karena, yang bertanggung jawab mengutip seluruh ketetapan serta menyudahi kebijaksanaan dalam merupakan arahan industri. Semacam halnya sistem data area hidup industri, guna dalam membolehkan pengurusan bayaran pelanggengan area hidup serta analisa bayaran aktivitas pelanggengan area hidup dengan cara berdaya guna serta efektif dan tidak berubah- ubah dalam pengumpulan ketetapan. Dengan terdapatnya

guna dalam ini diharapkan akuntansi area bisa berperan selaku perlengkapan manajemen bidang usaha yang bisa dipakai oleh para administrator kala berkaitan dengan bagian bidang usaha.

2. Fungsi eksternal

Fungsi eksternal ialah guna yang berhubungan dengan pandangan peliputan finansial. Statment Rancangan Akuntansi Finansial(SFAC) Nomor. 1 menarangkan kalau informasi finansial membagikan data yang bermanfaat untuk penanam modal serta penagih dan konsumen yang lain dalam mengutip ketetapan yang alami hal pemodalan, angsuran serta sejenisnya. Dalam guna ini, aspek berarti yang butuh dicermati oleh bumi upaya merupakan pengumuman hasil proteksi area hidup dalam wujud informasi akuntansi. Data yang dikatakan ialah hasil pengukuran kuantitatif aktivitas pelanggengan area hidup. Ini tercantum data mengenai pangkal energi ekonomi industri.

Klasifikasi biaya lingkungan Hansen dan Mowen (2009: 403) menyatakan bahwa biaya lingkungan hidup dapat digolongkan menjadi empat kategori, antara lain:

a) Biaya pencegahan lingkungan. Biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya limbah dan/atau limbah yang dapat membahayakan lingkungan hidup.

b) Biaya pemantauan lingkungan. Penetapan biaya aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lain perusahaan memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Standar dan proses lingkungan yang diikuti perusahaan ditentukan dalam tiga cara yaitu : Peraturan Pemerintah, Standar Sukarela (ISO) dan Kebijakan lingkungan dikembangkan oleh dewan pengelola.

c) Biaya kesalahan internal (biaya kesalahan dalam lingkungan). Biaya kegiatan yang dilakukan akibat timbulan limbah, limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar.

d) Biaya eksternal akibat insiden lingkungan hidup. Biaya untuk kegiatan yang dilakukan setelah membuang limbah dan sampah ke lingkungan.

2.METODE PENELITIAN

Subjek penelitian ini dilakukan diwilayah kerja rumah sakit RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan mendapatkan hasil dari studi riset.

Ada pula tipe riset ini dicoba dengan metode selaku selanjutnya ialah Tata cara pemantauan, ialah pemantauan langsung ataupun pengamatan kepada cara aplikasi tata cara akuntansi area dalam pengklasifikasian bayaran pengurusan kotoran serta kotoran operasional perusahaan pelayanan kedokteran. Serta yang kedua Tata cara riset kesusastraan serta daftar pustaka merupakan melaksanakan riset dengan metode mencari serta mengakulasi data yang berhubungan dengan riset lewat buku- buku, mempelajari serta mengambil sebagian rancangan teoritis mengenai amatan daftar pustaka serta pangkal data lain yang relevan dengan postingan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis biaya lingkungan. Berikut analisis biaya lingkungan hidup berdasarkan anggaran biaya/belanja berdasarkan revisi sumber dan alokasi pendanaan. Pada laporan di atas terdapat perubahan besaran anggaran pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Besaran anggaran tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anggaran tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 jumlah anggarannya meningkat dibandingkan tahun 2022. Berikut penjelasannya. dari tabel di atas.

Pada tahun 2020, anggaran/biaya yang disiapkan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo berdasarkan dana alokasi BLUD sebesar Rp204.759.000.000, sedangkan anggaran tahun 2021 sebesar Rp204.000.000.000. Dibandingkan anggaran tahun 2021 dan 2020 terjadi pengurangan sebesar Rp759.000.000,- turun sebesar 0,37%. Sedangkan pada tahun 2022 perkiraan biaya sebesar Rp 208.000.000.000, meningkat sebesar Rp 4.000.000.000 (1,96%) dibandingkan tahun 2021.

Proporsi total anggaran biaya lingkungan hidup pada tahun 2020 adalah sebesar 3,74% dari total anggaran biaya operasional RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo. Sedangkan proporsi total anggaran biaya lingkungan hidup pada tahun 2021 adalah sebesar 3,38% dari total anggaran biaya operasional RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikapapn.

Dari penjelasan di atas, anggaran biaya lingkungan hidup pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.000.000.000. karena beberapa izin yang perlu diperbarui, seperti biaya pelaksanaan pemeriksaan AMDAL, izin sling, izin insinerator, peningkatan pembersihan. biaya jasa dengan pihak ketiga dan banyaknya perbaikan dan pembangunan yang dilakukan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 terdapat biaya pemeliharaan dan jasa.

Kategori biaya preventif meliputi biaya peralatan, bahan lingkungan hidup, biaya pelaksanaan pengujian AMDAL, biaya peningkatan peringkat efisiensi usaha, biaya pengolahan limbah B3 dan B3 serta penjelasannya:

1. Untuk item biaya peralatan lingkungan seperti kling, sapu, laundry, tempat sampah, dll, antara tahun 2020 dan 2021 dan 2022, nilai barangnya mengalami penurunan, penyebabnya adalah waktu penyusutan dan pengurangan jumlah barang yang dibutuhkan. dibeli.
2. Sedangkan untuk komponen biaya peralatan lingkungan hidup tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, perkiraan awal tahun 2020 adalah sekitar Rp 200.000.000. 500.000.000 pada tahun 2021. Penyebabnya adalah jumlah sampah (sampah non medis dan sampah medis) yang semakin meningkat sehingga kebutuhan penggunaan kantong plastik di unit pelayanan cukup besar dan kebutuhan penambahan air menjadi penting. Ketika Pada tahun 2022, anggaran belanja investasi lingkungan hidup tidak mengalami perubahan.
3. Untuk faktor biaya pelaksanaan analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada tahun 2020 dan 2021, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tidak mempunyai anggaran karena pada tahun tersebut RSUD tidak mempunyai rencana penambahan gedung baru dan pada tahun 2022 pihak RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo menginvestasikan anggaran sebesar Rp 300.000.000. karena untuk membangun gedung terintegrasi onkologi perlu memperhatikan AMDAL.
4. Tidak terdapat perubahan pada komponen Biaya Bina Lingkungan (CSR) pada tahun 2020 dan 2021. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo memperkirakan biaya sebesar Rp 25.000.000,- sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2022, Biaya Bina Lingkungan (CSR) meningkat menjadi Rp 50.000.000,- karena adanya permintaan masyarakat RSUD Kanujoso Djatiwibowo untuk meningkatkan kapasitas drainase di sekitar masyarakat dan menambah jumlah tempat sampah.
5. Untuk komponen biaya FIT arah hijau dan kuning, pada tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak terjadi perubahan karena sesuai dengan perkiraan.
6. Faktor biaya pengelolaan limbah B3 dan B3 dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, perkiraan awal tahun 2020 dari Rp 420.000.000 menjadi Rp 250.000.000. Padahal, pada tahun 2020 pembuangan abu sisa dihitung dengan kilogram, sedangkan pada tahun 2021 pembuangan abu sisa pengolahan B3 dan limbah B3 dihitung oleh pihak ketiga per barel untuk menghemat biaya.

Tabel 4.1 Uraian Transaksi

No	Uraian Transaksi	2020	2021	2022
1	Biaya peralatan	Rp 200.000.000	Rp 500.000.000	Rp 500.000.000
2	Biaya AMDAL	-	-	Rp 300.000.000
3	Biaya CSR	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000

Kategori biaya deteksi meliputi biaya jasa pengujian air, udara dan gas, biaya pengujian air limbah dan biaya perizinan dengan penjelasannya :

Tabel 4.2 Kategori Biaya deteksi

	Uraian Transaksi	2020	2021	2022
1	Jasa pengujian	Rp 115.000.000	Rp 115.000.000	Rp 115.000.000
2	Konsultasi dan Sertifikasi ISO	-	-	-
3	Perizinan kesling	-	-	Rp 60.000.000
4	Izin Insinerator	-	-	Rp 50.000.000
5	Biaya perawatan Pompa Tungku/boiler	 Rp 500.000.000 Rp 660.000.000	 Rp 650.000.000 Rp 950.000.000	 Rp 700.000.000 Rp 1.100.500.000
6	Biaya kebersihan – CV Rudy's Co	Rp 4.781.820.000	Rp 4.828.576.900	Rp 5.800.000.000

1. Biaya jasa pengujian air, udara, dan gas mengalami peningkatan antara tahun 2021 hingga tahun 2020. Awalnya pada tahun 2020 diperkirakan biayanya berkisar antara Rp 115.000.000 hingga Rp 120.000.000 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya pengujian tambahan untuk pemeriksaan air limbah. Sedangkan pada tahun 2022 tidak ada perubahan anggaran sesuai perkiraan.
2. Untuk komponen Konsultasi dan Sertifikasi ISO 14001:Sistem pengelolaan lingkungan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun 2022 belum dianggarkan.
3. Untuk komponen biaya perizinan Kesling tidak dianggarkan pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2022 RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 60.000.000. Memang, lisensi Kesling pada 2022 sudah habis masa berlakunya.
4. Untuk komponen biaya perizinan insinerator, tidak ada anggaran pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan pada tahun 2022, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50.000.000,- untuk komponen biaya perizinan insinerator yang telah habis masa berlakunya.

Kategori biaya kerusakan internal meliputi biaya perbaikan dan perawatan pompa, toilet/kamar mandi buntu, lahan, perbaikan saluran drainase/saluran pembuangan, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan dan perbaikan Incinerator, boiler, genset, air limbah, cold storage dan biaya jasa pembersihan. berikut penjelasannya:

1. Untuk komponen biaya perbaikan dan pemeliharaan pompa, toilet/pancuran buntu, taman, perbaikan saluran drainase/saluran pembuangan limbah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2020 anggarannya mengalami kenaikan dari Rp 500.000,000 menjadi Rp 650.000.000,- pada tahun 2021. Memang pada tahun 2021, itu adalah sistem drainase yang dipasang di gedung Black Orchid dan suku cadang pompa diganti. Sedangkan pada tahun 2022, biaya pemeliharaan meningkat menjadi Rp 700.000.000. Hal ini disebabkan adanya renovasi kamar mandi, instalasi pompa air, instalasi pompa limbah, renovasi taman, pemeliharaan dan pemasangan sumur dalam

di gedung Black Orchid serta penambahan instalasi air bersih baru untuk ruangan rumah sakit.

2. Untuk komposisi bahan bakar tungku tidak terjadi perubahan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 karena sesuai dengan perkiraan. Pembakaran limbah infeksius dilakukan setiap hari dengan kapasitas pembakaran 50-80 kg/jam dengan menggunakan bahan bakar solar sebanyak 40-50 liter, dengan koordinasi pihak ketiga.
3. Tahun 2021 biaya pemeliharaan dan perbaikan tungku, boiler, genset, air pembuangan dan air dingin mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020, estimasi awal tahun 2020 dari Rp 660.040.000 menjadi Rp 950.000.000 pada tahun 2021. Bahkan, spare part boiler pun diganti. Sedangkan pada tahun 2022 anggarannya meningkat menjadi Rp1.100.500.000. Memang sudah dilakukan perawatan pada tungku dan genset.
4. Sedangkan untuk komponen biaya pelayanan kebersihan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV.Rudy's Co. Pada tahun 2021, biaya jasa kebersihan meningkat dari Rp 4.781.820.000 pada tahun 2020 menjadi Rp 4.828.576.900 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan adanya penambahan/perubahan ruangan rumah sakit sehingga kebutuhan akan penggunaan jasa tersebut. Sedangkan pada tahun 2022, biaya jasa kebersihan diperkirakan oleh RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo naik menjadi Rp5.800.000.000 karena adanya perubahan/kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 561/K.583/2022.

Usulan laporan biaya lingkungan Dalam laporan keuangan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo belum mengungkapkan secara jelas biaya yang terkait dengan kegiatan lingkungan hidup yang dilakukannya. Namun operasional rumah sakit rentan terhadap lingkungan, terutama limbah yang dihasilkannya. Dari laporan biaya/pengeluaran berdasarkan sumber dan alokasi dana, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo menyiapkan laporan keuangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo merupakan organisasi yang berbentuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Yayasan BLUD adalah organisasi pemerintah nirlaba yang tunduk pada peraturan pemerintah digital. 23 Tahun 2005, pasal 26 menyatakan: “Pelaporan dan akuntansi keuangan BLU dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia. BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku menurut jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Rumah sakit dokter Kanujoso Djatiwibowo harus segera membuat rencana untuk kepentingan pemangku kepentingan. Stakeholder RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo antara lain masyarakat khususnya warga Bali, lembaga donor dan pemerintah, jika RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo melaksanakan pelaporan biaya lingkungan hidup sebagai bentuk kepedulian, sehingga akan tercipta reputasi dan citra yang baik di kalangan pemangku kepentingan. Sampai saat ini, bagian fasilitas kesehatan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo hanya melaporkan mutunya. Dalam hal ini ketika mencoba membuat usulan mengenai pelaporan biaya lingkungan hidup di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tahun 2020, 2021 dan 2022. Laporan tersebut didasarkan pada empat kategori menurut Hansen dan Mowen (2009:403) yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal.

4.KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo tidak melakukan akuntansi lingkungan hidup, terbukti dengan tidak dibuatnya laporan khusus mengenai biaya lingkungan hidup. Memang belum ada standar akuntansi yang mewajibkan penerapan akuntansi lingkungan hidup di Indonesia. Biaya Lingkungan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo disajikan pada akun administrasi dan akun umum pada subakun harga pokok barang dan jasa. Hal

ini tidak menggambarkan informasi akuntansi terkait tanggung jawab rumah sakit terhadap pengelolaan lingkungan.

2. Akuntansi lingkungan memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan biaya lingkungan bagi setiap perusahaan atau lembaga pemerintah yang menghasilkan limbah berbahaya selama operasinya, terutama di bidang penyakit.
3. Dengan penerapan akuntansi lingkungan di RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo dapat membawa manfaat seperti pengelolaan biaya lingkungan yang baik, alokasi biaya yang lebih akurat, pengurangan biaya lingkungan, penyakit, dan penyakit. Lembaga akan mendapat kepercayaan lebih dari pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, H., & Ramlah, R. (2020). Penerapan akuntansi lingkungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, *11*(2), 131-140.

Damayanti, R. A. (2020). Akuntansi lingkungan konsep dan teori.

Husni, M., Wardani, R., Pagalung, G., & Ryketeng, M. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Rumah Sakit X di Masa Pandemi. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, *13*(02), 515-520.

Kusumawardani, A., Irwansyah, I., Setiawati, L., Ginting, Y. L., & Khairin, F. N. (2018). Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial Dan Lingkungan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, *2*(1), 65-82.

Nurhidayat, E., Junaid, A., & Kamase, J. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Berdasarkan Triple Bottom Line Pada Rsud HM Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, *2*(2), 38-80.

Rahim, S. (2020). Aktualisasi Ajaran Islam Dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *11*(3), 683-700.

Risnawati, H., & Arofah, S. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Lingkungan Pada RSUD RAA Soewondo Pati. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, *1*(2), 21-32.

Samsiar, S., Lewaru, T. S., & Anakotta, F. M. (2020). Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada RSUD Cenderawasih Kabupaten Kepulauan Aru (Studi Kualitatif). *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, *1*(1), 1-12.

Sela, A. Y., Karamoy, H., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD DR. Sam Ratulangi Tondano. *Indonesia Accounting Journal*, *1*(2), 63-73.

Sukirman-Suciati, A. S. (2019). Penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) pada RSUP Dr. wahidin sudirohusodo makassar. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, *3*(2), 89-105.

Wijayanto, A., Winarni, E., & Mahmudah, D. S. (2021). Pengaruh Penerapan Akuntansi Lingkungan. *Yos Soedarso Economics Journal*, *3*(1), 99-136.

Yuliarini, S. (2018, October). Akuntansi Lingkungan Dalam Perspektif Regulator. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN* (pp. 1191-1198).

Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS) Sosialisasi Perpajakan dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri

Duwi Riningsih[1], Krissantina Eferyn [2], Nonni Yap[3]
Universitas Kadiri-*riningsih@gmail.com*
-krissantina@gmail.com
-nonniyap@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to determine the influence of the voluntary disclosure program (PPS) on Kediri City Taxpayer compliance, then the influence of socialization of new tax regulations given by tax officers to Taxpayers on Kediri City Taxpayer compliance and finally the influence of use digitalization of tax services as a medium for carrying out tax obligations towards taxpayer compliance in carrying out their tax obligations. The population in this study is all taxpayers registered at the Kediri City Tax Service Office and the number recorded is 110,300 taxpayers consisting of individual taxpayers, corporate taxpayers and treasurer taxpayers. Using SPSS Version 20 data analysis. The results of this test can be concluded that the Voluntary Disclosure Program has a significant effect on taxpayer compliance, Tax Socialization and Tax Service Digitalization do not have a significant effect on taxpayer compliance.*

Keywords:Voluntary Disclosure Program (PPS), Tax Socialization, Digitalization of Tax Services, Taxpayer Compliance

1. PENDAHULUAN

Menurut Carolina (2019) dalam Yulianti (2022) berpendapat bahwa pemasukan negara terbanyak berasal dari sektor pajak dengan dibuktikannya pajak menyumbang 85,6% pendapatan selama tahun 2017. Pembangunan Nasional dapat terwujud apabila seluruh masyarakat turut serta berkontribusi dalam pembayaran pajak. Sekarang ini banyak wajib pajak yang memiliki usaha berkembang belum sepenuhnya patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku, banyak wajib pajak yang masih bebas dari jeratan pajak meskipun seharusnya wajib pajak tersebut sudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Penyebab wajib pajak belum patuh dan melaksanakan kewajiban terhadap pajak dikarenakan tidak memahami mekanisme perpajakan dan karena minimnya informasi perpajakan yang diterima. Selain itu karena sebagian besar masyarakat menganggap kalau pajak adalah sebuah upeti yang nilainya besar sehingga muncul rasa tidak peduli terhadap kewajiban perpajakannya.

Tahun 2019 muncul Pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian dunia bergejolak termasuk negara Indonesia. Munculnya Pandemic Covid-19 berimbas terhadap pendapatan wajib pajak, akibat penerapan Physical Distancing dan PPKM pendapatan perusahaan menjadi lesu, sebagian besar karyawan diberhentikan dari pekerjaan dan daya beli masyarakat menjadi turun. Disisi lain pemerintah juga membutuhkan tambahan dana dari sektor pajak yang digunakan untuk menanggulangi pandemic Covid-19.

Berbagai upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali roda ekonomi nasional, pemerintah menerbitkan berbagai macam kebijakan dan regulasi serta strategi dibidang ekonomi mulai dari pemberian berbagai jenis insentif pajak sampai dengan menerbitkan aturan yang terbaru yaitu Undang - Undang Harmonisasi Perpajakan. Dengan tujuan agar pertahanan ekonomi nasional dapat terjaga dan pemulihan ekonomi segera terwujud. Setelah berbagai kebijakan, upaya pemerintah terkait sistem perpajakan dan regulasi perpajakan diterbitkan permasalahan yang terjadi adalah para wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, terdapat beberapa faktor

yang mempengaruhi wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya sesuai seperti yang sudah ditargetkan.

Faktor yang Pertama pemahaman wajib pajak terhadap fasilitas yang diberikan dari kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang belum sepenuhnya diterima oleh wajib pajak. Pemerintah berupaya bagaimana memaksimalkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara diantaranya dengan terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, menurut Jarnuzi et al (2020) dalam Mappadang (2022) pengampunan pajak yang diterapkan belum sepenuhnya memenuhi target pemerintah karena hanya 3,88% orang pribadi yang mengikuti Tax Amnesty dari total wajib pajak orang pribadi. Dari gambaran tersebut dapat dipahami bahwa wajib pajak belum sepenuhnya mengikuti program pengampunan pajak tersebut dan terdapat indikasi bahwa masyarakat belum merepatriasi dan mendeklarasikan asset yang dimiliki diluar negeri kedalam negara Indonesia sehingga pemerintah menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela aturan ini terkandung dalam Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan yang mulai berlaku pada bulan Januari 2022 secara bertahap.

Faktor yang kedua adalah kegiatan sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh instansi pajak, dengan adanya sosialisasi pajak akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak jika mengerti akan perpajakan dan memiliki pengetahuan terhadap perpajakan menurut Septianigrum (2022). Sosialisasi perpajakan harus diterapkan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi peraturan – peraturan baru misalnya mengenai Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan ataupun memberikan pengetahuan secara berulang terhadap mekanisme dan proses perlakuan pajak sebagai contoh saat memasuki bulan Januari sampai bulan Maret atau April akan banyak diberikan sosialisasi pajak mengenai bagaimana prosedur dan tatacara pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ataupun SPT Tahunan Badan.

Faktor ketiga yaitu digitalisasi perpajakan, digitalisasi pajak merupakan reformasi dibidang perpajakan yang berupa pengembangan fasilitas layanan pajak yang berbasis online atau transformasi digital untuk menunjang proses penyetoran ataupun pelaporan perpajakan dengan tepat. Dirjen pajak menjawab tantangan revolusi industry 4.0 dengan otomatisasi dan integrasi layanan perpajakan, sehingga administrasi perpajakan dapat dengan mudah dilaksanakan (DJP, 2020) dalam Etanim (2022). Disisi lain dampak Pandemi Covid-19 mengharuskan semua layanan perpajakan dilakukan melalui layanan perpajakan berbasis online untuk menghindari penyebaran Virus Covid-19.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari program pengungkapan sukarela (PPS) terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kota Kediri, kemudian pengaruh dari sosialisasi peraturan – peraturan baru perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kota Kediri dan yang terakhir pengaruh penggunaan digitalisasi layanan pajak sebagai media untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh program pengungkapan sukarela (PPS), sosialisasi perpajakan dan digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kediri. Penelitian ini sejalan dengan roadmap penelitian peneliti selama lima tahun kedepan dimana tujuan akhir dari roadmap penelitian ini adalah untuk mengetahui reformasi perpajakan di indonesia secara terkini sehingga dengan adanya reformasi perpajakan dalam segala sektor pajak ddiharapkan dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Program pengungkapan sukarela atau Tax Amnesty Jilid II merupakan babak kedua dari pengampunan pajak yang pertama yang terjadi pada tahun 2016. Berdasar Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Hasil evaluasi Tax Amnesty Jilid I belum berjalan sesuai target pemerintah. Adanya beberapa kendala yang dihadapi seperti informasi Tax Amnesty yang belum merata kepada wajib pajak, kurang edukasi mekanisme

pengampunan pajak dan memang ada alasan yang sengaja tidak melaporkan harta tersebut. Masih minimnya angka kepatuhan wajib pajak membuat pemerintah dibawah kendali Menteri keuangan mengkaji ulang tentang keberlanjutan Tax Amnesty apakah perlu diadakan kembali. Selain pertimbangan tentang angka kepatuhan wajib pajak ada kondisi lain yang menjadi perhatian yaitu adanya pandemic covid-19 yang menyebabkan penerimaan pajak saat ini dibawah target (Hasanah, 2021).

Pada tahun 2021 dengan evaluasi perekonomian yang menurun tajam akibat pandemic covid-19 pemerintah terus berupaya bagaimana roda ekonomi negara tidak terpuruk. Untuk bangkit dari keterpurukan pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 29 Oktober 21 yang salah satu isinya kembali mengesahkan Tax Amnesty Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Keikutsertaan wajib pajak dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) menjadi kunci suksesnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasid mengatakan peluang meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk pengusaha masih sangat besar maka besar atau kecilnya keikutsertaan wajib pajak bergantung pada sosialisasi Tax Amnesty karenanya bercermin dari Tax Amnesty lalu masih banyak pengusaha yang belum berkontribusi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan, maka sosialisasi merupakan kunci sukses dalam Tax Amnesty (Nurul & Movanita, 2021) dalam Hasanah (2021). Dengan Suksesnya Program Pengungkapan Sukarela ini diharapkan memaksimalkan potensi pajak yang masuk ke kas negara sehingga dapat menumbuhkan dan menyehatkan kembali ekonomi negara Indonesia. Sejalan dengan penelitian oleh Mujahid (2019) menyatakan dengan adanya pengampunan pajak penerimaan pajak terhadap Pendapatan Domestic Bruto (PDB) akan meningkat, pembangunan infrastruktur dapat dijalankan dengan baik serta perkembangan dalam bidang industri baru dapat dikembangkan dan kemakmuran ekonomi secara keseluruhan dapat dirasakan. Program pengungkapan sukarela ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum melaporkan harta masa lalunya secara keseluruhan. Untuk mengikuti program tersebut wajib pajak diharuskan untuk membayar tebusan sesuai tarif PPh atas pengungkapan harta yang dilaporkan tersebut.

Tabel 1. Skema Program PengungkapanSukarela

Keterangan	Skema KebijakanI	Skema Kebijakan II
Subyek	WajibPajakOrangPribadidanBadan PesertaProgramPengungkapan Sukarela(PPS)	Wajib PajakOrangPribadi
Basis Aset	AssetPer 31 Desember 2015	Assetperolehantahun2016 – 2020yangbelumdilaporkan SPTTahunan 2020

TarifPPh Final	a. 11% untuk asset yang beradadi luar negeri b. 8% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri c. 6% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri yang diinvestasikan SBN/ Hilirisasi/ Renewable Energy	a. 18% untuk asset luar negeri b. 14% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri c. 12% untuk asset repatriasi luar negeri dan asset dalam negeri yang diinvestasikan SBN/ Hilirisasi/ Renewable Energy

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2022)

Dari data Tabel I tentang skema kebijakan yang pertama subyek pajaknya merupakan subyek pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan catatan pernah mengikuti Tax Amnesty Jilid I. Basis asset yang digunakan sebagi tolok ukur adalah asset yang diperoleh dari tanggal 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dimana asset tersebut sebagian atau belum diungkapkan secara keseluruhan di Tax Amnesty Jilid I. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan untuk menghimpun data perpajakan semakin akurat, sebagai landasan untuk menggali potensi – potensi pajak yang bisa masuk ke kas negara yang selanjutnya digunakan untuk pemulihan kondisi ekonomi

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dialkukan dirjen pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan agar dapat dilaksanakan oelh amsyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha (Faidzin, 2016) dalam Boediono (2018). Sosialisasi pajak yang dilakukan secara kontinyu dan intensif akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan wajib pajak mengenai mekanisme perpajakan yang relevan, peraturan terbaru atau kebijakan pajak serta regulasi – regulasi yang mengatur perpajakan wajib pajak. Kurangnya ilmu dan wawasan terkait perpajakan menyebabkan wajib pajak akan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Wajib pajak akan muncul rasa kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena dengan adanya sosilalisasi pajak wajib pajak akan memahami tentang manfaat membayar pajak serta saknsi yang diterima apabila melanggar aturan perpajakan. Menurut Meriani (2018) dalam Putra (2021) sosialisasi pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan Self Assessment System yang dijalankan saat ini karena wajib pajak yang akan berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sosialisasi pajak oleh fiskus dikatakan berhasil apabila kepatuhan pajak
wajib pajak semakin meningkat yang berawal dari pengayaan ilmu, wawasan, prosedur perpajakan dipahami dengan sepenuhnya.

Era sekarang ini sosialisasi perpajakan dikemas dalam metode yang menarik dan mudah dipahami dengan berbagai macam media yang digunakan. Sebelum adanya pademi Covid -19 sosialisasi perpajakan dilakukan dikantor pelayanan pajak dengan mengundang wajib pajak untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Setelah pandemic covid 19 menyebar sosialisasi perpajakan dilakukan dengan metode online dengan memanfaatkan berbagai media sosial.

Digitalisasi pajak merupakan inovasi fasilitas layanan pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa aplikasi layanan pajak berbasis online (DJP, 2020) dalam Etanim (2022). Menurut Aini (2022) peningkatan kualitas pelayanan melalui teknologi informasi telah menjadi inovasi utama yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menerapkan sistem elektronik dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, mudah dan efisien serta meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satu pelayanan terkait dengan pajak adalah dengan adanya portal DJP Online yang merupakan suatu layanan perpajakan digitalisasi yang dapat diakses melalui internet secara

real time. Layanan perpajakan dalam DJP Online tersebut semakin meningkatkan daya tarik pengguna orang pribadi atau badan untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Layanan DJP Online Pajak adalah proses cepat, aman, mudah, gratis dan paperless. Tujuan diperbaharui sistem pajak dengan adanya e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan serta produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Digitalisasi layanan pajak mampu menghubungkan antara pihak fiskus dan wajib pajak menjadi tidak terbatas dikarenakan tidak adanya batasan untuk ruang dan waktu dalam melakukan kegiatan perpajakan, kapanpun dan dimanapun bisa diakses asalkan bisa terhubung dengan koneksi internet. Informasi yang tersedia dari wajib pajak melalui platform digital akan lebih memudahkan pihak fiscus untuk merespon kepatuhan dari wajib pajak. Efisiensi waktu dan biaya dapat diminimalisir sehingga meningkatkan potensi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kunci sukses untuk membangun perpajakan dinegara Indonesia salah satunya adalah dengan mengembangkan layanan digitalisasi perpajakan sebagai sistem yang sederhana, cepat dan mudah untuk dilaksanakan serta sistem yang transparan agar kepatuhan wajib pajak menjadi optimal dan pemasukan kas pajak menjadi maksimal, indikasi terjadinya penghindaran pajak karena rumitnya sistem pengelolaan pajak.

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Jenis kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya merupakan bagian dari salah satu sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawab atas semua penentuan pajak yang benar, akurat dan tepat waktupada saat pembayaran pajak dan penyampaian surat pemberian tahuanan. Surat pemberitahuan tahunan merupakan surat yang disampaikan dalam satu tahun pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib menurut Rahayu (2010) dalam Alfina (2021).

Kepatuhan wajib pajak masuk dalam teori psikologis yang biasanya digunakan untuk meramalkan perilaku individu dikenal dengan Teori Perilaku Terencana. Teori Perilaku Terencana dirumuskan oleh Ajzen (1991) dalam Ningtyas (2022) yang menjelaskan bahwa niat merupakan kunci pentingsetiap individu untuk melakukan perilaku tertentu. memiliki niat yang tinggi maka semakin besar peluang untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah tiga komponen utama dalam Teori Perilaku Terencana (TPB). Ajzen (1991) dalam Ningtyas (2022) menjelaskan bahwa TPB masih dapat ditambahkan dengan komponen lain sesuai dengan objek yang diteliti. Penambahan komponen ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku yang dapat mempengaruhi niat lebih baik lagi. Atas hal ini, peneliti akan menambahkan satu komponen yakni kewajiban moral yang diharapkan dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu indikator keberhasilan pajak dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Apabila wajib pajak patuh terhadap perpajakannya maka dipastikan potensi pajak yang masuk ke kas negara. Kepatuhan wajib pajak sangat perlu ditingkatkan agar kondisi ekonomi negara bisa bangkit dari keterpukuran akibat pandemic covid 19.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitaif deskriptif, metode ini menggambarkan fenomena yang ada pada objek penelitian. Penelitian ini menggambarkan sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri. Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 6 Kota Kediri.

Populasi dalam penelitian ini adalah serluruh wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri dan jumlah yang tercatat adalah 110.300 Wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak bendaharawan.

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode purposive sampling.

Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud disini adalah wajib pajak tersebut sudah memiliki NPWP dan termasuk dalam daftar dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan aktif menggunakan Aplikasi Digital Perpajakan. Dikarenakan jumlah wajib yang terlalu banyak peneliti membatasi sampel yang digunakan sebanyak 200 wajib pajak.

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa melalui perantara. Data primer yang digunakan disini adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan didapat langsung dari responden pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan sumber data diperoleh berdasarkan pertanyaan dalam bentuk kuisioner yang diisi oleh responden yaitu Wajib Pajak yang sesuai kriteria. Sedangkan data sekunder berupa data yang diambil dari kantor pelayanan pajak meliputu jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri, Jumlah wajib pajak yang mengikuti PPS serta jumlah harta yang diungkap dalam PPS.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pertanyaan kepada seluruh responden pada penelitian ini. Selain itu menggunakan data observasi dan wawancara petugas pajak di KPP Pratama Kediri.

Dalam penelitian ini perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument karena penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner.

a. Uji Validitas

Valid berarti instrumen tersebut dapat mengukur apa yang seharusnyadiukur, penelitian ini menggunakan uji validitas konstrak (construct validity).Penentuan keputusan valid atau tidaknya instrument yang digunakan maka dilihat melalui kolom corrected item correlation dengan nilai r table pada level signifikan 0,05 jika nilai corrected item-total correlation lebih besar dari r table maka dikatakan valid (Supriyadi, 2014 : 29).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah mengatahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument tersebut digunakan sebagai alat 8 ukur suatu objek atau responden. Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode Cronbach Alpha, tingkat reliabilitas dengan metode Cronbach Alpha diukur berdasarkan skala 0 – 100, jika nilai Cronbach Alpha diatas

Teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputasi program SPSS (Statistical program for Social Science). Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Proses pengolahan data yang dilakukan adalah :

a. Edit, yaitu kegiatan memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh dari hasil kuesioner, untuk mengetahui apakah data yang ada sudah cukup.
b. Koding, yaitu kegiatan melakukan klasifikasi data dari jawaban responden dengan memberikan kode atau simbol serta skor menurut kriteria yang ada.
c. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017: 73-74).
d. Tabulasi, yaitu kegiatan melakukan pengolahan data ke dalam bentuk tabel dengan memproses hitung frekuensi dari masing-masing kategori, baik secara manual maupun dengan bantuan komputer.

C. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan suatu analisis data yang akurat, suatu persamaan regresi sebaiknya terbebas dari asumsi - asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain dengan uji normalitas, multikolonieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pengujian yang dilakukan atas dasar penelitian secara keseluruhan pada semua variabel independen yang terdiri dari Program Pengungkapan Sukarela, Sosialisasi Pajak dan Digitalisasi Pelayanan Pajak dan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak, adapun jenis pengujian sebagai berikut :

1. Uji Normalitas Data
   Uji ini bertujuan untuk menguji data yang berdistribusi normal akan digunakan alat uji normalitas. Alat uji normalitas yang biasa digunakan adalah alat analisis dengan grafik dan analisis statistik, dan yang kedua adalah diagram diagonal, sementara analisis statistik yang digunakan biasanya adalah Kolmogorov-Smirnov Ghozali (2007). Kolmogorov-Smirnov adalah nilai signifikansi dari hasil uji harus lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan, dimana nilai signifikan yang ditentukan adalah α0,05. Pengujian Normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov.
2. Uji Multikolinieritas
   Uji Multikolinieritas bertujuan untukmenguji apakah dalam model regresi ditemukan adannya korelasi antar variable bebas Ghozali (2007). Pada model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas, nilai cut off yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance <0,10 atau sama dengan Variance Inflation Factor (VIF) > 10.
3. Uji Heteroskedastisitas
   Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada data yang menyimpang terlalu jauh (outlier). Ada tidaknya heterokedastisitas dilihat dari nilai signifikansi masing masing variable independen Ghozali (2007). Dalam pengujian ini menggunakan Grafik Plot.
4. Uji Autokorelasi
   Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 Ghozali (2007). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lain, hal ini sering ditemukan pada time series.Dalam penelitian ini untuk melihat data terjadi autokorelasi atau tidak menggunakan uji Durbin Watson (D- W), sebagaimana yang dikatakan oleh Santoso (2010) bahwa secara umum bisa diambil patokan Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
   Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negative
5. Analisis Regresi Linear Berganda
   Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Penggunaan analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anta ra variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Digitalisasi Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dalam melakukan analisis regresi linear berganda penulis menggunakan bantuan komputer dengan program

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t (t- test) untuk melihat sejauh mana pengaruh (positif/negatif) Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (X1) Sosialisasi Perpajakan (X2) Digitalisasi Pelayanan Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Sosialisasi Perpajakan, Digitalisasi Layanan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri. Lokasi Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Kota Kediri yang beralamatkan di Jl. Brawijaya No. 6 Kota Kediri.

1. Uji Validitas

Penelitan dikategorikan Valid jika nilai r_{hitung} > dari r_{tabel}. Pengujian validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Program Pengungkapan Sukarela	X1.1	0,663	0,196	Valid
	X1.2	0,662	0,196	Valid
	X1.3	0,674	0,196	Valid
	X1.4	0,692	0,196	Valid
	X1.5	0,612	0,196	Valid
Sosialisasi Perpajakan	X2.1	0,717	0,196	Valid
	X2.2	0,751	0,196	Valid
	X2.3	0,679	0,196	Valid
	X2.4	0,709	0,196	Valid
Digitalisasi Layanan Pajak	X3.1	0,662	0,196	Valid
	X3.2	0,896	0,196	Valid
	X3.3	0,745	0,196	Valid
	X3.4	0,896	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,663	0,196	Valid
	Y.2	0,746	0,196	Valid
	Y.3	0,678	0,196	Valid
	Y.4	0,632	0,196	Valid
	Y.5	0,705	0,196	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah peneliti (2023).

Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa r_{hitung}> dari r_{tabel} dan dinyatakan valid.

2 Uji Reliabilitas

Penelitian dikategorikan Reliabel jika jawaban responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45) dengan hasil uji *alpha Cronbach* > 0,6. apabila nilai *alpha Cronbach*< 0,6 maka penelitian tidak reliabel (Ghozali, 2012). Tabel dibawah menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,677 > 0,6

Tabel 4.2 Uji Reliabilitas Program Pengungkapan Sukarela

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,677	,678	5

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,679	,680	4

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,679 > 0,6. Sehingga dapat dikatakan reliabel.

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Digitalisasi Layanan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,815	,812	4

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

Tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,815 > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan reliabel.

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,718	,717	5

Sumber : Hasil Output SPSS 20 (2023)

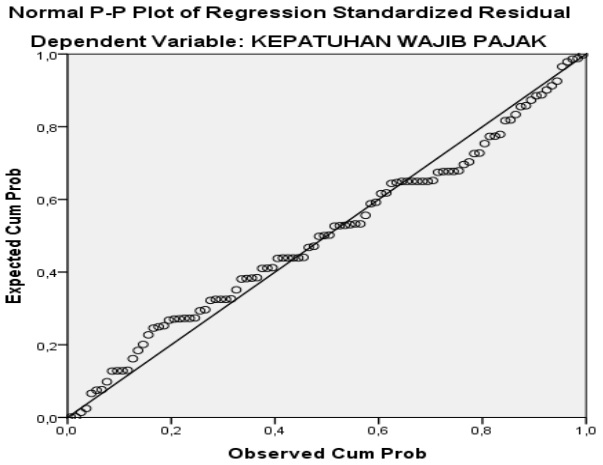
Tabel diatas menunjukkan bahwa *Cronbach alpha* 0,718 > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan reliabel.

3 Uji Asumsi Klasik

3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas sebagai alat analisa variabel terikat dan variabel bebas berdistribusi normal. Berdasarkan gambar kurva p-plot dalam bentuk titik – titik menyebar di garis diagonal, Berarti bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas.

Gambar 4.6 Kurva Normal P-Plot Uji Normalitas



Sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023)

3.2 Uji Kolmogrov-Smirnov

Penelitian dengan metode Kolomogrov Smirnov maka didapatkan hasil signifikan dari uji normalitas sebesar 0,826 hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian terdistribusi normal.

Tabel 4.7 Uji Kolmogrov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,44790374
Most Extreme Differences	Absolute	,083
	Positive	,079
	Negative	-,083
Kolmogorov-Smirnov Z		,826
Asymp. Sig. (2-tailed)		,503

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023)

3.3 Uji Multikolineritas

Dasar uji multikolinearitas adalah besarnya variabel *Inflation Factor* / VIF pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai VIF < 10, besarnya *Tolerance* pedoman suatu model regresi yang bebas Multikolineritas yaitu nilai *Tolerance*> 0,1.

Tabel 4.8 Uji Multikolineritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,387	1,520		2,229	,028		
	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	,664	,094	,639	7,091	,000	,504	1,983
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	,227	,116	,193	1,960	,053	,422	2,372
	DIGITALISASI LAYANAN PAJAK	-,005	,095	-,005	-,051	,959	,496	2,015

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

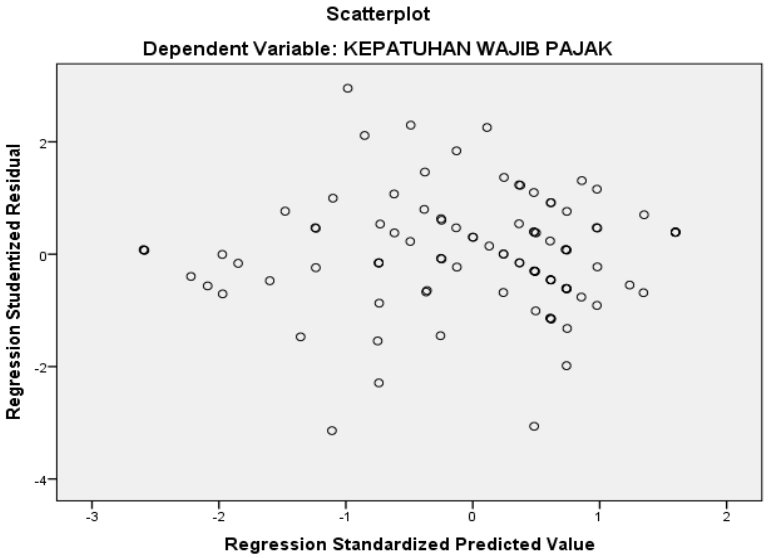
Sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023).

Berdasarkan tabel diketahui bahwa hasil pengujian untuk multikolinearitas diatas maka variabel program pengungkapan sukarela bernilai VIF sebesar 1.983 < 10.00. variabel sosialisasi perpajakan bernilai VIF sebesar 2.372 < 10.00 dan variabel digitalisasi layanan pajak bernilai VIF sebesar 2.015 < 10.00 sehingga disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari multikolinearitas.

3.4 Uji Heteroskedatisitas

Uji heteroskedatisitas untuk menguji apakah di dalam regresi terjadi tidak sama variance dari residual dengan satu pengamatan dengan pengamatan yang lain.

Gambar 4.9 Hasil heteroskedatisitas Scatterplot



sumber : Hasil output data SPSS yang telah diolah peneliti (2023).

Berdasarkan grafik scatterplot yang ada pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas pada model regresi.

3.5 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 Ghozali (2007). Uji autokorelasi pada tabel dibawah ini menunjukan bahwa (1.797 > 1.758)maka tidak terdapat autokorelasi positif.

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,779[a]	,607	,595	1,47035	1,797

a. Predictors: (Constant), Digitalisasi Layanan Pajak , Program Pengungkapan Sukarela, Sosialisasi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil output data SPSS 20 yang telah diolah oleh peneliti (2023).

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengolahan data analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 20 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,387	1,520		2,229	,028
	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	,664	,094	,639	7,091	,000

	SOSIALISASI PERPAJAKAN	,227	,116	,193	1,960	,053
	DIGITALISASI LAYANAN PAJAK	-,005	,095	-,005	-,051	,959

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Hasil output data SPSS 20 yang telah diolah oleh peneliti (2023).

Berdasarkan pada tabel yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS versi 20 maka diperoleh persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut :

Y = 3.387 + 0,664 X1 + 0,227 X2 + -0,005 X3 + e

4. 5 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat perlu dilakukan pengujian signifikansi dari masing-masing koefisien regresi yaitu dengan menggunakan analisis regresi, uji statistik F-test dan uji statistik t-test, seb agai berikut :

Tabel 4.12Uji Hipotesis

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,387	1,520		2,229	,028
	PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA	,664	,094	,639	7,091	,000
	SOSIALISASI PERPAJAKAN	,227	,116	,193	1,960	,053
	DIGITALISASI LAYANAN PAJAK	-,005	,095	-,005	-,051	,959

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

1. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
   Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (7.091 >1.984), sehingga dapat disimpulkan penelitian berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
2. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
   Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}(1.960 < 1.984), sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
3. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
   Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak di terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} (-0,005< 1.984), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

Uji Anova

Tabel 4.13Uji Anova

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	321,094	3	107,031	49,507	,000[b]
	Residual	207,546	96	2,162		
	Total	528,640	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), DIGITALISASI LAYANAN PAJAK , PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA , SOSIALISASI PERPAJAKAN

Berdasarkan hasil uji simultan diatas, diketahui bahwa ^{F} hitung sebesar 49,507>^{F}tabel sebesar 3,09. Pada uji F diatas hasil sifnifikan, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi bahwa variabel program pengungkapan sukarela, sosialisasi perpajakan dandigitalisasi layanan pajak, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
b. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
c. Digitalisasi Layanan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.
d. Program Pengungkapan Sukarela, Sosialisasi Perpajakan Dan Digitalisasi Layanan Pajak, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

Septianingrum, Sania. dkk. (2022).Pengaruh Sosialisasi Pajak,Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku *E-Commerce. E- JRA Vol. 11 No. 9.*

Boediono, Tegoeh G., dkk.AnalisisPengaruh SosialisasiPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis3 (1) hal. 22-38.*

S.(2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations.*Journal of EconomicPsychology*, 74, 1-68. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191.

daSilva,F.P., Guerreiro, R.,&Flores,E. (2019). Voluntaryversusenforcedtax compliancetheslipperyslopeframework intheBraziliancontext.International ReviewofEconomics.66(2),147-180. https://doi.org/10.1007/s12232-019-00321-0.

Etanim,Frialdo.(2022).Pengaruh Pemanfaatan E-Commerce Dan Digitalisasi Perpajakan terhadap Kinerja Umkm Di Jakarta Barat Dengan Insentif Pajak Selama Covid-19 Sebagai Variabel Pemoderasi. J*urnalAkuntansi*Vol. 3 No. 1

Aini,NadiaQurota,dkk.(2022).PengaruhKebijakanInsentifPajakPenghasilanbagiUMKM danDigitalisasiPajakterhadapKepatuhanWajibPajak.Bandungconferenceseries. Vol2 No. 1 https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581

Shiddiqui,Ahmed Danish.(2019).TheEffectof Tax AmnestiesProgramson Taxcollection andEconomicPerformance:AGlobal MacroEconomicAnalysis.*International Journal of Social and Administrative Sciences* DOI: 10.18488/journal.136.2019.42.108.128

Areo.OluwafadekemiS.(2020).Improved Public Services And Tax Compliance Of Small and Medium Scale Enterprises In Nigeria:AGeneralised Ordered Logistic Regression. Asian Economic And Financial Review DOI: 10.18488/*journal.aefr*.2020.107.833.860

Alfina,Zuli.,Diana,Nur.(2021).PengaruhInsentifPerpajakanAkibatCovid-19,Pemahaman Perpajakan,KesadaranWajib Pajak TerhadapKepatuhan WajibPajakDalam

Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan(Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara). *E-JRAVol*. 10 Nomor 4

Irawan,Fery &Raras,Punjung.(2021).Program Pengungkapan Sukarela Dalam Rangka Meningkatkan kepatuhan Pajak DiMasa Pandemi Covid-19*. PengmaskuVol1No.*

Yulianti,LitaNovia. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Kesadaran wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UmkmPadaMasa PandemiCovid-19 . Jurnal *Ilmiah manajemen dan kewirausahaan Vol2. No. 1.*

Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor7TentangHarmonisasiPeraturanPerpajakan2021.

Undang – Undang Republik Indonesia11TentangPengampunan Pajak 2016

Persepsi Mahasiswa terhadap Minat Investasi pada Saham Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial,UIN Suska Riau)

Lisa Tinaria[1], Maya Rizki Sari[2*]
STIE Mahaputra Riau - [1]*lisatinaria@gmail.com*
-[2] *mayarizisarii@gmail.com*

Abstrak— *This study aims to determine the effect of Perceptions of Sharia Compliance, Perceptions of Investment Objectives and Perceptions of Risk on Investment Interest in Management Major Students of the Faculty of Economics and Social Sciences, State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau, either partially or simultaneously. The data used in this study is primary data obtained from the results of filling out questionnaires for 100 respondents. Data collection methods in this study used questionnaires, literature books and journals related to research. Data analysis methods used include descriptive analysis, data quality test, classical assumption test, multiple regression analysis and hypothesis testing. The results of this study indicate that partially Perceived Investment Purpose and Perceived Risk have a positive and significant effect on Investment Interest, while partially Perception of Sharia Compliance has no effect and is not significant on Investment Interest. The results of simultaneous testing of the influence of Perceived Sharia Compliance, Perceived Investment Objectives and Perceived Risk have a positive and significant influence on Sharia Investment Interest. The value of Adjusted R Square is 0.326 or 32.6% which means that Investment Interest is influenced by Perceived Sharia Compliance, Perceived Investment Purpose and Perceived Risk and the remaining 67.4% can be explained by other factors not examined in this study.*

Keywords -Perception, Interest, Investment, Sharia Shares

1. PENDAHULUAN

Era industri 4.0 sudah banyak yang mulai menyadari akan pentingnya berinvestasi. Hal ini disebabkan karena investasi itu cukup memberikan mindset kepada masyarakat dan mahasiswa tentang manfaat dan keuntungan yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Beragam jenis investasi ditawarkan mulai dari investasi sektor rill contohnya emas, rumah, tanah. Dan investasi pada sektor financial contohnya tabungan, deposito, reksadana, obligasi, saham dll. Ketika kita memilih untuk berinvestasi pilihlah jenis investasi yang memungkinkan sesuai dengan kebutuhan kita, dan pada dasarnya setiap investasi dan bisnis itu mempunyai risiko yang berbeda – beda.

Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan perusahaan dan universitas untuk pembukaan rekening dalam upaya mendorong peningkatan jumlah investor pasar modal Indonesia. Kenaikan jumlah investor yang tercermin dari kepemilikan Single Investor Identification (SID) nantinya akan membuat ekonomi Indonesia akan bertambah besar ke depannya. Total SID mencapai 3,27 juta pada tahun 2020, mengalami peningkatan 792.527 atau 31,9 persen dari posisi akhir pada tahun 2019 sebanyak 2,48 juta SID. Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan, SID saham mencapai 1,38 juta, sedangkan SID reksa dana sebanyak 2,58 juta per 30 September. Jika tren kenaikan dapat dipertahankan setiap bulan selama kuartal IV-2020, maka BEI mengharapkan ada penambahan 300.000 - 400.000 SID baru. Sehingga jumlah investor ritel dapat melebihi 3,5 juta SID pada akhir 2020. Penambahan jumlah SID ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan Indonesia, sehingga SRO (self regulatory organization) bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terus memotivasi generasi penerus untuk berkontribusi dalam kemajuan pasar modal melalui investasi di pasar modal dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional (Kanalsatu.com, 22 Oktober 2020).

Jumlah investor di Riau terus meningkat namun peningkatannya lebih didominasi oleh orang china sedangkan untuk orang asli riau itu sendiri sangat sedikit. Tercatat jumlah investor pada tahun 2019 hanya sebesar 19.937 investor. Sementara pada periode Januari – Agustus Tahun 2020 jumlah investor Riau sudah mencapai 23.596 investor, artinya ada penambahan investor baru sebesar 3.659 investor atau meningkat sebanyak 18%. Sedangkan untuk transaksi di Riau

mengalami kenaikan cukup signifikan. Data transaksi total pada tahun 2019 sebesar Rp. 6,5 triliun, sementara pada tahun 2020 per agustus sudah mencapai Rp. 10,6 triliun sehingga terjadi kenaikan sebesar 163%. Penyebab kenaikan ini karena kondisi pasar yang sekarang cenderung froggis setelah mengalami turbulens akibat pandemik, sehingga memungkinkan investor melakukan trading dalam jangka yang pendek untuk memanfaatkan peluang naik turunnya harga (Bisnis.com, 22 September 2020)

Saat ini investasi tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan besar, namun masyarakat kecil pun dapat melakukan investasi bahkan pelajar pun dapat menginvestasikan dananya termasuk mahasiswa. Banyak potensi dan cara bagi mahasiswa untuk terlibat aktif sebagai investor salah satunya yaitu dengan cara membuka akun secara online melalui Galeri Investasi yang tersedia di perguruan tinggi. Namun berbagai kondisi dapat mempengaruhi keputusan investasi, salah satunya pada kondisi saat ini adanya pandemik Covid-19 yang berdampak pada penurunan minat investasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Diketahui bahwa persepsi return berpengaruh terhadap minat investasi berdasarkan teori yang dikatakan oleh Tandelilin (2010), menyatakan pada umumnya tujuan berinvestasi adalah untuk mendapat return atau keuntungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Trisnatio dan Pustikaningsih (2017), menemukan bahwa presepsi return berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi, sedangkan persepsi risiko tidak berpengaruhsignifikan terhadap minat berinvestasi. Akan tetapi bertolak belakang pada penelitian Setyowati (2020), menyatakan persepsi risiko berpengaruh terhadap minat berinvestasi sedangkan presepsi return tidak berpengaruh terhadap minat investasi.

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emmiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya telah sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Sedangankan yang dimaksud dengan efek syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan- undangan di bidang Pasar Modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan oleh syaiah ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DNS – MUI melalui fatwa (Soemitra, 2015:111).

Menurut Sutedi (2011:29), pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan prinsip syariah dimana setiap transaksinya dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Lembaga keuangan yang pertama kali concern di dalam pasar modal syariah adalah Amanah Icome Fund yang didirikan pada bulan Juni 1986 oleh para anggota The North American Islamic Trust yang bermarkas di Indiana, Amerika serikat.

Muhammad (2016:567), mengemukakan bahwa pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Dengan semakin beragamnya sarana dan produk investasi di Indonesia, diharapkan masyarakat akan memiliki alternatif berinvestasi yang dianggap sesuai dengan keinginannya. Langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah pada 25 Juni 1997 diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir 2002. Selanjutnya, pada bulan Juli 2000 PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) bersama dengan PT Dana Reksa Invesment Management (DIM) menerbitkan Jakarta Islamic Index (JII) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) jenis saham dari emiten-emiten yang kegiatan usahanya memenuhi syariah Islam. Penentuan kriteria dari komponen JII tersebut disusun berdasarkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah DIM (Dana Reksa Invesment Management).

Selanjut Muhammad (2016:552-553), karakteristik pasar modal syariah ada tujuh, sebagai berikut:

1. Bebas dari pemaksaan. Menurut kaidah ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak juga berarti bahwa investor tidak boleh dilaraang dalam bertransaksi. Termasuk dalam kaidaah ini adalah bahwa investor berhak untuk mencapai informasi dan pada saat yang sama tidak boleh ditekan untuk membuka rahasia tertentu.
2. Bebas dari salah interprestasi. Bahwa investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang besar, sehingga tidak menimbulkan salah interprestasi.
3. Hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Bahwa seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set informasi yang khusus. Apabila satu pihak memiliki satu set informasi maka harus dikemukakan kepada yang lain.

4. Hak untuk memproses informasi yang sama. Dalam hal ini investor memiliki hak dan kemampuan yang sama untuk memproses informasi, di mana tidak ada satu pihak yang dirugikan.

5. Bebas dari gejolak hati. Menurut kaidah ini, seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurang pengendalian diri.
6. Hak untuk bertransaksi pada harga yang efesien. Bahwa investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya efesien atau benar.
7. Hak untuk memiliki kekuatan tawar menawar yang sama. Bahwa dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan.
Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Manan (2012:284), saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai alat untuk meningkatkan modal jangka panjang. Para pembeli saham membayarkan uang pada perusahaan dan mereka menerima sebuah sertifikat saham sebagai tanda bukti kepemilikan mereka atas saham- saham dan kepemilikan mereka dicatat dalam daftar saham peerusahaan. Para pemegang saham dari sebuah perusahaan merupakan pemilik- pemilik yang disahkan secara hukum dan berhak untuk mendapatkan bagian dari laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam bentuk deviden.

Soemitra (2015:126), mengemukakan bahwa saham syariah diartikan sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Secara umum berinvestasi di saham syariah adalah hak memperoleh deviden dan capital gain. Sedangkan risikonya yaitu risiko tidak ada pembagian

Menurut Herlianto (2013:11), kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa inggris, yaitu investment. Kata invest sebagai kata dasar dari investment memiliki arti menanam. Dalam kamus istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Dan dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk - bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan dimasa yang akan datang. Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk menanamkansejumlah danapadasaat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masadatang.

Menurut Jogiyanto (2014:5), pengertian investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu yang tertentu.Abdullah (2017:278), mengemukakan bahwa tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan (return).Dalam berinvetasi para investor akan menghadapi beberapa sumber risiko yang akan mempengaruhi besar kecilnya risiko investasi antara lain (Tandelilin, 2010:102):
1. Risiko Pasar. Fluktasi pasar secara keseluruhan yang mempengaruhi variabilitas return suatu investasi disebut sebagai risiko pasar. Fluktasi pasar biasanya ditunjukan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan.
2. Risiko Tingkat Suku Bunga. Perubahan tingkat suku bunga bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, ceteris paribus. Artinya, jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun, demikian pula sebaliknya.
3. Risiko Nilai Tukar Mata Uang. Risiko ini berkaitan dengan fluktasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negara lainnya.
4. Risiko Inflasi. Inflasi yang meningkat akan mengurangi kekuatan daya beli rupiah yang telah diinvestasikan.
5. Risiko Bisnis.
6. Risiko dalam menjalankan bisnis dalam suatu jenis industri disebut sebagai risiko bisnis.
7. Risiko Finansial. Risiko ini berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk menggunakan hutang dalam pembiayaan modalnya. Semakin besar proporsi hutang yang digunakan perusahaan, maka

semakin besar pula risiko finansial yang dihadapi perusahaan.
8. Risiko Likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kecepatan suatu sekuritas yang diterbitkan perusahaan yang biasa diperdagangkan di pasar sekunder. Semakin cepat suatu sekuritas diperdagangkan, maka semakin likuid sekuritas tersebut, demikian sebaliknya.

9. Risiko Negara (Country Risk). Risiko ini juga disebut sebagai risiko politik, karena sangat
Pada dasarnya terdapat beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi menurut Tandelilin (2010:9)antara lain :

a. Menentukan Kebijakan Investasi. Pada tahapan ini, investor menentukaan tujuan investasi dan kemampuan atau kekayaannya yang dapat diinvestasikan, dikarenakan ada hubungan positif antara risiko dan *return*, maka hal yang tepat bagi para investor untuk menyatakan tujuan investasinya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan saja, tetapi juga memahami bahwa ada kemungkinan risiko yang berpotensi menyebabkan kerugian. Jadi, tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam keuntungan maupun risiko.
b. Analisis Sekuritas. Pada tahapan ini berarti melakukan analisis sekuritas yang meliputi penilaian terhadap sekuritas secara individual atau beberapa kelompok sekuritas. Salah satu tujuan melakukan penilaian tersebut adalah untuk mengidentifikasi sekuritas yang salah harga (*mispriced*).
c. Pembentukan Portofolio. Pada tahapan ketiga ini adalah membentuk portofolio yang melibatkan identifikasi aset khusus mana yang akan diinvestasikan dan juga menentukan seberapa besar investasi pada tiap aset tersebut, masalah selektifitas, penentuan waktu, dan diversifikasi perlu menjadi perhatian investor.
d. Melakukan Revisi Portofolio. Pada tahapan ini, berkenaan dengan pengulangan secara periodik dari tiga langkah sebelumnya. Sejalan dengan waktu, investor mungkin mengubah tujuan investasinya yaitu membentuk portofolio baru yang lebih optimal. Motivasi lainnya disesuaikan dengan preferensi investor tentang risiko dan return itu sendiri.
e. Evaluasi Kinerja Portofolio. Pada tahapan terakhir ini, investor melakukan penilaian terhadap kinerja portofolio secara periodik dalam arti tidak hanya *return* yang diperhatikan tetapi juga risiko yang dihadapi. Jadi, diperlukan ukuran yang tepat tentang *return* dan juga standar risiko yang relevan.

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, keinginan. Jadi harus ada sesuatu yang ditimbulkan, baik dari dalam dirinya maupun dari luar untuk menyukai sesuatu. Makmum (2017:190), minat pada dasarnya adalah sebab akibat dari pengalaman. Salah satu faktor yang mempengaruhi minat adalah faktor inner urge yaitu bahwa rangsangan yang datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah menimbulkan minat. Minat sangat besar pengaruhnya terhadap aktivitas yang dilakukan. Misalnya seseorang yang berminat terhadap mata kuliah yang berhubungan dengan investasi saham, maka dia akan sungguh-sungguh mempelajarinya dan menerapkannya seperti rajin mempelajarinya dengan mengikuti seminar tentang investasi saham, membaca buku tentang investasi saham agar memiliki pengetahuan yang cukup mengenai investasi saham dan akan mencoba untuk mempraktikkannya dengan membuka rekening saham. Pengetahuan tersebut seperti jenis investasi,tingkat return berinvestasi saham, tingkat risiko berinvestasi saham, cara memilih investasi saham yang tepat.
Menurut Slameto (2010:54), mengemukakan bahwa faktor – fakor yang mempengaruhi minat seseorang yaitu:
a. Faktor Intern yang terdiri dari faktor jasmani seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologi seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan dan kesiapan.
b. Faktor Ekstern yang berasal dari lingkungan seperti keluarga (cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga), kampus (metode mengajar di kelas, kurikulum, relasi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa).

Walgito (2010:99), mengemukakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanyastimulasi oleh individu melalui alat ndera atau juga disebut proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alatindera atau juga disebut proses sensors. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses

pendahulu dari proses persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu idividu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat pengecapan, dan kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, kesemuanya itu merupakan stimulus dari luar individu. Stimulus yang diindera itu kemudian dorganisasikan dan diinterprestasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi.

Persepsi merupakan pengertian kita tentang situasi sekarang dalam artian pengalaman-pengalaman kita yang telah lalu. Meskipun alat yang digunakan untuk menerima stimulus itu serupa pada setiap individu yang ada, namun penafsirannya akan berbeda. Oleh karena itu apa yang kita persepsi pada suatu waktu tidak hanya tergantug pada stimulusnya tetapi juga pada latar belakang beradanya stimulus tersebut seperti pengalaman-pengalaman sensoris terdahulu, perasaan individu pada saat itu, sikap, ataupun tujuan dari individu tersebut (Sulistomo, 2012:24).
Faktor - faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut: (Imran dan Hartono, 2017:1)

a. Sikap yaitu positif atau negatif pendapat yang akan diberikan kepada seseorang.
b. Motivasi yaitu hal yang membangkitkan hasrat seseorang mendasari sikap dan perilaku yang dilakukannya.
c. Minat yaitu hal lain yang memberikan perbedaan penilaian seseorang pada suatu
d. Pengalaman masa lalu yang dapat memberikan pengaruh terhadap pendapat sesorang karena akan mengambil keputusan yang sesuai pada yang ia pernah dilihat didengar.
e. Harapan yaitu mempengaruhi persepsi dalam membuat keputusan berdasarkan tawaran yang tidak sesuai.

Dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI,2019), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi. Menurut Hartaji (2012:5), mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.
Peran dan fungsi mahasiswa ada enam yaitu sebagai berikut (Ramadhan, 2015:1):
1. Mahasiswa sebagai Iron Stock. Mahasiswa dapat menjadi Iron Stock, yaitu mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia tangguh yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi – generasi sebelumnya.
2. Mahasiswa Sebagai "*Guardian of Value*". Mahasiswa sebagai Guardian of Value berarti mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai – nilai di masyarakat. Nilai yang harus dijaga adalah sesuatu yang bersifat benar mutlak, dan tidak ada keraguan lagi di dalamnya.
3. Mahasiswa Sebagai "*Agent of Change*". Mahasiswa sebagai Agent of Change.Artinya mahasiswa sebagai golongan yang harus menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan dikarenakan mahasiswa merupakan kaum yang "eksklusif", hanya 5% dari pemuda yang bisa menyandang status mahasiswa, dan dari jumlah itu bisa dihitung pula berapa persen lagi yang mau mengkaji tentang peran-peran mahasiswa di bangsa dan negaranya ini.
4. Mahasiswa sebagai "*Social Control*". Mahasiswa sebagai "*social control*", sebagai mahasiswa kita harus berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial. Dalam hal ini kita bisa mengontrol kehidupan masyarakat, dengan cara kita sebagai mahasiswa menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah.
5. Mahasiswa Sebagai "*Guardian Of Value"*. Guardian of value artinya penjaga nilai-nilai. Sesuai dengan artinya disini kita sebagai mahasiswa berperan sebagai penjaga nilai-nilai, nilai – nilai tersebut bukanlah nilai – nilai yang negatif melainkan nilai – nilai yang positif. Nilai positif yang bisa membawa negara ini lebih maju yaitu nilai "kebaikan" yang ada dalam masyarakat Indonesia.
6. Mahasiswa sebagai "*Moral Force*". Mahasiswa sebagai "moral force", kita sebagai mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral. Gelar moral force ini diberikan kepada kita sebagai mahasiswa oleh masyarakat, sebab kitalah yang akan menjadi kekuatan moral untuk negeri. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki acuan dasar dalam berprilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku, perkataan, cara berpakaian, cara bersikap dan lain sebagainya yang berhubungan dengan moral yang baik.

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dalam penelitian ini adalah Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan yang

dimulai pada bulan September tahun 2020 sampai bulan maret 2021.
Populasi dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang sudah memiliki akun saham di Galeri Investasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Tahun 2019 – 2020. Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan rumus slovin, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 68,75 disesuaikan peneliti menjadi 100 responden.
Menurut Sugiyono (2015:142), kuesionar merupakan teknik pngumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Kuisioner yakni pengu mpulan data dengan cara menyediakan daftar pernyataan yang akan penulis ajukan pada responden. Dimana responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka.

Tabel 1: Konsep Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Sumber
Minat Investasi Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal(investasi)atauaktivitas lain, tanpa ada yang menyuruh.	a. *Intern* yang terdiri dari faktor jasmani seperti faktor kesehatan dan cacat tubuh, dan faktor psikologi seperti intelegensi, perhatian, bakat, kematangan dan kesiapan. *Ekstern* yang berasal dari lingkungan seperti keluarga (cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga), kampus (metode mengajar di kelas, kurikulum, relasi dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa).	Slameto (2010)
Persepsi Kepatuhan Syariah. Kepatuhan syariahadalah pengelolaan (manajemen) maupun operasionalnya dilakukan dengan prinsip syariahyangsudah ditetapkan fatwa DSN-MUI.	a. Telah lulus uji *screening system* sesuai fatwa DSN-MUI. b. Tidak ada unsur riba seperti kegiatan komersial dan lembaga keuangan lainnya. c. Tidak ada unsur *maisir* (judi) d. Tidak menjual produk-produk yang haram, seperti: minuman keras, daging tidak halal dan babi. e. Tidak ada unsur *gharar*(ketidakjelasan)seperti Perusahaanasuransikonvensional. f. rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, danrasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dantotal pendapatan lainnya tidaklebih dari 10%.	Muhammad (2016)
Persepsi Tujuan Investasi. Tujuan investasi adalah mendapatkan sejumlah pendapatan keuntungan (*return*).	a. Jangka panjang. Menanamkan suatu modal dengan harapan dapat memperoleh keuntungan (*return*) pada waktu yang akan datang melalui penguasaan suatu *asset* bergerak dan *asset* tidak bergerak dalam kurun waktu yang lebih dari satu tahun. b. Jangka pendek. Menanamkan suatu modal dengan harapan mendapatkan keuntungan (*return*) dalam suatu *asset* tertentu yang bersifat *liquid* dan berjangka waktu yang pendek biasanya kurang dari satu tahun bisa dalam hitungan jam, hari, minggu, atau bulan.	Abdullah (2017) dan Samsul (2006)

Persepsi Risiko. Risiko merupakan penyimpangan hasil(*return*)yang diperoleh dari rencana hasil (*return*) yang diharapkan.	a. Risiko Pasar. b. Risiko Tingkat Suku Bunga. c. Risiko Nilai Tukar Mata Uang. d. Risiko Inflasi. e. Risiko Bisnis. f. Risiko Finansial. g. Risiko Likuiditas h. Risiko Negara (*Country Risk*).	Tandelin (2010)

Teknik Analisa Data

1. Analisa Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang ringkasan variabel -variabel penelitian tanpa mengkaitkan atau membandingkan dengan variabel yang lainnya. Jadi menjelaskan karakterisitk statistik suatu variabel secara mandiri.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang berupa kuisioner kedalam bentuk angka – angka dan perhitungan dengan metode statistik. Dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 22ihasilkan sebagai output dari analisis tersebut

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis regresi berganda dilakukan dalam penelitian ini karena jumlah variabel independent lebih dari satu sedangkan alat yang akan digunakan adalah software SPSS versi 22. Pada penelitian ini digunakan analisis linear berganda, karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Kepatuhan Syariah(X_1), Persepsi Tujuan Investasi (X_2) dan Persepsi Risiko (X_3) dengan variabel terikat Minat Berinvestasi (Y). Berdasarkan hasil penelitian, persamaan dalam analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2: Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.593	3.373		.769	.444
	Kepatuhan Syariah (X1)	.063	.124	.045	.512	.610
	Tujuan Investasi (X2)	.315	.098	.287	3.209	.002
	Risiko (x3)	.331	.078	.389	4.235	.000

Coefficients[a]

a. Dependent Variable: Minat Investasi (Y)

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat diketahui persamaan regresi berganda sebagai berikut: **$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$**

$Y = 2{,}593 + 0{,}063X_1 + 0{,}315X_2 + 0{,}331X_3 + e$

Arti angka – angka dalam persamaan regresi diatas adalah :

1. Nilai konstanta (a) sebesar 1,962 artinya adalah apabila Kepaatuhan Syariah, Tujuan Investasi, dan Risiko bernilai 0, maka Minat Investasi 2,593.
2. Nilai koefisien regresi 0,063 hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Syariah mempunyai hubungan positif terhadap Minat Investasi. Artinya, jika variabel Kepatuhan Syariah mengalami peningkatan satu satuan, maka Minat Investasi akan mengalami kenaikan sebesar 0,063 dengan asumsi koefisien variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien regresi 0,315 hal ini menunjukkan bahwa variabel Tujuan Investasi

mempunyai hubungan positif terhadap Minat Investasi. Artinya, jika variabel Tujuan Investasi mengalami peningkatan satu satuan, maka Minat Investasi akan mengalami kenaikan sebesar 0,315, dengan asumsi koefisien variabel lain konstan.

4. Nilai koefisien regresi 0,331 hal ini menunjukkan bahwa variabel Risiko mempunyai hubungan positif terhadap Minat Investasi. Artinya, jika variabel Risiko mengalami peningkatan satu satuan, maka Minat Investasi akan mengalami kenaikan sebesar 0,331, dengan asumsi koefisien variabel lain konstan.
5. Standar *error* (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y tetapi tidak dimaksudkan dalam persamaan.

Uji Simultan (Uji F)

1. Untuk mencari nilai F tabel dapat menggunakan rumus *degree of freedom* (df)= n-k. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 93 responden, dan jumlah variabel penelitian yang digunakan sebanyak 4 variabel, dan untuk variabel independen sebanyak 3 variabel, maka diperoleh nilai:
   F – table = (0,05;df1;df2)
   F – tabel = df1 = k – 1 = 4 – 1 = 3
   F-tabel = df2 = n – k = 100– 4 = 96 F- tabel = (0,05;3;96) = 2,70

2. Maka nilai F tabel pada df 96 pada tingkat signifikansi 0,05 dan jumlah variabel independen sebanyak 3 variabel adalah sebesar 2,70.

Tabel 3: Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	457.746	3	152.582	15.487	.000[b]
	Residual	945.814	96	9.852		
	Total	1403.560	99			

a. Dependent Variable: Minat Investasi (Y)

b. Predictors: (Constant), Risiko (x3), Kepatuhan Syariah (X1), Tujuan Investasi (X2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4: Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.571[a]	.326	.305	3.139

a. Predictors: (Constant), Risiko (x3), Kepatuhan Syariah (X1), Tujuan Investasi (X2)
b. Dependent Variable: Minat Investasi (Y)

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui nilai R Square sebesar 0,326 atau 32,6% yang menunjukkan bahwa pengaruh Kepatuhan Syariah, Tujuan Investasi dan Risiko dalam mempengaruhi Minat Investasi adalah sebesar 32,6%, sementara sisanya 67,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang diduga merupakan karena kurang memperluas sampel penelitian dibeberapa perguruan tinggi yang sudah memiliki akun saham dan kurangnya variabel kepatuhan syariah, tujuan investasi dan risiko dalam mempengaruhi variabel independen sehingga harus menambahkan variabel lain yang akan berpengaruh terhadap minat berinvestasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial variabel persepsi kepatuhan syariah (X_1) tidak memiliki pengaruh signifikan

terhadap Minat Investasi (Y) pada mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sehingga persepsi kepatuhan syariah tidak menjadi salah satu faktor dalam minat berinvestasi pada mahasiswa. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai t_{hitung} 0,512 < t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,610 berada di atas 0,05, sehingga H_1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa Persepsi Kepatuhan Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap Minat Investasi.

2. Secara parsial variabel persepsi Tujuan Investasi (X_2) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Investasi (Y) pada mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sehingga persepsi tujuan investasi menjadi salah satu faktor dalam minat berinvestasi pada mahasiswa. Semakin tinggi nilai tujuan investasi maka akan semakin mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi. Berdasarkan hasil pengolahan data nilai t_{hitung} 3,209 > t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,002 berada dibawah 0,05, sehingga H_2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Persepsi Tujuan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Investasi.
3. Secara parsial variabel Persepsi Risiko (X_3) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Minat Investasi (Y) pada mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sehingga persepsi risiko menjadi salah satu faktor dalam minat berinvestasi. Semakin tinggi nilai Risiko maka akan semakin mempengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui nilai t_{hitung} 4,235 > t_{tabel} 1,984 dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 berada dibawah 0,05, sehingga H_3 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Persepsi Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Investasi.
4. Secara simultan (bersama-sama) variabel Persepsi Kepatuhan Syariah (X_1), Persepsi Tujuan Investasi (X_2), dan Persepsi Risiko (X_3) memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap Minat Investasi (Y) pada mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Berdasarkan hasil pengolahan datadiketahui F_{hitung} sebesar 15,487 dengan nilai signifikan 0,000b. F_{tabel} dapat diperoleh dari F_{tabel} statistik sebesar 2,70. Dengan demikian diketahui bahwa, F_{hitung} (15,487) > Ftabel (2,70) dengan Signifikasi (0,000b) < 0,05, sehingga H_4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa Secara simultan Persepsi Kepatuhan Syariah , Persepsi Tujuan Investasi dan Persepsi Risiko memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap Minat Investasi.
5. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi (R^2) nilai Adjusted R square sebesar 0,212 hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh Persepsi Kepatuhan Syariah (X_1), Persepsi Tujuan Investasi (X_2), dan Persepsi Risiko (X_3) terhadap Minat Investasi (Y) adalah 32,6%, sementara sisanya 67,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentunya belum bisa dikatakan sempurna, namun diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan pihak kepentingan lainnya. Maka dari hasil penelitian saran yang dapat peneliti sampaikan adalah diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih mendalami penelitian yang berkaitan dengan Minat Investasi pada Saham Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah*. CV Pustaka Setia. Bandung.

Bisnis.com. 2020. *Nilai Transaksi Investor Saham Riau Naik 163%*. Diakses pada jam 07:30 hari senin tanggal 30 November 2020. https://m.bisnis.com/amp/read/20200922/534/1294888/nilai-transaksi-investorr-saham-riau-naik-163-persen.

Jogiyanto, Hartono. (2013). *Teori Portofolio dan Investasi*. BPFE. Yogyakarta Herlianto, Didit. 2013. *Manajemen Investasi plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*. Gosyan Publishing. Yogyakarta.

Ghozali, Imam.(2011). *Aplikasi Analisis Multivariale dengan Program SPSS*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang.

Hartaji, D. A. (2012). Motivasi Berperestasi Pada Mahasiswa yang Berkuliah Dengan Jurusan Pilihan Orangtua. *Jurnal Psikologi , Vol 2 (1), 13-18.*

Imran, Hermawan Bambang dan Hartono Jogiyanto. (2013). *Teori Portofolio dan Investasi*. BPFE.

Yogyakarta.
KBBI. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses pada jam 10.00 hari senin tanggal 30 November 2020. https://kbbi.web.id/mahasiswa
Kanalsatu.com. 2020. *BEI Terus Tingkatkan Jumlah Investor*. Diakses pada jam 20:20 hari senin tanggal 16 November 2020. http://kanalsatu.com/id/post/55260/bei-terus-tingkatkan-jumlah-investor.
Makmum, Khairani. 2017. *Psikologi Belajar*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peraadilan Agama.* Kencana. Jakarta
Muhammad. 2016. *Manajemen Keuangan Syariah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Ramadhan, Reza. 2015. *"Peran dan Fungsi Mahasiswa"*. Diakses pada Jam 20:00 Hari Senin Tanggal 30 November 2020.
https://www.kompasiana.com/rezaramadhanunj/55dadb8a54977303099134c5/peran-dan-fungsimahasiswa
Setyowati, Sulis. Wulandri, Diyah. Hana, Kharis Fadlullah. 2020. Pengaruh Edukasi Investasi, Persepsi Return dan Persepsi Risiko terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020.*
Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi*. Rineka Cipta. Jakarta
Sutedi, Malang Adrian. (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Ivestasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah.* Cet.1. Sinar Grafika. Jakarta.
Soemitra, Andri. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenadamedia Group. Jakata.
Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
Tandelilin Eduardus. (2010). *Pasar Modal: Manajemen Portofolio & Investasi Edisi ke-1*. PT Kanisius. Yogyakarta'
Trisnatio, Yonar Again. Pustikaningsih, Adeng. (2018). Pengaruh Ekspetasi Retrun, Persepsi Terhadap Resikodan Self Efficacy Terhada Minat Investasi Saham Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi, Volume 6 No 3 Tahun 2018.*
Walgito, Bimo.(2010). *Pengantar Psikologi Umum*. CV Andi. Yogyakarta.

Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Laba Kotor pada UMKM Olshop Swarga Bara

Nuuridha Matiin
STIE Nusantara Sangatta-*nuridha.frs@gmail.com*

Abstrak— *The analysis tools used are difference in gross profit, difference in sales, difference in cost of goods sold, difference in selling price, difference in sales quantity, difference in quantity of cost of goods sold, difference in cost of goods sold, difference in quantity of sales and scheme of analysis of gross profit.*

Keywords - ***Gross Profit, Sales, Cost of Goods Sold.***

1. PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu perusahaan tergantung dari seberapa besar laba yang diperoleh suatu perusahaan. Informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen di masa yang akan datang. Namun, banyak hal yang telah direncanakan dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan harapan semula, bahkan sering mengalami kegagalan. Kegagalan yang sering terjadi karena adanya perubahan dalam laba kotor di dalam suatu perusahaan yang disebabkan karena perubahan penjualan dan perubahan harga pokok penjualan (hpp). Laba kotor *(gross profit)* itu sendiri adalah bagian dari laba yang merupakan selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan (hpp). Perubahan dalam laba kotor ini, membutuhkan suatu analisis yang dinamakan Analisis Laba Kotor.

Analisis laba kotor adalah analisis atau evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk mencari dan mengetahui sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor suatu perusahaan dari periode ke periode. Manfaat analisis laba kotor bagi manajemen adalah memberikan cukup motivasi bagi manajemen untuk memulai suatu pemeriksaan, yang akan membawa kepada berbagai kemungkinan tindakan koreksi, khususnya analisis yang menunjukkan perbedaan tidak menguntungkan (rugi) antara anggaran dan realisasi.Perubahan laba kotor perlu dianalisis untuk mengetahui sebab-sebab perubahan terjadinya laba kotor, baik perubahan yang menguntungkan (kenaikan) maupun perubahan yang tidak menguntungkan (penurunan) laba kotor antara *budget* dan penjualan. Tanpa adanya analisis tersebut, maka perusahaan akan sulit membandingkan apakah laba kotor setiap periode akan selalu mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan. Oleh karena itu, analisis terhadap laba kotor sangat perlu dilakukan untuk kepentingan kelangsungan suatu usaha. Dengan melakukan analisis dapat diketahui berbagai hal mengenai kondisi keuangan suatu usaha serta untuk mengambil keputusan di periode selanjutnya agar kinerja usaha dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

Satu diantara usaha industri tersebut adalah industri yang bergerak dalam bidang pembuatan Amplangyang berada di Sangatta. Amplang adalah sebuah makanan ringan tradisional yang terbuat dari daging ikan yang digiling halus dengan campuran tepung sagu. Pada masa sekarang ini amplang sudah menjadi buah tangan yang populer bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang ada di Sangatta. Amplang UKM Olshop Swarga Bara merupakan pusat oleh-oleh yang berlokasi di Jalan Dr sutomoSangatta Utara. UKM Olshop Swarga Bara memproduksi beberapa jenis amplang dengan varian rasa dan ukuran yang berbeda serta harga yang berbeda-beda disetiap jenis nya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pencatatan laba kotor yang terjadi di UKM Olshop Swarga Bara senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh perubahan harga jual dari yang dianggarkan dengan yang direalisasikan, dimana disebabkan oleh meningkatnya harga pokok penjualan. Untuk itu diperlukan analisis laba kotor pada Amplang UKM Olshop Swarga Bara agar dapat mengetahui adanya perubahan dalam pendapatan dan biaya yang terjadi di setiap aktivitas perusahaan.

Landip Susilowati (2016:1) mengemukakan bahwa pengertian akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya, menurut Hans Kartikahadi dkk (2016:3), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Halim (2012:18) akuntansi adalah kegiatanjasa yang menghasilkaninformasikeuangansuatukesatuanekonomi yang bergunauntukpengambilankeputusanekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian akuntansi dari para ahli tersebut, disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat dan menghasilkan informasi yang diberikan organisasi melalui laporan keuangan dengan tujuan untukmemberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi suatu organisasi.

Menurut Mulyadi (2001:3) akuntansi manajemen adalah tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Sedangkan menurut Halim (2012:3) akuntansi manajemen adalah akuntansi yang menyajikan informasi keuangan dan nonkeuangan untuk pihak internal perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan.

Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Rudianto (2013:9)

Berdasarkan pengertian akuntansi manajemendari para ahlidisimpulkan bahwa akuntansi manajemen adalah akuntansi yang mengolah informasi keuangan yang terutama untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian, dan menyajikan informasi keuangan untuk perusahaan dalam rangka untuk mencapai tujuan serta guna pengambilan keputusan internal organisasi.

Menurut Hery (2015:47) penjualan merupakan total jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dagangan yang dijual perusahaan, baik meliputi penjualan tunai maupun penjualan kredit. Sedangkan menurut Kasmir (2018:307) penjualan adalah jumlah omzet barang atau jasa yang dijual, baik dalam unit maupun dalam rupiah.

Menurut Baridwan (2013:29) penjualan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utangnya (atau kombinasi keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Berdasarkan pengertian penjualan dari para ahli disimpulkanbahwa penjualan adalah total barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan kepada pelanggan yang dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit.

Laba kotor *(gross profit)* menurut Sjahrial (2013:77) adalah selisih penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Sedangkan menurut Kasmir (2018:306) laba kotor artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Adapun menurut Hery (2015:48) laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan.

Berdasarkan pengertian laba kotor disimpulkanbahwa laba kotor adalah laba yang diperoleh dari hasil penjualan yang dikurangi dengan harga pokok penjualan atau laba sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan.

2. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Proses pengumpulan data ini akan digunakan dalam penyusunan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada UKM Olshop Swarga Bara dengan tujuan untuk meyakinkan kebenaran terhadap isi laporan yang akan dikemukakan. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan komunikasi secara langsung dan dari via media sosial. Komunikasi secara langsung yang dilakukan dengan lisan dalam bentuk tanya jawab yang berhubungan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh informasi secara langsung

mengenai data yang diperoleh. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pengelola usaha.

Dokumentasi
Penulis mengumpulkan data yang berkaitandenganmasalahlabakotor.Melalui pencatatan dari berbagai dokumen yang dapat mendukung seperti data penjualan amplang serta bukti lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Profit (keuntungan/laba) adalah total pendapatan dikurangi dengan total biaya, yang secara umum matematis alat analisis yang dipergunakan oleh penulis sebagai berikut :

1. Selisih Laba Kotor

SLK = LKSS - LKAG ..... Rumus 3.1

Keterangan :
SLK= Selisih Laba Kotor
LKSS = Laba Kotor Sesungguhnya
LKAG = Laba Kotor Anggaran
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:143

2. Selisih Penjualan

SP = PSS - PAG ..... Rumus 3.2

Keterangan :
SP = Selisih Penjualan
PSS = Penjualan Sesungguhnya
PAG = Penjualan Anggaran
Sumber :BastianBustami & Nurlela, 2006:144

3. Selisih Harga Pokok Penjualan

SHPP = HPPSS - HPPAG ..... Rumus 3.3

Keterangan :
SHPP = Selisih Penjualan
HPPSS = Harga Pokok Penjualan Sesungguhnya
HPPAG = Harga Pokok Penjualan Anggaran
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:144

4. Selisih Harga Jual

SHJ = (HJSS – HJAG) x KSS ..... Rumus 3.4

Keterangan :
SHJ = Selisih Harga Jual
HJSS = Harga Jual Sesungguhnya
HJAG = Harga Jual Anggaran
KSS = Kuantitas Sesungguhnya
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:145

5. Selisih Kuantitas Penjualan

SKP = (KSS – KAG) x HJAG ..... Rumus 3.5

Keterangan :
SKP = Selisih Kuantitas Penjualan
KSS = Kuantitas Sesungguhnya
KAG = Kuantitas Anggaran
HJAG = Harga Jual Anggaran
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:145

6. Selisih Kuantitas Harga Pokok Penjualan

SKHPP = (KSS – KAG) x HHPAG ..... Rumus 3.6

Keterangan :
SKHPP = Selisih Kuantitas Harga Pokok Penjualan
KSS = Kuantitas Sesungguhnya
KAG = Kuantitas Anggaran
HHPAG = Harga-Harga Pokok Penjualan Anggaran
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:146

7. Selisih Harga-Harga Pokok Penjualan

SHHPP = (HHPSS – HHPAG) x KSS ..... Rumus 3.7

Keterangan :
SHHPP = Selisih Harga-Harga Pokok Penjualan
HHPSS = Harga-Harga Pokok Sesungguhnya
HHPAG = Harga-Harga Pokok Anggaran
KSS = Kuantitas Sesungguhnya
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:145

8. Selisih Kuantitas Bersih

SKB = SKP - SKHPP ..... Rumus 3.8

Keterangan :
SKB = Selisih Kuantitas Bersih
SKP = Selisih Kuantitas Penjualan
SKHPP = Selisih Kuantitas Harga Pokok Penjualan
Sumber :Bastian Bustami & Nurlela, 2006:1

Realisasi Penjualan, Harga Pokok Penjualan dan Laba Kotor

Jumlah Barang	Bungkus	Penjualan		HPP		Laba Kotor (Rp)
		Harga Jual / Bks (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga Pokok / Bks (Rp)	Jumlah (Rp)	
Amplang Jumbo	16.000	55.000	880.000.000	30.000	480.000.000	400.000.000
Jumlah	16.000	55.000	880.000.000	30.000	480.000.000	400.000.000

Sumber data : data yang telah diolah

3.HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.4
Daftar Selisih Laba Kotor

Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
Penjualan	350.000.000	754.370.000	304.370.000
HPP	150.000.000	366.020.000	116.020.000
Laba Kotor	200.000.000	288.350.000	88.350.000
Kuantitas yang dijual	10.000	15.534	5.534
Harga Jual/bks	45.000	55.000	10.000
Harga pokok/bks	25.000	30.000	5.000

Sumber : data yang telah diolah

Laporan Perubahan Laba Kotor

Kenaikan Penjualan disebabkan :	
1. Kenaikan harga jual	Rp. 154.340.000
2. Kenaikan kuantitas penjualan	$\underline{Rp.248.030.000 +}$
Jumlah	Rp. 402.370.000
Kenaikan Harga Pokok Penjualan disebabkan :	
1. Kenaikan Harga-Harga Pokok Penjualan	Rp. 87.570.000
2. Kenaikan kuantitas produk	$\underline{Rp.130.350.000 +}$
Jumlah	$\underline{Rp.217.920.000 -}$
Kenaikan Laba Kotor	Rp. 184.450.000

Berdasarkan pada laporan perubahan laba kotor diatas, produk amplang terjadi perubahan pada penjualan sebesar Rp. 402.370.000 yang disebabkan karena adanya kenaikan harga jual sebesar Rp. 154.340.000 (M) dan kenaikan kuantitas penjualan sebesar Rp. 248.030.000 (M). Dan perubahan harga pokok penjualan sebesar Rp. 217.920.000 disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok per unit sebesar Rp. 77.670.000 (TM) dan kuantitas harga pokok sebesar Rp. 130.350.000 (TM) sehingga laba kotor pun meningkat sebesar Rp. 184.450.000

Keterangan :

M = Menguntungkan

TM = Tidak Menguntungkan

Faktor – Faktor Penyebab Perubahan Laba Kotor

Perolehan laba perusahaan tiap periode tidak sama atau selalu berbeda-beda. Artinya laba yang diperoleh dari periode ke periode berubah-ubah. Perbedaan ini tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun dari kondisi luar perusahaan. Laba kotor dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu faktor perubahan harga jual, faktor perubahan kuantitas penjualan dan faktor harga pokok penjualan. Pada perusahaan manufaktur, harga pokok penjualan terdiri dari unsur biaya produksi, dan persediaan barang. Perubahan pada unsur-unsur harga pokok penjualan baik kenaikan maupun penurunan berpengaruh terhadap laba kotor.

a. Laporan Perubahan Harga Jual

Perubahan harga jual *(sales price variance),* adalah adanya perubahan antara harga jual yang sesungguhnya dengan harga jual yang dianggarkan atau harga jual tahun sebelumnya.

Apabila harga jual realisasi dikurangi dengan harga jual yang dianggarkan menunjukkan angka positif berarti adanya kenaikan harga atau menguntungkan, sebaliknya jika menunjukkan angka negatif berarti adanya penurunan harga jual dan menunjukkan keadaan yang merugikan.

Tabel
Laporan Harga Pokok Penjualan Realisasi & Anggaran

Jenis Produk	Harga Pokok Penjualan Realisasi	Harga Pokok Penjualan Anggaran	Selisih Harga Pokok Penjualan
	(a)	(b)	c = (a - b)
Amplang Jumbo	Rp. 366.020.000	Rp.150.000.000	Rp 216.020.000

Sumber : data yang telah diolah

BerdasarkanTabel di atas selisih laba kotor disebabkan oleh harga pokok penjualan. Selisih harga pokok penjualan tersebut mengalami kerugian yang disebabkan oleh harga pokok realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 216.020.000 dari harga pokok anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat memberikansimpulan sebagai berikut :

Setelah dilakukan perhitungan dapat diketahui faktor-faktor penyebab perubahan laba kotor pada UMKM Olshop Swarga Bara disebabkan oleh adanya perubahan harga jual, perubahan kuantitas penjualan, dan perubahan harga pokok penjualan dari anggaran ke realisasi.

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan. Berikut perubahan harga jualtersebut mengalami kenaikan dari harga jual anggaran, perubahan kuantitas penjualan yang dipengaruhi oleh kuantitas realisasi meningkat, dan perubahan harga pokok penjualan yang mengalami kerugian disebabkan kenaikan hargabahanmentahataubahansebagaiproduksipembuatanamplang.

Saran yang dapat diberikan kepada UMKMOlshop Swarga Bara adalah sebagai berikut :

UMKM Olshop Swarga Bara sebaiknya melakukan pencatatan yang lebih terperinci tentang penjualan dan biaya-biaya agar dapat mengetahui seberapa besar pendapatan yang diperoleh dan berapa besar biaya-biaya yang telah dikeluarkan agar usaha tersebut terhindar dari kerugian.

Hal yang memengaruhi kenaikan laba kotor adalah kuantitas penjualan, maka diharapkan UMKM Olshop Swarga Bara dapat menjaga kenaikan tersebut agar tidak menjadi penurunan yang dapat menyebabkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Bustami, Bastian & Nurlela. (2006). *Akuntansi Biaya Tingkat Lanjut.* Jakarta : Graha Ilmu.

Hans Kartikahadi., dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan MenengahBerbasis SAK Berbasis IFRS Buku1*. Jakarta :SalembaEmpat.

Supriyono. (2012). *Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.).

Ikatan Akuntansi Indonesia. PSAK No. 1 *Tentang Laporan Keuangan*-edisi revisi 2015. Penerbit dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo.)

Susilowati, L. (2016) *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa Dan Dagang.* Edisi 1 Yogyakarta: Kalimedia.).

Somantri, Hendi, (2011). Memahami Akuntansi SMK, Bandung : Armico) Menurut Suradi (2009:16)

Suradi, (2009). Pengantar Akuntansi 1, Yogyakarta : Gava Media Yogyakarta)

Mulyadi, (2014). Akuntansi Biaya, Yogyakarta : STIM YKPN)

Mulyadi (2001). *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat, dan Rekayasa.* Jakarta: Salemba Empat)

Halim. (2012). *Akuntansi Manajemen*. Edisi kedua. Cetakan kedua. Yogyakarta: BPFE)

Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis.* Jakarta: Erlangga)

Sari, Nurbatin, dan S.W. Setiyowati. 2017*. Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK.* Jakarta : Mitra Wacana Media.)
Hery. (2012) *Akuntansi dan Rahasia dibaliknya.* (edisi pertama). Jakarta: PT. Bumi Aksara).
Munawir. (2014). *Analisa Laporankeuangan.* Yogyakarta: Liberty.
Sodikin dan Riyono. (2014). *Akuntansi Pengantar 1.* Yogyakarta: Sekolah Tinggi IlmuManajemen YKPN.
Kasmir. (2012). *AnalisisLaporan Keuangan.* Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada.
Rudianto. (2012). *Akuntansi ManajemenInformasiuntukPengambilan Keputusan Strategis.* Jakarta: Erlangga.
Baridwan, Zaki.(2013). *Intermediate Accounting* (edisikedelapan). Yogyakarta :Penerbit BPFE.
Jumingan. (2014). *AnalisisLaporan Keuangan.* Cetakankelima. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi(Comprehensive Edition).*Jakarta : PT. Grasindo.
Kasmir. (2018). *AnalisisLaporan Keuangan.* Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
Sjahrial, Dermawan dan Purba. (2013). *AnalisisLaporan Keuangan.* Jakarta: Mitra Wacana Media.
Hery. (2015). *AnalisisLaporan Keuangan PendekatanRasio Keuangan.* Cetakanpertama. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Pekanbaru

Mila Ultsani[1], Agustiawan[2], Nur Fitriana[3]
Universitas Muhammadiyah Riau -[1]*190301012@student.umri.ac.id*
-[2]*agustiawan@umri.ac.id*
-[3]*nurfitri@umri.ac.id*

Abstrak— *This research aims to determine the factors influencing taxpayer compliance when paying motor vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga, Pekanbaru City. This research uses quantitative methods. The population used in this research are taxpayers who pay their vehicle tax at UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The sample used in this research was 400 taxpayers. This research data was collected by distributing questionnaires directly to UPT SAMSAT Simpang Tiga Pekanbaru City. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis with SPSS version 22 software tools. The results of this study show that the factors used, namely taxpayer income level, taxpayer awareness, service quality, and tax sanctions have an influence on motor vehicle taxpayer compliance.*

Keywords*: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Service Quality, Tax Sanctions, Income Level*

1. PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada pasal 1 ayat 1 UU tersebut dijelaskan bahwa “Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat“. Pajak di Indonesia terbagi 2 bagian pemungutan berdasarkan jenisnya yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Salah satu manfaat pajak kendaraan bermotor yaitu untuk meningkatkan pendapatan kabupaten dan kota.

Tabel 1 Rasio Wajib Pajak (WP) Kendaraan Bermotor yang Menunggak dan Terkena Denda Pajaknya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru (Unit) Tahun 2020-2022

Tahun	WP yang Terdaftar (Unit)	WP yang Membayar (Unit)	WP yang Menunggak & Terkena Denda (Unit)	Persentase %
2020	169.738	154.189	15.769	9,3 %
2021	187.176	167.573	15.567	8,3 %
2022	201.107	181.489	27.802	13,8 %

Sumber : Data Bapenda Provinsi Riau, 2023

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 169.738, dengan jumlah wajib pajak yang membayar adalah 154.189 dengan persentase 90,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 15.769 dengan persentase 9,3% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 187.176 dengan jumlah wajib pajak yang membayar adalah 167.573 dengan persentase 91,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 15.567 dengan persentase 8,3% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Dimana tahun 2020 dengan 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar, dan membayar mengalami kenaikan dan sejalan dengan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 201.107

dengan jumlah yang membayar adalah 181.489 dengan persentase 86,2% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang menunggak dan terkena denda adalah 27.802 dengan persentase 13,8% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan demikian pada tahun 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar dan membayar mengalami kenaikan namun tidak sejalan dengan wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami kenaikan. Karena seharusnya, jika wajib pajak yang terdaftar dan yang membayar mengalami kenaikan maka wajib pajak yang menunggak dan terkena denda mengalami penurunan.

Tabel 2 Jumlah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang Menunggak dan Terkena Denda di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru (Unit) Tahun 2020-2022

Tahun	Tunggakan yang didapat	Denda yang didapat
2020	Rp. 11.300.097.556	Rp. 3.675.351.637
2021	Rp. 13.919.355.883	Rp. 3.684.819.983
2022	Rp. 18.804.140.654	Rp. 6.859.532.208
Total	**Rp. 44.023.594.093**	**Rp. 14.219.703.828**

Sumber : Data Bapenda Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan data tahun 2020 s/d 2022 diatas jumlah penerimaan tunggakan dan denda di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru, pada tahun 2020 jumlah tunggakan sebesar Rp. 11.300.097.556, tahun 2021 jumlah tunggakan meningkat menjadi Rp. 13.919.355.883 dan ditahun 2022 jumlah tunggakan mengalami kenaikan hingga sebesar Rp. 18.804.140.654. Denda yang didapat mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya tunggakan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah denda yang didapat sebesar Rp. 3.675.351.637, tahun 2021 jumlah denda meningkat menjadi Rp. 3.684.819.983 dan tahun 2022 jumlah denda meningkat hingga Rp. 6.859.532.208. Dapat disimpulkan bahwa jumlah tunggakan dan denda yang didapat dari tahun 2020 s/d 2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya hal ini memperkuat data tabel 1.1 bahwa kepatuhan wajib pajak di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru masih adanya wajib pajak yang belum patuh. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4).

TheoryofPlannedBehaviour (TPB) atau teori perilaku terencana adalah niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991) terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi niat individu dalam berperilaku, yaitu :

1. Sikap terhadap perilaku dan mengaju pada sejauh mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap perilaku yang bersangkutan. Sikap terhadap perilaku dianggap sebagai variabel pertama yang memengaruhi niat berperilaku. Ketika seorang individu menghargai positif suatu perbuatan, maka ia memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu.
2. Norma subjektif (social) mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Pengaruh sosial berakar dari keluarga, pasangan hidup, kerabat, rekan dalam bekerja dan acuan lainnya yang berkaitan dengan suatu perilaku.
3. Kontrol prilaku mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu serta hambatan dan rintangan yang diantisipasi.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya dan untuk kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni :

1) **Fungsi anggaran *(budgetair)***sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) **Fungsi mengatur *(regulerend)*** sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.
3) **Stabilitas**, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4) **Redistribusi Pendapatan**, penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menurut Golongan
   a. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).
   b. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
   a. Pajak Subjektif: pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh**:** Pajak penghasilan (PPh).
   b. Pajak Objektif: Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keaadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
   a. Pajak Pusat: pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
   b. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wwalet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan ha katas tanah dan bangunan

Dalam administrasi negara, pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis-jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 2 UU 28/2009). Pajak kendaraan bermotor temasukkedalam jenis pajak daerah dan bersifat memaksa.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Menurut Rahayu (2013) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dipakai untuk konsumsi atau menambahkan kekayaan wajib pajak, meliputi keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, royalti, dividen dan lain sebagainya. Berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2022 pasal 1 ayat 13 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, pada pasal 1 ayat 20 pendapatan asli daerah yang (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui,diakui, dihargai, dan ditaati. Menurut Rahayu (2017)

munculnya kesadaran dari wajib pajak ditunjukan dengan kondisi yang mana wajib pajak memiliki pengertian dan paham akan arti, fungsi serta tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Asri (2011) berpendapat bahwa wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran dalam membayar pajak apabila :

1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2) Mengetahui dan memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan sukarela.
5) Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar

Menurut Parasuraman, *etal.,* (1998) dalam penelitian Nirajenani& Aryani (2018) mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Menurut Arianto (2018) kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai berfokus pada memenuhi kebutuhan dan persyaratan, serta pada ketepatan waktu untuk memenuhi harapan pelanggan. Menurut Nugroho (2017) dalam penelitian Julantari, dkk (2021) pelayanan yang berkualitas dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan UU perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi perpajakan dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan UU perpajakan yang berlaku. Samudra (2015) menyatakan bahwa didalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini melewati prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama yaitu sejak bulan Maret 2023 s.d Desember 2023, sehingga peneliti memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan penelitian ini

Penelitian ini dalam menyebarkan kuesioner memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama yaitu 11 Oktober 2023 s.d 15 Desember 2023. Penelitian menggunakan 4 variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4)) yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,3%

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang membayarkan pajak kendaraan bermotornya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena masih terdapat wajib pajak yang kurang patuh terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan hasil yang didapat dari UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (bebas) yaitu variabel X1 atau variabel tingkat pendapatan wp, variabel X2 atau variabel kesadaran wp, variabel X3 atau variabel kualitas pelayanan dan variabel X4 atau variabel sanksi perpajakan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu Y atau variabel kepatuhan wpmenggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang dikuantitatifkan

Untuk mendukung penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban-jawaban atas pernyataan-pernyataan dalam pengisian kuesioner oleh responden.
b. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data wajib pajak yang menunggak dan wajib pajak yang terkena denda pajak kendaraan bermotor di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan kuantitatif dimana peneliti menyebarkan secara langsung kueisioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayarkan pajaknya di UPT SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang nantinya akan di olah penulis menggunakan software SPSS (*StatisticProductand Service Solution*) Versi 22. Disamping itu penulis juga menganalisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden berdasarkan pertanyaan yang mencerminkan indikator masing-masing variabel kemudian ditabulasi untuk dianalisis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi mengenai angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti yaitu, kepatuhan wajib pajak (Y), tingkat pendapatan wajib pajak (X1),

kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Stastistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Kepatuhan Wajib Pajak	400	12	20	17.31	1.938
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	400	13	20	16.47	1.851
Kesadaran Wajib Pajak	400	10	20	16.75	1.743
Kualitas Pelayanan	400	70	95	78.56	6.436
Sanksi Perpajakan	400	7	15	12.64	1.746
Valid N (*listwise*)	400				

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tebel 4.3 di atas menunjukkan hasil analisis stastistik deskriptif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)
   Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimun sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17,31 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,938. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kepatuhan wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
2. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1)
   Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa tingkat pendapatan wajib pajak memiliki nilai minimun sebesar 13, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,47 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,851. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel tingkat pendapatan wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
3. Kesadaran Wajib Pajak (X2)
   Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimun sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 16,75 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,743. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kesadaran wajib pajak karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
4. Kualitas Pelayanan (X3)
   Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa kualitas pelayanan memiliki nilai minimun sebesar 70, nilai maksimum sebesar 95, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 78,56 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 6,436. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel kualitas pelayanan karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.
5. Sanksi Perpajakan (X4)
   Bedasarkan pengujian statistik di atas, diketahui bahwa sanksi perpajakan memiliki nilai minimun sebesar 7, nilai maksimum sebesar 15, dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,64 dengan nilai standar deviasi (tingkat sebaran data) sebesar 1,746. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik dari variabel sanksi perpajakan karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya

Hasil Uji Validitas Data

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,912	0,098	Valid
	Y.2	0,918	0,098	Valid
	Y.3	0,922	0,098	Valid
	Y.4	0,879	0,098	Valid
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,844	0,098	Valid
	X1.2	0,895	0,098	Valid
	X1.3	0,843	0,098	Valid
	X1.4	0,825	0,098	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,772	0,098	Valid
	X2.2	0,746	0,098	Valid
	X2.3	0,680	0,098	Valid
	X2.4	0,749	0,098	Valid
Kualitas Pelayanan (X3)	X3.1	0,681	0,098	Valid
	X3.2	0,693	0,098	Valid
	X3.3	0,749	0,098	Valid
	X3.4	0,756	0,098	Valid
	X3.5	0,855	0,098	Valid
	X3.6	0,850	0,098	Valid
	X3.7	0,866	0,098	Valid
	X3.8	0,864	0,098	Valid
	X3.9	0,914	0,098	Valid
	X3.10	0,860	0,098	Valid
	X3.11	0,867	0,098	Valid
	X3.12	0,790	0,098	Valid
	X3.13	0,802	0,098	Valid
	X3.14	0,862	0,098	Valid
	X3.15	0,868	0,098	Valid
	X3.16	0,830	0,098	Valid
	X3.17	0,785	0,098	Valid
	X3.18	0,814	0,098	Valid
	X3.19	0,549	0,098	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,869	0,098	Valid
	X4.2	0,888	0,098	Valid
	X4.3	0,908	0,098	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

erdasarkan tabel 3 hasil uji validasi di atas dapat dilihat bahwa dari hasil uji validasi masing-masing variabel menunjukkan hasil r hitung > r tabel dengan tingkat signifikan. Maka setiap pertanyaan yang digunakan dinyatakan valid sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach'sAlpha*	Nilai Kritis	Keterangan
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1)	0,870	0,60	Reliabel
Kesadarab Wajib Pajak (X2)	0,706	0,60	Reliabel
Kualitas Pelayanan (X3)	0,964	0,60	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,861	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,924	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan bahwa setiap variable menunjukkan nilai *cronbach'salpha*> 0,60, maka kuesioner yang merupakan indikator setiap variabel dapat dikatakan reliabel atau handal.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-SampleKolmogorov-SmirnovTest		
		UnstandardizedResidual
N		400
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	.0000000
	Std. Deviation	1.35938257
MostExtremeDifferences	*Absolute*	.041
	Positive	.041
	Negative	-.041
TestStatistic		.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.108[c]

a. Testdistributionis Normal.
b. Calculatedfrom data.
c. LillieforsSignificanceCorrection.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan table 5 di atas menjunjukkan nilai signifikan sebesar 0,108 > 0,05, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
		CollinearityStatistics	
Model		*Tolerance*	*VIF*
1	*(Constant)*		
	Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	.673	1.487
	Kesadaran Wajib Pajak	.904	1.106
	Kualitas Pelayanan	.722	1.385
	Sanksi Perpajakan	.816	1.226

a. *DependentVariable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan table 6 di atas menunjukkan bahwa setiap variable memiliki nilai *tolerance*> 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8 Hasil Uji HeteroskedastisitasGlejser

Model		*UnstandardizedCoefficients*		*Standardized Coefficients*	*t*	*Sig.*
		B	*Std. Error*	*Beta*		
1	*(Constant)*	1.178	.604		1.952	.052
	Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	.016	.027	.037	.611	.542
	Kesadaran Wajib Pajak	-.012	.025	-.026	-.504	.615
	Kualitas Pelayanan	-.010	.007	-.076	-1.299	.195
	Sanksi Perpajakan	.048	.026	.103	1.856	.064

a. *DependentVariable*: abs_res

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan table 7 di atas bahwa setiap variabel independen pada nilai sig> 0,05, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi variabel tingkat pendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Hasil Uji Rekresi Linear Berganda

Tabel 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]

Model		*UnstandardizedCoefficients*		*Standardized Coefficients*
		B	*Std. Error*	*Beta*
1	*(Constant)*	2.328	1.012	
	Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	.159	.045	.152
	Kesadaran Wajib Pajak	.089	.041	.080
	Kualitas Pelayanan	.040	.013	.132
	Sanksi Perpajakan	.612	.043	.551

a. *DependentVariable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

erdasarkan table 8 di atas yang diuji dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 2{,}328 + 0{,}159X_1 + 0{,}089X_2 + 0{,}40X_3 + 0{,}612X_4$$

Penjelasan dari hasil regresi adalah sebagai berikut:

a. Nilai konstanta (a) sebesar 2,328 menunjukkan bahwa apabila variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4)) memiliki nilai konstan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,328.
b. Nilai koefisien variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1) sebesar 0,159 artinya jika tingkat pendapatan wajib pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,159 atau 15,9%.
c. Nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X2) sebesar 0,089 artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,089 atau 8,9%.
d. Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan (X3) sebesar 0,040 artinya jika kualitas pelayanan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,040 atau 4%.

e. Nilai koefisien variabel sanksi perpajakan (X4) sebesar 0,612 artinya jika sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1 (satu) satuan, maka akan menaikkan nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,612 atau 61,2%

Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Parsial (uji t)

Tabel 10 Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients[a]

Model		UnstandardizedCoefficients		StandardizedCoefficients	T	Sig.	CollinearityStatistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.328	1.012		2.300	.022		
	Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	.159	.045	.152	3.528	.000	.673	1.487
	Kesadaran Wajib Pajak	.089	.041	.080	2.166	.031	.904	1.106
	Kualitas Pelayanan	.040	.013	.132	3.185	.002	.722	1.385
	Sanksi Perpajakan	.612	.043	.551	14.108	.000	.816	1.226

a. *DependentVariable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 9 di atas hasil Uji hipotesis dengan menggunakan uji t untuk masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) sebagai berikut :

a. Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung tingkat pendapatan wajib pajak sebesar 3,528 dimana t hitung > t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya tingkat kepatuhan wajib pajak (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung kesadaran wajib pajak sebesar 2,166dimana t hitung > t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,031< 0,05. Artinya kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_2 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung kualitas pelayanan sebesar 3,185 dimana t hitung > t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,002< 0,05. Artinya kualitas pelayanan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

d. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Dari tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa t hitung sanksi perpajakan sebesar 14,108 dimana t hitung > t tabel sebesar 1,960 dan nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05. Artinya sanksi perpajakan (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar kendaraan bermotor. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_4 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$

Model Summary[b]

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. ErroroftheEstimate*
1	.713[a]	.508	.503	1.366

a. *Predictors: (Constant*), Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

b. *DependentVariable*: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi *(Adjusted R Square)* sebesar 0,503 atau 50,3%. Hal ini berarti bahwa 50,3% kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4). Sedangkan 49,7% kepatuhan wajib pajak (Y) kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *TheoryofPlannedBehaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor sikap yang mana seseorang memiliki evaluasi atau penilaian. Niat dari sikap ini meruapakan perencanaan individu mengenai keputusan berperilaku secara sadar maupun tidak mengenai tingkat pendapatan wajib pajak individu.

Tingkat pendapatan wajib pajak meliputi sikap taat membayar pajak meski pendapatan tinggi maupun rendah, kesanggupan membayar pajak serta pendapatan tersebut dapat memenuhi ke butuhan pokok sehari-hari. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnadeva (2020) bahwa tingkat pendapatan yang semakin tinggi diperoleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarpajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Ningsih (2022) dan Nita,dkk (2022).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *TheoryofPlannedBehaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor sikap yang mana seseorang memiliki kemauan untuk bertindak. Perilaku ini merupakan tindakan wajib pajak untuk membayar pajak secara sadar.

Kesadaran wajib pajak meliputi partisipan untuk menunjang pembangunan daerah, terdapat undang-undang yang menaggut serta mengetahui alokasi pemungutan pajak untuk negara. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Juliantari (2021) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Krisnadeva (2020), Nirajenani&Artani (2018) dan Dewi &Rumiyatun (2017).

Pengaruh Kualitas Pelayanan (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_3 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *TheoryofPlannedBehaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor kontrol prilaku. Saat wajib pajak mendapatkan kualitas pelayanan yang memuaskan, maka akan membuat wajib pajak bergerak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan mempertimbangkan untuk membayar pajak karena adanya pelayanan yang memuaskan seperti kondisi fisik kantor atau SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru dinilai memadai, kahandalan pelayanan dalam melayani wajib pajak yang akan membayar pajak

kendaraannya misalnya petugas mampu menanggapi dengan cepat dalam menangani keluhan wajib pajak, memberikan jaminan berupa sikap petugas dalam menjawab pertanyaan, teliti dan proses yang cepat kepada wajib pajak yang membutuhkan bantuan, dan adanya empati petugas dengan tidak membedakan status sosial dan memberikan perhatian yang sama kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Krisnadeva (2020) bahwa kualitas pelayanan memengaruhi pengambilan keputusan untuk membayar pajaknya. Sejalan dengan hasil penelitian Nirajenani& Aryani (2018).

Pengaruh Sanksi Perpajakan (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H_4 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial. Penelitian ini didukung dengan *TheoryofPlannedBehaviour (TPB)* atau teori perilaku terencana yang berkaitan dengan penelitian ini pada faktor norma sosial, yang mana pengaruh ini berasal dari orang sekitar wajib pajak dan berkaitan dengan suatu perilaku. Sanksi yang ditetapkan mampu mendukung taat atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Sanksi perpajakan ini meliputi sanksi administrasi dan pidana. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Indira Ningsih, dkk (2022) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Juliantar, dkk (2021), Krisnadeva (2020), Dian Efriyenti (2019), Kristi & Anang (2019) dan Nirajenani& Aryani (2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
3. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Simpang Tiga Kota Pekanbaru

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan, yaitu :

1. Penelitian ini melewati prosedur yang cukup panjang dan memakan waktu yang lama yaitu sejak bulan Maret 2023 s.d Desember 2023, sehingga peneliti memerlukan waktu yang panjang untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Penelitian ini dalam menyebarkan kuesioner memerlukan waktu yang cukup panjang dan lama yaitu 11 Oktober 2023 s.d 15 Desember 2023.
3. Penelitian menggunakan 4 variabel independen (tingkat pendapatan wajib pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), kualitas pelayanan (X3), dan sanksi perpajakan (X4)) yang mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 50,3% dan masih terdapat 49,7% variabel independen yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, T. W., &Yushita, A. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wp Terhadap Kepatuhan Wp Badan Kpp Cilacap 2018. *Jurnal Kajian Akuntansi. Vol. 6 No. 6, Hal. 1-15.*

Ajzen, I.(1991). *The TheoryofPlannedBehavior*, *OrganizationalBehaviorand Human DecisionProcesses*, Vol. 50 No. 2, Hal. 179-211

Ajzen, I. (2011). *The theoryofplannedbehaviour: reactionsandreflectionsPsychology&health*. Vol. 26 No. 9, Hal. 1113-1127

Alicia, E, dkk. (2021). Analisis Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor PadaKantor Bersama SAMSAT Tondano. *JAIM: JurnalAkuntansi Manado. Vol. 2 No. 2. Hal. 207-215*

Ariyanto, D., dkk. (2020). InfluenceofJustice, Cultureand Love of Money TowardsEthicalPerceptiononTaxEvasionwith Gender as moderatingVariable. *Journalof Money LaunderingControl*. Vol. 23 No. 1, Hal. 245–266

Chau, G., &Leung, P. (2009) . A criticalreviewofFischer'staxcompliance model: A researchsynthesis. *JournalofAccountingandTaxation, Vol. 1 No. 2, Hal. 34-40*

Chusaeri, Y, dkk. (2017). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi. Vol. 6 No. 9. Hal. 16-30*

Dewi, I. A. P. P I, dkk. (2020. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 11 No. 3. Hal. 2614 – 1930*

Efriyenty, Dian. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam. *E-jurnal Akuntansi. Vol. 3 No. 2, Hal. 20-28*

Farandy, M. R., &Sulitiyanti, U. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kenda raan Bermotor. *Journalof Chemical Informationand Modeling*

Febriyanti, A. A. I. I., & Setiawan, P. E. (2017). Analisis Aspek-Aspek Wajib Pajak Sebagai Anteseden Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 21 No. 2, Hal. 996–1025

Fetrisia, J. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pendapatan Wajib Pajak. *E-Jurnal STIE.*

Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Jakarta

Juliantari, Ni Komang Ayu, dkk (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *E-Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar. Vol. 3 No. 1, Hal. 128-139.*

Karlina, U. W & Ethika, M. H (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Bung Hatta. Vol. 15 No. 2, Hal. 143-154.*

Krisnadeva, A. A. N. (2020).Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntasni. Vol. 30 No. 6, Hal. 1425-1440.*

Mardiasm (2018). *Perpajakan* Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi

Mumu, A. dkk. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 15 No. 2, Hal. 175-184*

Ningsih, Dwi Indria, dkk (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Riau. Vol. 2 No. 1, Hal. 190-199.*

Nirajenani, C. I. P & M. Aryani, N. Kt. L (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Udayana. Vol. 21 No. 1, Hal. 339-369.*

Nita, E, dkk. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *E-Jurnal Politeknik Negeri Padang. Vol. 1 No. 2, Hal. 128-141*.

Puteri, P. O, dkk (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, dan Sistem SAMSAT *DriveThru*Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor SAMSAT Kota Padang). *E-Jurnal JEA. Vol. 1 No. 3, Hal. 1569-1588*.

Prena, G. Das, dkk. (2019). Tax Sanctions, Tax Amnesty Program, and Tax Obligation Placement towards Compliance Report on Corporate Taxpayers. *International Journal of Social Sciences and Humanities*. Vol. 3 No. 1, Hal. 26–35.

Rahayu, S. K. (2010). *PERPAJAKAN INDONESIA*: Konsep dan Aspek Formal,Yogyakarta : Graha Ilmu

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (11th ed.). Salemba Empat

Samudra, A A. (2015). *Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers

(Suari, D. P. A. M, dkk (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi

Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Gianyar. *E-Jurnal. Hal. 775-786.*

Sugiyono. (2016(. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV

Susilawati, K. E., &Budiartha, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 4 No. 2, 345–357*

Tresnalyani, N. K. Mi dan Jati, I. K. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Perpajakkan dan Biaya Kepatuhan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-*Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 24 No. 1. Hal. 578-605*

Wardani, D. K., & Asis M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajibpajak, dan program SAMSAT corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraanbermotor. *Jurnal Akuntansi Dewantara. Vol. 1 No. 2, Hal.106-116*

Wardani, D. K dan Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem SAMSAT *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di SAMSAT *Drive Thru* Bantul). *E-Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa. Vol. 5 No. 1, Hal. 15-24*

PERATURAN

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta

Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat. Jakarta

SUMBER INTERNET

https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/indikator-keberhasilan-djp-adalah-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-293858#:~:text=.04%2F2000.-,Menurut%20Keputusan%20Menteri%20Keuangan%20No.%20544%2FKMK.04%2F,untuk%20mengangsur%20atau%20menunda%20pembayaran
Indikator Keberhasilan DJP adalah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 12 Juni 2023

https://educhannel.id/blog/artikel/pendapatan.html#:~:text=Menurut%20Boediono%20(2002)%2C%20secara,%2C%20minggu%2C%20dan%20bulan)
Pendapatan. Diakses pada 31 Mei 2023

https://flazztax.com/2021/06/24/simak-5-jenis-pajak-pusat-beserta-pengertiannya//
Simak 5 Jenis Pajak Pusat Beserta Pengertiannya. Diakses pada 31 Mei 2023

https://lifepal.co.id/media/cek-pajak-kendaraan-bermotor-secara-berkala-ini-4-manfaatnya-lho/#Manfaat_pajak_kendaraan_bermotor
Ini Manfaat Pajak Kendaraan Bermotordan Cara bayarnya. Diakses pada 14 April 2023

https://klikpajak.id/blog/pajak-yang-dipungut-pemerintah-pusat/#Jenis_Pajak_yang_Dikelola_Pusat
Pajak yang Dipungut Pemerintah Pusat, Bagaimana Penjelasannya ?. Siakses pada 10 april 2023

https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Definisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-jenis-Pajak-Daerah
Definisi Pajak Daerah dan Jenis-jenis Pajak Daerah. Diakses pada 28 Desember 2022

https://SAMSATdigital.id/artikel/mengapa-bayar-pajak-kendaraan-bermotor
Mengapa Bayar Pajak Kendaraan Bermotor ?. Diakses pada 06 Juni 2023

Pengaruh Profitabiitas Struktur Aktiva Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022)

Putri Handayani[1], Linda Hetri Suriyanti[2], Nur Fitriana[3]
Universitas Muhammadiyah Riau - *[1]190301008@student.umri.ac.id*
-[2]lindahetri@umri.ac.id
- [3]nurfitri@umri.ac.id

Abstrak - *The aim of this research is to analyze the influence of profitability, asset structure and company size on capital structure. This research is a case study of a food and beverage sub-sector manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the 2020-2022 period. For this research, the data source used is secondary data obtained from IDX (Indonesian Stock Exchanges) in the form of annual reports of food and beverage sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI), namely (www.idx.co.id). The data analysis technique used in this research is descriptive analysis and research hypothesis testing which is carried out using a multiple regression model. The results of the analysis conclude that profitability, asset structure and company size influence capital structure. This research uses 3 independent variables and 1 dependent variable, namely profitability, asset structure and company size on capital structure where it can be seen that the Adjusted R Squared value is 57.8% which has an influence in this research so that there is still a remaining 42.2% which is influenced by other variables outside this research.*

Keywords: Profitability,Assets Structure, Company Size* and *Capital Structure.

1.PENDAHULUAN

Perkembangan perusahaan makanan dan minuman dapat dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia yang bertambah setiap tahunnya maka penjualan yang akan dihasilkan juga akan bertambah sehingga untuk tetap dapat berproduksi perusahaan akan membutuhkan modal yang cukup besar (Liando, 2021). Kebutuhan akan modalmerupakan prinsip utama yang tidak bisa lepas dari setiap usaha. Kebutuhanakan modal usaha dapat diperoleh dari pinjaman berupa utang(Sunaryo, 2020). Namun di sisi lain penggunaan utang juga harusdikontrol perusahaan, agar tidak terjadi utang yang berlebih. Hal ini dikarenakan jika jumlah utang melebihi jumlah ekuitas yang dimiliki, maka perusahaan akan memiliki resiko likuiditas yang tinggi(Aminah, 2019). Untuk menentukan seberapa besar kebutuhan modal yang akan digunakan, maka dilakukan pengambilan keputusan pendanaan.Aktivitas pendanaan ini merupakan bagian dari struktur modal (Ardini, 2020).

Menurut Yusgiantoro (2020) struktur modal merupakan faktor penting untukmenentukan perekonomian suatu bisnis, karena menyangkut besarnya biaya modal rata-rata.Besarnya biaya modal rata-rata sangat tergantung dari struktur pinjaman dan modal sendiri, sehingga seorang manager keuangan harus bisa dan mampu mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Struktur modal yang maksimal mampu mengoptimalkan nilai perusahaan ataupun harga saham. Struktur modal dapat diukur dengan persamaan berikut :

Debt to Equity Ratio = Total Utang X 100%
Total Ekuitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan akan menarik para investor untuk menanamkan dana guna memperluas perusahaan (Fahmi, 2021). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan dan ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan maupun investasi.Semakin meningkat keuntungan maka perusahaan tersebutakan semakin baik (Sartono, 2021). Menurut (Kasmir, 2020), cara untuk menghitung profitabilitas suatu perusahaan dapat menggunakan rasio Return on Asset (ROA) melalui cara berikut :

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{Laba Bersih}}{\textbf{Total Asset}} \textbf{X 100\%}$$

Struktur aktiva adalah penentuan seberapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aktiva, baik dalam aktiva lancar maupun dalam aktiva tetap (Syamsudin, 2021). Manfaat dari struktur aktiva adalah manajemen dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam 1 periode dan manajemen dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam 1 periode tertentu (Kasmir, 2021). Struktur aktiva dapat dipandang dari objek operasional yang pada dasarnya menggolongkan aktiva dalam perbandingan tertentu untuk keperluan penting perusahaan. Menurut (Weston, 2020) struktur aktiva dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$\textbf{Struktur Aktiva} = \frac{\textbf{Aset Tetap}}{\textbf{Total Asset}}$$

Menurut Machfoedz (2019), Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan. Penentuan ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan kepada total aset perusahaan. Nilai perusahaan yang meningkat dapat ditandai dengan total aktiva perusahaan yang mengalami kenaikan dan lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang perusahaan (Sugiyono, 2020). Dengan mengetahui ukuran perusahaan investor dapat menggunakannya sebagai alat untuk menilai keuangan perusahaan, karena ukuran perusahaan tersebut mewakili karakteristik keuangan perusahaan.Menurut (Gerianta,2021), ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan nilai buku dari total aset dengan rumusan berikut :

Ukuran perusahaan = Ln (Total Aktiva)

2.METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu sendiri merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik dan permodelan matematis. Populasiyang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi BEIyaitu www.idx.co.id,diperoleh populasi sebanyak 28 perusahaan.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang artinya tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Dalam penelitian ini, sampeldiperoleh dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel denganpertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 84 perusahaan dari 28 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022 yang memiliki data lengkap dan diperlukan peneliti dalam waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2020-2022. Pemilihan sampel dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Kriteria-kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Sampel

NO	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2020-2022.	**84**
2	Perusahaan makanan dan minuman yang tidak menerbitkan laporan keuangannya per 31 Desember dengan lengkap dan berurutan pada tahun 2020-2022.	**(41)**
3	Perusahaan makanan dan minuman yang mengalami kerugian pada tahun 2020-2022.	**(12)**
4	Perusahaan makanan dan minuman yang tidak menggunakan mata uang rupiah pada tahun 2020-2022.	**(3)**
	Banyaknya sampel perusahaan	**28**
	Banyaknya sampel yang lolos kriteria,makaobservasi pengamatan secara keseluruhan selama 3 tahun.	**84**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2023

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa dokumentasi, dimana data diperoleh dari situs BEI (www.idx.co.id)pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2020-2022

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing variabel. Berikut ini hasil pengujian variabel-variabel penelitian yang dijelaskan secara statistik deskriptif :

Tabel 3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Struktur Modal	84	.11	7.94	.8861	.95670
Profitabilitas	84	.00	.34	.0910	.06282
Struktur Aktiva	84	.02	.76	.3367	.17287
Ukuran Perusahaan	84	13.77	30.73	22.2240	5.87406
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Data Olahan SPSS, 2024

1. Struktur Modal

Hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3.1 menyatakan bahwa struktur modalmemiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8861 dan standar deviasi sebesar 0,95670. Nilai standar deviasi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi dengan baik sehingga terjadi penyimpangan data yang besar dan data bersifat heterogen atau cenderung bervariasi antara satu dengan yang lain. Nilai

minimum sebesar0,11 yaitu pada perusahaan PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) tahun 2022 dan nilai maksimum sebesar 7,94 pada perusahaan PT. Central Proteina Prima Tbk (CPRO) tahun 2020.

2. Profitabilitas

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel 3.1 menyatakan bahwa profitabilitasmemiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0910 dan standar deviasi sebesar 0,06282. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik sehingga penyimpangan data lebih kecil dan data bersifat homogen atau cenderung tidak bervariasi. Nilai minimum sebesar 0,00 yaitu pada perusahaan PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,34 pada perusahaan PT. Central Proteina Prima Tbk (CPRO) tahun 2021.

3. Struktur Aktiva

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3.1 menyatakan bahwa struktur aktiva memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,3367 dan standar deviasi sebesar 0,17287. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (*mean*) yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik sehingga penyimpangan data lebih kecil dan data bersifat homogen atau cenderung tidak bervariasi. Nilai minimum sebesar 0,02 yaitu pada perusahaan PT. Tigaraksa Satria Tbk (TGKA) tahun 2020-2021 dan nilai maksimum sebesar 0,76 pada perusahaan PT. Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) tahun 2020.

4. Ukuran perusahaan

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 3.1 menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 22,2240 dan standar deviasi sebesar 5,87406. Nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan baik sehingga penyimpangan data lebih kecil dan data bersifat homogen atau cenderung tidak bervariasi. Nilai minimum sebesar 13,77 yaitu pada perusahaan PT. Akasha Wira International Tbk (ADES) tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 30,73 pada perusahaan PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) tahun 2022.

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas pada penelitian ini :

Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		84
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.47033412
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.070
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Sumber: Data Olahan SPSS, 2024

Tabel 3.2 menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan 84data (N=84) diperoleh nilai *asymp sig* (2-*tailed*) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari uji normalitas nilai residual terdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi pada penelitian ini dapat dikatakan baik, akurat, tidak bias dan konsisten.

Uji Multikolinearitas

Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang tejadi apa hubungan diantara variabel bebas. Uji Multikolinearitas dapatdideteksidengan melihatnilaitolerance dan nilai*VarianceInflationFactor*(VIF),dengankriteriasebagaiberikut:

1.JikanilaiVIF<10dengannilaitolerance>0,10makadapat dinyatakan tidakterjadi gejalamultikolinearitas.

2.JikanilaiVIF>10dengannilaitolerance<0,10maka dapat dinyatakan terjadi gejalamultikolinearitas.

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Profitabilitas	.930	1.076
	Struktur Aktiva	.873	1.145
	Ukuran Perusahaan	.906	1.103

a. Dependent Variable: Struktur Modal

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil dari tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari variabel Profitabilitas 0,930, Struktur Aktiva 0,873 dan Ukuran Perusahaan 0,906 bebas

multikolinearitas, karena nilai *tolerance* > 0,10. Sedangkan nilai VIF Profitabilitas 1,076, Struktur Aktiva 1,145, Ukuran Perusahaan 1,103, bebas multikolinearitas, karena nilai VIF < 10. Dari angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari masalah multikolinearitas atau tidak terjadi multikolinieritas antara variabel bebas dari data penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidakterjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).Ketika profitabilitas signifikansi diatas tingkat kepercayaan 0,05, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil Uji Heteroskedastisitas:

Tabel 3.4 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		T	Sig.
1	(Constant)	1.958	.054
	Profitabilitas	1.400	.165
	Struktur Aktiva	-.333	.740
	Ukuran Perusahaan	-.585	.560

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas yakni sebagai berikut :

1. Nilai signifikan profitabilitas sebesar 0,165 > 0.05 yang artinya variabel profitabilitas tidak mengalami heteroskedastisitas.
2. Nilai signifikan strukturaktiva sebesar 0,740 > 0.05 yang artinya variabel strukturaktiva tidak mengalami heteroskedatisitas.
3. Nilai signifikan ukuran perusahaan sebesar 0,560 > 0.05 yang artinya variabel ukuran perusahaan tidak mengalami heteroskedatisitas.

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda diterapkan dalam penelitian ini karena selain untuk mengukur kekuatan hubungan antar 2 variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel, apakah memiliki hubungan positif atau negatif. Berikut ini merupakan hasil dari persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	.397	.258	
	Profitabilitas	1.571	.648	.183
	Struktur Aktiva	2.834	.306	.720
	Ukuran Perusahaan	.021	.009	.175

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil Tabel 4.6 diatas, maka diperoleh hasil Persamaan Regresi Liniear Berganda sebagai berikut:

$$Y = 0{,}360 + 2{,}480\ X1 + 2{,}515\ X2 + 0{,}017\ X3 + e$$

Dari persamaan diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien konstanta 0,397 memiliki makna apabila variabel independen diasumsikan nol, maka Y adalah 0,397. Hal ini berarti jika profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan dianggap konstan atau tidak ada perubahan, maka perusahaan akan mengalami struktur modalsebesar 0,397.
2. Nilai koefisien regresi profitabilitas (X1) sebesar 1,571artinya apabila variabel profitabilitasmeningkat sebesar satu-satuan maka struktur modalmeningkat sebesar 1,571dengan anggapan variabel independen lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi struktur aktiva (X2) sebesar 2,834artinya apabila variabel struktur aktivameningkat sebesar satu-satuan maka struktur modalmeningkat sebesar 2,834dengan anggapan variabel independen lainnya konstan.
4. Nilai koefisienregresi ukuran perusahaan (X3) sebesar 0,021 artinya apabila variabel ukuran perusahaanmeningkat sebesar satu-satuan maka struktur modal meningkat sebesar 0,021 dengan anggapan variabel independen lainnya konstan.

Uji T

Menurut Ghozali (2020) menyatakan bahwa uji parsial ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi bahwa variabel independen yang lain konstan. Pengujian ini didasarkan pada tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel X terhadap Y. Hasil uji T dapat dilihat pada Tabel 3.6:

Tabel 3.6 uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.397	.258		1.539	.128
	Profitabilitas	1.571	.648	.183	2.425	.018
	Struktur Aktiva	2.834	.306	.720	9.267	.000
	Ukuran Perusahaan	.021	.009	.175	2.292	.025

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.7 pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Hipotesis pertama menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan tabel uji T pada profitabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,018, nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini **diterima**.

2) Hipotesis kedua menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan tabel uji T pada struktur aktiva menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa struktur aktiva berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.Sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini **diterima**.

3) Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal. Berdasarkan tabel uji T pada ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,025, nilai signifikan ini kurang dari 0,05. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini **diterima**.

Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini adalah hasil Uji KoefisienDeterminasi :

Tabel 3.7 Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.760[a]	.578	.562	.47907	1.731

Sumber: data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, maka didapatkan nilai *Adjusted* R *Square* sebesar 0,578 atau 57,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas, Struktur

AktivadanUkuran Perusahaanterhadap Struktur Modal memberikan pengaruh sebesar 57,8% dan sisanya sebesar 42,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pengaruh ProfitabilitasTerhadap Struktur ModalPada Perusahan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji T) variabel profitabilitasterhadap struktur modalmenunjukkan hasil yaitu t hitung sebesar 2,425 dengan nilai signifikan sebesar 0,018. Sehingga hasil penelitian signifikansi 0,018 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitasberpengaruh terhadap struktur modalpada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minumanyang terdaftar di BEI Periode 2020 – 2022. Sehingga hipotesis pertama (H_1) dapat diterima.

Sesuai dengan teori struktur modal yaitu *Pecking Order Theory* yang menjelaskan bahwa perusahaan akan lebih menyukai sumber pendanaan internal daripada harus menggunakan sumber pendanaan eksternal atau utang. Penggunaan sumber pendanaan eksternal atau utang hanya digunakan ketika pendanaan dari internal tidak mencukupi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mustika, 2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perusahaan akan lebih memilih menggunakan pendanaan yang diperoleh dari sumber internal yaitu menggunakan labaperusahaan.

Pengaruh Struktur AktivaTerhadap Struktur ModalPada Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji T) variabel struktur aktivaterhadap struktur modalmenunjukkan hasil yaitu t hitung sebesar 9.267 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sehingga hasil penelitian signifikansi 0,000< 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel struktur aktivaberpengaruh terhadap struktur modalpada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2020 – 2022. Sehingga hipotesis kedua (H_2) dapat diterima.

Berdasarkan *Pecking order theory* perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal sendiri. Sedangkan perusahaan yang sebagian besar aktivanya berupa aktiva lancar akan mengutamakan pemenuhan dananya dengan hutang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nadiera, 2023) yang menyatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan. Total aset yang dimiliki oleh perusahaan akan didominasi oleh aset tetap, sedangkan modal perusahaan akan didominasi oleh modal sendiri. Oleh karena itu, semakin besar struktur aset maka akan semakin kecil struktur modal perusahaan. Apabila perusahaan memiliki struktur aktiva yang tinggi maka artinya perusahaan memiliki jumlah aktiva tetap yang baik.Dengan tingginya struktur aktiva tersebut maka perusahaan tidak perlu untuk berutang karena dapat memanfaatkan dan memaksimalkan aktiva yang dimilikinya.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur ModalPada Perusahaan

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji T) variabel ukuran perusahaan terhadap volatilitas harga saham menunjukkan hasil yaitu t hitung sebesar 2.292 dengan nilai signifikan sebesar 0.025. Sehingga hasil penelitian signifikansi 0.025< 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap volatilitas harga sahampada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Periode 2020 – 2022. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima.

Berdasarkan *Pecking Order Theory*menyebutkan bahwa perusahaan lebih menggunakan pendanaan internal sebelum memutuskan untuk berutang. Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan menggunakan dana internal terlebih dahulu jika tidak dapat menggunakan alternatif kedua dengan menggunakan utang untuk memenuhi kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar dikarenakan membutuhkan lebih banyak dana untuk mendukung kegiatan operasionalnya (Fahmi, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Timbangnusa dkk, 2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modalpada perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu gambaran dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan sebagainya (Gerianta, 2021).Perusahaan tersebut akan lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dari kreditur karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki profit lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Pratiwi, 2021). Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan maka kebutuhan dana operasional perusahaan akan semakin tinggi. Dengan demikian maka semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar struktur modalnya, sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin kecil struktur modalnya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkanbahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan justru semakin rendah struktur modal atau hutang perusahaan. Semakin besar tingkat profitabilitas dari suatu perusahaan maka semakin tinggi puladana internal yang dimiliki oleh perusahaan yang berasal dari laba ditahan sebagai dana untuk kegiatan operasionalnya.
2. Struktur aktiva berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini menunjukkanbahwa semakin tinggi struktur aktiva maka akan diikuti dengan tingginya struktur modal. Saat aset lancar dan aset tetap mengalami peningkatan maka sangat berpengaruh terhadap struktur modal.
3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal.Hal ini menunjukkanbahwa ukuran perusahaan mempunyai kemampuandalam hal finansial sehingga menjadi pertimbangan dalam keputusan struktur modal perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ratih, B,S. (2020). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Universitas Muhammadiyah MAKASSAR

Ridloah, S. (2010). Faktor penentu struktur modal: studi empirik pada perusahaan multifinansial. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, *1*(2).

Sianipar, S. (2011). Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmu Administarsi, 156, 315–322.*

Sibagariang, Y,A,P., Sitorus, J,S. (Des,2022). Profitabilitas, Struktur Aktiva, Likuiditas dan Ukuran PerusahaanTerhadapStrukturModal Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar diBEITahun 2016-2019.Journal of Management and Bussines Vol.4, No2,Juli-Des2022.p-ISSN:2656-8918.e-ISSN:2684-83. DOI:10.31539/jomb.v4i2.4789

Siregar, H., Fahmi, M. (2020). AnalisisStruktur Aktiva, Net Profit Margin dan Current Ratio Terhadap Capital StructurePada Perusahaan Go Public di BEI. *Jurnal Manajemen Bisnis STIE IBBI. ISSN 1858-3199.*

Sofyan, R,F. (2021).Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan,Struktur Aktiva dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal Pada PerusahaanMakanan dan Minuman Tahun 2020-2022. Universitas Islam MALANG (2019).

Tamara, A,G., Muslih, M., Isynuwardhana,D.(April, 2020).Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aset dan Ukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal. *e-Proceeding of Management. Vol.7, No.01 April 2020.ISSN:2355-9357*

Tangiduk, D., Paulina V,R., Johan, T. (2017). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva dan Profitabilitas Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI Periode 2011-2015,Vol. 5, No.2 (2017), *Jurnal Emba*

Timbangnusa, E., Tulung, J. E., & Untu, V. N. (2023).Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal Tahun 2016-2020 (pada Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *11*(1), 910-919.

Udayani, D., & Suaryana, I. G. N. A. (2013). Pengaruh Profitabilitas Dan Investment Opportunity Set Pada Struktur Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *4*(2), 299-314.

Wachidah, F.[1]., Elvira, W,L[2]., Rokhmad, B[3].(Des, 2021). Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2022.ISSN Online:2654-6590

Wirawan, P,A. (2017).PengaruhStruktur Aktiva, Profitabilitas, UkuranPerusahaan dan Likuiditas Terhadap Struktur Modal PadaPerusahaanSektor Barang Konsumsi yangterdaftar di BEI. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*. Volume 9 No.1 Tahun 2017. P-ISSN:2599-1418.e-ISSN:2599-1426

Yanti, I, G, A, D, N., Darmayanti, N, P, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan Makanan dan Minuman. E-*Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8 (4), 2297. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i04.p15

Zahro, E,O., Hidayati, A,N,. Habib, M,A,F. (Juli, 2022). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Struktur Aktiva dan Resiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI. *Jurnal Sinar Mahasiswa*.e-ISSN:2598-398X│P-ISSN:2337-8743 Vol 9, No 2 Juli2022

Liwang, F, P.(2011). Analsis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal serta Pengaruhnya terhadap Harga Saham pada Perusahaan-Perusahaan yang Tergabung dalam LQ45 Periode 2006-2009. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2011 (Semantik 2011), ISBN 979-26-0255-0: 1-9.

Ruslim, H. (2009). Pengujian Struktur Modal (Pecking Order Theory):Analisis Empiris terhadap Saham di LQ-45. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*,11(3): 209-221.

Pengaruh Motivasi Dan Tingkat Literasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Memutuskan Berinvestasi Di Pasar Modal

Heri Ribut Yuliantoro[1], Dini Nurmalasari[2], Theresia Elfina Tinambunan[3]
Politeknik Caltex Riau-*[1]heriry@pcr.ac.id*
-*[2]dini@pcr.ac.id*
- *[3]theresia22aktp@mahasiswa.pcr.ac.id*

Abstract- *This study looked at how students' motivation and literacy levels related to their interest in share investment. All Politeknik Caltex Riau Investment Gallery registered students enrolled in the Accounting Study Program served as the study's subjects; they were chosen from a sample. A total of 100 student data sets were examined based on sample selection. In order to evaluate the data and make conclusions, this research use multiple regression approaches along with conventional assumption testing and hypothesis testing through a data processing tool. The study's findings demonstrate that, among the 100 student data examined, motivation and reading proficiency had a major impact on students' levels of interest. The study's findings revealed that most pupils who were enthusiastic about.*

Keywords-Student Interest, Motivation, Literacy Level

1. PENDAHULUAN

Saat ini, pemerintah Indonesia berusaha serius untuk memperluas pasar modal di Indonesia. Ini ditunjukkan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui slogan kampanye yang digaungkan akhir ini yakni: "Aku Investor Saham", yang mengedukasi mahasiswa untuk melakukan investasi di pasar modal. Kampanye ini diawali dengan memberi tahu mahasiswa tentang pentingnya berinvestasi dalam saham, yang dapat menarik investor lokal dan membantu meningkatkan ekonomi Indonesia. Program tersebut memiliki tujuan untuk mengedukasi, mendorong, serta meningkatkan partisipasi dalam industri pasar modal dengan menyasar investor baru ke demografi generasi muda seperti mahasiswa. Investasi saat ini memiliki banyak jenis. Investasi saham merupakan salah satu alternatif investasi yang paling populer dan menarik saat ini. Saham dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan atau keterlibatan individu atau organisasi dalam suatu perusahaan. (Anoraga and Pakarti, 2006) Mahasiswa ingin menginvestasikan sejumlah uang karena tertarik melakukan alternatif salah satu investasi di pasar modal.. Namun, jika investor tidak memahami secara menyeluruh bahaya yang terkait dengan investasi atau cara melakukan investasi, ada banyak kendala yang harus diatasi. (Erika, 2021)

Politeknik Caltex Riau membuat galeri investasi bursa untuk mengajarkan mahasiswa tentang barang dan jasa pasar modal. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Galeri Investasi Politeknik Caltex Riau menunjukkan bahwa 35 investor datang pada tahun 2019, 61 investor datang pada tahun 2020, 83 investor lagi pada tahun 2021, dan 133 investor datang pada tahun 2022. Siswa dapat berinvestasi berdasarkan motivasi, literasi, permodalan, pengetahuan investasi, persepsi risiko, dan efisiensi keuangan.

Serangkaian aktivitas yang dikenal sebagai literasi keuangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri. Motivasi adalah dorongan yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah literasi mempengaruhi minat investasi pada instrumen saham mahasiswa Politeknik Caltex Riau, apakah minat mahasiswa di Politeknik Caltex Riau untuk investasi saham dipengaruhi oleh motivasi investasi atau apakah keduanya berpengaruh?

Rumusan masalah penelitian adalah apakah tingkat literasi dan motivasi mahasiswa berpengaruh terhadap minat mereka untuk memutuskan berinvestasi saham pasar pasar modal di Indonesia?**.** Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah motivasi dan tingkat literasi mahasiswa mempengaruhi minat mereka dalam memutuskan berinvestasi instrumen saham di pasar modal.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran untuk menerapkan dan memahami perilaku, khususnya minat mahasiswa dalam berinvestasi di pasar modal. Penelitian ini juga akan memberikan informasi dan gambaran tentang bagaimana tingkat literasi dan motivasi investasi mempengaruhi minat mahasiswa untuk memutuskan berinvestasi di pasar modal. Selain itu, penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang investasi saham di pasar modal dan menunjukkan seberapa besar pengaruh tingkat literasi dan motivasi investasi terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal.

1. Minat

   Terdapat beberapa pengertian mengenai minat yang dapat menjadi rujukan dalam penelitian ini. Salah satunya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "minat" berarti keinginan yang kuat. (Balai Pustaka, 2006). Selain itu minat juga dapat diartikan ketika seseorang merasa tertarik dan tertarik pada suatu hal atau aktivitas tanpa alasan. (Slamto, 2010) Pengertian lainnya mengartikan minat adalah suatu kecenderungan efektif seseorang untuk memilih aktivitas, dan situasi tertentu dapat mengubahnya (Ramadhan and Hermanto, 2015).

2. Motivasi

   Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan yang mendorong orang untuk bekerja sama, bekerja dengan baik, dan mengintegrasikan semua upaya mereka untuk mencapai kebahagiaan. (Hasibuan, 2009)

3. Tingkat Literasi

   Kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola uang dengan baik dikenal sebagai literasi keuangan (Bhushan and Medhury, 2013) Otoritas Jasa Keuangan mengartikan kemampuan untuk seseorang untuk mengelola uang melalui cara yang membantu orang tersebut berkembang dan hidup lebih baik di masa depan dikenal sebagai literasi keuangan. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa

Motivasi merupakan proses pemberian dorongan yang dapat mempengaruhi tugas dan psikologi seseorang serta menentukan tingkat ketekunan, fokus, dan intensitas yang ditunjukkan seseorang untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, motivasi menentukan tindakan apa yang akan diambil seseorang. Ketika seseorang memiliki kebutuhan dasar mereka, seperti kebutuhan psikologis dan keamanan, mereka mulai berinvestasi. (Firyanti and Oktafani, 2015) Saat seseorang memiliki dana yang melebihi kebutuhan mereka, mereka termasuk dalam kategori yang takut untuk mengambil risiko (*risk adverse*). Jika mereka termasuk dalam kategori penantang risiko (*risk taker*), mereka akan mengambil keuntungan dari dana melalui menabung ataupun deposito. Namun, mereka akan melakukannya dengan cara menginvestasikan dananya kedalam jenis instrumen investasi

yang menguntungkan jika mereka termasuk dalam kategori penantang risiko.. Karena kebutuhan penting seseorang telah dipenuhi, keinginan atau motivasi untuk berinvestasi muncul. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosial, aktualisasi diri, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan sosial. (Fakrulloh, 2022).

Mahasiswa memiliki motivasi internal dan pengaruh dari luar dirinya. Salah satu contoh diantaranya adalah keinginan mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut tentang investasi pada Pasar Modal dengan mengunjungi Galeri Investasi. Selain itu, ada motivasi dari luar diri mahasiswa untuk belajar tentang investasi dari orang lain yang tahu tentang seluk beluk investasi sebelumnya, dan dari pihak kampus diantaranya Galeri Investasi.
Mereka ingin mempelajari investasi di pasar modal karena pengaruh yang ada di luar. Ajakan dosen untuk berpartisipasi dalam sosialisasi Pasar Modal diterima dengan baik sebagai motivasi dari luar. Keputusan untuk berinvestasi pada instrumen saham di Pasar Modal akan mengubah ketertarikan saat ini. Akibatnya, minat investasi dipengaruhi oleh motivasi. (Pajar, 2017). Dari beberapa penjelasan diatas menunjukkan bahwa minat berinvestasi saham di pasar modal dipengaruhi oleh motivasi investasi. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H_1: Motivasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa.

Pengaruh Tingkat Literasi Terhadap Minat Mahasiswa

Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai tingkat pemahaman seseorang tentang konsep-konsep penting tentang keuangan dan bagaimana mereka mengelola keuangan pribadi mereka dengan membuat pilihan jangka pendek serta jangka panjang, membuat perencanaan jangka panjang, dan mengamati perubahan ekonomi. Secara umum, literasi keuangan merupakan pembahasan mengenai pendapatan seseorang, sumber dayanya, dan cara yang efektif dan efisien untuk menghasilkan uang, membeli barang dan jasa, dan menghasilkan uang dengan cara apapun. (Remund, 2010)

Perguruan tinggi dapat mengajarkan mahasiswa keterampilan keuangan, yang akan berkontribusi besar pada pengetahuan keuangan yang mereka miliki. Dengan mempelajari materi terkait pasar modal serta lembaga keuangan lainnya, mahasiswa dianggap telah mempelajari tentang keuangan secara keseluruhan, termasuk kemampuan untuk melakukan investasi (Widayati, 2012). Sebagai kesimpulan dari ilustrasi ini, dapat ditentukan hipotesis sebagai berikut:

H_2: Tingkat literasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuntitatif, karena data yang di peroleh nantinya secara numerik, angka yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis lebih lanjut. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari Galeri Investasi.
Target populasi penelitian ini adalah mahasiswa aktif akuntansi Politeknik Caltex Riau angkatan 2019-2022 yang sedang investor di Galeri Investasi Politeknik Caltex Riau dengan jumlah mahasiswa 133 orang. Penelitian ini melibatkan Populasi (N) = 133 individu, dan dengan asumsi tingkat kesalahan (e) adalah 5%, jumlah sampel yang digunakan adalah 100. Tabel 1 berikut menyajikan variabel yang digunakan pada penelitian ini:

Tabel 1

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran Variabel	Skala Pengukuran Variabel
Minat Mahasiswa Berinvestasi (Y)	Memiliki minat adalah kecenderungan efektif dari seseorang saat memilih aktivitas, dan situasi tertentu dapat mengubah minat seseorang. (Ramadhan and Hermanto, 2015).	Mencari tahu tentang jenis investasi pasar modal, Mempelajari investasi pasar modal, dan mencoba untuk berinvestasi (Khairunnisa, 2021).	Skala Likert pengukuran 1-4, dari sangat tidak setuju s/d sangat setuju.
Pengaruh Motivasi (X_1)	Motivasi meliputi daya pendorong, meningkatkan pengetahuan, dan membentuk keahlian (Denziana and Febriani, 2017).	Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi atau tenaga dalam diri pribadi seseorang, tanda motivasi adalah dengan timbulnya perasaan yang mengarah tingkah laku seseorang, dan motivasi ditandai dengan munculnya reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan (Khairunnisa, 2021).	Skala Likert pengukuran 1-4, dari sangat tidak setuju s/d sangat setuju.
Tingkat Literasi (X_2)	Literasi keuangan merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan dan membuat keputusan yang efektif terkait dengan manajemen penggunaan uang (Bhushan and Medhury, 2013).	Mencari tahu tentang jenis investasi, mempelajari investasi, dan mengetahui jenis pasar modal (Khairunnisa, 2021).	Skala Likert pengukuran 1-4, dari sangat tidak setuju s/d sangat setuju.

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner. Studi ini menggunakan angket jenis tertutup, yang memungkinkan responden hanya memilih pilihan jawaban-jawaban yang telah disediakan.Penelitian ini menggunakan skala likert untuk mengukur variabel motivasi, dan tingkat literasi. Skor ditentukan pada setiap pernyataan sebagai berikut ini:

Tabel 2

Tabel Pengukuran dengan Skala Likert

No.	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Setuju (S)	3
4	Sangat Setuju (SS)	4

Sumber : Olah data penulis

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian ini ialah mahasiswa Politeknik Caltex Riau angkatan 19, angkatan 20, angkatan 21, dan angkatan 22 yang terdaftar di Galeri Investasi Politeknik Caltex Riau Dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100%. Berikut ini deskripsi responden penelitian.

Tabel 3
Distribusi Responden

Keterangan	Kriteria	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	24	24%
	Perempuan	76	76%
Jumlah		**100**	**100%**
Angkatan	19	25	25%
	20	25	25%
	21	25	25%
	22	25	25%
Jumlah		**100**	**100%**

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Tabel deskriptif diatas menjelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu 76%. Berdasarkan tingkat angkatan hasil data respondennya sama sebesar 25%.

Uji validitas data pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sig (2-tailed) pada total skor konstruk < 0,05 item pernyataan dikatakan telah valid dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Uji reliabilitas data yang terkumpul pada penelitian ini hasilnya terlihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Hasil Uji Data Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Motivasi	0,795	Reliabel
Tingkat Literasi	0,800	Reliabel
Minat Mahasiswa	0,799	Reliabel

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Melalui tabel hasil pengujian peneliti menyimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan reliabel baik variabel independen maupun variabel dependen karena nilai Cronbach Alpha >0,60.

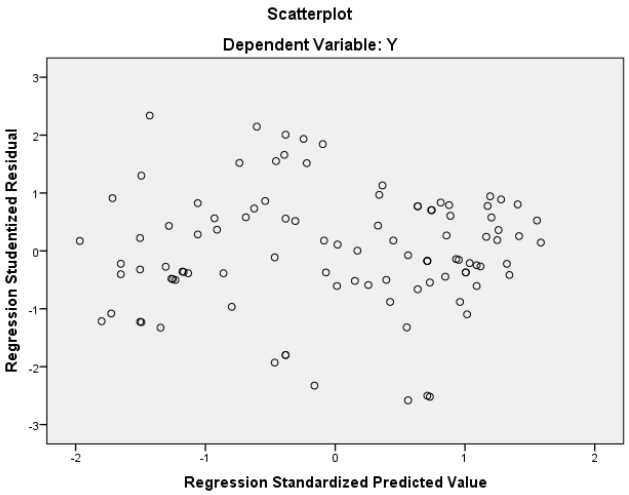
Berikut hasil pengolahaan data dengan menggunakan uji normalitas :

Tabel 5
Hasil Uji Data Normalitas

Test Statistic	.091
Asymp. Sig. (2-tailed)	.038[c]
Exact Sig. (2-tailed)	.351
Point Probability	.000

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Uji normalitas menunjukkan nilai Exact Sig. (2-tailed): 0,351, hal ini berarti model regresi berdistribusi normal, karena nilainya >0,05. Oleh karena itu, model penelitian layak digunakan.Uji multikolineritas menunjukkan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak ada multikolinieritas antar variabel independen. Nilai toleransi: 0,779 yang >0,10 dan nilai VIF: 1,284 yang <10. Berdasarkan hal itu dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa model regresi tidak menunjukkan multikolinieritas antar variabel independen. Selain itu, nilai toleransi variabel motivasi adalah: 0,779 lebih dari 0,10, dan nilai VIF adalah: 1,284 kurang dari 10.Hasil penelitian yang menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan plot dispersi grafik tidak menunjukkan adanya pola tertentu. Tampilan hasil uji heteroskedastisitas dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 22 ditampilkan dalam Gambar 1 berikut :



Gambar 1 Hasil Uji Data Heteroskedastisitas
Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini hasilnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6
Hasil Uji Data Regrasi Liner Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	10.097	1.964	
	X1	.274	.084	.312
	X2	.311	.089	.333

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

Y = 10,097 + 0,274X1 + 0,311X2 + e

Masing-masing variabel memiliki prediksi yang ditunjukkan oleh analisis regresi berganda. Dari persamaan regresi berganda diperoleh pengertian jika motivasi (X1) dan tingkat literasi (X2) tetap konstan dan tidak mengalami perubahan (nilai 0), maka profitabilitas (Y) memiliki nilai konstanta 10,097 satuan. Koefisien regresi variabel motivasi (X1) adalah: 0,274, yang merupakan satuan positif, yang berarti bahwa jika variabel motivasi meningkat sedangkan yang lain tetap, maka minat mahasiswa akan meningkat sebesar: 0,274 satuan. Koefisien regresi variabel tingkat literasi (X2): 0,311, yang merupakan satuan positif, yang berarti bahwa jika variabel tingkat literasi ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka minat mahasiswa akan meningkat sebesar: 0,311 satuan. Hasil dari uji t penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Data t

t	Sig.
5.140	.000
3.260	.002
3.476	.001

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel motivasi: 0,002, dengan nilai yang dihasikan <0,05. Hasil perhitungan nilai thitung: 3,260> ttabel: 1,984 mendukung hasil uji ini. Jadi, dapat disimpulkan pengetahuan tentang investasi berdampak positif pada minat investasi. Hasil uji hipotesis juga menunjukkan bahwa H1 diterima. Hasil regresi menunjukkan bahwa ada nilai signifikan pada variabel tingkat literasi: 0,001 nilai ini <0,05. Perhitungan nilai thitung: 3,476 lebih besar dari ttabel: 1,984 mendukung hasil ini. Dengan demikian, kesimpulannya literasi berdampak positif secara signifikan pada minat investasi. Uji hipotesis tersebut menunjukkan hasil bahwa H2 diterima.

Berikut tabel hasil pengolahan dengan koefisien determinasi.

Tabel 8
Hasil Uji Data Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.553[a]	.306	.292	5.62750

Sumber : Olah data dengan menggunakan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R Square menunjukkan nilai:0,292. Nilai ini menunjukkan bahwa 29,2% variasi variabel Minat Mahasiswa dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel Motivasi dan Tingkat Literasi. Sedangkan selebihnya sebesar:70,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dengan model penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis regresi berganda yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel motivasi dan tingkat literasi memiliki pengaruh positif terhadap minat mahasiswa dengan koefisien regresi berurutan: 0,274 dan 0,311. Berdasarkan temuan tersebut, untuk meningkatkan minat dalam berinvestasi saham di pasar modal salah satunya adalah dengan meningkatkan motivasi dan tingkat literasi. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan variabel lain yang terkait dengan minat mahasiswa berinvestasi pada instrumen saham di pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, P. and Pakarti, P. (2006) *Pegantar Pasar Modal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Balai Pustaka (2006) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Bhushan, P. and Medhury, Y. (2013) 'Financial Literacy and Its Determinat', *International Journal of Engineering Business and Enterprise Applications (IJEBEA)* [Preprint].

Denziana, A. and Febriani, R.F. (2017) 'Pengaruh Motivasi, Persepsi Biaya Pendidikan dan Lama Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untu Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi di Bandar Lampung)', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, p. 6.

Erika, C. (2021) *Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Literasi Keuangan dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Pada Mahasiswa Sastra-1*. Universitas Sumatera Utara.

Fakrulloh, D.D. (2022) *Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun 2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan*, *Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Available at: https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan#:~:text=Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam,tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa.

Firyanti, I. and Oktafani, F. (2015) 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berbisnis Dengan Sistem Multi Level Marketing (Studi Pada: Member PT Melia Sehat Sejahtera).', in *E-Proceeding of Management*, pp. 716–723.

Hasibuan, M. (2009) *Manajemen; Dasar, Pengertian, dan Masalah*. (Revisi ed. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Khairunnisa, F. (2021) *Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi dan Literasi Pasar Modal Terhadap Peningkatan Minat Berinvestasi*. Universitas Muhammadiyah Makasar.

Otoritas Jasa Keuangan (2020) 'Daftar Tingkatan dan Aspek Literasi Keuangan', *Jurnal Enterpreneur*, Februari 0.

Pajar, R. (2017) 'Pengaruh Motivasi Investasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Pada Mahasiswa FE UNY', *Profita*, 5(1), pp. 1–16.

Ramadhan, A. and Hermanto, S. (2015) 'Analisis Perilaku Nasabah Terhadap Minat Berinvestasi Deposito', *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4.

Remund, D. (2010) 'Financial Literacy Explicated: The Case For A Clearer Definition In An Increasingly Complex Economy', *The Journal Of Consumer Affairs*, pp. 276–295.

Slamto (2010) *Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengeruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Widayati, I. (2012) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa

Falkutas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Brawijaya', *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 1(1), p. 7.

Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Produk Rusak Galon 19L Pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari

Tasya Arta Mevia[1], M. Nur Afif[2], Maria Magdalena Melani[3], Saepul Anwar[4]
Universitas Djuanda – [1]*tasyaarta101196@gmail.com*
– [2]*m.nur.afif@unida.ac.id*
– [3]*maria.magdalena@unida.ac.id*
– [4]*saeful.anwar@unida.ac.id*

Abstrak *- Analyzing the accounting for damaged products is important for the Company to calculate the cost of production. The purpose of this research is to determine the recording and calculation of production costs, determine the causes of damaged products, and calculate the accounting treatment for damaged products when determining the production costs of 19L gallons at PT. Aqua Golden Mississippi Babakanpari. The research method used is descriptive with a quantitative approach. Data collection methods include interviews, field observations, and documentation. The data analysis technique uses a full costing approach, process costing method, and determining the cost of production. These findings explain the production costs set by PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari Rp. 15,383,945,347,-. The total loss of damaged products was IDR. 2,631,937,174,- recorded as controlling factory overhead costs.*

Keywords - ***Accounting Treatment, Analysis, Damaged Products.***

1. PENDAHULUAN

Sebuah perusahaan dalam menghadapi persaingan industri yang ketat perlu bersaing untuk mendapatkan layanan dan kualitas produk yang unggul. Hanya perusahaan yang sangat kompetitif yang dapat melanjutkan upayanya untuk meningkatkan keuntungan. Dalam industri, kualitas dan produktivitas produk merupakan kunci keberhasilan berbagai sistem produksi. Keduanya merupakan kriteria kinerja yang sangat penting bagi perusahaan komersial. Perusahaan manufaktur adalah suatu perusahaan yang menjalankan usahanya melalui suatu proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggunakan (menggabungkan) beberapa faktor produksi yang ada untuk menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang bermanfaat bagi konsumen. Proses produksi sendiri merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi yang siap dijual. Tidak semua bahan baku yang digunakan dapat menjadi barang jadi atau keluaran sesuai yang diharapkan. Jadi pada peusahaan manufaktur hal diatas tidak terlepas dari adanya pengurangan hasil produksi. Pengurangan ini dapat berupa sisa bahan, produk cacat dan produk rusak (Ferry, 2017).

Biaya produksi adalah biaya pabrik ditambah dengan harga pokok persediaan produk dalam proses awal atau harga pokok produk jadi periode ini ditambah dengan harga pokok sediaan produk dalam proses akhir (Ayuningtyas 2013).

Riwayadi (2017) menjelaskan bahwa harga pokok produksi merupakan penjumlahan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Berdasarkan narasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harga pokok produksi adalah suatu cara yang dilakukan Perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah produksi. Ketepatan penentuan harga pokok produksi menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena ketepatan penentuan harga pokok produksi mempengaruhi ketepatan harga jual yang di informasikan. Harga pokok produksi yang tepat, yaitu harga pokok produksi tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ketepatan penentuan harga pokok produksi dipengaruhi oleh ketepatan dalam pengakumulasian dan perhitungan biaya produksi yang meliputi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lainnya.

Produk rusak (*spoilage*) produk yang tidak memenuhi standar kualitas, yang mana baik secara teknis maupun ekonomis tidak dapat diperbaiki. Dalam hal teknis, produk yang memiliki kerusakan secara fisik tidak dapat diperbaiki (Purwaji, 2016). Sementara itu Mulyadi (2014) Produk rusak

merupakan barang yang mengalami kerusakan dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi, jika dilakukan perbaikan maka biaya yang dikeluarkan sama dengan atau melebihi dari biaya produksi suatu barang. Perlakuan akuntansi produk rusak adalah sebagai produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, pengurang biaya overhead pabrik, dan pengurang setiap elemen biaya produksi (Mursyidi ,2013). Pada prakteknya dalam setiap produksi atau pengolahan produk disuatu Perusahaan khususnya di Perusahaan manufaktur tidak dapat dihindari dari adanya kendala yang menyebabkan produk rusak. Kerusakan mesin, kelalaian karyawan, dan kurangnya pengawasan terhadap proses produksi dapat menyebabkan produk rusak hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan mutu dari produksi tersebut. PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari salah satu Perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang air galon 19L. PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari permasalahan produk rusak pada saat proses produksi yang tercatat pada Perusahaan PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari seperti pada table di bawah ini.

Tabel 1

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari Galon 19L
Sumber: PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari (2024)

No	Tahun	Jumlah Produksi	Jumlah Produk Rusak	Presentase %	Nilai Produk Rusak	Nilai Produk Baik	Presentase %
1	2018	989.000	20.460	2,1%	262.911.000	12.708.650.000	2,1%
2	2019	1.250.000	25.589	4,0%	328.818.650	16.062.500.000	4,0%
3	2020	1.967.000	119.879	6,2%	1.540.445.150	25.301.650.000	6,2%
4	2021	1.958.000	80.659	6,0%	1.036.468.150	25.160.300.000	6,0%
5	2022	1.279.000	65.878	5,3%	846.532.300	16.435.150.000	5,3%
	Total	**7.443.000**	**312.465**	**6,0%**	**4.015.175.250**	**95.642.550.000**	**6,0**

Pada tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 119.879 unit dalam presentase 6,2% produk rusak. Produk rusak akan sangat berpengaruh terhadap besarnya harga pokok produksi sehingga perlakuan akuntansi produk rusak terhadap perlakuan akuntansi. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengambil judul : “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Produk Rusak Galon 19L Pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari”. Adapun tujuan dan arah dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui, mengeksporasi, dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan produk rusak pada galon 19L yang berada pada perusahaan.

American Institue of Certified Public Accountants (AICPA), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan dengan cara tertentu yang sistematis beserta penafsiran hasilnya.

Agoes dan Trisnawati (2015), Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Sementara itu Suriyono (2015) Akuntansi Biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat manajemen dalam memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Suriyono (2015)

Tujuan akuntansi biaya adalah membantu manajemen dalam membuat pengendalian dan perencanaan terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dengan tepat dan teliti. (Mulyadi 2015). Adapun Fungsi akuntansi biaya berfungsi untuk mengukur pengorbanan nilai masukan tersebut guna menghasilkan informasi bagi manajemen yang salah satu manfaatnya adalah untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha tersebut (Mulyadi, 2014).

Siklus akuntansi biaya adalah sebuah tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, data keuangan yang sudah diproses sebelumnya dan pelaporan yang dimulai saat terjadinya transaksi (Dina & Fitria, 2014). Selain itu siklus akuntansi biaya pada sebuah perusahaan manufaktur dipakai untuk mengikuti proses pengolahan sebuh produk, sejak dimasukannya sebuah bahan baku ke dalam proses produksi hingga dihasilkannya sebuah produk jadi dari proses pembuatan produk. (Usry 2017)

Mulyadi (2015), Menyatakan istilah harga pokok juga digunakan untuk menunjukkan pengorbanan sumber ekonomi dalam pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dalam penentuan harga pokok produksi sangat ditentukan oleh besarnya. biaya produksi yang akan dikeluarkan sebagai dasar dalam penetapan harga jual produk, adapun pengertian metode penentuan harga pokok produksi. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi kedalam harga produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. *Variable costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel kedalam harga produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik variable.

Manfaat dari harga pokok produksi menyatakan bahwa manfaat informasi harga pokok produksi yaitu menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi periodik, mementukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca (Mulyadi, 2014). Soemarso (2016) terdapat unsur utama yang mebentuk unsur-unsur harga pokok produksi disebut juga dengan unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead* pabrik.

1. Biaya bahan baku
   Biaya bahan baku ialah biaya yang jumlah nya *relative* sangat besar dalam rangka menghasilkan suatu jenis output.
2. Biaya tenaga Kerja
   Biaya tenaga kerja merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia.
3. Biaya *overhead* pabrik
   Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari macam-macam biaya yang semuanya tidak dapat ditelusuri secara langsung.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya produk rusak ada dua yaitu kerusakan secara wajar atau kerusak normal dan kerusakan abnormal. (Homgren, 2016). Sementara itu Mulyadi (2015) menjelaskan bahwa Masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku sebagai berikut:

1. Sisa bahan (*Scrap* Material)
   Sisa bahan adalah bahan yang mengalami kerusakan didalam proses produksi.
2. Produk Rusak (*Defective Goods*)
   Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan.
   Batian dan Nurlaela (2016), Faktor yang menyebabkan produk rusak yaitu:
1. Bersifat Normal
   Setiap produksinya tidak bisa dihindari terjadinya produk rusak.
2. Akibat kesalahan
   Dimana terjadinya produk rusak diakibatkan kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, kurangnya pengawasan, pengendalian dan kelalaian karyawan.

Mulyadi (2014), Perlakuan terhadap produk rusak tergantung dari sifat dan penyebabnya sebagai berikut :

1. Jika produk rusak terjadi kaeena sulitnya pengerjaan pesanan atau faktor lainnya, maka harga pokok dibebankan sebagai tambahan harga pokok yang baik dalam pesanan yang bersangkutan.
2. Jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses, maka kerugian yang timbul sebgaai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk rusak Galon 19L pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari pada periode 2018-2022. Penelitian ini dilakukan di PT. Aqua Golden Mississipi Bakanpari yang berlokasi di JL. Raya Cidaju KP. Pojok, Caringin Kabupaten Sukabumi.

Desain penelitian ini dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Menurut Sugiono (2016) penelitian kuantitatif deskriptif adalah metode yang berlandasan terhadap

filsafat positivisme. Tujuan peneliti menggunakan metode ini untuk memberikan informasi yang tidak ada unsur manipulasi dari fenomena yang terjadi pada Perusahaan tersebut.

Sugiono (2016) Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen-dokumen Perusahaan.
2. Data Sekunder
   Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literature, artikel, dan sumber lainnya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi lainnya sebagai berikut :

1. Studi lapangan
   Studi yang dilaksanakan untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian.
2. Wawancara
   Dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi dan data-data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait.
3. Dokumentasi
   Dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai data atau penjelasan yang digunakan untik melengkapi penelitian.
4. Studi Pustaka
   Studi yang digunakan untuk memperoleh data secara teoritis.

Analisis data Sugiono (2018) adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorgaisasikan data kedalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap produk rusak pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari

1. Perhitungan dan mencatat harga pokok produksi dengan menggunakan metode *full costing*
2. Mengumpulkan dan menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan harga pokok proses
3. Metode perhitungan harga pokok produksi

Biaya bahan baku	Rp. xxx
Biaya tenaga kerja langsung	Rp. xxx
Biaya *overhead* pabrik *variable*	Rp. xxx
Biaya *overhead* pabrik tetap	Rp. xxx +
Harga pokok produksi	Rp. xxx

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aqua lahir atas ide almarhum Tirto Utomo (1930-1994) Beliau menggagas lahirnya industri air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia melalui PT Golden Mississippi pada tanggal 23 Februari 1973. Kegiatan fisik perusahaan dimulai pada bulan Agustus 1973 ditandai dengan pembangunan pabrik di kawasan Pondok Ungu Bekasi, Jawa Barat Percobaan produksi dilaksanakan pada bulan Agustus 1974 dan produk komersil dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1974 dengan kapasitas produksi 6 juta liter setahun. Produk pertamanya adalah Aqua kemasan botol kaca 950 ml yang kemudian disusul dengan kemasan Aqua 5 galon, dimana pada saat itu masih terbuat dari kaca.

Metode yang digunakan dalam harga pokok produksi PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari menggunakan metode *full costing*. Hal ini diketahui dari cara perhitungan harga pokok produksinya yang Dimana bahan baku, tenaga kerja, dan biaya *overhead* pabrik dibebankan ke pusat biaya atau departemen yang bersangkutan.

Pembebanan biaya apabila terdapat produk dalam proses dengan Tingkat penyelesaian tertentu, perlu dilakukan penyertaan produk dalam proses menjadi produk jadi yang disebut dengan unit *ekuivalen* produksi. *Ekuivalen produksi* menunjukan unit produk jadi dan unit produk dalam proses yang disetarakan dengan produk jadi. Ada dua metode aliran biaya untuk mengkalkulasi biaya

produksi produk dalam proses, dengan unit *ekuivalen* produksi yaitu aliran biaya rata-rata tertimbang dan aliran biaya *FIFO*.

Perhitungan Harga Pokok Produksi galon 19L pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari

1. Biaya Bahan Baku
   Biaya bahan pembuatan galon 19L

Tabel 2 Biaya Bahan Baku

No	Material	Jumlah Biaya (Rp)
1.	Biaya Pengemasan	300.000.000
2.	Biaya Sub-Kontrak Manufaktur	630.000.000
	Total	**930.000.000**

Sumber : PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari (Diolah Peneliti, 2024)

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung
   Upah atau tunjangan yang dibayarakan kepada karyawan yang bersangkutan

Tabel 3 Biaya Tenaga Kerja Langsung

No	Keterangan	Biaya (Rp)
1.	Gaji operator, *Leader, User*	750. 924. 882
2.	Pembayaran Lembur	218. 100. 701
	Total	**969. 025.583**

Sumber : PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari (Diolah peneliti, 2024)

3. Biaya overhead pabrik
   Pemeliharaan mesin, Listrik, air, perlatan, dan lain-lain

Tabel 4 Biaya Overhead Pabrik

Biaya Produksi Langsung	Biaya (Rp)
Biaya Pemeliharaan Mesin	1.268.770.084
Biaya Pemeliharaan Utility	399.321.800
Listrik	427.846.915
Biaya Tenaga Kerja Ahli Mesin	961.338.485
Biaya Angkut Pembelian	1.372.650
Biaya Depresiasi Mesin	300.297.329
Total	**2.959.625.463**

Tabel 5 Biaya Overhead Pabrik

Biaya Overhead Pabrik Variabel	Biaya (Rp)
Persediaan barang pengganti dan	151.207.392
sample	757.595.134
Biaya Asuransi	51.978.134
Ketering	3.639.090.891
Biaya Tenaga Kerja	308.311.710
Biaya Sosial Lainnya	390.852.327
Biaya Depresiasi	250.000.000
Biaya Pemeliharaan	30.056.087
Biaya Perjalanan	1.022.759.304
Biaya Lain-lain	
Total	8.238.961.165
Jumlah Total	**11.198.586.628**

Sumber : PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari (Diolah peneliti, 2024)

Perhitungan Harga Pokok Produksi PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari

Tabel 6 Laporan Harga Pokok Produksi

Laporan Harga Pokok Produksi
PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari

Biaya Bahan Baku	Rp. 830.000.000
Biaya Tenaga Kerja Langsung	Rp. 969.025.583
Biaya Overhead Pabrik	Rp. 2.959.625.463
Biaya Overhead Pabrik Langsung	Rp. 8.238.961.165
Total Biaya Produksi :	Rp. 11.198.586.628

Sumber : PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari (Diolah peneliti, 2024)

Total biaya yang disjaikan pada tabel diatas adalah total biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam pemakaian biaya pembuatan galon, jumlah biaya tersebut dibagi kepada dua departemen. Karena pada praktik nya proses produksi terbagi menjadi dua departemen pembentukan dan depatemen penyelesaian, masing – masing departemen memiliki laporan penggunaan biaya masing-masing.

Perhitungan Produk Rusak Pada Departemen Pembentukan dan Departemen Penyelesaian PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari

Tabel 7 Perhitungan Departemen Pembentukan dan Departemen Penyelesaian

Tahun	Jumlah Produksi	Total Departemen Pembentukan	Total Departemen Penyelesaian
2018	989.000	Rp. 11.484.155.902	Rp. 16.915.301.775
2019	1.250.000	Rp. 11.961.036.304	Rp. 17.640.677.597
2020	1.967.000	Rp. 12.048.934.864	Rp. 17.188.376.833
2021	1.958.000	Rp. 37.149.282.852	Rp. 16.911.237.130
2022	1.279.000	Rp. 42.446.326.371	Rp. 56.072.431.544

Sumber : PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari (Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa laporan dari dua departemen pembentukan dan penyelesaian mengalami perubahan setiap tahunnya. Harga pokok produksi pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari terdapat hasil perhitungan perusahaan yaitu sebesar Rp. 19.325.065,- dan telah dihitung kembali harga pokok produksi oleh peneliti yaitu sebesar Rp.19.413.126,-. Perusahaan akan mengalami kerugian jika terus menerus terdapat produk rusak pada produksi, karena banyak nya produk rusak akan mengeluarkan biaya produksi yang hampir sama dengan produk baik.

Pelakuan akuntansi produk rusak galon 19L

Jumlah produksi galon pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari sebanyak 4.740.231 psc. Jumlah produk rusak sebanyak 1.958.000 pcs. Biaya produksi galon diantaranya sebagai berikut :

Total biaya produksi : Rp. 15.383.945.347
Jumlah produk masuk dalam proses : 4.740.231 pcs
Jumlah produk rusak : 1.985.000 pcs
Rincian sebagai berikut :
Produk rusak x harga pokok produksi
Departemen pembentukan : 568 pcs x Rp. 2.929.498 = Rp. 1.663.954.864
Departemen penyelesaian : 685 psc x Rp. 1.413.126 = Rp. 967.991.310
Total kerugian produk rusak : Rp. 2.631.937.174

Total kerugian produk rusak dari dua departemen produksi tersebut adalah : Rp. 2.631.937.174

Dalam perlakuan akuntansi produk rusak di PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari masuk kedalam produk rusak yang bersifat normal tidak laku dijual. Produk rusak yang bersifat normal dan tidak laku dijual, maka harga pokok produksi pada produk rusak akan dibebankan pada produk selesai. Yang akan mengakibatkan harga produk selesai yang baik akan lebih mahal. Maka harga pokok produk rusak diperlakukan sebagai pengendali biaya *overhead* pabrik sesungguhnya.

Penyebab terjadinya produk rusak pada galon 19L PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari ada beberapa faktor yang menyebabkan produk rusak pada Galon 19L sebagai berikut :

1. Kerusakan Mesin
   Mesin merupakan alat yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk.
2. Kelalaian Karyawan
   Kelalaian yang disebabkan karyawan kurangnya konsentrasi dalam proses produk pembuatan galon 19L.

Berdasarkan realita tersebut dapat diketahui bahwa produk yang rusak juga dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari jika perusahaan menanganinya dengan benar. Perusahaan PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari dengan metode total biaya dan pelaporan harga pokok produksi yang rusak menentukan kebenarnya dan keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan jika produk yang rusak tersebut dibuang dengan benar. Penanganan produk rusak yang tidak tepat menyebabkan produk galon menjadi lebih tinggi karena biaya produksi yang lebih tinggi, sedangkan produk akhir yang dihasilkan tidak memadai.

Temuan penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian (Nurjanah, 2022) tentang perlakuan produk rusak dalam perhitungan biaya produksi untuk menentukan Harga jual pada PT. Yongjin Javasuka Gaarment Factory II. Metode penelitian yang digunakan adalah ex post dengan pendekatan kuantitatif, artinya perhitungan harga menunjukkan produksi dasar perusahaan masih kurang baik, dan produk rusak sudah menyerap harganya tidak memperhitungkan produk rusak saat menghitung produk pembanding biaya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap analisis perlakuaan akuntansi atas produk rusak galon 19L pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari kabupaten sukabumi maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan harga pokok produksi pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari kabupaten sukabumi menggunakan metode *full costing*. Harga pokok produksi yang ditetapkan PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari sebesar Rp. 15.000,- sedangkan menurut peneliti sebesar Rp. 14.440,- terdapat selisih sebesar Rp. 590,- perhitungan sesuai dengan standar pemakaian.
2. Perlakuan produk rusak pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari Kabupaten Sukabumi bersifat normal tidak laku dijual maka harga pokok produk rusak akan dibebankan kepada produk selesai yang mengakibatkan harga pokok produk selesai baik yang per pcs akan menjadi lebih besar.
3. Penyebab terjadinya produk rusak pada PT. Aqua Golden Mississipi Babakanpari kabupaten sukabumi ada beberapa faktor diantaranya kerusakan pada mesin pada saat produksi, seperti kurang nya bahan, mesin tidak panas saat digunakan. Adapun kelalaian pada karyawan saat produksi atau saat pengecekan kualitas produk, kurangnya pengawasan pada pihak *quality* perusahaan.

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Sebaiknya karyawan yang berhubungan langsung dengan produksi melakukan pengecekan mesin secara rutin, pemeliharaan dan perawatan yang baik pada mesin, membuat rencana standar *reject* perharinya agar jumlah *reject* dapat dikendalikan dan diantisispasi dari sebelumnya. Dan meningkatkan lagi untuk mengendalikan produk *reject* agar dapat meminimalisir produk yang rusak saat produksi.
2. Perusahaan harus lebih teliti atau menerapkan *quality control* dan harus segera memberikan informasi dengan cepat dan tanggap dalan meminimalisir kerugian yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno., Trisnawati. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Salemba Empat. Jakarta

Anwar, Saepul, et al.(2023) Analisis Perlakuan Akuntansi Produk Rusak Dalam Menentukan Harga Pokok Produksi Kapas**.** *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* 9.2 (2023): 1-12.

Afif, M. N., & Rahmawati, D. R. (2018). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Teh Sedap Wangi Menggunakan Metode Harga Pokok Proses Pada PT. Sariwangi AEA. *Jurnal Akunida, 3(1), 1-19*

Ayuningtyas, D. (2013). Evaluasi Penerapan Biaya Standar Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Biaya Produksi Pada Harian Tribun Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *1*(4).

Bastian dan Nurlela. (2016). Akuntansi Biaya : Kajian Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Homgren, Charles T. dkk. (2016*). Akuntansi Biaya*, Penekanan Manajerial. Jakarta: PT. Indeks.

Mulyadi, (2015**),** *Akuntansi Biaya*, Edisi 5, Aditya Media, Yogyakarta

Mursyidi. (2013). *Akuntansi Biaya*. Cetakan kedua. Bandung : Refika Aditama.

Muhamad Nur Afif . *Akuntansi Biaya Teori dan Aplikasi***.** GCAINDO *inspiring and empowering*

Nurjanah, Parida & Afif. Analisis Perlakuan Produk Rusak Dalam Perhitungan Biaya Produksi Untuk Menentukan Harga Jual Pada PT. Yongjin Javasuka Garment Factory II. *Diss. Universitas Djuanda Bogor, (2022).*

Nienik H Samsul, (2013), Perbandingan Harga Pokok Produksi Full Costing dan Variabel Costing Untuk Harga Jual CV Pyramid, *Jurnal EMBA* Vol 1. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado

Purwaji Agus (2016*), Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Jakarta: Salemba.

Riwayadi (2017), *Harga Pokok Produksi*, STMIK Makasar

Sugiyono (2014***), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***, : Alfabeta

Supriyono, R, (2015), *Akuntansi Biaya*, STIE YKPN, Yogyakarta

Septiarahmah, Ranie. Perlakuan Akuntansi Terhadap Produk Cacat Dan Rusak Pada PT. Industri Sandang Nusantara **(persero)** Unit Patral Banjaran. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, (2019).

Tabrani, N. I. M. Perlakuan Akuntansi Produk Rusak dalam Menghitung Harga Pokok Produksi pada PT. Hox Tong (SCX) Palembang **(Doctoral disserlation, Universitas Muhammadiyah Palembang).**

Zuhroh, Diana. Perlakuan Akuntansi Produk Cacat Dan Produk Rusak Pada PT. “EPI” Di Surabaya, *Jurnal Teknik Industri* 24.1 (2021): 18-29.

Peran BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Program Zmart Santripreneur

Ismi Azis[1] Agnes Yolanda[2] Arista Khairunnisa[3]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu
-[1] ismi-azis@stiesnu-bengkulu.ac.id
-[2] agnes@stiesnu-bengkulu.ac.id
-[3] arista-khairunnisa@stiesnu-bengkulu.ac.id

Abstract-*To increase the benefits of zakat in terms of economic empowerment, a zakat distribution program is needed that supports empowerment, namely not only consumptive but also productive. BAZNAS, in terms of economic empowerment of santri, distributes funds to help santri to become empowered and independent by holding an economic empowerment program through the zmart santripreneur program. This research was conducted on the Zmart Santriprenuer group of Bengkulu Province. This research uses a qualitative approach with a case study type. The data sources used are primary data and secondary data with data collection methods through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions. The theory used in this research is the theory of the role of social workers proposed by Jim Ife, and the theory of empowerment outcome indicators according to Sumodiningrat. The aim of this research is to find out the role and results of the empowerment carried out by BAZNAS for students through the Zmart Program, especially Zmart students in Bengkulu Province . The BAZNAS institution is considered to be able to minimize poverty and thus empower students. Because in Islam, we are taught to share with each other in order to achieve prosperity. The research results show that the role of BAZNAS in empowering the students' economy has been carried out optimally. This is proven that BAZNAS has carried out its roles, namely the role as a social worker in economic empowerment for students who receive Zmart Santriprenuer assistance in Bengkulu Province through programs providing business capital assistance, training and group mentoring.*

Keywords: *BAZNAS, Economic Empowerment, Zakat .*

1. PENDAHULUAN

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelola zakat di Indonesia. Sebagai pengelola zakat resmi, artinya BAZNAS berada di bawah naungan pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah namun juga dinaungi hingga pemerintah pusat.

Provinsi bengkulu yang terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatera dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudera Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km2. Dengan luas wilayah tersebut, provinsi bengkulu memiliki 129 Kecamatan yang tersebar di 9 Kabupaten dan 1 Kota.

Dengan luas wilayah tersebut, menurut data yang dihimpun pada tahun 2021 terdapat 15.969 santri yang tersebar di 61 pondok pesantren di provinsi bengkulu, artinya di tahun 2024 sudah dipastikan ada santri yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memerlukan pembinaan dalam kapasitas peningkatan ekonomi bagi para santri. Sehingga BAZNAS

khususnya provinsi bengkulu melakukan pemberdayaan ekonomi kepada para santri melalui salah satu programnya.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) mampu menghimpun dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya sebesar 21.3 Triliun pada Tahun 2022, dikatakan meningkat 52,14 % dari tahun 2021 yang hanya mampu mengumpulkan 14 Triliun. Pencapaian ini juga merupakan akumulasi pencapaian dari BAZNAS RI, BAZNAS Provinsi/ Kabupaten/Kota, LAZ tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan catatan pengelolaan zakat oleh masjid dan masyarakat hingga triwulan 3 atau sejak Januari sampai September 2022.

BAZNAS memiliki peran sangat penting demi menciptakan kelayakan hidup masyarakat yang dalam hal ini adalah para santri. Santri merupakan para alumni-alumni pondok pesantren yang tercatat secara sah di bawah naungan kementerian agama dengan dibuktikan oleh ijazah pondok pesantren. Baznas merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu melakukan pemberdayaan ekonomi santri yakni melalui program zmart santriprenuer yang tersebar di daerah-daerah di provinsi Bengkulu.

Dengan demikan, sesuai dengan total dana yang mampu dihimpun oleh BAZNAS di tahun 2022, BAZNAS pusat menyalurkan 91,75% dan membantu mustahik sebanyak 755.536 orang. BAZNAS juga membuat layanan atau program yang dirancang dan sudah terealisasi, sehingga dapat menciptakan Z-mart sebanyak 349, selain itu dapat menciptakan sebanyak 6 lembaga keuangan yakni Baznas Microfinance Desa (BMD), tercipta lumbung pangan sebanyak 4 unit, tercipta sebanyak 10 balai ternak dan juga zakat community development (ZCD) sebanyak 103 unit.

Dalam al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 disebutkan mengenai penerima manfaat dari dana zakat . dalam surat tersebut disebutkan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

> "Sesungguhnya zakat-zakat yang diberikan hanyalah untuk orang-orang kafir, yang tidak mendapatkan ekonomi yang mencukupi mereka, yang bertugas mengelola zakat, orang mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang memiliki utang untuk di jalan Alloh dan untuk mereka yang sedang berjuang dijalan Alloh, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Alloh, dan Alloh maha mengetahui lagi maha bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Hubungan dari QS At-taubah ayat 60 dengan penelitian ini mengenai fenomena kontemporer yaitu ada delapan asnaf yang wajib menerima zakat diantaranya: Fakir, Miskin. Amil Zakat, Muallaf, individu yang memerdekakan budak, orang yang memiliki hutang, sedang berjuang dijalan Allah, serta seseorang dalam perjalanan tapi bukan untuk maksiat namun menemukan kesulitan atau kesuahan dalam perjalannya.

Program BAZNAS cukup banyak, salah satu diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi santri melalui program zmart santripreneur. Menurut BAZNAS, santri juga perlu diberdayakan serta diberikan modal atau disediakan lapangan pekerjaan agar dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya, salah satunya yaitu diberikan bantuan berupa warung klontong.

Melalui program Z-Mart, BAZNAS pusat melalui BAZNAS provinsi bengkulu menyalurkan dan memberikan bantuan berupa Z-Mart Santriprenuer. Zmart santriprenur adalah program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi yang dikhususkan untuk santri atau alumni-alumni pondok pesantren. Program zmart santriprenuer ini bertujuan untuk membantu para santri dalam berwirausaha, penerima bantuan ini adalah santri atau para alumni pondok pesantren yang berusia 17-30 Tahun yang memang mau berwirausaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BAZNAS Provinsi Bengkulu, Tercatat sebanyak 10 orang santriprenuer di provinsi Bengkulu yang menerima bantuan ini. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS berupa rombong untuk berjualan beserta isinya dengan nominal Rp. 16.500.000.

Menurut data yang dihimpun penulis pada Majalah Tempo “melalui program zmart santriprenuer, BAZNAS ingin mendorong dan menggelorakan jiwa wirausaha para santri, demi bisa mengangkat perekonomian keluarga santri dan lingkungan sekitar. Karena saya yakin, para santri sudah disiapkan oleh masing-masing pondok pesantrennya agar menjadi manusia yang berguna bagi sekitar dan memberi kebaikan dimana saja”.

Program zmart santriprenur ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian santri, sehingga warung klontong yang diberikan dapat menambah penghasilan para santri yang ada diprovinsi bengkulu. Terdapat 100 Santri yang memperoleh bantuan ini yang tersebar di Indonesia dan diantaranya ada 10 santri provinsi bengkulu yang menerima bantuan yang tersebar di beberapa daerah di provinsi Bengkulu.

Tabel 1.1

Penerima Zmart Santriprenur

No	Lokasi Zmart	Jumlah
1	Kota Bengkulu	8 Orang
2	Bengkulu Utara	1 Orang
3	Bengkulu Tengah	1 Orang
	Jumlah	10 Orang

Sumber Data: Wawancara kepada pendamping Zmart santripreneur

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini sudah banyak dilakukan mengenai peran baznas dalam meningkatkan perekonomian diantaranya: Haryanti, dkk dalam judul peran baznas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam penelitiannya bahwa lembaga BAZNAS di Kabupaten Tasikmalaya sudah secara optimal dalam melakukan penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat, terbukti telah sesuai dengan aturan atau ketetapan yang terkandung dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. yang mana menjelaskan mengenai golongan mana saja yang berhak menerima zakat. Pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi sudah ada namun memang belum terlihat secara signifikan, masih ada beberapa mustahik hanya untuk konsumtif saja.

Penelitian dari Farhan dan Muhammad (2022) dengan judul peran BAZNAS dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat Kota Medan, dalam penelitiannya pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Sumatera Utara yaitu sistem pendayagunaan zakat produktif dalam mensejahterakan mustahik yang djalankan oleh BAZNAS sudah tepat. Hal ini terlihat bagaimana pencapaian yang didapat pada program kerja ini, sehingga memberikan hasil positif untuk menjadi jalan keluar dan memperbaiki perekonomian umat islam serta berdampak bagi para mustahik untuk bisa mencukupi kehidupannya dengan usaha yang ia jalani dari hasil pendayagunnan zakat produktif tersebut.

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai suatu perangkat atau rangka yang diharapkan untuk miliki oleh orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Soerjono Soekanto (2002) menjelaskan peran aspek dinamis kedudukan atau status, apabila individu tersebut melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan harapan, maka individu tersebut dapat dikatakan menjalankan suatu peran. Riyadi (2002) mengartikan peran sebagai orientasi yang diperankan atau dimainkan oleh suatu pihak dalam lingkungan sosial (Lantaeda et al., 2017).

Pada pemberdayaan ekonomi, peran pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat mayoritas dilakukan dengan kapasitas sebagai pendamping, dan bukan sebagai pemecah masalah. Kegiatan pendampingan sosial ini berpusat pada tujuan pekerjaan sosial 3P yaitu, pemungkin (enabling), pendukung (supporting), pelindung (protecting) (Zubaedi, 2013). Peran pekerja sosial juga dikemukakan oleh Jim Ife (Siregar, 2021) sebagai berikut ini :

a. Peran Pekerja Sosial Fasilitatif

Peran fasilitatif dijalankan dengan memberikan dorongan dan motivasi kepada kelompok atau individu. Peran fasilitatif juga bisa meliputi *sosial animation* dengan memberikan semangat, *mediation and negoitation* menjadi penengah dan penghubung saat terjadi konflik*, building consensus* yakni membangun kesepakatan akan pemecahan masalah dari kesulitan yang sedang dihadapi, *group facilitation* dengan membentuk group dan memberi fasilitas terhadap kegiatan kelompok tersebut dan *support* yakni dengan memberi

dukungan moril kepada kelompok atau anggota kelompok dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

b. Peran Pekerja Sosial E*ducation*

pada peran ini pekerja sosial memiliki peran menentukan setiap agenda untuk membantu kelompok atau anggota kelompok. Membantu tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, namun juga membantu dalam hal meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman.

c. Peran Pekerja Sosial *Refresentational*

Peran pekerja sosial representatif dijalankan ketika berinteraksi dengan lembaga luar sebagai representasi dari kelompok. Peran pekerja sosial *reprentational* meliputi upaya berikut ini: *networking* dengan mengembangkan dan menjalin relasi dengan berbagai kelompok, *obtaining resources* dengan mengenali, mengumpulkan, dan memanfaatkan sumber - sumber yang ada di masyarakat.

d. Peran Pekerja Sosial Teknis

Peran pekerja sosial adalah melakukan proses administratif termasuk mengumpulkan, menyusun data, menganalisis data, mempresentasikan rangkuman data dan melakukan *need assessment* untuk pengembangan potensi kelompok, individu, ataupun masyarakat termasuk ke dalam agenda promosi kepada pihak luar.

Pemberdayaan masyarakat menurut Chamber (1995) merupakan konsep pembangunan ekonomi yang termasuk nilai– nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people – centered, participatory, empowerment, and sustainable* (Noor, 2011). Jim Ife (1995) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya menyediakan sumber daya peluang, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya (Fadhillah, 2009).

Menurut Kartasasmita (1996) pemberdayaan artinya memampukan atau memberikan kemampuan dan memandirikan masyarakat, yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (Mulyawan, 2016). Berdasarkan teori pemberdayaan oleh para ahli atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya pemberian daya agar masyarakat mampu untuk menjadi mandiri dan berkembang dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, Sumodiningrat (1999:138) mengemukakan indikator - indikator sebagai berikut (Mulyawan, 2016):

a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi kelompok, serta makin luasnya interaksi kelompok lain di dalam masyarakat.

Zakat produktif yang kemudian dikenal sebagai zakat yang diberikan dalam bentuk modal untuk pengembangan usaha. Pendaygunaan zakat produktif ini dianggap suatu alternatif dalam membantu para mustahik untuk lebih mandiri. Zakat produktif juga diartikan sebagai zakat yang diberikan kapada para mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan produksi dengan tujuan menumbuhkan dan mengembangkan potensi produktivitas serta taraf ekonomi mustahik (Yunita, 2021).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mencari data penelitian berupa data skunder. Data skunder didapat dari sumber rujukan yang mendukung penelitian ini dengan mencari rujukan teori-teori relefan yang menunjang penelitian. Ini merupakan penelitian yang metodenya dengan cara mengumpulkan data-data pustaka yang mendukung dengan literatur hukum Islam yang terkait dengan pembahasan. Rujukan teori yang didapatkan dengan metode penelitian studi literatur atau studi pustaka dijadikan sebagai landasan dasar penelitian ini yakni berkaitan dengan peran lembaga BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi yakni bersumber dari buku dan artikel.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Jim Ife dan teori indikator hasil pemberdayaan menurut Sumodiningrat. Adapaun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untu melihat sejauh mana peran dan hasil pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS terhadap mustahik yang dalam hal ini adalah santri melalui program Zmart khususnya Kelompok Zmart Santriprenuer Provinsi Bengkulu.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memberikan bantuan kepada santri melalui program zmart santriprenuer tentu BAZNAS sudah melaksanakan salah satu peran meningkatkan perekonomian mustahik, yang dalam hal ini kepada para santri yang mana dalam delapan asnaf penerima zakat santri termasuk kepada golongan fisabilillah.

Peran BAZNAS beberapa tahun ini memang lebih efektif baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya. Maanfaatnya sangat dirasakan bagi para mustahik, bahkan tidak

hanya untuk dikonsumsi saja akan tetapi bisa diberdayakan demi meningkatkan ekonomi khususnya ekonomi santri.

Sebagai pengelola dana zakat, infak dan sodaqoh, BAZNAS harus mampu dan selalu mempermudah para mustahik untuk mendapatkan jaringan demi memperoleh haknya melalui pengelolaan dana zakat. Akan tetapi, hal ini juga perlu dukungan para muzzaki, baik itu dari perorangan maupun lembaga agar senantiasa menyalurkan dananya untuk melakukan pembayaran zakat atau berinfak serta sedekah melalui BAZNAS demi mendukung program-program BAZNAS.

Ditemukan dilapangan tidak semua masyarakat memiliki kesempatan menikmati pendapatan ekonomi diatas rata-rata. Justru beberapa orang sebaliknya lebih besar pengeluaran daripada pendapatannya. Setiap orang tentu memiliki keinginan untuk hidup layak dan bisa selalu memenuhi kebutuhan primernya. Islam memberikan solusi dalam berbagai persoalan ekonomi yakni dengan adanya zakat, infak dan sedekah mampu memperbaiki ketimpangan ekonomi. Semakin banyak yang menyalurkan uangnya untuk membayar zakat, infak dan sedekah ke lembaga maka semakin banyak juga yang akan merasakan mafaatnya.

Beberapa cara dalam menngentaskan kemiskinan apabila ditinjau dari hukum kesyariahan yang erat kaitannya dengan pemberdayaan umat yang dalam hal ini untuk para santri yaitu dengan membuat lapangan pekerjaan melalui proses pemanfaatkan dana zakat yang dijadikan modal usaha agar dapat menciptakan industri supaya lebih berdaya yaitu melalui program zmart santriprenuer.

Hal ini termasuk salah upaya pemberdayaan ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi santri dan dapat menciptakan kesejahteraan sehingga santri mencapai falah. Dalam pandangan Islam salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan ialah dengan zakat, infaq dan sedekah. Penggunaan bantuan ini diharpakan tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif saja, namun dianjurkan agar dimanfaatkan secara produktif.

Pendayagunaan zakat, infak dan sedekah melalui program zmart santriprenuer ini diaharapkan setiap penerima zakat dapat menghasilkan atau berinovasi secara terus-menerus, maka dapat meningkatkan pendapatan serta mampu keluar dari mustahik dan menjadi muzzaki. Kesejahteraan ini ditentukan atas bebrapa hal, antara lain seperti saling mencintai, berperilaku mulia, nilai spiritual, mempunyai akses kepada keadilan, kebebasan, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran ekonomi Islam. Semua sumberdaya harus dimanfaatkan secara efisien dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

a. Peran BAZNAS sebagai pekerja sosial

Teori peran pekerja sosial yang dikemukakan oleh Jim Ife(Siregar, 2021) dianalisa berdasarkan temuan yang ditemukan peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Pekerja Sosial Fasilitatif

Peran pekerja sosial fasilitatif yakni berkaitan dengan bagaimana cara pendamping menunjang pengembangan kelompok maupun anggota kelompok. Peran pekerja sosial fasilitatif yang ditemukan pada penelitian ini BAZNAS dalam melakukan pemberdayaan ekonomi santri melalui kelompok Zmart Santriprenuer selalu memberikan motivasi baik itu pada saat pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui Latihan Dasar Kelompok (LDK) maupun motivasi yang disampaikan secara langsung kepada anggota kelompok ketika pendampingan mandiri.

2. Peran Pekerja Sosial *Education*

Edukasi dalam melakukan pemberdayaan harus selalu dilakukan. Peran edukasi termasuk membangun kesadaran, memberikan informasi, menghadapi hubungan kelompok dan pelatihan (Zubaedi, 2013). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa peran pekerja sosial *Education* dilakukan oleh BAZNAS adalah mengadakan pelatihan terkait pembukuan keuangan. Selain itu pendamping juga senantiasa memberikan masukan atas keluhan yang sering dihadapi oleh anggota kelompok Zmart Santriprenuer.

3. Peran Pekerja Sosial Refresentatif

Peran pekerja sosial refresentatif dilakukan dalam melakukan hubungan atau interaksi dengan pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan kelompok (Zubaedi, 2013). Peran pekerja sosial refresentatif pda BAZNAS ditemukan pada penilitian yakni BAZNAS melalui program Zmart Santriprenuer bekerjasma kapda vendor/mitra untuk memasok barang untuk kemudian dijual oleh para santri. Selain itu BAZNAS juga sering melakukan publikasi melalu media online terkait Zmart Santriprenuer, namun publikasi yang dilakukan belum cukup maksimal karena masih banyak pesaing lainnya yang juga sudah diketahui banyak orang mengenai keberadaannya.

4. Peran Pekerja Sosial Teknis

Peran Pekerja sosial teknis yaitu menerapkan keterampilan yang dimiliki untuk pengembangan kelompok. Peran pekerja sosial teknis ditemukan dalam penelitian ini yaitu BAZNAS juga turut menyusun dan membantu anggota kelompok dalam membuat laporan terhadap perkembangan Zmart Santriprenuer. BAZNAS melaksanakan peran pekerja sosial teknis dapat menjalankan perannya dengan melakukan pengumpulan data omzet anggota kelompok yang kemudian disusun sebagai laporan kepada pihak terkait sebagai bahan untuk pembuatan keebijakan berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian terkait teori peran pekerka sosial yang dikemukakan oleh Jim Ife (1997) Yakni pekerja sosial fasilitatif, edukatif, refresentatif, dan teknis maka dapat

diambil kesimpulan bahwa BAZNAS sudah menjalankan peran pekerja sosial dengan menumbuhkan semangat serta memberi motivasi kepada para santri, peran pekerja sosial edukatif dengan mengadakan Latihan Dasar Kelompok (LDK), peran pekerja sosial refresentatif dengan membangun hubungan dengan vendor untuk memasok barang untuk dijual, dan peran pekerja sosial teknis dilakukan oleh BAZNAS dengan mengumpulkan data omzet para mustahik dalam hal ini para santri, perkembangan dan kondisi yang sedang dihadapi yang selanjutnya dijadikan laporan kepada BAZNAS RI sebagai bahan pertimbangan keputusan selanjutnya.

b. Pemberdayaan Ekonomi

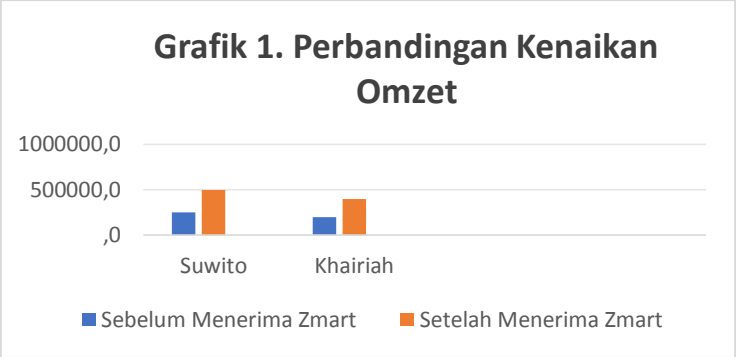
Dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, Sumodiningrat (1999) mengemukakan indikator sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin

Berkurang jumlah penduduk miskin dalam penelitian ini terlihat dari jumlah omzet yang didapatkan dalam satu hari, terdapat salah satu anggota kelompok Zmart Santriprenuer yang dianggap cukup berhasil, yakni santriprenuer Suwito pada Pondok Pesantren Babussalam Bengkulu Utara yang omzet hariannya mencapai 500 ribu rupiah bahkan lebih setiap harinya. Yang jika dihitung omzet santriprenuer Suwito bisa mencapai 15 juta rupiah setiap bulannya dengan total belanja santriprenuer Suwito ini kisaran 12 juta per bulan, artinya saudara Suwito bisa meraih keuntungan mencapai 3 juta rupiah per bulannya.

Selain itu juga ada santriprenuer Khairiah Elmarwiah yang merupakan alumni Pondok Pesantren Pancasila berhasil meraih omzet 400 ribu rupiah bahkan lebih setiap harinya. Yang jika ddihitung omzet Saudari Khairiah Elmarwiah ini mencapai 12 juta rupiah setiap bulannya dengan total belanja lebih kurang 10 juta rupiah per bulan, artinya saudari Khairiah Elmarwiah ini bisa merain keuntungan mencapai 2 juta rupiah setiap bulannya.

Meski pendapatan yang didapat oleh para kelompok santriprenuer masih memenuhi kajian mustahik penerima bantuan yakni pendapatan kurang dari Rp. 4.000.000 per bulan, namun para anggota kelompok zmart santriprenuer provinsi bengkulu mengaku bahwa pendapatannya meningkat dari sebelumnya. Artinya dapat disimpulkan bahwa BAZNAS masih harus terus berusaha untuk melakukan pendampingan kepada kelompok openerima bantuan zmart santriprenuer. Akan tetapi program zmart santriprenuer memiliki potensi dalam mengurangi kemiskinan karena bantuan aset produktif dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi mereka.



Sumber data: Wawancara kepada penerima zmart santripreneur

2. Berkembangnya usaha dengan peningkatan pendapatan

Indikator lain yang menentukan tingkat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat dengan berkembangnya usaha berupa inovasi untuk menambah pemasukan (Mulyawan, 2016). Peningkatan pendapatan dalam penelitian ini dilakukan anggota kelompok zmart santriprenuer dengan memenuhi semua permintaan konsumsen sehingga menjadikan omzet hariannya ikut meningkat. Dapat dikatakan BAZNAS berhasil untuk mendorong anggota kelompok untuk melakukan peningkatan pendapatan dengan memberikan ruang kepada para santri untuk melakukan diskusi terkait masalah yang dihadapi.

3. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.

Menurut Sumodiningrat tingkat keberhasilan suatu pemberdayaan dapat dilihat dari tingkat kepedulian terhadap kesejahteraan keluarga miskin disekitarnya (Mulyawan, 2016). meningkatnya kepedulian para anggota terhadap lingkungan sekitar terlihat saat bulan ramadhan para santriprenuer melakukan aksi berbagi takjil di area lampu merah kepada golongan yang membutuhkan seperti pemulung, pengemis atau orang lain yang yang melintas yang membutuhkan takjil untuk berbuka.

4. Meningkatkan kemandirian kelompok

Sumodiningrat juga mengemukakan bahwa kemandirian kelompok juga menjadi tolak ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan program pemberdayaan. Kemandirian ditandai dengan berkembangnya usaha, menguatnya permodalan, dan meningkatnya kemampuan administrasi (Sumodiningrat, 1999).

Pada penelitian ini ditemukan kemandirian kelompok terlihat ketika kelompok memutuskan sesuatu terkait dengan barang yang akan dijualnya termauk inovasi terhadap barang baru. Mengenai pengelolaan permodalan, santripreneur dianggap berpengalaman karena banyak dianatara santri sudah pernah menjadi pedagang. Selian itu, santripreneur telah mendapatkan pengarahan dari pendamping terkait administrasi keuangan dan juga terlihat dari adanya laporan pembukuan yang mereka berikan kepada pendamping tiap

bulannya. BAZNAS dalam hal ini dianggap berhasil karena banyak dari santri preneur mulai bisa melakukan pengelolaan manajemen seperti pembukuan dan pelaporan.

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan.

Selain Empat Indikator diatas Sumodiningrat juga menyatakan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan menjadi tolak ukur atas keberhasilan pemberdayaan (Mulyawan, 2016). Indikator ini ditemukan pada penelitian ini bahwa setiap anggota sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Berdasarkan penelitian ini maka BAZNAS berhasil dalam melakukan pemberdayaan ekonomi melalui program Zmart Santri Preneur. Melalui program ini santri diberikan bantuan berupa rombong beserta isinya sejumlah Rp. 16.500.000 yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi sehingga membantu finansial mereka.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

BAZNAS memiliki peran dalam hal pemberdayaan ekonomi, baik itu untuk konsumtif maupun sebagai modal usaha (produktif) untuk para santri. Pengelolaan dana zakat BAZNAS RI melalu BAZNAS provinsi Bengkulu sudah baik dalam pemberdayaan ekonomi santri, terbukti dengan adanya salah satu program zmart santriprenuer yakni berupa bantuan warung klontong yang diberikan kepada para santri/ alumni santri yang ada di provinsi Bengkulu. Dengan adanya bantuan zmart tersebut para santri atau alumni yang ada di Provinsi bengkulu sudah merasakan manfaat peningkatan ekonomi berupa penambahan penghasilan dari berjualan di warung tersebut.

BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi santri melalui program zmart santriprenuer dalam penelitian ini kelompok zmart santripreneur provinsi Bengkulu, BAZNAS telah menjalankan perannya sebagai perkerja sosial sesuai dengan teori Jim Ife (1997) Yakni pekerja sosial fasilitatif, edukatif, refresentatif, dan teknis. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa BAZNAS sudah menjalankan peran pekerja sosial dengan menumbuhkan semangat serta memberi motivasi kepada para santri, peran pekerja sosial edukatif dengan mengadakan Latihan Dasar Kelompok (LDK), peran pekerja sosial refresentatif dengan membangun hubungan dengan vendor untuk memasok barang untuk dijual, dan peran pekerja sosial teknis dilakukan oleh BAZNAS dengan mengumpulkan data omzet para mustahik dalam hal ini para santri, perkembangan dan kondisi yang sedang dihadapi yang selanjutnya dijadikan laporan kepada BAZNAS RI sebagai bahan pertimbangan keputusan selanjutnya.

Hasil pemberdayaan ekonomi santri yang dilakukan oleh BAZNAS dalam program zmart santriprenuer sesuai dengan teori Sumodiningrat (1999) yaitu berkurang penduduk miskin, meningkatnya pendapatan usaha, dapat terpenuhinya kebutuhan pokok,

meningkatnya kemandirian, meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan lingkungan.[1] Dilihat dari indikator tersebut, maka BAZNAS dapat dikatakan cukup berhasil meskipun beberapa poin masih perlu diperhatikan atau menunggu waktu dilakukan analisis pada akhir periode pendampingan karena kelompok zmart santriprenuer Provinsi Bengkulu belum mencapai satu tahun pendampingan intensif.

Para anggota kelompok zmart santriprenuer dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka, selain itu para anggota kelompok zmart santriprenuer juga melakukan inovasi terhadap barang-barang yang dijualnya untuk menarik para konsumsen agar berbelanja di usaha mereka. Selanjutnya para anggota kelompok juga sering bertukar pengalaman, sehingga santriprenuer yang mengalami kesulitan dapat terbantu. Para anggota juga mengolah modal dan hasil jualan mereka sendiri untuk melaporkan omzet yang didapatkan setiap harinya kepada pendamping. Selain itu para anggota juga melakukan kegiatan sosial, seperti berbagi takjil dibulan Ramadhan.

DAFTAR PUSTAKA

Haryanti, N., Adicahya, Y., & Ningrum, R. Z. (2020, Jully). PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT. Iqtisadiya: *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7(14), 104-105.*

Ife Jim. (1995). Community Development: Creating Community Alternatives : Vision, Analysis, and Practice. Longman.

Indonesia, Kementrian Agama Republik. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.

Janwari, Djazuli; Yadi, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Manurung, Farhan Edma & Harahap, Muhammad Ikhsan. Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen.* Vol. 2 No. 1, Year [2022] Page 1365-1371

Multifiah. (2011). *ZIS Untuk Kesejahteraan Ummat*, 1st edn (Malang: Universitas Brawijaya Press).

Mulyawan, R. (2016) . Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan (1.st ed.). UNPAD Prress.

Noor, M. (2011). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. 2, 13.

Permana, Yoghi Citra, 'peran zakat dalam penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)', *The Journal of Tauhidinomics*, 1 (2015), 93–104

Qardhawi, Y. (1995). Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press.

Riyadi, (2002), Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Gramefia, Jakarta.

Siregar, K. L. (2021). peran pekerja sosial kementrian sosial republik indonesia terhadap anak sebagai korban tindak pidana (studi kasus di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak privinsi sumatera utara)100.

Soekanto, Soerjono, (2002), Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara.

Sumodiningrat, Gunawan (1999), Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat, Edisi II, PT. Bina Row Pariwara, Jakarta.

Yunita, V. (2021). Analisis Peran Lembaga Amil Zakat dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif (Studi Kasus di LAZISMU Kota Makassar). Universitas Muhammadiyah Makassar.

Zubaedi. (2013). pengembangan masyarakat: wacana & praktik (1st ed.). Kecana Prenada media grup

Sumber Internet

https://bengkulu.bps.go.id/indicator/153/56/1/luas-wilayah-di-provinsi-bengkulu.html diakses Maret 2024

https://bengkulu.kemenag.go.id/file/file/PPID2021/DATA_PONDOK_PESANTREN_SEPROVINSI_BENGKULU_TAHUN_2021.pdf diakses Maret 2024

https://majalah.tempo.co/read/info-tempo/166188/wapres-salurkan-bantuan-baznas santripreneur-dan-zmart diakses Februari 2024

https://satudata.kemenag.go.id/publikasi/read/pondok-pesantren-dalam-angka-tahun-2023 diakses Maret 2024

Web BAZNAS, https://baznas.go.id/ diakses Februari 2024

Kompensasi Dalam Ekonomi Islam

Orin Oktasari[1], Orisa Capriyanti[2], Agnes Yolanda[3], Mardian Suryani[4], Arista Khairunnisa[5]
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama (STIESNU) Bengkulu
-[1] orin@stiesnu-bengkulu.ac.id
-[2] orisa@stiesnu-bengkulu.ac.id
-[3] agnes@stiesnu-bengkulu.ac.id
-[4] mardian@stiesnu-bengkulu.ac.id
-[5] arista-khairunnisa@stiesnu-bengkulu.ac.id

Abstract-*Compensation in Islamic Economics, Compensation is the basic, or minimum, wage/salary and any additional payments paid directly or indirectly, whether in cash or in kind, by employers to workers in connection with the employment relationship. Compensation has an important role in the welfare of employees in a company/organization. Providing compensation to employees needs special attention from the organization/company in order to motivate employees and persist in working in the organization or company, because this is the area where there are many gaps in the implementation of compensation. For example, the minimum wage has not been realized, there is no social and health security. Islam explains that compensation must be given to employees as a reward that has been promised by employers, employers will get the results of work that has been completed while workers will get wages or compensation for the energy they have expended, then there is no gender difference in receiving wages/ reward from Allah. This concept of justice in wages dominates every practice that has ever occurred in Islamic countries. The basic principle used by the Prophet and Khulafaur Rasyidin was middle, moderate in determining employee wages, not too much or too little (proportional). The main purpose of providing wages is so that employees meet all their basic life needs. So, they are not encouraged to take actions that are not justified just to provide for themselves and their families (not corruption), therefore workers are required to get wages or compensation for the energy they have expended fairly and appropriately.*

Keywords*: compensation, Islamic economics*

1. PENDAHULUAN

Bekerja adalah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan didalam mencapai tujuannya tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sesuai dengan penjelasan Abdul Aziz (2013) pada buku etika bisnis Islam bahwa Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya memikirkan materi duniawi tampa memikirkan kehidupan akhirat. Sebagai mana Allah befirman dalam Al-Quran. Surah Al-Qashas ayat 77:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang di anugrahkan Allah kepadamukebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu darikenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimanaAllah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah

kamu berbuat kerusakandi muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang beruatkerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)

Islam selalu mengatur umatnya dalam setiap perilakunya. Mulai dari kepentingan individu sampai dengan kepentingan hidup khalayak banyak. Semuanya itu ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah baku dalam ajaran Islam. Dalam dunia pekerjaan, permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau yang berkaitan erat dengan pekerja, seperti pengangguran, aksi unjuk rasa/demo, dan pemutusan hubungan kerja merupakan masalah global yang dapat terjadi di semua negara di belahan dunia. Berbagai tuntutan oleh kelompok buruh atau serikat pekerja sering terjadi yang akar persoalannya adalah sangat mendasar menyangkut upah mereka yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, pengangkatan dari pekerja kontrak menjadi pekerja tetap, serta tuntutan hak-hak dasar lainnya.

Menurut Selamat Riyadi (2011) menjelasakan pada prinsipnya karyawan atau tenaga kerja merupakan aset yang sangat berharga sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu unit tempat kerja yang wajib mendapatkan perlindungan, baik pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. Tetapi perlindungan pekerja belum di lakukan secara memadai khususnya pada pekerja non formal atau sektor informal serta pada pekerja perempuan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam organisasi yaitu pemberian kompensasi. Menurut Pasal 1 Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003, kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/ atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan yang aman dan sehat.

Menurut Pasal 3 bagian b Undang-Undang Republik Indonesia No.11 tahun 2020, bahwa menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Abdul Azis (2013) menjelaskan hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan merupakan hubungan timbal-balik maka ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka maka hak pihak lainnya akan terpenuhi, begitu juga sebaliknya. Kewajiban kedua belah pihak, yang mana jika kewajiban-kewajiban itu di laksanakan maka hak masing-masingpun akan terpenuhi. Berbicara mengenai hak, tidak terlepas mengenai etika. Islam hadir demi keseimbangan dan menolak kebebasan tampa pertanggung jawaban. Konsep pertanggung jawaban bermula dari pemahaman bahwa setiap orang akan di pertanggung jawabkan amal nya, kemudian keluarga dan perusahaan milik nya. Sebagai tenaga kerja, mereka berhak mendapatkan kompensasi dalam pekerjaan. Karena di bagian ini lah yang banyak memiliki kesenjangan penerapan kompensasi. Seperti belum terealisasi nya upah minimum, tidak ada nya jaminan sosial dan kesehatan. dimana itu sangat di butuhkan oleh tenaga kerja.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami konsep kompensasi dalam ekonomi Islam, termasuk aspek etimologis, terminologis. Data dalam kajian ini bersumber dari teks-teks agama seperti Al-Qur'an dan Hadits, serta sumber-sumber otentik lainnya yang berkaitan langsung dengan konsep kompensasi, termasuk fiqh, dan literatur akademik lainnya yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yaitu dari penelusuran perpustakaan, basis data jurnal

online, dan repositori digital untuk mengidentifikasi dan mengakses materi yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara tematis. Ini melibatkan identifikasi, pemeriksaan, dan interpretasi tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber yang dikumpulkan. Analisis ini bertujuan untuk memahami berbagai dimensi konsep kompensasi dan perspektif ekonomi Islam mengenai kompensasi, termasuk definisi, faktor yang mempengaruhi kompensasi, dalil-dalil yang berkaiatan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Kompensasi

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2006) Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Marwansyah (2010) menjelaskan Kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Kompensasi langsung (gaji, upah, dan upah insentif).
2) Kompensasi tidak langsung (program kesejahteraan karyawan dan pelayanan karyawan).[1]

Secara umum, konsep kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima seseorang, baik fisik maupun tidak, yang harus diperhitungkan untuk kemudian diberikan kepada seseorang. Kompensasi merupakan hal yang wajar yang biasa terjadi di sebuah perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan. Kompensasi sebanding dengan hadiah. Namun dalam dunia kerja atau bisnis, kompensasi lebih sering dilihat dalam bentuk gaji dan/atau tunjangan. Biasanya dipadukan dengan apresiasi kepada karyawan yang mendukung perkembangan bisnis secara positif dan berkelanjutan. Misalnya, ketika kamu mencari informasi di situs pencari kerja, perekrut perusahaan menawarkan banyak keuntungan kepada calon karyawannya jika nantinya diterima bekerja.

Gaji adalah balas jasa yang di bayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Maksutnya gaji tetap akan di bayar walaupun pekerja tidak masuk kerja. Kemudian Malayu S.P. Hasibuan (2006) menjelaskan bahwa Upah adalah balas jasa yang di bayar secara periodik kepada pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang di sepakati membayarnya. Upah insentif adalah tambahan balas jasa yang di berikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Upah insentif ini merupakan alat yang di pergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi.

Menurut William B. Werther dan Keith DavisKompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaan yang di berikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik di desain dan di kelola oleh bagian personalia. Menurut Andrew F. Sikula Kompensasi adalah segala sesuatu yang di konstitusikan atau yang di anggap suatu balas jasa atau ekuivalen.

Berdasarkan uraian diatas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli jelaslah bahwa peranan serta pentingnya masalah kompensasi untuk mensejahterakan karyawan dalam sebuah perusahaan/organisasi. Karena itu semestinya pemberian kompensasi kepada karyawan perlu mendapatkan perhatian khusus dari

organisasi/perusahaan agar memotivasi karyawan dan bertahan untuk bekerja di organisasi atau perusahaan tersebut.

Kompensasi juga tidak diberikan dalam bentuk uang saja, kompensasi dapat juga berbentuk materil atau benda. Hal ini di karenakan prestasi yang di berikan kadang kadang sukar dinilai dengan uang, tetapi lebih mudah dalam wujud materil atau benda. Di samping uang dan materil, kompensasi juga dapat di berikan perusahaan berupa fasilitas bagi karyawan. Kompensasi berupa fasilitas ini biasanya di berikan sebagai tambahan dari bentuk kompensasi materil.

Jenis-jenis kompensasi banyak perbedaan dan persamaan pendapat dari para ahli. Namun tujuan nya hampir sama yaitu untuk memberikan kompensasi yang layak pada karyawan perusahaan/ organisasi. Menurut Hadari nawawi menjelaskan bahwa kompensasi di bedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1) Kompensasi total, yaitu keseluruhan penghargaan yang di terima oleh seorang pekerja untuk seluruh pekerjaan yang dilakukan nya sebagai kontribusinya pada pencapaian tujuan organisasi.
2) Kompensasi khusus atau kompensasi tambahan, yaitu penghargaan yang diberikan kepada para pekerja dengan status tertentu dalam perusahaan/ organisasi.

R. Wayne Mondy (2008) dalam tulisannya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia Jenis-jenis kompensasi lain juga di ungkapkan oleh Robbins bahwa imbalan atau kompensasi secara garis besar terbagi dua, yaitu “imbalan intirinsik, yaitu imbalan yang tidak berbentuk fisik dan hanya dapat di rasakan seperti kelangsungan pekerjaan, jenjang karir yang jelas, kondisi lingkungan dan memberikan kepuasan kerja, sedangkan imbalan ekstrinsik yaitu imbalan berbentuk uang yaitu gaji dan tunjangan”.

Sedangkan jenis kompensasi yang sering digunakan para ahli kompensasi terdiri dari dua komponen, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Kompensasi finansial langsung terdiri atas pembayaran yang di terima oleh seseorang dalam bentuk upah, gaji, bonus dan komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung atau bennefit (maslahat) meliputi semua bentuk balas jasa finansial yang tidak termasuk kedalam komponensasi finansial langsung, seperti tunjangan-tunjangan, asuransi, bantuan sosial karyawan, dan sebagainya sesuai dengan penjelasan Marwansyah (2010).

Begitu juga Marwansyah (2010) menjelaskan kembali bahwa Kompensasi non finansial mencakup berbagai bentuk kepuasan yang di terima oleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau yang berupa lingkungan psikologis atau lingkungan fisik tempat seseorang bekerja. Kepuasan yang berasal dari pekerjaan antara lain berupa tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, dan peluang untuk mengembangkan diri. Contoh kepuasan yang berasal dari lingkungan kerja antara lain rekan kerja yang menyenangkan, atasan yang kompeten, kondisi kerja yang nyaman, dan penyediaan kafetaria.

Ada keuntungan dengan di berikan kompensasi tidak langsung tersebut, yaitu meningkat kan semangat semangat kerja dan kesetiaan karyawan pada perusahaan, menurunkan jumlah absensi para karyawan, dan memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan/organisasi beradasarkan hasil penilitian Yayu Humaero (2014)

Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Saga (2009) menjelaskan dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan yaitu Berikut penjelasan dari beberapa jenis kompensasi yang umum di gunakan oleh perusahaan/ organisasi :

1) Gaji

Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang di bayarkan atas pelepasan tanggung jawab atas pekerjaan karyawan/ individu. Gaji di pergunakan untuk memberikan kompensasi kepada tenaga kerja yang bekerja di perusahaan/ organisasi. Menurut Veithzal gaji adalah " program pemberian upah dan gaji harus di tetapkan atas asas adil dan asas layak serta dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku sehingga upah dan gaji yang di berikan merangsang motivasi dan kepuasan kerja karyawan".

Sedangkan pengertian gaji menurut S.P Hasibuan ialah " balas jasa yang di bayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti". Jadi dalam pemberian gaji kepada karyawan nya, perusahaan/ organisasi haruslah memiliki rencana penggajian yang adil dan layak yang sesuai dengan undang-undang kesejahteraan untuk para pekerja. Sehinggah pemberian gaji akan memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang layak serta memotivasi karyawan dalam bekerja untuk lebih produktif dan propesional.

2) Upah

Upah adalah imbalan yang di bayarkan secara langsung berdasarkan waktu yang di tentukan dan diberikannya tidak dengan waktu yang tetap atau berubah-ubah. Upah tidak seperti gaji yang jumlah nya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah menjadi tinggi atau lebih rendah. Pada dasarnya gaji atau upah di berikan untuk menarik calon pegawai agar masuk menjadi karyawan di perusahaan beradasarkan penjelasan Yayu Humaero (2014).

Menurut Edwin B. Flipo " wages is defined as the adequate and equitable renumeration of personnel for their constribution to organizational objectives, artinya upah di definisikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi.

3) Insentif

Tjutju yuniarsih dan suwatno (2009) menjelaskan insentif adalah penghargaan/ imbalan yang diberikan untuk memotifasi pekerja/ pegawai/ anggota organisasi agar motivasi dan produktivitas kinerjanya tinggi, sifat nya tidak tetap atau sewaktu-waktu, insentif terdiri dari:

1) Insentif pemerataan, yang diberikan kepada semua karyawan/ anggota organisasi tampa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya.
2) Insentif berdasarkan prestasi yang di berikan kepada pekerja yang prestasi kerja nya tinggi.

4) Tunjangan

R. Wayne Mondy (2008) menjelaskan bahwa tunjangan adalah penghargaan tidak langsung yang di berikan perusahaan/organisasi kepada karyawan untuk mendapatkan kesejahteraan dan rasa nyaman dalam pekerjaannya tersebut. "para pemberi kerja memberikan sebagian besar tunjangan secara sukarela, namun hukum mewajibkan tunjangan lainnya yaitu mencakup 10% dari kompensasi total, tunjangan tersebut meliputi jaminan sosial, ganti rugi karyawan, asuransi, serta cuti keluarga dan pengobatan".

Pendapat lain menurut Jac Fitz dan Barbara (2011) "Tunjangan adalah bagian penting tetapi merupakan bagian sekunder dari total program kompensasi. Tunjangan perlu kompetitif, tetapi paket tunjangan yang terbaik sekalipun tidak akan menjamin bahwa setiap orang tertarik bekerja untuk perusahaan".

Tunjangan meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk kedalam kompensasi finansial langsung, yaitu bukan berupa uang/ barang, akan tetapi

kompensasi berupa jaminan sosial untuk karyawan. Meskipun karyawan tidak mendapatkan uang dari tunjangan tersebut, namun karyawan mendapatkan manfaat perlindungan asuransi yang diberikan perusahaan/ organisasi.

Kompensasi memiliki fungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Dengan kompensasi, pekerja dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi dan keluarganya. Pada sisi lain, kompensasi berfungsi sebagai faktor motivasi dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja karyawan. Kompensasi yang lebih baik akan menciptakan kepuasan kepada karyawan dan akan memotivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Sebaliknya untuk mendapatkan kompensasi yang lebih baik, karyawan akan berusaha bekerja lebih baik sesuai dengan hasil penelitian Tjutju yuniarsih dan suwatno (2009).

Tujuan kompensasi antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan pemerintah.

1) Ikatan kerja sama

   Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja sama formal antara majikan dan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugas nya dengan baik, sedangkan pengusaha/ majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2) Kepuasan kerja

   Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja.
3) Pengadaan efektif

   Jika program kompensasi di tetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah.
4) Motivasi

   Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahan nya.
5) Stabilitas karyawan

   Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak,serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turn over relatif kecil.
6) Disiplin

   Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan makin lebih baik.
7) Pengaruh serikat buruh

   Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan dapat fokus pada pekerjaannya.
8) Pengaruh pemerintah

   Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku maka intervensi pemerintah dapat di hindarkan.

Menurut Cascio, tujuan yang mungkin paling penting dari setiap pembayaran atau kompensasi adalah keadilan. Keadilan paling tidak dapat dinilai dari 3 dimensi, yaitu :

1) Keadilan internal artinya jika di pandang dari nilai relatif setiap jabatan terhadap sebuah organisasi, apakah tingkat pembayaran nya adil?
2) Keadilan eksternal artinya apakah gaji yang dibayarkan oleh sebuah organisasi adil jika di bandingakan dengan tingkat upah yang dibayarkan organisasi sejenis?

3) Keadilan individual artinya apakah imbalan yang di terimah oleh seeorang adil jika di banding kan dengan imbalan yang diterima oleh orang lain yang mengerjakan pekerjaan yang samaatau sejenis?

Abdurrahman (2005), menjelaskan Keadilan adalah pekerjaan yang rumit, butuh ketelitian dan keahlian, sehinggah segala sesuatu diletakkan tepat pada tempat nya. Kalau tidak, maka tidak akan terwujud keseimbangan.

Faktor Yang Mempengaruhi Kompensasi

Struktur dan tingkat dan tingkat gaji di pengaruhi oleh banyak faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun faktor-faktor eksternal.

1) Kondisi Pasar Tenaga Kerja

Tingkat upah dapat di pengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk jabatan-jabatan yang sangat terbatas ketersediaan pekerjanya dalam pasar tenaga kerja, karena mebutuhkan pekerja dengan kecakapan tinggi cenderung diberi gaji yang tinggi, tetatpi untuk jabatan yang pekrja nya melimpah, tingkat gaji nya cenderung rendah.

2) Peraturan pemerintah

Peraturan tentang pengupahandan kesejahteraan pekerja misalnya di atur dalam pasal 88 s.d 101 UU Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ketentuan lainnya yang harus diikuti antara lain adalah peraturan tentang upah minimum, termasuk pemerintah daerah tingkat 1 (provinsi) dan tingkat II (kota/kabupaten).

3) Sikap Manajemen

Keinginan pihak manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan semangat kerja, menarik pekerja-pekerja yang berkualitas tinggi,mengurangi perputaran tenaga kerja, meningkatkan standar hidup kerja, juga mempengaruhi struktur dan tingkat gaji/upah.

4) Kemampuan Membayar

Gaji atau upah yang dibayarkan kepada pekerja merupakan salah satu komponen biaya produksi, yang harus di hitung secara cermat oleh setiap perusahaan.

5) Biaya Hidup

Pemberian gaji/upah perlu mempertimbangkan komponen biaya hidup di suatu wilayah. Tingkat upah dikota-kota besar dengan biaya hidup yang tinggi, tentu harus di bedakan dengan tingkat upah di daerah dengan biaya hidup yang lebih rendah. Ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah biasanya juga memperthitungkan biaya hidup di provinsi, kota/kabupaten atau wilayah tertentu.

b. Konsep Kompensasi menurut Tinjauan Ekonomi Islam

Perspektif Islam, upah termasuk ke dalam domain fiqh muamalat, yakni dalam pembahasan tentang *ijaroh.* Menurut bahasa, *ujroh* berarti upah. Oleh karena itu, lafaz *ujroh* memiliki pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan. Kitab-kitab fiqh muamalat kontemporer saat ini banyak yang menerjemahkan kata *ujroh* dengan sewa menyewa, maka hal tersebut jangan lantas diartikan dengan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dipahami dalam arti yang lebih komprehensif sesusai dengan tulisan Rais, Isnawati dan Hasanuddin (2011).

Mardani (2012) menjelaskan pendapat lain mengemukakan bahwa *ujroh* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *'iwadh* (ganti). Dengan sendirinya, lafaz *al-tsawab* (pahala) dapat juga dikatakan dengan upah, karena *al-tsawab* (pahala) merupakan imbalan atas suatu pekerjaan baik. *Ujroh* atau upah diartikan sebagai imbalan atas jasa

seorang*ajir* (orang yang dikontrak jasanya) oleh *mustajir* (orang yang membayar jasanya). *Ijaroh* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu disertai dengan kompensasi. Kompensasi inilah yang kemudian disebut *ujroh.*

Rafika Chudriana Putri, dkk (2023) menjelaskan bahwa:

1) Konsep adil dan layak

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik)

a) Adil

Organiasi yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan organiasi yang dipimpin oleh orang-orang bertaqwa. konsep adil ini merupakan ciri-ciri organisasi yang bertaqwa. Al-Qur'an mengaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

b) Adil bermakna jelas dan transparan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۖ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Baqarah: 282)

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terkait dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Ketika mempekerjakan orang lain, maka sudah semestinya ia memberikan hak atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang itu. Hal ini pun telah diajarkan oleh Rasulullah saw. di dalam hadis sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering." (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. mengajarkan kepada umat Islam untuk memanusiakan manusia. Memberikan hak kepada para pekerja yang telah menunaikan kewajibannya sebelum kering keringatnya. Dengan demikian maka, para pekerja itu merasa dihargai usahanya dan semakin tambah semangat untuk bekerja.

Hadits lain yang menjelaskan tentang waktu pembayaran upah adalah:

"diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah telah berfirman: ada tiga jenis manusia dimana akau adalah musuh

mereka nanti dihari kiamat. Pertama adalah orang yeng membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku). Kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua orang yang menjual seseorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga adalah orang yang menyewa seorang upahan dan memperkejakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya. (HR. Bukhari)

Hadits di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat dperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang diusuhi oleh Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

c) Adil bermakna proposional

وَلِكُلّٖ دَرَجٰتٞ مِّمَّا عَمِلُواْۚ وَلِيُوَفِّيَهُمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

Artinya: dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. (QS. Al-Ahqaf: 19)

فَٱلۡيَوۡمَ لَا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗاۖ وَلَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Artinya: Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. (QS. Yaasiin: 54)

وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, (QS. An-Najm: 39)

Ayat-ayat di atas menegaskan baawa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Konteks ini yang oleh pakar manajemen Barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama, maka upah mereka mesti sama. Prinsif ini telah menjadi hasil konvensi International Labour Organization (ILO) nomor 100.15.

Metode job evaluation & job grading yang dikenal di Indonesia yaitu mercer system dan hay system. Hay Job Evaluation dibuat berdasarkan tiga factor yaitu: Pertama Know-How, maksudnya adalah kumpulan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Kedua, problem solving Artinya, jangka waktu, kompleksitas, tingkat analisis, evaluasi dan inovasi yang diperlukan dalam pekerjaan yang merupakan penerapan know-how. Ketiga Accountability, yakni ruang lingkup pekerjaan dalam mengarahkan sumber daya yang ada dan memberi jawaban dari konsekuensi suatu keputusan dan tindakan.

Sistem menajemen penggajian HY atau sering disebut dengan *Hay System*, telah menerapkan konsep ini. Siapun pekerja atau karyawannya, apakah tua atau muda, berpendidikan atau tidak, selagi mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, maka mereka akan dibayar dengan upah yang sama.

d) Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, tranparan serta proposional ditinjau dari berat pekerjaannya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima.

a. Layak bermakna cukup pangan, sedang, papan

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

Mereka (para budak dan pealayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuahanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). (HR. Muslim).

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Mustawid Bin Syadad Rasulullah SAW bersabda:

Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaknya ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, maka hendaklah ia mencarikan tepat tinggal. Abu Bakar mengatakan: diberikan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: siapa yang hmengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pecuri. (HR. Abu Daud)

Dari dua hadits di atas, dapat diketaui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodohnya. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerja formal, tetapi karyawan sudah dianggap merupakan keluarga majikan. Konsep mengangap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan. Konsep upah menurut Islam, tidak dapat dipisahkan dari konsep moral.

b. Layak bermakna sesuai dengan pasaran

Hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan upah seseorang jauh dibawah yang biasanya diberikan. Jika ini dibiarkan terjadi maka pengusaha sudah berbuat tidak layak bagi pekerja tersebut.

2) Hubungan kerja dalam Islam

Menurut Islam hubungan antara perusahaan dengan karyawan, majikan dengan pembantu, atasan dengan bawahan adalah hubungan partnersip. Dimana keduanya saling melengkapi antara perusahaan dan karyawan. Dalam *maqasid*

syariah terwujudnya keadilan adalah hal yang utama serta agar menghilangkan kedzaliman. Keadilan yang dimaksud meliputi berbagai bidang, baik dalam pemberian upah maupun pemenuhan kesejahteraan para pekerja yang berdampak pada peningkatan produktivitas pekerjaan. Dengan adanya keadilan ini maka untuk menciptkan suatu hubungan kerja Islami terciptlah hak dan kewajiban bagi para pekerja.

Abdul Hamid Musri (2000) dalam tulisannya *SDM Produktif: Pendekatan Alquran dan Sains* Adapun hak tenaga kerja yang wajib dipenuhi adalah:

a) hak memilih pekerjaan yang sesuai kemampuan, pengalaman, potensi yang dimiliki. Hak kerja dalam Islam didasarkan atas kemampuan atau profesionalisme. Mengingat Islam menekankan tentang prestasi kerja.
b) Hak memperoleh Gaji
   Kaidah Islam menegaskan bahwa gaji sesuai dengan pekerjaan, tidak ada kedzaliman, pengurangan atau tindakan anarki. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan dibawah naungan PT. Patria Anugrah Sentosa beradasarkan dari kalkulasi upah penjualan, insentif, dan bonus. Karyawan PT. Patria Anugrah Sentosa tidak menerima gaji pokok atau tunjangan lainnya.
c) Hak cuti dan keringanan Pekerjaan
   Hak cuti kerja biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja, hari libur, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang harus istirahat atau cuti.
d) Hak memperoleh Jaminan dan Perlindungan
   Islam menetapkan hak jaminan sosial dan perlindungan sejak 14 abad yang lalu. Jaminan sosial adalah salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap resiko sosial ekonomi. Pengakuan hak asasi tercermin dalam konvensi ILO No. 120 tahun1992 yang memuat untuk standar minimum jaminan sosial yang meliputi tunjangan tunai untuk hari tua, sakit, cacat, kematian, serta pelayanan medis bagi pekerja yang menderita sakit.

Kompensasi dalam ekonomi Islam seharusnya dapat diberikan kepada karyawan atau pelerja dalam bentuk imbalan yang telah dijanjikan oleh para pemberi kerja, kemudian pemberi kerja akan mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan atau pekerja sedangkan karyawan atau pekerja akan mendapatkan upah atau kompensasi dari tenaga yang telah dikeluarkannya. Sebagaimana Allah swt menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat At-Taubah ayat 105, Surat An-Nahl ayat 97 dan surah al khafi ayat 30:

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah ayat 105)

Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan

cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan.

مَنْ عَمِلَ صٰلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl ayat 97).

Menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah/ balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/ rezeki yang halal) dan balasan akhirat (dalam bentuk pahala).

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya: Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik. (Q.S. Al-Kahfi ayat 30)

Sementara itu, Surat Al-Kahfi ayat 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zhalim dengan cara menyia-nyiakan amal hambanya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri Islam.

Berdasarkan tiga ayat diatas, yaitu At-Taubah 105, An-Nahl 97 dan Al-kahfi 30, maka imbalan dalam konsep islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akhirat itu lebih penting dari pada penekanan pada dunia sebagaimana yang tersirat dalam Qur'an surat Al-qhashash ayat 77:

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qhashash ayat 77).

4. KESIMPULAN

1. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan

kepada perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu: Kompensasi langsung (gaji, upah, dan upah insentif) dan Kompensasi tidak langsung (program kesejahteraan karyawan dan pelayanan karyawan)**.**

2. Upah yang diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. Pada masa Khalifah Umar r.a., gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikan, sehinggah mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga, mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarganya (tidak korupsi).
3. Kompensasi dalam ekonomi Islam seharusnya dapat diberikan kepada karyawan atau pekerja dalam bentuk imbalan yang telah dijanjikan oleh para pemberi kerja, kemudian pemberi kerja akan mendapatkan hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh karyawan atau pekerja sedangkan karyawan atau pekerja akan mendapatkan upah atau kompensasi dari tenaga yang telah dikeluarkannya secara adil dan layak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2005). *Fiqih Pekerja*. Rembang: Pustaka Anisah. Hal 115

Abu Fahmi, et al. (2014) *Hrd Syariah Teori dan Implementasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 186

Abu Sinn, Ahmad Ibrahim.(2012). *Manajemen Syariah*, Jakarta : Rajagrafindo persada. Hal. 207

Aziz, Abdul, (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam.* Bandung: Alfabeta. Hal. 246

Departemen Agama Republik Indonesia. (2006) *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung.

Hamid Musri, Abdul. (2000). *SDM Produktif: Pendekatan Alquran dan Sains.* Jakarta: Gema Insani. Hal 155

Hasibuan, Malayu S.P. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. rev. Ed. ; Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 118-121

Humaero, Yayu. (2014). *Sistem Kompensasi di Madrasah Al-Ihsan Pandeglang Banten*, Skripsi (tidak di terbitkan), Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta. Hal. 14-16

Jac Fitz –enz and Barbara Davision. (2013) Cet. 3, *How to measure Human resources Management, terj. Widarti raharjo,* Jakarta : Kencana. Hal. 113

Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marwansyah. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia,* Edisi Kedua, Bandung: Alfabeta. Hal

Mondy, R. Wayne.(2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia Jilid 2, Terj.* Bayu Airlangga, Jakarta: Erlangga. Hal.43

Rafika, Chudriana Putri,dkk. (2023). *Analsisis Konsep Al- Ujrah (Upah) Dalam Ekonomi Islam : Pendekatan Tafsir Tematik,* Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 9(01), 2023. Hal.6

Robert L. Mathis and jhon H. Jackson. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Terj. Diana Anggelica, Human Resource Management,* Jakarta: Salemba Empat.

Risyidin, Idin. (2015). *Semua Orang Berhak Atas Jaminan Sosial,* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal 186

Riyadi, Selamat. (2012). *Paradigma Terhahadap Perempuan Pekerja di Dunia Kerja dan Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Islam*, Kebijakan Negara dan Realitas",

Makalah Kajian Islam Komprehansif di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal.1

Shaleh, *Mausu'ah AL-Hadits Asy-Syarif Kutubus Sittah Sunan Bukhari Kitab Al-Buyu; Hadits No. 106*.

Shaleh, *Mausu'ah Al-Hadits Asy-Syarif Kutubus Sittah Shahih Muslim Kitab Al-Iman*, bab 10.

Shaleh, *Mausu'ah Al-Hadits Asy-Syarif Kutubus Sittah Shahih Sunan Abu Daud Kitab Al-Kharaf,* bab 9, hadits No. 2940.

Tjutju yuniarsih dan suwatno. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian,* Bandung: Alfabeta. Hal. 127

Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala. (2009) Cet. 2, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan,* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.741

PERATURAN

Republik Indonesia. 2003. Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan.

Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta kerja.

SUMBER INTERNET

https://dailysocial.id/post/kompensasi-adalah diakses pada 2 Maret 2024

https://bincangsyariah.com/khazanah/upah-dan-hak-pekerja-dalam-islam/ diakses 4 Maret 2024

https://www.ilmuhrd.com/2018/01/job-evaluation-dan-job-grading.html diakses 5 Maret 2024